



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KOTA MUNGKID
2018**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Nomor: 050.23/13820 Tanggal 21 Juni 2018 Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 harus diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Hasil Fasilitasi, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2019.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juni 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 22

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD	I-8
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	II-136
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017	II-171
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-345
2.5. Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	II-349
2.6. Permasalahan Pencapaian Prioritas Daerah.....	II-350
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-5
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	IV-24
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 V-1
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	 VI-1
 BAB VII PENUTUP	 VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut	II-2
Tabel 2.2.	Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	II-3
Tabel 2.3.	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-4
Tabel 2.4.	Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya	II-6
Tabel 2.5.	Sungai-sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang	II-8
Tabel 2.6.	Tipe Iklim di Kabupaten Magelang	II-11
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015	II-13
Tabel 2.8.	Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang	II-14
Tabel 2.9.	Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang	II-15
Tabel 2.10.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang	II-17
Tabel 2.11.	Data Kejadian Bencana, 2013-2017	II-21
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (Jiwa)	II-22
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (Jiwa)	II-23
Tabel 2.14.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.15.	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2016	II-25
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2016 (Jiwa)	II-25
Tabel 2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)	II-26
Tabel 2.18.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (%)	II-26
Tabel 2.19.	PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-27
Tabel 2.20.	PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-28
Tabel 2.21.	Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016 (%)	II-29
Tabel 2.22.	PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-30
Tabel 2.23.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.24.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (%)	II-32
Tabel 2.25.	Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2011-2015	II-35
Tabel 2.26.	Indeks Ketimpangan Williamson 2012-2016	II-36

Tabel 2.27.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.28.	Jumlah Desa yang Tergolong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi Kabupaten Magelang Tahun 2012 Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah	II-39
Tabel 2.29.	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.30.	Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	II-41
Tabel 2.31.	Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2015-2016	II-41
Tabel 2.32.	Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	II-45
Tabel 2.33.	Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.34.	Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.35.	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.36.	Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.37.	Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-51
Tabel 2.38.	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.39.	Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017	II-52
Tabel 2.40.	Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.41.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.42.	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.43.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	II-55
Tabel 2.44.	Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.45.	Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam, Murid dan Guru Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.46.	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.47.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-59
Tabel 2.48.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.49.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-60
Tabel 2.50.	Jumlah dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.51.	Jumlah dan Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-61

Tabel 2.52.	Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-62
Tabel 2.53.	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.54.	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-63
Tabel 2.55.	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-64
Tabel 2.56.	Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2.57.	Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	II-66
Tabel 2.58.	Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.59.	Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2013-2017.....	II-67
Tabel 2.60.	Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017	II-69
Tabel 2.61.	Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.62.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.63.	Cakupan Patroli Petugas Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017.....	II-71
Tabel 2.64.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.65.	Rasio Jumlah Tenaga Linmas per 10.000 Orang Penduduk Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.66.	Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas	II-72
Tabel 2.67.	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.68.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.69.	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.70.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.71.	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.72.	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.73.	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.74.	Rasio Rata-Rata UMK dibanding KHL Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-76
Tabel 2.75.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.76.	Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.77.	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2013-2017.....	II-78

Tabel 2.78.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014-2017	II-78
Tabel 2.79.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.80.	KDRT di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.81.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.82.	Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.83.	Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2013-2017 (Ton)	II-83
Tabel 2.84.	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.85.	Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.86.	Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.87.	Jumlah Tanah Bersertifikat Tahun 2013-2017	II-86
Tabel 2.88.	Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2013-2017	II-86
Tabel 2.89.	Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.90.	Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-87
Tabel 2.91.	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-88
Tabel 2.92.	Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.93.	Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.94.	Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.95.	Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.96.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.97.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.98.	Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.99.	Data Pelayanan Perijinan	II-91
Tabel 2.100.	Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017	II-92
Tabel 2.101.	Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.102.	Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.103.	Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.104.	Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.105.	Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017	II-95

Tabel 2.106. Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.107. Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.108. Produksi Hortikultura Tahun 2013-2017 (Ton)	II-98
Tabel 2.109. Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.110. Populasi Ternak Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.111. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015	II-100
Tabel 2.112. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015	II-100
Tabel 2.113. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017	II-101
Tabel 2.114. Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-101
Tabel 2.115. Jumlah Hotel dan <i>Homestay</i>	II-102
Tabel 2.116. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2013-2017 (hari)	II-102
Tabel 2.117. Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHB) Tahun 2013-2016	II-103
Tabel 2.118. Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHK) Tahun 2013-2016	II-103
Tabel 2.119. Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017	II-104
Tabel 2.120. Produksi Benih Ikan Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ribuan Ekor)	II-104
Tabel 2.121. Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ton)	II-104
Tabel 2.122. Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.123. Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.124. Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.125. Data Transmigrasi Tahun 2012-2017	II-108
Tabel 2.126. Kinerja Makro Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2013-2017	II-109
Tabel 2.127. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017	II-109
Tabel 2.128. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2013-2017	II-110
Tabel 2.129. Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017	II-111
Tabel 2.130. Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017 (orang)	II-111
Tabel 2.131. Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2013- 2017 (Orang)	II-112
Tabel 2.132. Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Lokakarya, Seminar Tahun 2013-2017 (Orang)	II-112
Tabel 2.133. Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-113

Tabel 2.134. Rekomendasi LHP dari Tahun 2013 s/d 2017 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut	II-114
Tabel 2.135. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.136. Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2013-2016	II-117
Tabel 2.137. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2013-2016	II-117
Tabel 2.138. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2013	II-117
Tabel 2.139. Angkatan Kerja Per Sektor Tahun 2014-2017	II-118
Tabel 2.140. Aksesibilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-119
Tabel 2.141. Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2013-2017	II-119
Tabel 2.142. Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang	II-120
Tabel 2.143. Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 ...	II-120
Tabel 2.144. Jenis. Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-121
Tabel 2.145. Jenis. Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-122
Tabel 2.146. Angka Kriminalitas Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.147. Jumlah Demo Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.148. Lama dan Jenis serta SKPD Penyedia Layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	II-125
Tabel 2.149. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-128
Tabel 2.150. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2013-2017	II-129
Tabel 2.151. Status Desa Tahun 2016	II-133
Tabel 2.152. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017	II-134
Tabel 2.153. Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017 ...	II-135
Tabel 2.154. Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-136
Tabel 2.155. Capaian Kinerja Aspek Daya Saing	II-137
Tabel 2.156. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-138
Tabel 2.157. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-141
Tabel 2.158. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	II-142
Tabel 2.159. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang	II-143
Tabel 2.160. Capaian Kinerja Urusan Perumahan	II-144
Tabel 2.161. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah	II-145
Tabel 2.162. Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-146
Tabel 2.163. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	II-147
Tabel 2.164. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-148
Tabel 2.165. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	II-149
Tabel 2.166. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-151

Tabel 2.167. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-151
Tabel 2.168. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-152
Tabel 2.169. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-153
Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-154
Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-155
Tabel 2.172. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-156
Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga	II-156
Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-157
Tabel 2.175. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan	II-158
Tabel 2.176. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-159
Tabel 2.177. Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-160
Tabel 2.178. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-160
Tabel 2.179. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika .	II-161
Tabel 2.180. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-162
Tabel 2.181. Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-163
Tabel 2.182. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-165
Tabel 2.183. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II-165
Tabel 2.184. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-166
Tabel 2.185. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-167
Tabel 2.186. Capaian kinerja Urusan Perdagangan	II-167
Tabel 2.187. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-168
Tabel 2.188. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ..	II-169
Tabel 2.189. Capaian Kinerja Urusan Keuangan	II-170
Tabel 2.190. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-173
Tabel 2.191. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan	II-178
Tabel 2.192. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntinan	II-181
Tabel 2.193. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPU-PR	II-184
Tabel 2.194. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-188
Tabel 2.195. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	II-191
Tabel 2.196. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-195
Tabel 2.197. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Kesbangpol	II-198
Tabel 2.198. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	II-200
Tabel 2.199. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II-203
Tabel 2.200. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-207
Tabel 2.201. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika	II-209
Tabel 2.202. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas	

	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	II-212
Tabel 2.203.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup	II-215
Tabel 2.204.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-218
Tabel 2.205.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-220
Tabel 2.206.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan	II-223
Tabel 2.207.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Pangan	II-227
Tabel 2.208.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perikanan	II-230
Tabel 2.209.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	II-234
Tabel 2.210.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-237
Tabel 2.211.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-240
Tabel 2.212.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	II-243
Tabel 2.213.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah	II-245
Tabel 2.214.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat ...	II-248
Tabel 2.215.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD	II-252
Tabel 2.216.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang	II-255
Tabel 2.217.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Humas dan Protokol	II-257
Tabel 2.218.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	II-259
Tabel 2.219.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Umum	II-261
Tabel 2.220.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum	II-263
Tabel 2.221.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian	II-265
Tabel 2.222.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan	II-267
Tabel 2.223.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat	II-269
Tabel 2.224.	Valuasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Salaman	II-272
Tabel 2.225.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Borobudur	II-275
Tabel 2.226.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Ngluwar	II-279
Tabel 2.227.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Salam	II-284
Tabel 2.228.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Srumbung	II-287
Tabel 2.229.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD	

	Kecamatan Srumbung	II-290
Tabel 2.230.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Muntilan	II-294
Tabel 2.231.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Mungkid	II-297
Tabel 2.232.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Sawangan	II-300
Tabel 2.233.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Candimulyo	II-304
Tabel 2.234.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Mertoyudan	II-307
Tabel 2.235.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Tempuran	II-310
Tabel 2.236.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Kajoran	II-313
Tabel 2.237.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Kaliangkrik	II-316
Tabel 2.238.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Bandongan	II-319
Tabel 2.239.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Windusari	II-322
Tabel 2.240.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Secang	II-327
Tabel 2.241.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Tegalrejo	II-332
Tabel 2.242.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Pakis	II-335
Tabel 2.243.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Grabag	II-339
Tabel 2.244.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Ngablak	II-343
Tabel 2.245.	Permasalahan Terkait Capaian Kinerja Aspek Prioritas Daerah	II-351
Tabel 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016	III-2
Tabel 3.2.	Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Magelang tahun 2013-2016	III-3
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	III-4
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	III-5
Tabel 3.5.	Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2019	III-7
Tabel 3.6.	Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2017, Target 2018 dan Proyeksi Tahun 2019	III-8
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018 dan Prediksi Tahun 2019	III-10
Tabel 3.8.	Realisasi Pembiayaan 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi 2019	III-11
Tabel 3.9.	Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi Tahun 2019	III-12
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	IV-3
Tabel 4.2.	Rencana Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019	IV-10
Tabel 4.3.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten	

	Magelang, Provinsi dan Nasional	IV-21
Tabel 4.4.	Alokasi Tambahan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang	IV-28
Tabel 5.1.	Rencana Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019	V-5
Tabel 6.1.	Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang Tahun 2019	VI-1
Tabel 6.2.	Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang Tahun 2019	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-1
Gambar 2.2.	Posisi Kabupaten Magelang diantara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah	II-3
Gambar 2.3.	Peta Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-4
Gambar 2.4.	Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya	II-7
Gambar 2.5.	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang	II-12
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-20
Gambar 2.7.	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-22
Gambar 2.8.	PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2016	II-31
Gambar 2.9.	PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016	II-33
Gambar 2.10	Peta Desa dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017	II-38
Gambar 2.11	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016	II-48
Gambar 2.12	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016	II-49
Gambar 2.13	Angka Kematian Balita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2016	II-50
Gambar 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017	II-130
Gambar 2.15	Jumlah Unit Pelayanan Publik	II-130
Gambar 2.16	Nilai Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	II-131
Gambar 2.17	Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat per Rumpun Unit Pelayanan Publik Tahun 2017	II-131
Gambar 2.18	Jumlah Unit Layanan Publik yang Mencapai IKM Kategori A Tahun 2013-2017	II-132
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2012-2016	III-4
Gambar 3.2.	Laju Inflasi Tahun 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran	III-6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan, baik antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahun. Kinerja Pemerintah Daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Dengan demikian, masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Adapun RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, Tahun 2019 merupakan tahap akselerasi. Pada tahapan ini akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan dalam rangka menentukan program pembangunan yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Tema pembangunan Tahun 2019 adalah "*Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan*". Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke-6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi ke-6, juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang menjadi dasar

penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 265 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, rapat teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan musrenbang kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan, yaitu:

1) Penyiapan rancangan awal RKPD,

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan pada RPJMD dan renstra SKPD. Konsultasi publik Rancangan awal RKPD dilaksanakan pada Tanggal 9 Januari 2018, dengan mengundang pemangku kepentingan seperti: LSM, Perguruan Tinggi, Kepala Desa, Asosiasi Profesi dan lain-lain. Tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi Rancangan awal RKPD, serta meminta masukan guna perbaikan rancangan awal RKPD.

2) Penyiapan rancangan RKPD, dilakukan dengan 4 tahapan:

a. Musrenbang RKPD di Kecamatan,

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) Tahun 2019. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Januari 2018. Sesuai Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 050/630/24/2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, masing-masing desa melakukan *input* 4 usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Usulan Desa (SIDUDES).

Dari usulan desa yang masuk, kecamatan menyusun prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Rapat Teknis. Jumlah usulan setiap kecamatan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah desa di masing-masing kecamatan. Usulan ini harus masuk dalam aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

- b. Rapat Teknis (Ratek),
Rapat Teknis (Ratek) adalah forum musyawarah antara SKPD dengan Kecamatan untuk mensinkronkan antara Rancangan Renja SKPD dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). Ratek dilaksanakan 30 Januari s.d. 1 Pebruari 2018. Hasil Ratek adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang akan masuk dalam Renja SKPD. Keluaran Rapat Teknis adalah Berita Acara Kesepakatan berdasarkan urutan prioritas lokasi kegiatan yang bisa diakomodir oleh masing-masing SKPD.
 - c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan Urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait. Ouput kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD; dan Berita Acara Forum SKPD.
Rancangan Renja SKPD disusun dalam Pra-Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD melalui aplikasi SIPPD.
Forum SKPD dilaksanakan dari Tanggal 7 s.d. 14 Pebruari 2018.
 - d. Forum Rumpun SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas (harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi) prioritas kegiatan pembangunan antar SKPD sebagai upaya menyempurnakan Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Output kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD; dan Berita Acara Forum Rumpun SKPD Kabupaten.
Forum rumpun dilaksanakan tanggal 19 sd 21 Pebruari 2018 yang dibagi dalam 3 forum rumpun yaitu forum rumpun Ekonomi dan SDA, forum rumpun Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, serta forum rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPd Kabupaten berdasarkan rancangan Renja-SKPD; Musrenbang Kabupaten Magelang dilaksanakan 2 (dua) hari pada Tanggal 7 s.d. 8 Maret 2018. Hari pertama Pembukaan dan hari ke-2 sidang Komisi, yang dibagi menjadi Komisi Ekonomi dan SDA, Komisi Taru PWI dan Komisi Pemerintahan dan Sosbud.
- 4) Penyusunan Rancangan Akhir RKPd.
Pasca Musrenbang, usulan SKPD dicermati kembali dengan melakukan *desk* dan pleno dari mulai tanggal 19 s.d. 29 Maret 2018. Pencermatan ini dilakukan dalam rangka menyusun prioritas dan pencapaian indikator RPJMD, dengan mendasarkan ketersediaan anggaran yang ada. Kesepakatan hasil *desk* dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala SKPD dan Bappeda dan Litbangda, untuk selanjutnya dibahas bersama Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan kesepakatan *desk* tersebut SKPD melakukan *edit* Pra-RKA Renja SKPD melalui aplikasi SIPPD.

Setelah semua tahapan dilaksanakan, maka RKPd Kabupaten Magelang Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 tahun 2019 pada tanggal 11 Mei 2018.

Menindaklanjuti pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi melaksanakan fasilitasi atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019. Hasil fasilitasi disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah:

1. Nomor 050.23/13772 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penetapan Peraturan Bupati Magelang tentang RKPD tahun 2019;
2. Nomor 050.23/13820 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019;
3. Berita Acara Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut maka Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan dengan mengacu pada hasil Fasilitasi Penyusunan RKPD Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

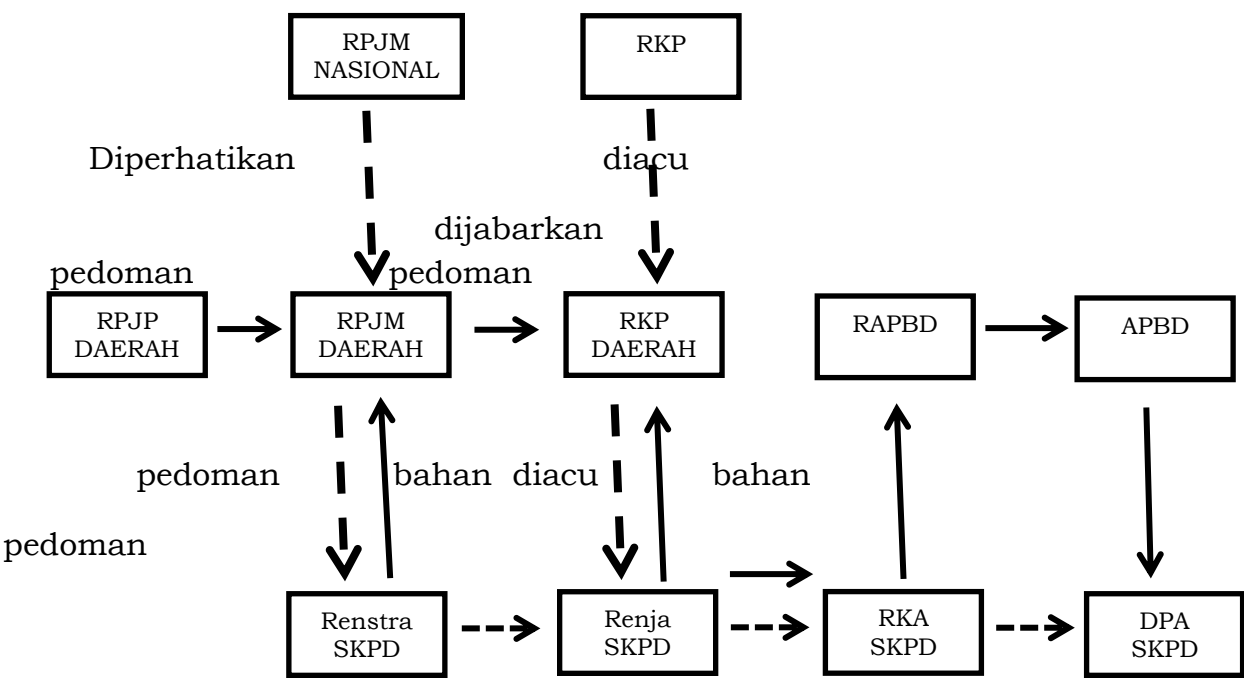
- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Selain hal tersebut, RPJMD juga berfungsi untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang. Keberadaan RKPD Tahun 2019 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019. RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sementara itu, hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif, yaitu penyusunan Renstra SKPD

harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, penyusunan RKPD tersebut perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator, target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 dan mewujudkan sinergitas rencana program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 serta menyesuaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provisi Jawa Tengah

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasano perasional bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2019;

5. Memenuhi ketentuan terkait konsistensi perencanaan dan penganggaran dimana Penetapan RKPD Kabupaten/Kota setelah Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Gubernur

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan RKPD.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2017.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah Tahun 2016, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

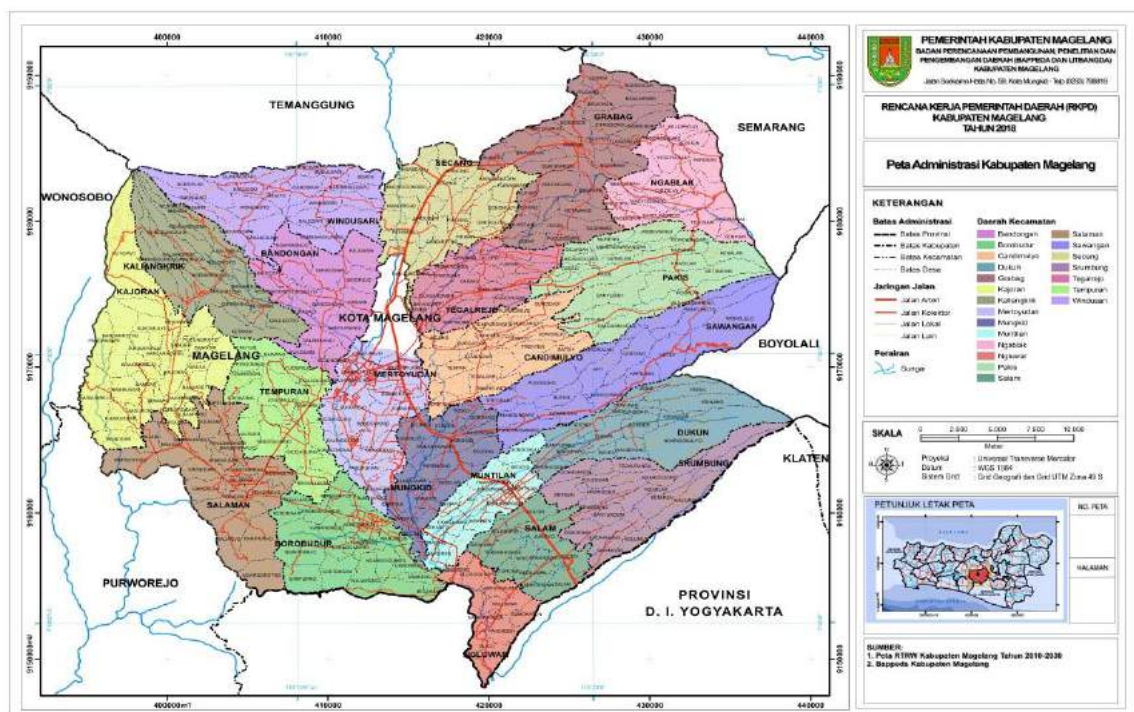
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Adapun luas masing-masing kecamatan, persentase luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
	Total	1.085,73	100.00		

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110⁰01’51” dan 110⁰26’58” Bujur Timur dan antara 7⁰19’13” dan 7⁰42’16” Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.2.
Posisi Kabupaten Magelang Diantara Jalur Transportasi Strategis
Provinsi Jawa Tengah

Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid)
ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)
Kab. Cilacap	182,00	Kab. Kudus	141,00
Kab. Banyumas	163,00	Kab. Jepara	161,00
Kab. Purbalingga	149,00	Kab. Demak	116,00
Kab. Bajarnegara	117,00	Kab. Semarang	64,50
Kab. Kebumen	92,70	Kab. Temanggung	33,70
Kab. Purworejo	53,30	Kab. Kendal	91,00
Kab. Wonosobo	77,30	Kab. Batang	108,00
Kab. Boyolali	48,40	Kab. Pekalongan	148,00
Kab. Klaten	62,00	Kab. Pemalang	181,00
Kab. Sukoharjo	94,50	Kab. Tegal	210,00
Kab. Wonogiri	134,00	Kab. Brebes	220,00
Kab. Karanganyar	114,00	Kota Magelang	13,20
Kab. Sragen	124,00	Kota Surakarta	94,10
Kab. Grobogan	154,00	Kota Salatiga	67,40
Kab. Blora	204,00	Kota Semarang	95,40
Kab. Rembang	219,00	Kota Pekalongan	148,00
Kab. Pati	164,00	Kota Tegal	210,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu

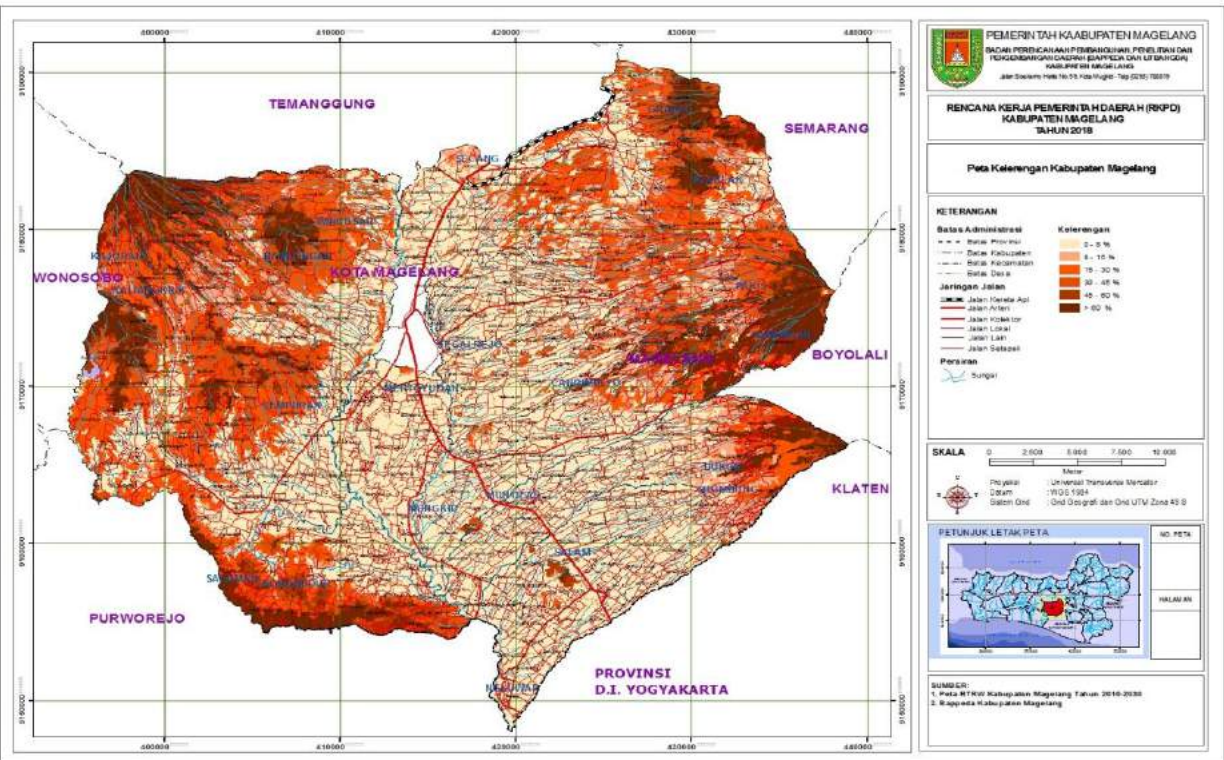
Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan gambar 2.3. berikut:

Tabel 2.3.
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.3.
Peta Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/*alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Secara rinci, jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah:

- *Alluvial* kelabu, *alluvial* coklat, regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
- Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.
- Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.
- Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

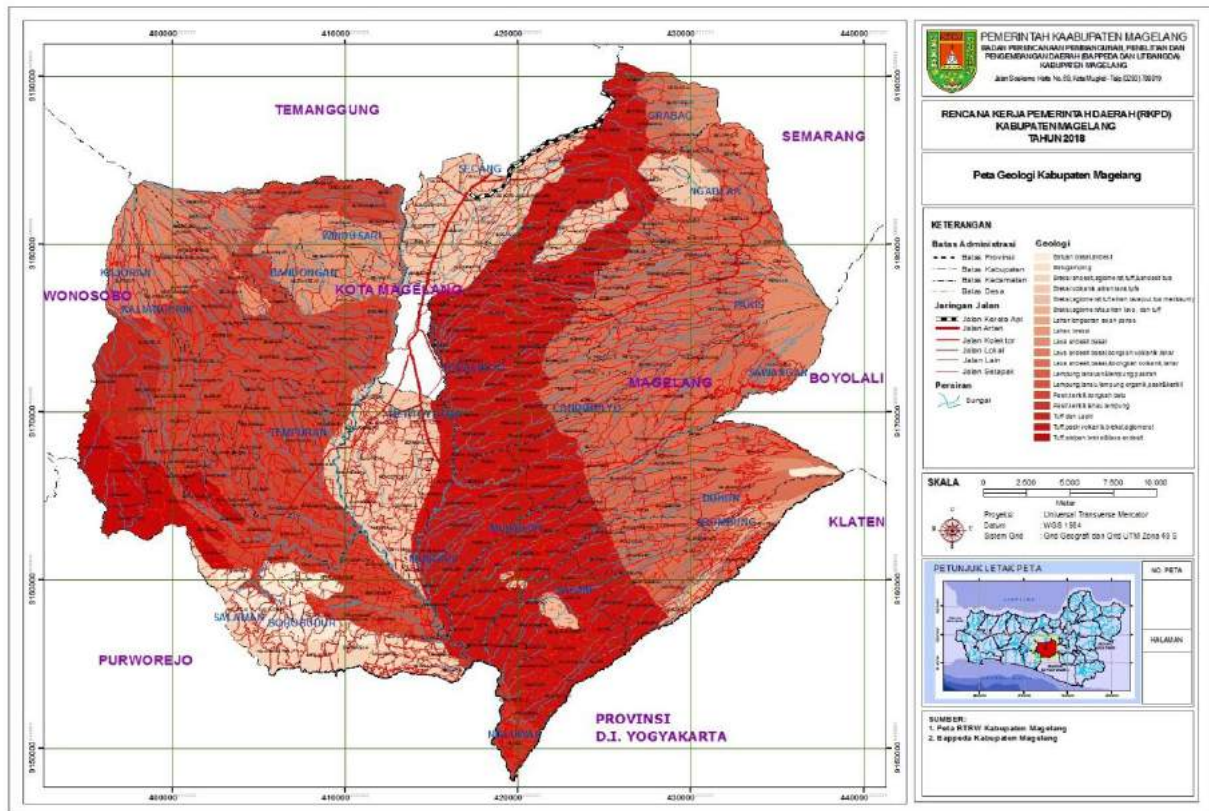
Secara lebih rinci, penyebaran sumber daya mineral dan kegunaannya bisa dilihat pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

No	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
1.	Trass	Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur • Desa Bawang Kecamatan Tempuran
2.	Tanah Liat	Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur • Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam
3.	Batu gamping	Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur
4.	Marmer	Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar dan perangkat toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur
5.	Andesit	Bahan pondasi: bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Griputno Kecamatan Borobudur • Desa Bawang Kecamatan Tempuran
6	Sirtu	Bahan bangunan perumahan, jalan dan saluran air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Windusari • Kecamatan Bandongan • Kecamatan Borobudur • Kecamatan Srumbung • Kecamatan Dukun • Kecamatan Sawangan • Kecamatan Pakis • Kecamatan Salam • Kecamatan Candimulyo
7.	Kaolin	Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur
8.	Oker	Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet dan campuran plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan • Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
9.	Mangaan	Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Giripurno Kecamatan Borobudur • Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Data lebih lengkap mengenai informasi di atas juga bisa dilihat pada gambar 2.4. (Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya) di bawah ini.



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.4.
Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai satu sungai besar dan 124 (seratus dua puluh empat) sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 5.043,25 m³/detik dan minimum 847,83 m³/detik. serta 219 (dua ratus sembilan belas) mata air dengan jumlah debit 12.252 liter/detik.

Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m³/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m³/tahun.

Curah hujan potensial 4.067,14 juta m³/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Sedangkan air hujan tertampung 78,32 juta m³/tahun.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sungai-sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Krasak	177,66	29,61
2	Bebeng	62,60	15,23
3	Mandung	20,30	5,64
4	Petel	15,86	8,46
5	Gayam	11,42	1,41
6	Duren	34,12	4,51
7	Cebong	11,42	2,82
8	Slamet	27,07	4,23
9	Batang	56,40	10,58
10	Sendang	16,07	5,64
11	Gandu	18,61	3,95
12	Maling	8,46	2,12
13	Gremeng	27,92	4,23
14	Mayeng	18,05	4,23
15	Jengking	14,10	2,82
16	Manggisan	19,74	5,64
17	Bledu	16,92	3,81
18	Dukuh	19,18	6,77
19	Druju	21,57	2,96
20	Clumprit	11,00	3,38
21	Pandanan	16,92	4,23
22	Jlegong	36,66	9,02
23	Putih	169,2	14,1
24	Bunut	32,57	6,77
25	Blongkeng	87,98	17,63
26	Lamat	54,29	8,46
27	Pule	18,75	3,81
28	Pundung	15,86	5,64
29	Keji	31,02	8,46
30	Biru	25,38	6,77
31	Bangkong	33,84	4,23
32	Senowo kecil	21,15	6,35
33	Senowo	57,53	8,46
34	Sewukan	39,48	4,23
35	Kepil	22,77	4,65
36	Jombol	21,57	4,51
37	Tringsing	51,32	10,15
38	Kunjang	38,35	6,77
39	Klesem	10,58	2,54
40	Apu	33,84	8,46
41	Pabelan	391,28	42,3
42	Kuning	21,15	4,23
43	Gung	21,43	5,08
44	Mangu	91,37	11,28
45	Dadar	32,57	6,35
46	Progo	777,26	84,6

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
47	Legono	47,38	5,92
48	Anggas	40,33	6,77
49	Mejing	27,92	3,38
50	Soti	50,76	2,82
51	Beji	19,04	3,38
52	Katang	19,04	2,26
53	Parangan	9,31	1,69
54	Benger	10,15	1,97
55	Talang	7,05	1,69
56	Sono	25,38	6,35
57	Gayur	22,56	2,54
58	Gandu	24,82	6,2
59	Segoro	27,92	3,95
60	Andong	20,3	2,82
61	Balong	29,61	14,1
62	Sat	32,15	3,38
63	Balong	61,34	15,23
64	Katang	21,57	4,23
65	Mambang	26,65	9,02
66	Pucang	34,83	8,46
67	Elo	135,36	11,28
68	Grabag	31,02	8,46
69	Daru	54,64	14,1
70	Sarangan	20,09	3,38
71	Sat	24,11	4,23
72	Tengah	11,84	2,26
73	Beji	18,05	5,08
74	Sorobayan	14,66	3,81
75	Urang	13,75	3,38
76	Sindon	27,07	4,23
77	Sileng	46,53	11,28
78	Suroloyo	37,22	2,26
79	Ngaglik	18,05	2,82
80	Mendo	13,82	3,38
81	Kluban	25,38	5,08
82	Rejo	15,23	2,82
83	Cangkringan	11,28	2,54
84	Caren	15,23	3,38
85	Lumut	16,92	2,26
86	Lingseng	20,3	4,23
87	Gambyangan	18,61	3,38
88	Tangsi	186,12	31,73
89	Wader	11,65	1,69
90	Glutak	13,82	2,54
91	Krengseng I	9,08	1,69
92	Krengseng II	10,26	1,97
93	Loro	39,48	10,58
94	Anget	15,79	3,38
95	Sinan	15,79	5,08
96	Curuk	15,79	2,82
97	Setro	9,87	2,26
98	Lanang	9,38	1,97
99	Jangkang	13,54	4,23
100	Glagah	13,54	4,23
101	Krasak	12,41	1,69
102	Loro	67,68	14,1

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
103	Loning	59,22	8,46
104	Wulung	21,71	3,81
105	Kembang	8,88	1,69
106	Jangkar	14,81	2,26
107	Dammar jati	19,04	4,23
108	Posong	13,75	2,82
109	Kanci	81,08	10,58
110	Kanci Kidul	59,93	10,58
111	Kanci Lor	51,89	10,58
112	Semawang Ki	25,38	4,23
113	Semawang Ka	111,67	16,92
114	Guntur	15,51	3,38
115	Selogriyo	17,84	3,38
116	Derso	15,23	1,97
117	Cemuk	11,8	2,54
118	Cibuk	9,87	1,69
119	Celapar	42,3	11,84
120	Butek	12,63	1,69
121	Balung	12,83	1,97
122	Jail	13,32	2,26
123	Sikuwuk	13,82	2,26
124	Klegung	33,84	8,46
125	Semagung	22,84	3,35

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Opak, 2018

- Air Tanah

Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:

- 1) Mandala air tanah gunung api strato

Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing.

- 2) Mandala air tanah antar pegunungan

Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan dikelilingi oleh 5 (lima) gunung menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Magelang sebanyak 219 mata air. Mata air tersebut berada di sekitar kaki gunung api yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2017, jumlah mata air yang digunakan oleh PDAM adalah 18 mata air.

Selain itu, kelima gunung yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan

utamanya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^o C, dengan kelembaban udara 82%. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.589 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 121 hari. Sedangkan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang juga mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, rata-rata curah hujan pada Tahun 2012 berkisar antara 3-394 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Iklim di Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

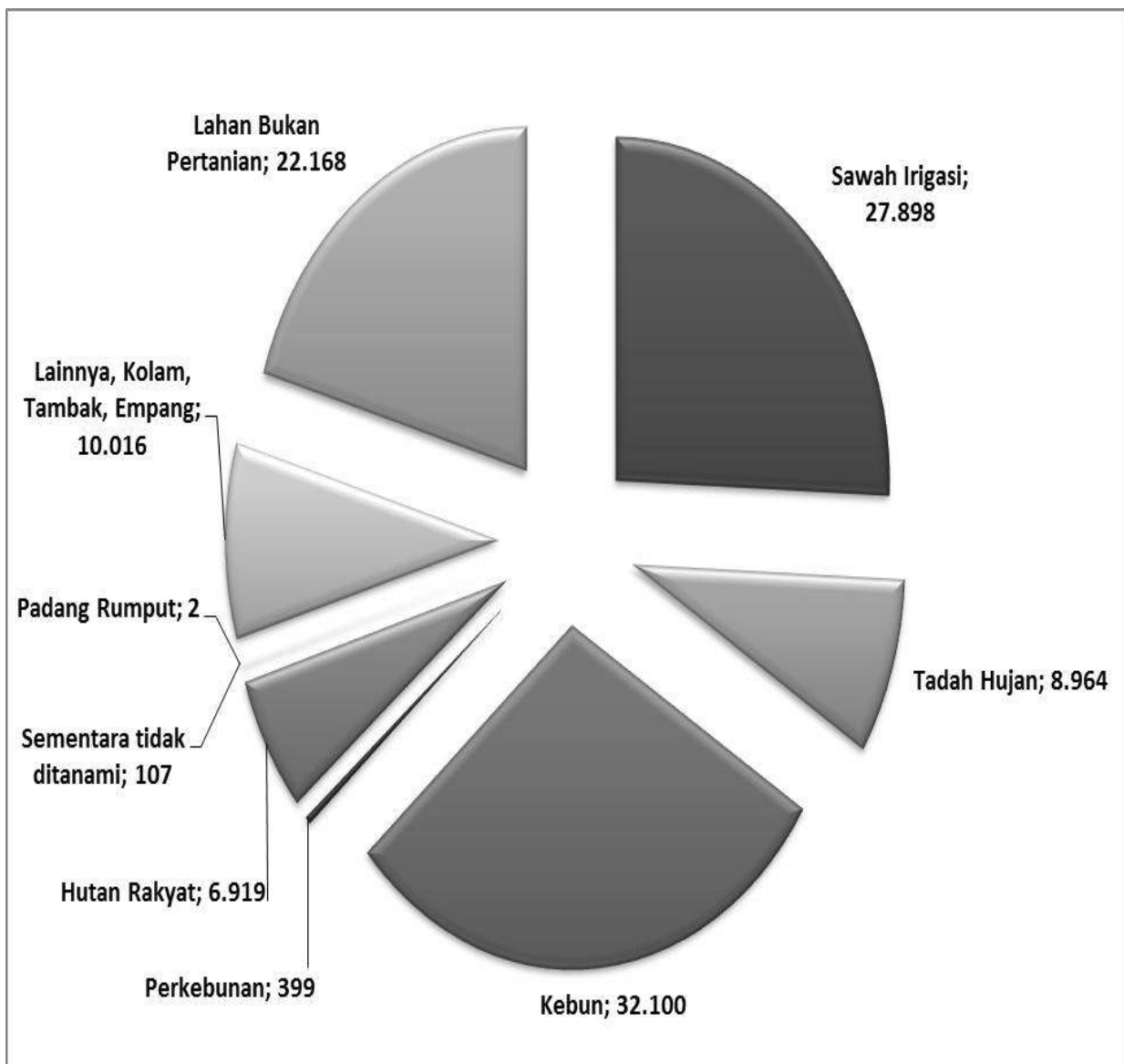
Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data BPS Tahun 2016, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup Lahan Pertanian seluas 86,405 ha dan Lahan Bukan Pertanian seluas 22.168 ha. Lahan Pertanian terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 ha dan lahan kering seluas 49.543 ha. Adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27,898 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8,964 ha.

Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,100 ha, perkebunan seluas 399 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,919 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,016 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2016 disajikan dalam Gambar 2.5.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (79,58 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (33,95 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi.

Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 2012-2015 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2015

Penggunaan Lahan	Luas (ha)			
	2012	2013	2014	2015
1. Lahan Pertanian	78.748	86.410	86.405	86.405
A. Lahan Sawah	36.974	36.892	36.882	36.862
01. Irigasi	29.254	28.801	28.028	27.898
02. Tadah Hujan	7.720	8.091	8.854	8.964
B. Lahan Kering	41.923	49.518	49.523	49.543
01. Kebun	35.493	32.679	32.437	32.100
02. Perkebunan	296	394	399	399
03. Hutan Rakyat	3.665	6.312	6.562	6.919
04. Padang Rumput	2	2	2	2
05. Sementara tidak ditanami	107	107	107	107
06. Lainnya, Kolam, Tambak, Empang	2.360	10.024	10.016	10.016
2. Lahan Bukan Pertanian	29.676	22.163	22.168	22.168
Jalan, Pemukiman, Kantor, dll	29.676	22.163	22.168	22.168
Jumlah	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menetapkan bahwa rencana struktur Ruang di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi system perkotaan, sistem perdesaan, dan sistem jaringan infrastruktur wilayah.

Sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 8 sistem perwilayahan, dimana Kabupaten Magelang masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Di dalam sistem perwilayahan ini, Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi perkotaan yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Sedangkan Kabupaten Magelang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten.

Sistem perkotaan di Kabupaten Magelang dibagi menjadi 4 (empat) kawasan perkotaan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dan pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensinya. Terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Selain itu, Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah:

- Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi.
- Kawasan Candi Borobudur merupakan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.

- Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1,474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8.
Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sunga Blongkeng e. Sungai Pabelan f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

No	Nama Sungai	Keterangan
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan pelestarian alam dan cagar Budaya di Kabupaten Magelang, meliputi:

- Kawasan Taman Nasional.
Kawasan taman nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.
- Kawasan Cagar Budaya.
Kawasan dan situs cagar budaya yang harus dilindungi di Kabupaten Magelang antara lain sebagaimana pada Tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9.
Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang

No	Obyek Wisata	Lokasi
1	Candi Borobudur	Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur
2	Candi Pawon	Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur
3	Candi Mendut	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid
4	Candi Ngawen	Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan
5	Candi Gunung Wukir/Canggal	Desa Somokaton, Kecamatan Salam
6	Candi Gunung Sari	Dusun Gunungsari Desa Gulon Kecamatan Salam
7	Candi Losari	Dusun Losari Desa Kadiluwih Kecamatan Salam
8	Makam Gunung Pring*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
9	Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
10	Makam Pasteur Van Lith*	Kecamatan Muntilan
11	Candi Asu	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
12	Candi Pendem	Desa Sengi, Kecamatan Dukun

No	Obyek Wisata	Lokasi
13	Candi Lumbung	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
14	Makam Ky. Condrobumi	Kecamatan Candimulyo
15	Makam Sunan Geseng	Desa Tirto, Kecamatan Grabag
16	Air Terjun Seloprojo**	Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak
17	Pemandian Kalibening**	Kecamatan Secang
18	Candi Selogriyo	Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari
19	Candi Batur	Dusun Ngobaran Desa Candisari Kecamatan Windusari
20	Candi Retno	Dusun Cetokan 2 Desa Candiretno Kecamatan Secang
21	Candi Umbul	Desa Kartoharjo Kecamatan Grabag
22	Prasati Tukmas	Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Garabag
23	Masjid Baitul Mutaqin	Dusun Sengon Desa Trasan Kecamatan Bandongan
24	Langgar Agung Pangeran Diponegoro	Desa Menoreh, Kecamatan Salaman
25	Pesarean Pangeran Singosari (Gunung Sari Salam)*	Desa Gulon, Kecamatan Salam
26	Makam Kyai Mijil*	Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur
27	Makam Kyai Raden Syahid*	Desa Salam, Kecamatan Salam
28	Klenteng “Hok An Kiong”	Jl.Pemuda Muntilan Kecamatan Muntilan
29	Gereja Santo Antonius	Jl.Kartini Muntilan Kecamatan Muntilan
30	SMP Negeri I Muntilan	Jl.Pemuda No 161 Muntilan Kecamatan Muntilan
31	Seminari Mertoyudan	Jl.Mayjend Bambang Soegeng Ds.Mertoyudan Kecamatan Mrtoyudan
32	Stasiun Kereta Api Mertoyudan	Jl.Raya Mertoyudan Magelang Muntilan
34	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl.Kawedanan No.1 Muntilan
35	Bunderan Petrus Kanisius dan SD Pangudi Luhur	Jl. Kartini No.2 Muntilan
36	Gedung SLTP Marsudi Rini Marganingsih	Jl. Kartini No.18 Muntilan
37	Gedung Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jl. Kerkhoff No.1 Muntilan

No	Obyek Wisata	Lokasi
38	Rumah Tradisional Jawa	Jl. Raya Borobudur-Palbakang (sebelah utara Candi Mendut)
39	Kompleks Makam Kerkoff	Dusun Bojong Desa Mendut Kecamatan Mungkid

* benda purbakala/ benda yang diduga cagar budaya

** bukan cagar budaya, namun merupakan DTW buatan/ alam

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang, 2018

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10.

Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^{\circ}$ – 20° , Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
- 2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering

(49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.

- 4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas \pm 32.437 ha.
- 5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas \pm 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
- 6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijau makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
- 7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- 9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
- 10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
- 11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 - 1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 - 2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.1.8.3. Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya,

Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah dan keberadaan gunung Merapi. Ancaman bencana oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang adalah:

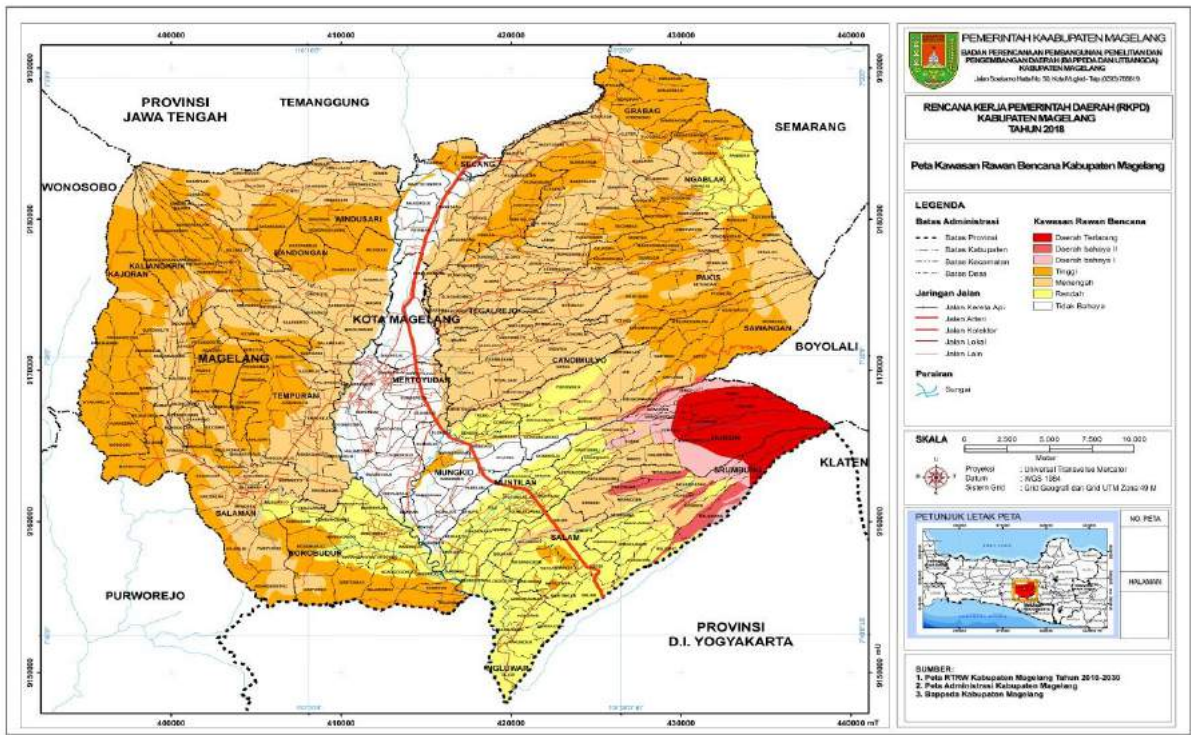
- a. Tanah longsor di 17 kecamatan.
- b. Banjir di aliran sungai terutama Sungai Progo dan Sungai Elo.
- c. Banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
- d. Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 13 kecamatan.
- e. Kekeringan/krisis air bersih di 10 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 desa), yaitu Kecamatan Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kecamatan Salaman (Margoyoso dan Sriwedari), Kecamatan Borobudur (Kenalan dan Sambeng).
- f. Kebakaran hutan.
- g. Letusan Gunung Merapi, 3 (tiga) kecamatan berada di Kawasan Rawan bencana (KRB) III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah

Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) KRB III, 3 kecamatan, 19 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung di 8 desa (Kaliurang, Kemiren, Tegalrandu, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Nglumut, Ngablak, Ngargosoko);
 - b. Kecamatan Dukun di 8 desa (Kalibening, Keningar, Sumber, Krinjing, Sengi, Mangunsuko, Sewukan, Ngargomulyo, Paten);
 - c. Kecamatan Sawangan di 3 desa (Wonolelo, Ketep, Kapuhan).
- 2) KRB II, 3 kecamatan, 21 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung (Bringin, Kamongan, Kradenan, Banyuadem, Pucanganom, Pandanretno, Jerukagung, Sudimoro, Polengan);
 - b. Kecamatan Dukun (Wates, Banyudono, Banyubiru, Dukun, Ngadipuro, Mangunsuko);
 - c. Kecamatan Sawangan (Krogowanan, Sawangan, Gondowangi).
- 3) KRB I, 5 kecamatan, 24 desa:
 - a. Kecamatan Dukun (Ketunggeng);
 - b. Kecamatan Ngluwar di 5 desa (Blongkeng, Pakunden, Bligo, Somokaton, Ngluwar);
 - c. Kecamatan Mungkid di 4 desa (Pabelan, Progowati, Ngrajek, Bojong);
 - d. Kecamatan Salam di 8 desa (Salam, Mantingan, Sucen, Kadiluwih, Gulon, Jumoyo, Seloboro, Sirahan);
 - e. Kecamatan Muntilan di 7 desa (Muntilan, Ngawen, Gunungpring, Tamanagung, Gondosuli, Adikarto, Keji).

Adapun peta kawasan rawan bencana di Kabupaten Magelang disajikan dalam gambar 2.6. di bawah ini.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

Sedangkan data kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Data Kejadian Bencana, 2013-2017

No	Kejadian/ Jenis Bencana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angin Puting Beliung	35	28	70	40	33
2	Banjir	3	6	10	13	7
3	Gempa bumi	0	7	0	0	1
4	Kebakaran	37	51	90	37	23
5	Kekeringan	5	0	6	0	3
6	Tanah Longsor	47	61	162	105	231
7	Bencana Lainnya/KLB	7	10	16	9	15
8	Erupsi	0	0	0	0	0
Jumlah		135	134	164	204	352

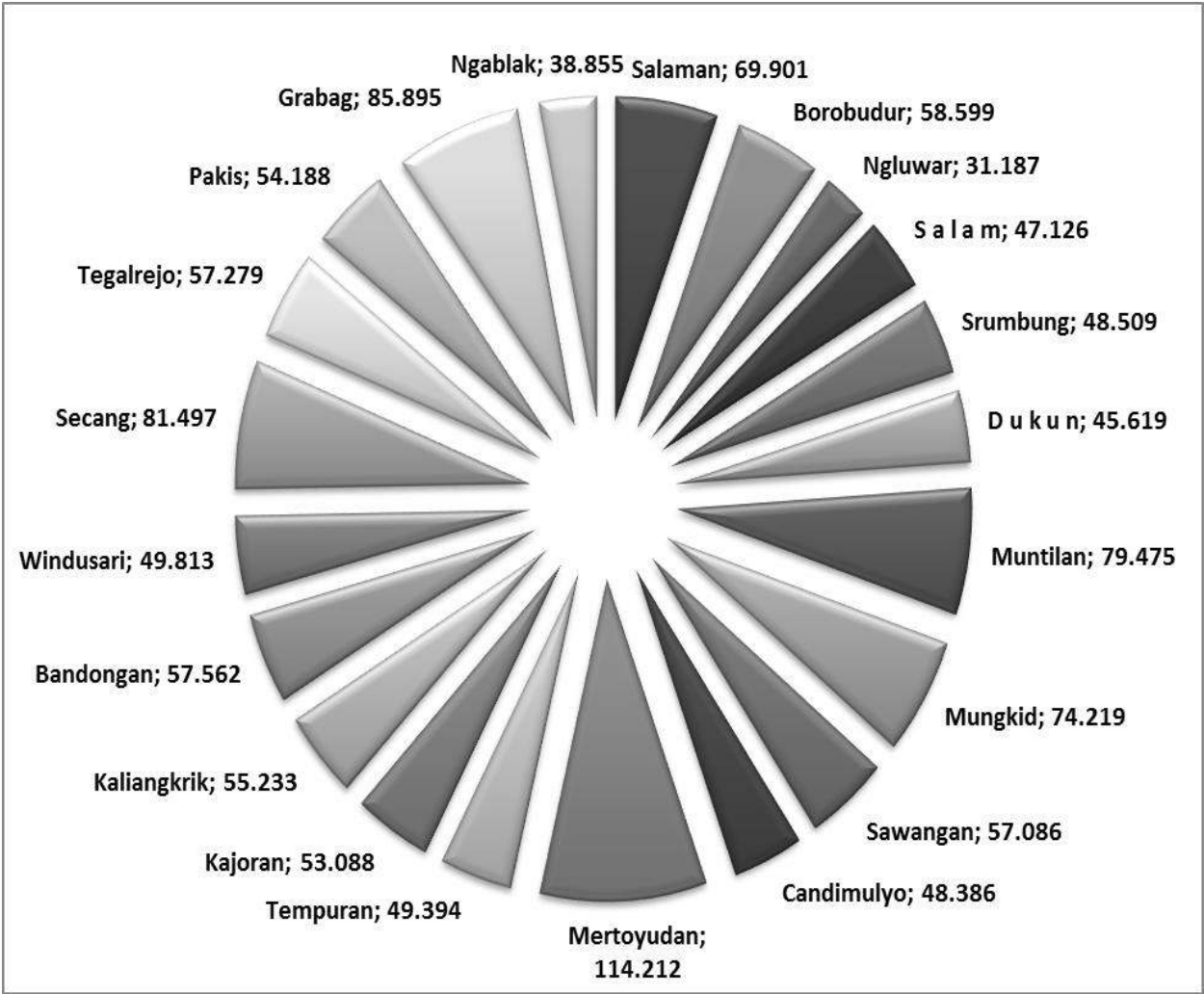
Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan Tabel 2.11, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 jumlah bencana di Kabupaten Magelang meningkat sebanyak 148 kejadian, atau sebesar 72,55% dibandingkan dengan Tahun 2016. Namun upaya penanggulangan bencana tetap harus diupayakan sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.268.396, bertambah 11.273 jiwa atau 0,90% dari tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.257.123. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 1.245.496 jiwa.

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan, pada Tahun 2016, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu sebesar 114.212 (9 persen). Hal ini disebabkan di Kecamatan Mertoyudan banyak terdapat kegiatan ekonomi yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini, sementara kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil berada di Kecamatan Ngluwar (2 persen), hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Ngluwar merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil di kabupaten Magelang yaitu sebesar 22,44 km². Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 2.7.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.7.
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran per kecamatan Tahun 2013-2017, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Salaman	68.016	68.656	69.283	69.901	70.497
2.	Borobudur	57.193	57.672	58.140	58.599	59.039
3.	Ngluwar	30.590	30.795	30.995	31.187	31.371
4.	S a l a m	45.896	46.314	46.723	47.126	47.513
5.	Srumbung	46.747	47.340	47.926	48.509	49.080
6.	D u k u n	44.359	44.787	45.205	45.619	46.018
7.	Muntilan	77.306	78.043	78.763	79.475	80.161
8.	Mungkid	71.574	72.464	73.344	74.219	75.076
9.	Sawangan	55.458	56.010	56.551	57.086	57.602
10.	Candimulyo	46.963	47.445	47.919	48.386	48.840
11.	Mertoyudan	109.753	111.248	112.746	114.212	115.670
12.	Tempuran	48.003	48.475	48.938	49.394	49.834
13.	Kajoran	52.403	52.644	52.871	53.088	53.285
14.	Kaliangkrik	53.875	54.339	54.790	55.233	55.658
15.	Bandongan	56.156	56.636	57.103	57.562	58.002
16.	Windusari	48.144	48.707	49.262	49.813	50.351
17.	Secang	78.230	79.325	80.413	81.497	82.565

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
18.	Tegalrejo	55.332	55.989	56.636	57.279	57.907
19.	Pakis	53.330	53.628	53.913	54.188	54.443
20.	Grabag	83.878	84.567	85.237	85.895	86.526
21.	Ngablak	38.475	38.611	38.738	38.855	38.958
Jumlah		1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah 0,96 persen dan antara Tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah 0,93 persen, serta 2016 sampai dengan 2017 adalah 0,90 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 sebesar 100,72. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magelang terdapat 100,72 penduduk laki-laki.

Sementara itu, terdapat 11 (sebelas) kecamatan dengan *Sex Ratio* lebih dari 100. ini menunjukkan 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Magelang yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada perempuan. Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang memiliki *sex ratio* terbesar (108,67) yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 8,67 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan *sex ratio* terkecil terdapat di Kecamatan Ngluwar yaitu 97,31 yang berarti pada setiap 100 perempuan hanya ada 97,31 penduduk laki-laki.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Magelang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Mertoyudan, Muntilan dan Secang. Kepadatan penduduk menurut kecamatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan per Kecamatan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2016

No	Kecamatan	Usia Produktif (15-64 Thn)	Usia Tidak Produktif (0-14 Th & >65 Th)	Jumlah	<i>Dependency Ratio</i>
1	Salaman	45.859	23.424	69.283	51,08
2	Borobudur	38.836	19.304	58.140	49,71
3	Ngluwar	20.409	10.586	30.995	51,87
4	Salam	31.044	15.679	46.723	50,51
5	Srumbung	31.895	16.031	47.926	50,26
6	Dukun	30.555	14.650	45.205	47,95
7	Muntilan	53.300	25.463	78.763	47,77
8	Mungkid	49.337	24.007	73.344	48,66
9	Sawangan	37.656	18.895	56.551	50,18
10	Candimulyo	31.375	16.544	47.919	52,73
11	Mertoyudan	77.873	34.859	112.732	44,76
12	Tempuran	32.837	16.101	48.938	49,03
13	Kajoran	34.632	18.239	52.871	52,67
14	Kaliangkrik	35.909	18.881	54.790	52,58
15	Bandongan	38.418	18.685	57.103	48,64
16	Windusari	32.238	17.024	49.262	52,81
17	Secang	53.892	26.521	80.413	49,21
18	Tegalrejo	39.030	17.606	56.636	45,11
19	Pakis	36.893	17.020	53.913	46,13
20	Grabag	56.537	28.700	85.237	50,76
21	Ngablak	27.254	11.484	38.738	42,14

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2016, Kabupaten Magelang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Magelang adalah sebesar 33% dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.16. dibawah ini :

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2012-2016 (jiwa)

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 14	261.090	220.129	272.003	303.099	301.021
15 - 64	948.751	928.551	886.499	836.057	845.008
65+	108.697	111.824	103.998	106.340	110.194

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2011-2016 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

2.1.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

Pada Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 persen, Jawa tengah 5,28 persen, dan kabupaten Magelang 5,40 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Magelang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.17 di bawah.

Tabel 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang.
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2012	4,88	5,34	6,03
2013	5,91	5,11	5,56
2014	5,38	5,27	5,01
2015	5,03	5,47	4,88
2016	5,43	5,28	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Khusus pada Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih rendah dibanding pertumbuhan provinsi, tetapi lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional.

Secara sektoral pada Tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Perusahaan (10,18 persen), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (10,07 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,78 persen).

Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,17 persen), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (2,22 persen), dan sektor Pertambangan dan Penggalian (2,94 persen).

Dari data historis tampak sektor pertanian sebagai sektor dominan tumbuhnya tergolong paling lambat. Sementara itu dua sektor unggulan yang lain, industri dan perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan sebagai pendukungnya, secara konsisten meningkat. Data perkembangan ekonomi sektoral Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (%)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.46	1.89	1.75	3.26	3.33
B. Pertambangan dan Penggalian	7.39	5.90	4.52	1.71	2.94

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
C. Industri Pengolahan	8.57	10.93	7.44	5.13	5.82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.14	7.65	3.32	1.50	7.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	-0.29	1.81	1.33	2.17
F. Konstruksi	9.37	5.42	5.08	5.93	6.32
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.81	4.13	3.52	3.99	5.28
H. Transportasi dan Pergudangan	8.42	8.56	8.55	8.54	6.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.63	5.40	7.50	6.60	6.02
J. Informasi dan Komunikasi	10.56	7.95	13.04	9.45	8.09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.10	4.39	5.23	8.44	10.07
L. Real Estate	4.01	7.70	7.18	7.35	6.56
M,N. Jasa Perusahaan	7.03	12.06	8.36	9.74	10.18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77	2.73	1.67	4.24	2.22
P. Jasa Pendidikan	17.82	9.41	10.17	7.10	6.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.46	7.10	11.78	6.92	9.78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.33	9.22	8.51	3.29	8.64
PDRB	4.88	5.91	5.38	5.03	5.40

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 Rp26.223.219,71. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.

PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.277.173,90	4.698.034,20	5.180.515,64	5.646.623,82	5.974.390,51
B. Pertambangan dan Penggalian	691.971,35	758.100,91	925.847,17	1.072.439,49	1.140.800,44
C. Industri Pengolahan	3.679.575,76	4.163.188,04	4.739.299,59	5.259.653,79	5.830.568,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.115,87	10.330,32	10.703,35	11.432,66	13.264,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.301,50	18.843,43	19.526,54	20.486,41	21.341,02
F. Konstruksi	1.649.342,43	1.804.903,01	2.032.068,15	2.240.638,65	2.421.236,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.583.636,29	2.792.601,00	2.980.680,48	3.230.590,75	3.516.599,14
H. Transportasi dan Pergudangan	569.447,02	627.823,74	729.826,69	820.655,80	879.968,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	699.813,16	776.872,17	882.266,29	980.915,89	1.096.806,75
J. Informasi dan Komunikasi	604.945,62	638.366,22	704.277,86	756.340,66	818.842,53

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	469.552,36	513.792,97	563.838,59	641.887,13	727.606,30
L. Real Estate	327.100,40	356.116,47	401.248,55	445.879,48	482.444,80
M,N. Jasa Perusahaan	36.373,98	42.711,47	47.920,53	55.349,06	63.089,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	701.962,43	755.467,87	805.661,91	882.405,73	949.578,24
P. Jasa Pendidikan	936.246,14	1.108.648,02	1.276.872,56	1.393.111,48	1.529.252,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.486,55	144.740,99	168.511,59	188.190,15	208.452,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	347.447,37	392.304,03	454.345,82	485.043,21	548.977,07
PDRB	17.731.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018.

Sementara itu nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp19.855.844,24. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.827.627,05	3.900.103,18	3.968.480,17	4.097.841,45	4.234.440,24
B. Pertambangan dan Penggalian	667.027,11	706.372,16	738.285,98	750.942,72	772.990,26
C. Industri Pengolahan	3.190.670,17	3.539.293,89	3.802.680,12	3.997.570,79	4.230.032,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.132,17	10.907,25	11.269,25	11.438,62	12.292,36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.133,32	18.080,11	18.407,38	18.651,51	19.056,79
F. Konstruksi	1.526.541,01	1.609.322,00	1.691.117,51	1.791.405,65	1.904.580,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.400.862,00	2.500.051,09	2.588.142,41	2.691.442,36	2.833.603,46
H. Transportasi dan Pergudangan	570.460,06	619.318,41	672.277,24	729.691,57	777.889,43
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	643.002,72	677.721,12	728.538,27	776.587,13	823.333,08
J. Informasi dan Komunikasi	618.502,09	667.692,39	754.787,91	826.095,58	892.926,63

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	416.810,09	435.101,35	457.847,63	496.491,50	546.479,99
L. Real Estate	322.168,18	346.973,80	371.873,60	399.215,80	425.386,83
M,N. Jasa Perusahaan	34.207,81	38.334,21	41.537,31	45.582,63	50.224,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	627.980,45	645.103,58	655.887,62	683.671,71	698.849,22
P. Jasa Pendidikan	748.437,47	818.857,86	902.153,17	966.239,66	1.028.593,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.768,65	121.845,05	136.202,00	145.633,89	159.884,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	334.812,21	365.678,16	396.800,80	409.849,41	445.280,35
PDRB	16.071.142,55	17.020.755,61	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Tiga sektor dominan pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,78 persen), Industri pengolahan (22,23 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,41 persen).

Sementara itu tiga sektor pemberi kontribusi terendah pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,05 persen), Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang (0,08 persen), dan Jasa Perusahaan (0,24 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21.
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,11	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,90	3,87	4,22	4,44	4,35
C	Industri Pengolahan	20,78	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,30	9,21	9,27	9,29	9,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,57	14,25	13,60	13,39	13,41
H	Transportasi dan	3,21	3,20	3,33	3,40	3,36

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,11	23,97	23,63	23,40	22,78
	Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,41	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,84	1,82	1,83	1,85	1,84
M.N	Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	3,85	3,67	3,66	3,62
P	Jasa Pendidikan	5,28	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,74	0,77	0,78	0,79
R.S. T.U	Jasa lainnya	1,96	2,00	2,07	2,01	2,09
PDRB Kabupaten Magelang		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

2.1.3.1.2. PDRB Penggunaan/Pengeluaran

Data historis PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016 yang dihitung melalui pendekatan penggunaan/ pengeluaran (*expenditure approach*) bertambah Rp8.484.727,60 juta, atau 47,83%, jika dibanding Tahun 2012 yang besarnya Rp17.738.492,11 juta, menjadi Rp26.223.219,71 juta.

Komponen Pengeluaran terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang besarnya mencapai 72,61% atau Rp20.157.675,80 juta. Komponen Pengeluaran terkecil adalah Perubahan Inventori yang besarnya hanya 1,36% atau Rp355.996,89 juta.

Data perkembangan total PDRB menurut penggunaan dan perkembangan komponen PDRB menurut penggunaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.22 berikut ini:

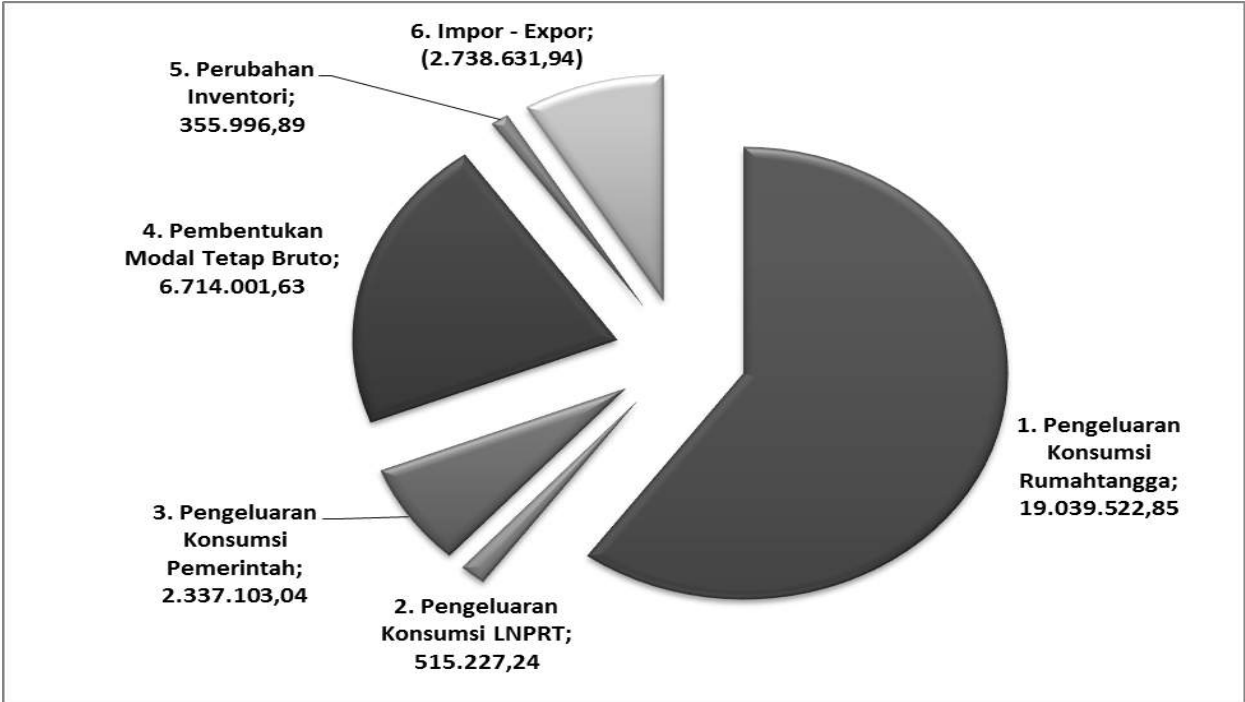
Tabel 2.22.
PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	13.529.689,13	15.203.515,40	16.525.058,44	17.930.024,71	19.039.522,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	314.472,80	361.325,40	416.121,71	469.061,62	515.227,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.569.937,77	1.730.237,29	1.916.931,81	2.197.651,32	2.337.103,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.904.284,41	5.147.306,09	5.909.839,42	6.432.281,33	6.714.001,63

5. Perubahan Inventori	1.102.612,29	985.073,80	1.152.562,93	732.137,79	355.996,89
6. Ekspor Barang dan Jasa	6.885.288,66	7.054.331,31	7.483.484,53	8.347.227,78	9.109.875,09
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10.567.792,95	10.878.944,43	11.480.587,54	11.976.740,39	11.848.507,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.738.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Komposisi masing-masing komponen penggunaan/pengeluaran, yang meliputi: pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan), pengeluaran lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor, disajikan dalam Gambar 2.8.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Gambar 2.8.
PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2016

Selama periode pada Tahun 2016, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen). Selain itu, ekspor dan impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34--41 persen produk Kabupaten Magelang diperdagangkan ke luar daerah. Demikian halnya dengan impor, karena sekitar 50--60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 26--27 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada Tahun 2012-2016 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Berarti bahwa perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

2.1.3.1.3. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Sedang yang dimaksud dengan inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persentase) indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pengertian Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu periode waktu dengan periode tertentu yang telah ditetapkan. Laju inflasi biasanya disebabkan antara lain oleh: perubahan ketersediaan uang di tangan masyarakat (*money supply*) sebagai akibat dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral, kebijakan pemerintah tentang harga barang/jasa tertentu (*pricing policy*), kebijakan tentang subsidi, naik turunnya produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Inflasi Kabupaten Magelang antara Tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2012-2016 masih dapat dikendalikan. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2013	8.34	7.99	8.38
2014	7.91	8.22	8.36
2015	3.60	2.73	3.35
2016	2.86	2.36	3.02
2017	3.47	3.71	3.61

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan, dalam dua tahun terakhir laju inflasi di Kabupaten Magelang lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2013-2016 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Sementara pada tahun 2017 kelompok perumahan dan transport yang mencapai inflasi tertinggi selama satu tahun. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.24. berikut:

Tabel 2.24.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2017 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Umum	8.49	7.91	3.6	2.86	3.47

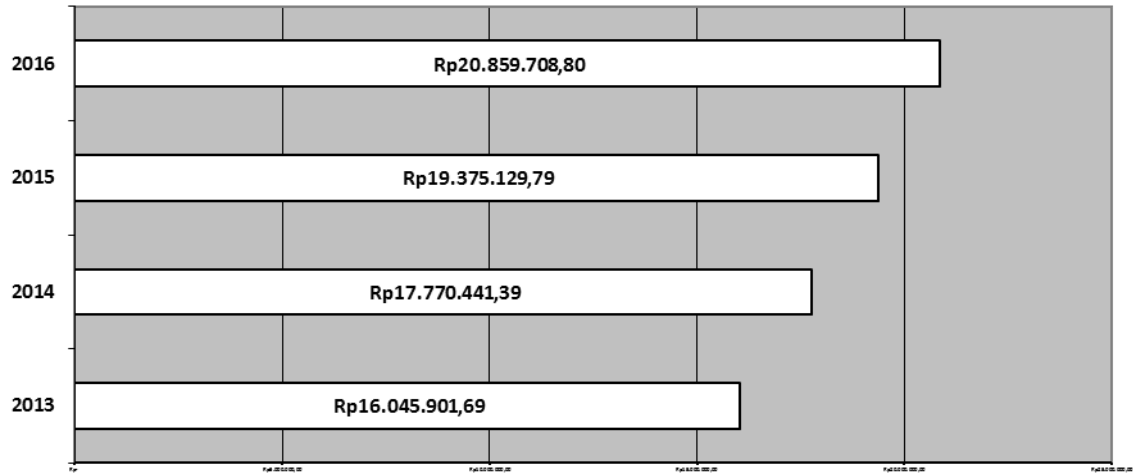
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Bahan Makanan	15.74	13.02	3.80	6,25	2.15
3	Makanan Jadi	4.48	5.23	6.40	5.23	2.47
4	Perumahan	3.73	7.83	5.34	1.21	5.67
5	Sandang	-1.83	3.44	2.23	2.53	2.77
6	Kesehatan	2.19	3.30	3.45	2,42	2.21
7	Pendidikan	1.94	2.36	2.67	0,80	2.64
8	Transport	14.72	10.48	-1.86	2,14	5.01

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.1.4. PDRB Perkapita

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Selama periode 2011-2015 perkembangan PDRB perkapita ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan cukup signifikan. PDRB perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2015 mencapai Rp20.859.708,80, naik 30,00 persen atau sebesar Rp4.813.807,11 dibanding Tahun 2011 yang hanya Rp16.045.901,69. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.9.
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016

2.1.3.1.5. Pemerataan Pembangunan

Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai kue regional, manakala kue regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Metode untuk mengukur pemerataan pembangunan antar lain teori *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia dan Indeks Wiliamson.

- *Gini Ratio*

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini dihitung dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan.

Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

- P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i
- Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i

Bank Dunia menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0.4$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0.4 - 0.5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0.5$

Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, *Gini Ratio* di Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan nilai $< 0,4$ yang berarti bahwa Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Magelang, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki penghasilan rendah. Data *Gini Ratio* Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut;

- Tahun 2011 sebesar : 0.32
- Tahun 2012 sebesar : 0.33
- Tahun 2013 sebesar : 0.34
- Tahun 2014 sebesar : 0.34

Data diatas memperlihatkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang sejak Tahun 2011 menunjukkan penurunan, yang berarti ketimpangan pendapatan di Kabupaten Magelang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. pemerataan pendapatan di Kabupaten Magelang lebih baik. *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahun 2011 sebesar : 0.38
- Tahun 2012 sebesar : 0.38
- Tahun 2013 sebesar : 0.39
- Tahun 2014 sebesar : 0.38

- Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan. membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh

kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Dari data historis 2011-2015 diketahui bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima lebih besar dari 17 persen total pendapatan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi.

Namun mengingat persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan sebesar minus tiga koma delapan dua persen (-3.82%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan sedang mengalami penurunan sebesar minus satu koma lima puluh delapan persen (-1.58%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi mengalami peningkatan sebesar lima satu koma empat persen (5,4%). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memburuk.

Adapun pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.25. berikut :

Tabel 2.25.
Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
40% berpengeluaran rendah	23,00	22,90	20,50	19,46	19,18
40% berpengeluaran sedang	35,30	34,35	35,54	36,22	33,72
20% berpengeluaran tinggi	41,70	42,74	43,96	44,32	47,10

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

- Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam dan jumlah penduduk per kecamatan. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

-
$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

dimana :

- CVw = Indeks Williamson

- f_i = Jumlah penduduk kecamatan ke-i (jiwa)
- n = Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (jiwa)
- Y_i = PDRB per kapita kecamatan ke-i (Rupiah)
- \bar{y} = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Magelang (Rupiah).

Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi, yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data.

Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita, metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan.

Semakin tinggi variasi datanya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya, diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik.

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang, dalam RPJMD 2014-2019, ditargetkan berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,4.

Pada Tabel 2.26 disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson, untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kecamatan. Penghitungan dilakukan untuk melihat perkembangan selama lima tahun terakhir berdasar data antara Tahun 2012 sampai 2016. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.26.
Indeks Ketimpangan Williamson 2012-2016

Tahun	Ketimpangan Antar Kecamatan	
	ADHK	ADHB
2012	0.4101	0,3292
2013	0,3993	0,3672
2014	0.4049	0,3991
2015	0,4159	0,4157
2016	0,4160	0,4225

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,39 hingga 0,41. Baik

secara harga berlaku maupun konstan hampir-hampir tidak ada fluktuasi atau perkembangan yang signifikan.

2.1.3.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada Tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sejumlah 157.150 jiwa (12,42%), mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin Tahun 2016 sebesar 158.900 jiwa (12,67 %).

Jika dilihat dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebesar 10,98% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan Tahun 2017 belum berjalan baik. Adapun data penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	13,96	12,98	13,07	12,67	12,42
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	171,02	160,480	162,380	158.900	157.150
Garis Kemiskinan (Rp/kapita bulan)	235,43	246,292	253,866	271.800	281.237
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	2,07	1,60	1,84	1,67
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,34	0,47	0,32	0,44	0,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Magelang berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Magelang tahun pada 2017 telah mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir indek P1 mengalami fluktuasi. Capaian Tahun 2017 adalah 1,67%, turun dari Tahun 2016 sebesar 1,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih dekat daripada tahun sebelumnya.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terakhir jika dilihat dari data di atas juga terlihat fluktuatif. Tahun 2017 capaian P2 di kabuapten Magelang menunjukan capain terendah selama rentang lima tahun terakhir, yaitu berada pada angka 0,31%. Indeks tertinggi terjadi pada Tahun 2014, sebesar 0,47%

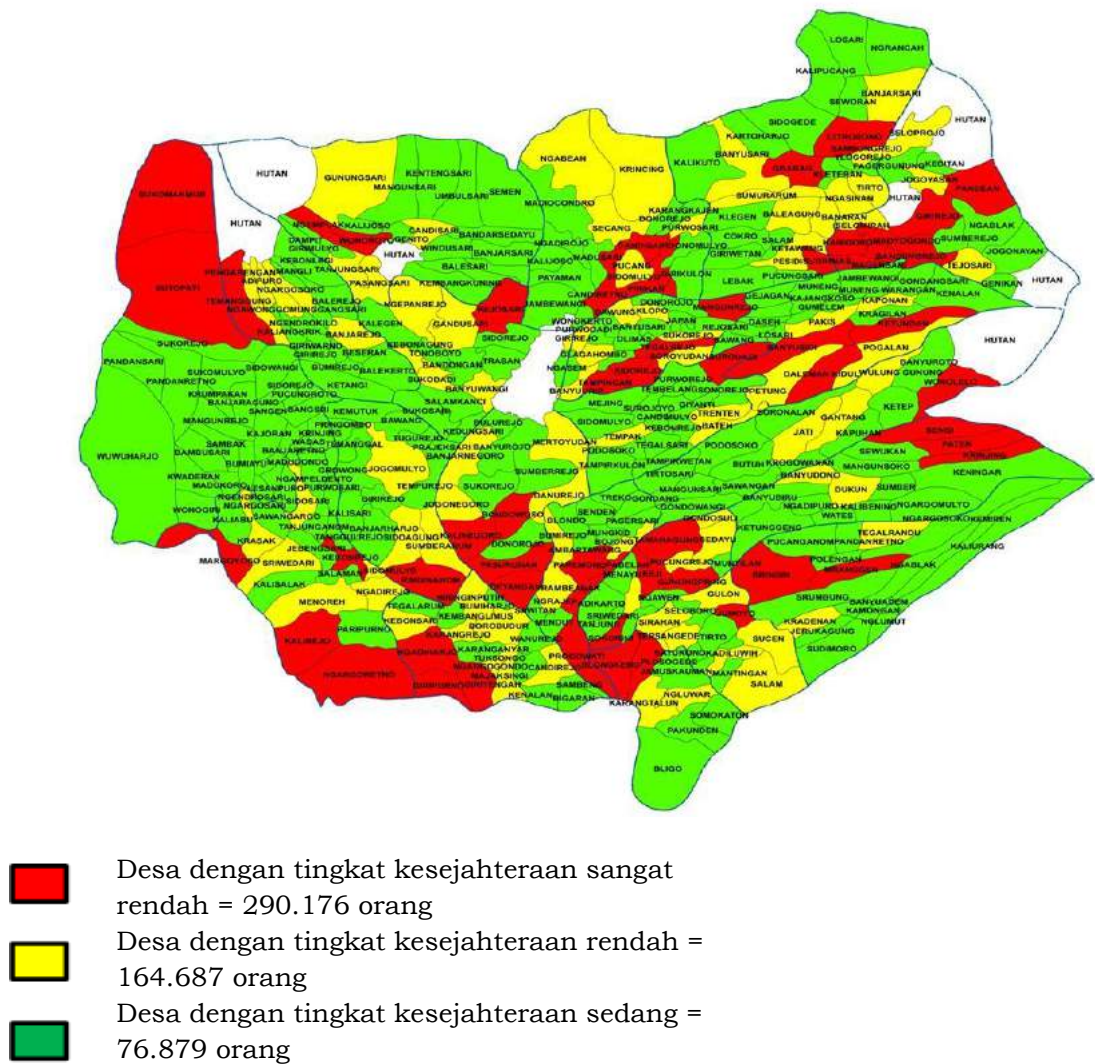
Guna mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Bappeda Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan prioritas lokasi intervensi program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Pemetaan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan mendasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah diolah. Sehingga di setiap kecamatan di semua kabupaten/ kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Magelang akan diklasifikasikan menurut 3 (tiga) kategori yang dianalisis mendasarkan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan total jumlah penduduk (Menggunakan Metode Interval).

Dari hasil pemetaan prioritas intervensi lokasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah/merah sebanyak 94 desa;
- 2. Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah/kuning sebanyak 151 desa;
- 3. Desa dengan tingkat kesejahteraan sedang/hijau sebanyak 127 desa.

Adapun arahan strategis untuk untuk pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2019 agar lebih tepat sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Program kegiatan OPD agar diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas berdasarkan BDT 2015.
- 2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)
- 3. OPD Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- 4. Tahun 2017 merupakan tahap akhir RPJMD 2013-2018, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).



Sumber : TPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Gambar 2.10.
Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017

Jumlah dan Nama Desa yang tingkat kemiskinannya tinggi adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.
Jumlah Desa yang Tergolong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi (Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah) Kabupaten Magelang Tahun 2012

NO	KECAMATAN	DESA
1	Bandongan	Gandusari, Kebonagung, Ngepanrejo, Salamkanci
2	Borobudur	Bumiharjo, Giripurno, Giritengah, Kebonsari, Kenalan, Ngargogondo
3	Candimulyo	Bateh, Kebonrejo, Podosoko, Purworejo, Sidomulyo, Trenten
4	Dukun	Krinjing,Paten, Wates
5	Grabag	Citrosoo, Kartoharjo, Ngrancah, Pesidi, Sambungrejo, Sugihmas, Tirto
6	Kajoran	Pandanretno
7	Kaliangkrik	Banjaretno, Kebonlegi, Mangli, Munggangsari, Ngargosoko, Pengarengan, Selomoyo
8	Mertoyudan	Deyangan, Pasuruhan
9	Mungkid	Gondang, Ngrajek, Paremono, Progowati, Rambeanak
10	Muntilan	Adikarto, Congkrang, Sriwedari
11	Ngablak	Keditan, Madyogondo, Magersari, Seloprojo
12	Ngluwar	Blongkeng, Karangtalun, Plosogede
13	Pakis	Daleman Kidul, Gondangsari
14	Salaman	Kalirejo, Ngargoretno, Paripurno, Purwosari, Sawangargo, Tanjunganom
15	Salam	Kadiluwih, Mantingan, Tersangede
16	Sawangan	Soronalan, Wulunggunung
17	Secang	Candiretno, Donomulyo, Girikulon, Karangkajen, Madusari , Pirikan, Purwosari, Sidomulyo
18	Srumbung	Mranggen, Ngargosoko, Pandanretno
19	Tegalrejo	Banyusari, Mangunrejo, Ngasem, Tampingan
20	Tempuran	Bawang, Girirejo, Growong, Kemutuk, Pringombo,Ringinanom, Tugurejo
21	Windusari	Candisari, Dampit, Genito, Gunungsari, Mangunsasri, Ngemplak, Pasangsari, Wonoroto

Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha

5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah
8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

2.1.3.1.7. Angka Kriminalitas

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Dari data di bawah bisa dilihat bahwa penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2012-2016 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29.
Angka Kriminalitas yang tertangani di Kab.Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2013	1.221.681	319	189	59,24	2,61
2	2014	1.233.695	252	181	71,81	2,04
3	2015	1.245.482	434	332	76,49	3,48
4	2016	1.245.496	252	186	73,30	2,02
5	2017	1.280.679	339	248	73,16	2,65

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.3.2.1.Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 mencapai 67,85 poin, meningkat sebesar 0,72 poin, dibandingkan IPM Tahun 2015 sebesar 67,13.

Dalam RPJMD 2014-2019 IPM Kabupaten Magelang pada Tahun 2019 ditargetkan mencapai 73,94. Data historis menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

Peringkat IPM Kabupaten Magelang mengalami kemajuan, jika pada Tahun 2012 berada pada peringkat ke-27 di Provinsi Jawa Tengah, dan Tahun 2016 berada pada peringkat ke 24. Data Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015, disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

Cakupan Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014*	2015*	2016*
Magelang	73,14	73,67	66,35	67,13	67,85
Jawa Tengah	73,36	74,05	68,78	69,49	69,98
Indonesia	73,29	73,81	68,90	69,55	70,18
Peringkat di Jawa Tengah	27	25	25	25	24

* Perhitungan menggunakan metode baru
 ** Penurunan angka IPM Tahun 2013 ke 2014 karena penggunaan metode baru.
 Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2015 yang sebesar 67,85 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori ‘sedang’. Menurut klasifikasi yang ditetapkan BPS capaian IPM dengan nilai 60≤IPM<70 termasuk ‘sedang’, Capaian IPM IPM < 60 termasuk ‘rendah’, Capaian nilai IPM berkisar antara 70 ≤ IPM < 80 masuk kategori pembangunan manusianya tinggi. Apabila nilai IPM berkisar IPM ≥ 80 masuk dalam kelas pembangunan manusianya ‘tinggi’.

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka pada Tahun 2016 akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-3 se-eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan kedua, Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Kabupaten Temanggung pada urutan keempat, seperti terlihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Nilai dan Peringkat IPM Kab./Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM 2015	Nilai IPM 2016	Peningkatan	Peringkat Peningkatan
1	Kab. Kebumen	66,87	67,41	0,54	III
2	Kab. Purworejo	70,37	70,66	0,29	VI
3	Kab. Wonosobo	65,70	66,19	0,49	V
4	Kab. Magelang	67,13	67,85	0,72	II
5	Kab. Temanggung	67,07	67,60	0,53	IV
6	Kota Magelang	76,39	77,16	0,77	I

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

IPM disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e0); pendidikan yang diukur

berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Indikator Angka Melek Huruf dalam metode baru diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Magelang Tahun 2016, sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (tahun)	: 73,33
Angka Melek huruf (persen)	: 95,75
Harapan Lama Sekolah (persen)	: 12,15
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	: 7,40
Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/PPP)	: 8,501

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-4 se-eks Karesidenan Kedu. Angka Harapan Lama Sekolah pada urutan ke-4. Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-5. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan derajat kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah 73,33 tahun. Artinya, pada Tahun 2016 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73,33 tahun. Selama periode lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan, yaitu dari 73,00 tahun pada Tahun 2012 menjadi 73,33 tahun di Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016 memiliki harapan untuk terus hidup bertambah 0.06 tahun dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Pada Tahun 2014-2015 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang masih dibawah Angka Harapan Hidup Jawa Tengah (73,96 pada Tahun 2015 dan 74,02 pada Tahun 2016).

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh masyarakat.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini deteksi kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Namun, dalam metode baru yang digunakan sejak Tahun 2014, indikator Angka Melek Huruf (Lit) diganti dengan Harapan Lama Sekolah. Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang ketiga indikator tersebut.

Secara nasional ditargetkan pada Tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 sebesar 93,60 dan Tahun 2015 sebesar 95,75. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Angka Melek Huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Dalam periode 2012-2016 HLS meningkat sebesar 2,05% per tahun. Meningkatnya HLS memberi pertanda bahwa kesempatan penduduk untuk sekolah menjadi lebih tinggi. Pada Tahun 2016 HLS Kabupaten Magelang mencapai 12,15 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016 yang baru mencapai 7,40 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7,15 tahun), namun bila diamati se-eks Karesidenan Kedu lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang terletak pada urutan yang kedua setelah Kota Magelang yang sebesar 10,29 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 di Kabupaten Magelang sebesar 7,19 dan Tahun 2016 sebesar 7,40. Angka ini turun dibanding angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013, dikarenakan adanya perhitungan dengan metode yang baru oleh BPS

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,40 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,40 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2011-2013 dan 2014-2015 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain masih tingginya biaya pendidikan yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalanya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini. Faktor lain yang memperngaruhi nilai rata-rata lama sekolah adalah banyaknya penduduk asli Kabupaten Magelang yang berpendidikan tinggi, bekerja di luar daerah dan menjadi penduduk daerah tersebut.

Terlepas dari jalannya yang lamban faktor lain dari meningkatnya angka rata rata lama sekolah dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada, disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampun daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. Alasan lainnya karena pendapatan

orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Dengan demikian perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti: Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai *deflator* dalam penghitungan perkiraan *Pusching Power Parity* (PPP) antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 sebesar Rp8.182.000,00 per bulan, pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp8.501.000,00 pertahun atau Rp708.416,00 per bulan. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen. Data Nilai Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016, disajikan dalam tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

No	Komponen	2012	2013	2014*	2015	2016
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,23	70,63	73,25	73,27	73,33
2.	Angka Melek Huruf (persen)	93,31	93,64	93,60	95,75	95,75
	Harapan Lama Sekolah			12,00	12,14	12,15
3.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	7,55	7,55	7,02	7,19	7,40
4.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	641,45	644,48	7,877	8,182	8.501

*Perhitungan menggunakan metode baru

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada Tahun 2015 sebesar 99,87%, Tahun 2016 menjadi 103,69, dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 105,87, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa

yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI ada siswa yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada Tahun 2015 sebesar 84,49 pada Tahun 2016 turun menjadi 82,40 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 88,38. Peningkatan ini disebabkan antara lain berkurangnya penduduk Kabupaten Magelang usia 13-15 yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Magelang, serta meningkatnya keterjangkauan penduduk Kabupaten Magelang terhadap akses pendidikan SMP/MTs.

APK SMA/MA/SMK pada Tahun 2015 sebesar 54,17, Tahun 2016 naik menjadi 60,48 atau meningkat sebesar 6,31 dari Tahun 2016 dan pada tahun 2017, meningkat lagi menjadi 64,23. Hal ini bisa terjadi karena kesadaran penduduk untuk melanjutkan sekolah ke SMA sederajat mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A					
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	126.254	125.072	122.290	122.873	123.243
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	APK SD/MI/Paket A	104.44	101.33	99.87	103.69	105,87
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	APK SMP/MTs/Paket B	79.77	83.52	84.49	82.40	88,38
3	SMA/SMK/MA/Paket C					
3.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	29.254	30.953	33.165	34279	37.242
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C	47.34	50.72	54.17	60.48	64,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

2.1.3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap, penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk di usia sekolah yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Dengan kata lain Angka Partisipasi Murni merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi APM Kabupaten Magelang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A					
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	109.177	107.403	106.200	106.333	107.862
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,98	87,02	86,74	89,70	92,66
2	SMP/MTs/Paket B				61.59??	
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	36.108	38.856	39.225	40.439	41.113
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	57,04	62,40	64,86	62,78	67,76
3	SMA/SMK/MA/Paket C				42.13??	
3.1	Jumlah Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	20.393	21.985	23.011	24.219	27.181
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	33,00	36,03	37,58	42,70	46,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

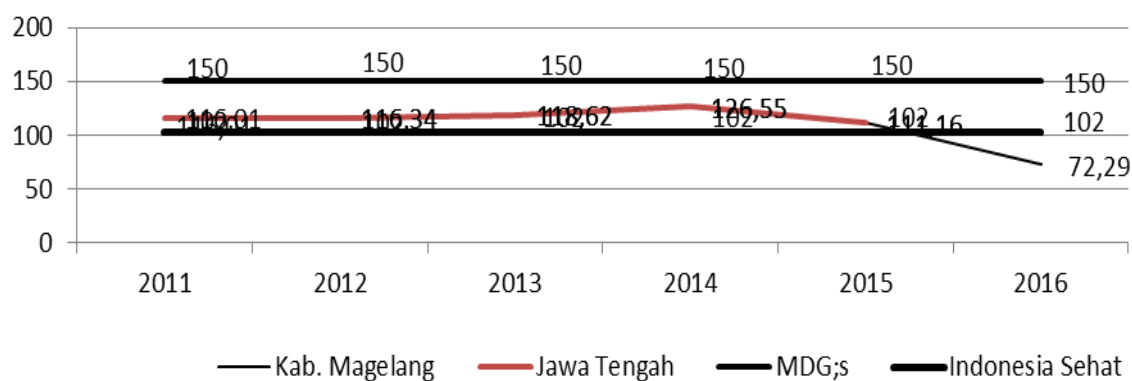
2.1.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan saat persalinan dan pasca persalinan sehingga membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi (*making pregnancy*

safer). Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Dalam konteks Kabupaten Magelang AKI disajikan dalam wujud angka jumlah kematian ibu per kelahiran hidup dikalikan 100.000 dalam setahun.

Dalam kurun waktu 2011-2016, kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, secara detail dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.11.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang tahun 2011-2016

Dilihat dari jumlah kematian ibu sebagai berikut :

Tahun 2013	: 11 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014	: 14 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015	: 10 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016	: 13 kasus dari 17.984 kelahiran hidup
Tahun 2017	: 8 kasus dari 17.192 kelahiran hidup

Upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu selama kurun waktu 2011-2016 dilakukan melalui pemberian jaminan persalinan, pelaksanaan forum group discussion (FGD), pemberian makanan tambahan ibu hamil dan kegiatan kelas ibu hamil, sehingga kesehatan ibu hamil dapat selalu terpantau, dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

2.1.3.2.5. AKB dan AKABA

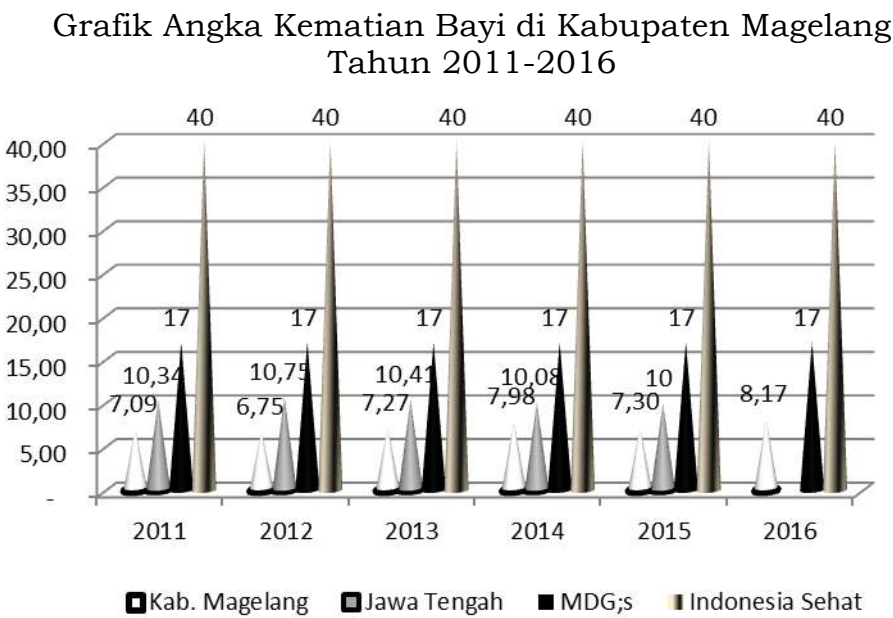
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).

Dilihat dari jumlah kematian bayi sebagai berikut :

Tahun 2013	: 138 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014	: 149 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015	: 131 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016	: 147 kasus dari 17.984 kelahiran hidup

Dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 AKB di Kabupaten Magelang relatif stabil, walaupun terjadi peningkatan dan penurunan tetapi tidak terlalu drastis. Namun demikian AKB Kabupaten Magelang Tahun 2015 sebesar 7,30/1000 KH lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 10/1.000 KH.

Gambaran Angka Kematian Bayi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai gambar 2.12 berikut :



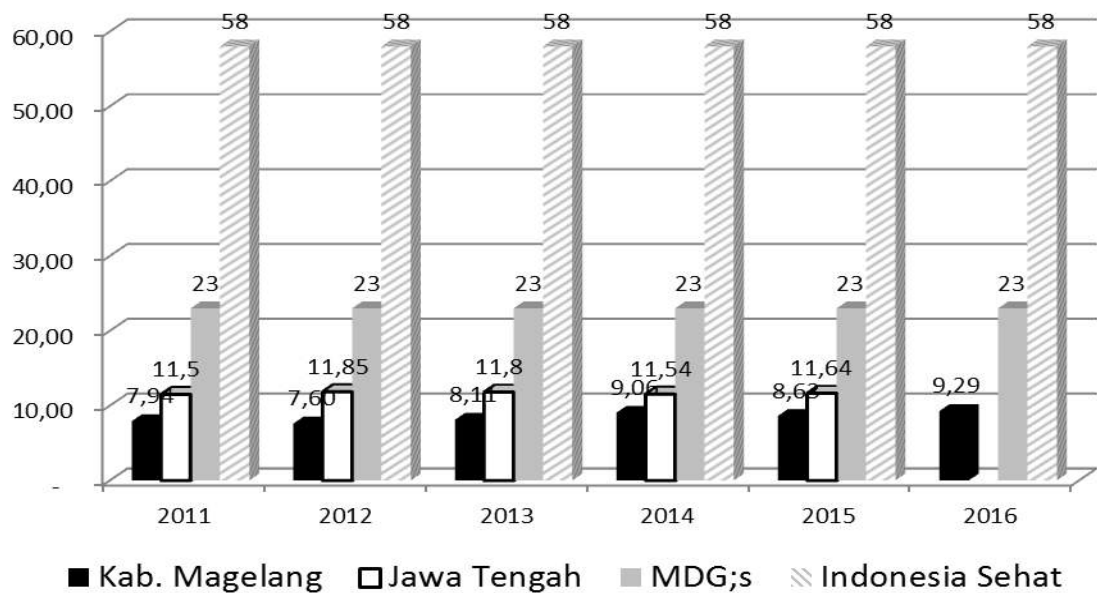
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.12.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Sedangkan balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun 11 bulan 29 hari). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.

Dalam kurun Tahun 2011-2016. AKABA cenderung stabil, tetapi mulai Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 11,54 /1.000 KH, kemudian pada Tahun 2015 meningkat menjadi 11,64/1.000 KH dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 11,85/1.000 KH. Peningkatan AKABA bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yang paling banyak ditemui adalah gangguan pada asupan gizi akibat adanya penyakit penyerta. Pada Tahun 2016 terjadi 167 kasus kematian balita. Jika dibandingkan dengan jumlah balita 17.984 anak Tahun 2016 maka diperoleh AKABA : 11,85/1000 balita. Data selengkapnya disajikan dalam gambar 2.13.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2017

Gambar 2.13.

Angka Kematian Balita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2016

Data ABA dan AKABA secara lengkap disajikan dalam tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	7,27	7,98	7,30	8,17	6,63
Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,11	9,06	8,83	9,29	7,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.6. Presentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk pada anak balita disebut juga kurang energi protein (KEP) yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Penyebab timbulnya gizi buruk di Kabupaten Magelang karena kelainan kongenital dan adanya penyakit penyerta sehingga sulit untuk ditanggulangi, kejadian gizi buruk akibat kurangnya asupan makanan sangat sedikit terjadi. Kasus gizi buruk pada balita tidak seiring dengan kasus kematian pada balita. Secara detail kejadian gizi buruk pada balita di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.36.

Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2013	28	96.413	0,03
2	2014	36	95.689	0,04
3	2015	30	91.861	0,03
4	2016	36	92.246	0,04
5	2017	18	86.699	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kondisi kesehatan gizi masyarakat mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, angka prevalensi gizi buruk balita pada awal Tahun 2012 cukup kecil sebesar 0,01%, sampai dengan Tahun 2016 mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya dan pada Tahun 2016 mencapai 0,04%.

Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang menurut Kecamatan Tahun 2016-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)
1.	Salaman	1	5.093	0,02	1	4.445	0.02
2.	Borobudur	3	4.322	0,07	-	3.905	-
3.	Ngluwar	2	1.870	0,11	1	1.659	0.06
4.	S a l a m	9	2.982	0,30	-	2.756	-
5.	Srumbung	0	3.900	0,00	-	3.287	-
6.	D u k u n	0	3.150	0,00	-	2.733	-
7.	Muntilan	3	5.428	0,06	2	7.988	0.03
8.	Mungkid	2	5.746	0,03	1	4.560	0.02
9.	Sawangan	0	3.675	0,00	0	3.394	-
10.	Candimulyo	0	3.350	0,00	0	2.972	-
11.	Mertoyudan	3	8.766	0,03	3	9.053	0.03
12.	Tempuran	0	3.521	0,00	0	3.305	-
13.	Kajoran	1	4.339	0,02	2	4.228	0.05
14.	Kaliangkrik	0	4.628	0,00	0	3766	-
15.	Bandongan	1	4.468	0,02	1	4.286	0.02
16.	Windusari	1	3.894	0,03	0	3.516	-
17.	Secang	6	6.109	0,10	2	5.357	0.04
18.	Tegalrejo	2	3.877	0,05	1	3.500	0.03
19.	Pakis	0	3.402	0,00	0	3.373	-
20.	Grabag	2	6.835	0,03	4	6.074	0.07
21.	Ngablak	0	2.891	0,00	0	2.541	-
	Total	36	92.246	0,04	18	86.699	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.7. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Antara Tahun 2015 hingga 2017 di Kabupaten Magelang terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan data pengangguran terbuka (tabel 2.80) yang terus menurun. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144
Kesempatan Kerja	632.450	639.264	646.021	654.072	661.203
Rasio penduduk yang bekerja	95,74	95,94	96,13	96,48	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jika dipilih menurut umur tampak bahwa rasio penduduk yang bekerja pada permintaan tenaga kerja usia muda paling rendah. Sisi lain dari fakta ini adalah tersedianya peluang bagi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan daya saing, misalnya menghadapi MEA. karena biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan dan/atau pelatihan generasi muda terbukti rendah. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja menurut umur selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Rasio penduduk yang bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
15 – 19	39.416	33.254	84,37	39.157	33.309	85,07
20 – 24	50.468	46.075	91,30	50.960	46.803	91,84
25 – 29	65.763	64.078	97,44	66.793	65.264	97,71
30 – 34	83.922	82.043	97,76	84.604	83.120	98,25
35 – 39	76.873	75.859	98,68	77.704	76.715	98,73
40 – 44	88.578	83.683	94,47	89.203	84.803	95,07
45 – 49	78.673	76.852	97,69	79.149	77.411	97,80
50 – 54	66.248	65.381	98,69	66.859	66.052	98,78
55 – 59	40.550	39.657	97,80	40.730	39.909	97,98

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
60 +	87.420	87.187	99,73	87.985	87.817	99,81
Jumlah	677.909	654.072	96,48	683.144	661.202	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan gedung kesenian Untuk bidang olahraga, perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.

Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah grup kesenian	1.380	1.480	1.464	2.454	2,756
Jumlah gedung kesenian	3	3	4	4	6
Jumlah Museum	7	7	7	7	7
Jumlah klub olah raga	28	28	34	34	na
Jumlah gedung olah raga	1	1	1	1	na
Jumlah Stadion	0	1	1	1	na
Jumlah Lapangan Olahraga	253	253	255	265	na

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang 2018

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.1.4.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.1.4.1.1. PENDIDIKAN

2.1.4.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 pada jenjang SD/MI 99,37; pada jenjang SMP/MTs 94,08 dan pada SMA/SMK/MA 62,40. Tahun 2016 Angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI 98,18; pada jenjang SMP/MTs 95,65 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 67,24. Tahun 2017 APS pada jenjang SD/MI 98,94; pada jenjang SMP/MTs 96,45 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 70,36. Perkembangan APS selengkapanya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	99,54	99,56	99,74	98,18	98,94
SMP/ MTs (13 – 15 th)	89,06	93,24	94,08	95,65	96,45
SMA/SMK/MA (16-18 th)	54,13	59,96	63,39	67,24	70,36

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini menunjukkan kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada setiap jenjang. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42.
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/ MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	918	915	916	916	914
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Rasio (per 10.000)	75,66	74,13	74,8	77,18	78,52
1.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	132,17	134,89	133,69	129,6	127,96
2	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	195	196	195	198	198
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Rasio (per 10.000)	30,80	31,48	31,59	30,72	32,63
2.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	324,63	317,68	316,54	325,56	306,44
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	95	98	100	97	98
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Rasio (per 10.000)	15,37	16,06	16,33	17,09	16,90
3.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	650,41	622,69	612,21	585,05	591,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang dalam periode Tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif namun menunjukkan trend yang meningkat. Fluktuasi ini disebabkan jumlah penduduk kelompok usia sekolah per jenjangnya bersifat dinamis dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 74,8 per 10.000 penduduk menjadi 77,18 per 10.000 penduduk pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 menjadi 78,52. Berarti bahwa untuk jenjang SD sederajat pada Tahun 2015, rata-rata jumlah siswa persekolahnya sebanyak $10.000/74,8 = 133,69$ siswa, pada Tahun 2016 rata-rata siswa menjadi 129,6 dan pada Tahun 2017 rata-rata siswanya menjadi 127,56. Untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2015 rata-rata persekolah sebesar 316,54 menjadi 325,56 pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 menjadi 32,63 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA, pada Tahun 2015 rata-rata siswa persekolah sebesar 612,21 siswa menjadi 585,05 siswa pada Tahun 2016, menjadi 16,90 pada Tahun 2017. Hal ini mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017

No.	Kecamatan	2016						2017					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio
1.	Salaman	52	7,389	142.10	3,921	230.65	3,921	52	6.926	133,19	17	3.621	213,00
2.	Borobudur	46	5,699	123.89	2,896	321.78	2,896	46	5.541	120.46	9	2.831	314,56
3.	Ngluwar	27	2,950	109.26	1,443	288.60	1,443	27	2.861	105,96	5	1.410	282,00
4.	S a l a m	34	4,518	132.88	2,320	257.78	2,320	35	4.402	125,77	9	2.262	251,33
5.	Srumbung	45	4,440	98.67	2,403	300.38	2,403	45	4.440	98,67	8	2.256	282,00
6.	D u k u n	36	4,118	114.39	2,221	246.78	2,221	36	4.042	112,28	9	2.088	232,00
7.	Muntilan	47	7,018	149.32	3,833	212.94	3,833	47	7.019	149,34	18	3.674	204,11
8.	Mungkid	45	6,604	146.76	3,572	297.67	3,572	45	6.586	146,36	11	3.341	303,73
9.	Sawangan	39	4,963	127.26	2,834	283.40	2,834	40	4.776	119,40	10	2.439	243,90
10.	Candimulyo	41	4,632	112.98	2,509	501.80	2,509	40	4.484	112,10	5	2.387	477,40
11.	Mertoyudan	54	9,971	184.65	5,295	588.33	5,295	53	9.859	186,02	10	5.070	507,00
12.	Tempuran	37	4,750	128.38	2,554	232.18	2,554	37	4.728	127,78	11	2.406	218,73
13.	Kajoran	54	5,653	104.69	2,897	289.70	2,897	53	5.563	104,96	10	2.751	275,10
14.	Kaliangkrik	45	5,664	125.87	3,373	481.86	3,373	45	5.497	122,16	7	3.125	446,43

No.	Kecamatan	2016						2017					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio
15.	Bandongan	46	5,751	125.02	3,081	308.10	3,081	46	5.631	122,41	10	2.955	295,50
16.	Windusari	39	5,130	131.54	2,908	363.50	2,908	38	5.077	133,61	8	2.751	343,88
17.	Secang	51	7,665	150.29	4,249	326.85	4,249	51	7.771	152,37	13	4.051	311,62
18.	Tegalrejo	44	5,345	121.48	2,827	471.17	2,827	44	5.215	118,52	6	2.571	428,50
19.	Pakis	40	4,376	109.40	2,600	371.43	2,600	40	4,247	106,18	7	2.338	334,00
20.	Grabag	63	8,792	139.56	4,812	481.20	4,812	63	8.583	136,24	10	4.578	457,80
21.	Ngablak	31	3,254	104.97	1,913	382.60	1,913	31	3.159	101,90	5	1.770	354,00
	Total	916	118,682	129.57	64,461	325.56	64,461	914	116.407	125,51	198	60.675	322,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru di suatu tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid tingkat pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Perkembangan rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44.
Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	9.323	9.177	9.076	8.971	8.869
1.2.	Jumlah Murid	126.712	125.072	122.290	122.873	123.243
1.3.	Rasio (per 1000)	73,58	73,37	74,22	73,01	71,96
1.4.	Rasio guru terhadap murid	13,59	13,63	13,47	13,70	13,89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	5.623	3.985	4.206	4.031	4.043
2.2.	Jumlah Murid	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.3.	Rasio (per 1000)	111,35	76,63	80,65	75,97	75,39
2.4.	Rasio guru terhadap murid	8,98	13,05	12,40	13,16	13,26
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	2.674	2.650	2.960	2.956	2.981
3.2	Jumlah Murid	29.254	30.953	33.165	34.279	37.242
3.3	Rasio (per 1000)	91,41	85,61	89,25	86,23	80,04
3.4.	Rasio guru terhadap murid	10,94	11,68	11,20	11,60	12,49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.4. Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Magelang diantaranya adalah Bustanul Atfal atau Raudhotul Arfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah. Ada jenis pendidikan islam yang lain yang bersifat informal, yaitu pendidikan di pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Wilayah Kabupaten Magelang. Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Magelang disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam, Murid dan Guru Tahun 2013-2017

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bustanul Atfal/Raudhotul Atfal					
	Sekolah	428	425	430	428	427
	Murid	15.032	15.509	16.457	16.556	17.185

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Guru	1.155	1.184	1.190	1.171	1.183
2	Madrasah Ibtidaiyah					
	Sekolah	310	310	310	310	310
	Murid	32.164	32.490	32.792	33.040	33.733
	Guru	2.651	2.648	2.618	2.576	2.547
3	Madrasah Tsanawiyah					
	Sekolah	71	71	71	71	71
	Murid	13.084	14.050	14.548	14.755	14.607
	Guru	1.303	1295	1273	1.278	1.252
4	Madrasah Aliyah					
	Sekolah	18	18	18	18	18
	Murid	3.444	888	3.987	4.549	4.760
	Guru	412	405	391	425	428

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2. KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan prioritas dan perlu mendapatkan pelayanan secara menyeluruh baik pada pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, mengingat aspek kesehatan pada ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2017, terdapat 2.461 posyandu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46.
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah posyandu	2.232	2.234	2.345	2.345	2.461
2. Jumlah balita	96.413	95.689	91.861	92.246	86.699
3. Rasio (100 kali)	2,32	2,33	2,55	2,54	2,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel 2.47. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Posyandu terbanyak berada di Kecamatan Secang (166) dan jumlah Posyandu terkecil berada di Kecamatan Tempuran. Kecamatan yang memiliki jumlah balita terbanyak adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan yang memiliki jumlah balita terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Salaman	133	4.010	37,67	133	4445	33,42
2.	Borobudur	134	4.572	49,04	134	3905	29,14
3.	Ngluwar	74	4.257	71,04	74	1659	22,42
4.	S a l a m	104	4.543	62,91	104	2756	26,5
5.	Srumbung	141	3.518	46,23	140	3287	23,47
6.	D u k u n	83	5.597	67,43	84	2733	32,53
7.	Muntilan	117	4.360	52,39	119	7988	67,13
8.	Mungkid	56	5.145	163,30	147	4561	31,02
9.	Sawangan	84	4.169	49,63	85	3394	39,93
10.	Candimulyo	88	4.847	77,81	90	2972	33,02
11.	Mertoyudan	152	3.097	59,85	149	9054	60,76
12.	Tempuran	73	5.899	94,51	80	3305	41,31
13.	Kajoran	123	3.804	39,06	123	4228	34,37
14.	Kaliangkrik	87	4.723	111,76	93	3766	40,49
15.	Bandongan	120	3.752	72,93	120	4286	35,72
16.	Windusari	103	3.876	37,63	103	3516	34,13
17.	Secang	165	5.482	39,28	166	5357	32,27
18.	Tegalrejo	110	3.158	74,16	125	3500	28
19.	Pakis	84	4.258	74,50	89	3373	37,90
20.	Grabag	140	4.090	50,64	209	6074	29,06
21.	Ngablak	95	5.089	85,15	94	2541	27,03
	Total	2.345	92.246	40,81	2461	86.699	35,23

Sumber : Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.48.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Poliklinik	266	266	266	266	11
3.	Jumlah Pustu	63	63	63	63	63
4.	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	41,703	42,127	42,948	44,133	43,737

6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	4,547	4,593	4,682	4,811	115,308
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	19.196	19.392	19.770	20.315	20,133

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.2.1. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.49.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik*		Pustu	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1.	Salaman	70,497	2		2		4	
2.	Borobudur	59,039	2		0		3	
3.	Ngluwar	31,371	1		1		3	
4.	S a l a m	47,513	1		3		3	
5.	Srumbung	49,080	1		0		3	
6.	D u k u n	46,018	1		0		3	
7.	Muntilan	80,161	2		3		2	
8.	Mungkid	75,076	1		1		2	
9.	Sawangan	57,602	2		0		3	
10.	Candimulyo	48,840	1		0		3	
11.	Mertoyudan	115,670	2		7		2	
12.	Tempuran	49,834	1		1		3	
13.	Kajoran	53,285	2		0		4	
14.	Kaliangkrik	55,658	1		1		3	
15.	Bandongan	58,002	1		2		3	
16.	Windusari	50,351	1		0		4	
17.	Secang	82,565	2		1		4	
18.	Tegalrejo	57,907	1		0		2	
19.	Pakis	54,443	1		0		3	
20.	Grabag	86,526	2		1		3	
21.	Ngablak	38,958	1		0		3	
	Total		29		23		63	

*Poliklinik adalah Polindesa, bukan poliklinik milik swasta

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.2. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.50.
Jumlah dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta)	2	2	2	3	3

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	0
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	4	4
7.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.496	1.257.123	1.268.396
8.	Rasio RS per 1.000.000 Penduduk	0,82	0,81	0,80	3,18	3,15
9.	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit	272	331	331	331	331
10.	Rasio Tempat Tidur RS per Penduduk	0,00023	0,00027	0,00027	0,00027	0,00027

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2018

2.1.4.1.2.3. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Dalam Lampiran I :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa rumus untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk, adalah $\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kabupaten Magelang.

Untuk mencapai kondisi ideal, sesuai standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, Kabupaten Magelang yang penduduknya Tahun 2017 mencapai 1.268.396, harusnya tersedia jumlah dokter 507 dokter. Sementara dokter yang ada saat ini hanya 177, sehingga Kabupaten Magelang hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 42,4 persen.

Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Tengah yang jumlah penduduknya 33.774.140 pada Tahun 2015, membutuhkan ketersediaan layanan idealnya 13.510 dokter, namun yang tersedia hanya 8.059 dokter, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 59,65 persen. Data rasio dokter per satuan penduduk, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah dan Rasio Dokter Per jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokter Umum	56	93	88	87	123
2	Dokter Spesialis	36	45	51	51	52
3	Dokter Gigi	34	38	38	39	40
4	Jumlah Dokter (1+2+3)	92	176	177	177	215
5.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.496	1.257.123	1.268.396

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	Rasio per 1000 penduduk (4/5)	0,076	0,144	0,142	0,141	0,169

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 2018

Distribusi dokter tidak merata. Pada tahun 2016 ketersediaan dokter paling sedikit ada di Kecamatan Windusari sebanyak 2 dokter, untuk melayani 39.486 penduduk, sehingga Rasio Dokter Per seribu Penduduk adalah 0,051. Artinya, setiap 20.000 penduduk hanya tersedia pelayanan 1 dokter, dengan demikian tingkat ketercukupan pelayanannya adalah 12,66 persen.

Kemudian, ketersediaan dokter paling sedikit selanjutnya di Ngluwar, Srumbung, Candimulyo, Kaliangkrik, Ngablak hanya tersedia 3 dokter. Sehingga kebutuhan dokter yang tercukupi paling rendah di Kecamatan Kaliangkrik yang tercukupi hanya 12,46 persen, di Kecamatan Windusari hanya 12,6 persen. Ketercukupan pelayanan dokter paling tinggi di Kecamatan Salaman, sebesar 36,32 persen.

Pada Tahun 2017, jumlah dokter terbanyak di Kecamatan Muntilan, sedangkan jumlah dokter paling sedikit ada di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Srumbung, Candimulyo, Windusari, dan Tegalrejo. Data jumlah, rasio dokter dan ketercukupan per jumlah penduduk menurut kecamatan, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.52.
Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016				2017			
		Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan	Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan
1.	Salaman	68.842	10	0,145	36,32	70,497	6	0,085	21,28
2.	Borobudur	57.193	6	0,105	26,23	59,039	1	0,017	4,23
3.	Ngluwar	32.037	3	0,094	23,41	31,371	1	0,032	7,97
4.	S a l a m	46.472	5	0,108	26,90	47,513	3	0,063	15,79
5.	Srumbung	47.171	3	0,064	15,90	49,080	1	0,020	5,09
6.	D u k u n	47.035	4	0,085	21,26	46,018	2	0,043	10,87
7.	Muntilan	78.724	8	0,102	25,41	80,161	79	0,986	246,38
8.	Mungkid	64.355	5	0,078	19,42	75,076	3	0,040	9,99
9.	Sawangan	55.507	6	0,108	27,02	57,602	2	0,035	8,68
10.	Candimulyo	47.910	3	0,063	15,65	48,840	1	0,020	5,12
11.	Mertoyudan	115.448	8	0,069	17,32	115,670	2	0,017	4,32
12.	Tempuran	46.203	5	0,108	27,05	49,834	3	0,060	15,05
13.	Kajoran	59.048	6	0,102	25,40	53,285	2	0,038	9,38
14.	Kaliangkrik	60.191	3	0,050	12,46	55,658	2	0,036	8,98
15.	Bandongan	56.127	4	0,071	17,82	58,002	2	0,034	8,62
16.	Windusari	39.486	2	0,051	12,66	50,351	1	0,020	4,97
17.	Secang	74.027	7	0,095	23,64	82,565	2	0,024	6,06
18.	Tegalrejo	48.760	3	0,062	15,38	57,907	1	0,017	4,32
19.	Pakis	53.360	4	0,075	18,74	54,443	2	0,037	9,18
20.	Grabag	143.431	9	0,063	15,69	86,526	4	0,046	11,56
21.	Ngablak	38.522	3	0,078	19,47	38,958	2	0,051	12,83

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.4. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Rasio Tenaga kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.53.
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan	641	501	508	780	780
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Rasio	0,05	0,04	0,04	0,062	0,061

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.54.
Jumlah dan Rasio Tenaga kesehatan Per Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8)
1.	Salaman	68.842	79	0,11	70,497	79	0,11
2.	Borobudur	57.193	46	0,08	59,039	46	0,08
3.	Ngluwar	32.037	22	0,07	31,371	22	0,07
4.	S a l a m	46.472	30	0,06	47,513	30	0,06
5.	Srumbung	47.171	29	0,06	49,080	29	0,06
6.	D u k u n	47.035	17	0,04	46,018	17	0,04
7.	Muntilan	78.724	43	0,05	80,161	43	0,05
8.	Mungkid	64.355	29	0,05	75,076	29	0,04
9.	Sawangan	55.507	38	0,07	57,602	38	0,06
10.	Candimulyo	47.910	30	0,06	48,840	30	0,06
11.	Mertoyudan	115.448	60	0,05	115,670	60	0,05
12.	Tempuran	46.203	29	0,06	49,834	29	0,06
13.	Kajoran	59.048	41	0,07	53,285	41	0,08
14.	Kaliangkrik	60.191	28	0,05	55,658	28	0,05
15.	Bandongan	56.127	28	0,05	58,002	28	0,05
16.	Windusari	39.486	25	0,06	50,351	25	0,05
17.	Secang	74.027	47	0,06	82,565	47	0,06
18.	Tegalrejo	48.760	35	0,07	57,907	35	0,06
19.	Pakis	53.360	29	0,05	54,443	29	0,05
20.	Grabag	143.431	75	0,05	86,526	75	0,09
21.	Ngablak	38.522	20	0,05	38,958	20	0,05
	Total	1.257.123	780	0,06	1.268.396	780	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada SPM bidang kesehatan yaitu:

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan

- peserta KB aktif. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
 3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB terdiri dari cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dan
 4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.

Tabel 2.55.
Kinerja Makro Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar					
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	127,68%	134,71%	100%	107,54%
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,81%	99,87%	99,93%	98,40%	94,6%
c. Cakupan kunjungan bayi	96,50%	104,26%	106%	91,90%	94,56%
d. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
g. Cakupan peserta KB aktif	79,9%	79,70%	81,24%	82,64%	83,47%
h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit					
1. <i>Acute Flacid Paralysis</i> rate (AFP) lebih besar atau sama dengan 2/ 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun	0	1,31	1,67	3,28%	2,65
2. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	12,80%	12,80%	12,80%	60,38%	100%
3. Penemuan pasien baru TB BTA positif	89,01%	28,30%	29,00%	49,51%	40%
4. Penderita DBD ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
5. Penemuan penderita diare	91,54%	91,54%	91,54%	83%	100%
i. Cakupan pelayanan kesehat-an dasar masyarakat miskin	62,77%	58,87%	58,87	44,77%	100%
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan					
a. Rasio Rumah Sakit Pemerintah per satuan penduduk	1/ 1.221.681 jiwa	1/ 1.221.681 jiwa	1/ 1.245.482 jiwa	1/1.257.123 jiwa	1/1.268.396 Jiwa
b. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	42,05	42,05	42,05	44,13	43,74
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB					
4. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
5. Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	99,73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.3. PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG

2.1.4.1.3.1. PEKERJAAN UMUM

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendung, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman. Data historis pencapaian kinerja pekerjaan umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan Kabupaten (km)	836.84	887.83	887,83	1000,83	1.000,83
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	565.50	579.94	608.34	670.33	736,88
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	67.58	65.32	68.52	66,98	73,63
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.96	0.98	0.97	0.075	0,99
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	43.48	43.83	44.08	47,03	50.591
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	708.96	710.010	107.735	111,41	113.083
Luas Jaringan Irigasi	35.693,45	35.693,45	35.693,45	35.693,45	35.693,45
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	18.549.16	20.025.00	21.268.05	21.344.68	22.499,36
Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	51,96	56,10	59,59	61,22	64,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2016 menurun dibandingkan Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena panjang jalan Kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan, mengalami kenaikan dari 887,83 km pada Tahun 2015 menjadi 1000,83 km pada Tahun 2016 (ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 182.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten).

2.1.4.1.3.2. PENATAAN RUANG

Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik, luas kawasan lindung kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan

cagar budaya, luas kawasan budidaya, ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang, jumlah IMB yang dikeluarkan, luas kawasan industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan. Dalam tabel berikut disajikan ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang.

Tabel 2.57.
Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Nama Dokumen	Tahun Disusun	Cakupan Layanan	Keterangan
RDTR Kecamatan Mertoyudan	2011	Wilayah Kec. Mertoyudan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Muntilan	2012	Wilayah Kec. Muntilan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salam	2012	Wilayah Kec. Salam	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salaman	2012	Wilayah Kec. Salaman	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Tempuran	2013	Wilayah Kec. Tempuran	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Secang	2013	Wilayah Kec. Secang	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Grabag	2013	Wilayah Kec. Grabag	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Tegalrejo	2013	Wilayah Kec. Tegalrejo	Belum diperdakan
RTBL Koridor Borobudur	2012	Wilayah SP-1 KSN Borobudur	Belum diperbupkan
RTBL Palbapang-Mendut	2006	Koridor jalan Palbapang-Mendut	Belum diperbupkan
RTBL Blondo Mertoyudan	2006	Koridor sepanjang jalan Mertoyudan-Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Perkotaan Kecamatan Secang	2014	Koridor Payaman – Perempatan Secang	Belum diperbupkan
*)RTBL Kawasan Perkotaan Kecamatan Mertoyudan	2014	Kawasan Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2016	Koridor Tanjung – Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2017	Koridor Jl. Bambang Sugeng – Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Pawon	2017	Kawasan Candi Pawon	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Mendut	2017	Kawasan Candi Mendut	Belum diperbupkan

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Pada saat ini ruang terbuka hijau masih tersedia cukup luas. Lahan pertanian sawah terdapat 36.974 ha, lahan kering perkebunan 41.923 ha, Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik yang sudah dimiliki dan tersebar di kawasan perkotaan luasnya mencapai 20,6 ha. Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	20.6	20.6	4.11	4.11	31
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	461	429	594	384	577

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 2.59.
Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Tangga	336.432	347.126	358.929	381.898	358.573
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	66.12	84.79	77.87	80.13	83,69
Rumah tangga pengguna listrik	307.588	322.121	338.013	337.587	369.197
Rumah tangga bersanitasi (%)	70.58	81.31	80.38	80.38	81,42
Lingkungan pemukiman kumuh (%)	2.59	2.59	2.52	2,52	2,24
Rumah layak huni (%)	55.94	53.04	53.13	55.45	56,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Pembangunan/peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan memberikan bantuan pada keluarga miskin dan/atau masyarakat yang berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah, namun kondisi rumah tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk dihuni. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kabupaten Magelang dilaksanakan melalui 3 sumber pendanaan, yaitu melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang bersumber pada pendanaan APBD Kabupaten dimulai Tahun 2011 sebanyak 24 unit, Tahun 2012 sebanyak 363 unit dan pada 2013 sebanyak 554 unit, Tahun 2014 sebanyak 527 unit, tahun 2015 sebanyak 1.059 unit, Tahun 2016 sebanyak 3.412 unit dan Tahun 2017 sebanyak 3.693 unit. Melalui APBD Provinsi bantuan dana rehab rumah tidak layak huni telah dilaksanakan sebanyak 10 unit di Tahun 2011, 10 unit di Tahun 2012, 35 unit di Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 sebanyak 50 unit. Sedangkan pada Tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Magelang tidak mendapatkan bantuan rehab rumah dari AOBK Provinsi. Namun pada Tahun 2017, Kabupaten Magelang kembali mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi untuk rehab rumah tidak layak huni sebanyak 388 unit.

Sedangkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui sumber pendanaan APBN dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat. Peningkatan rumah tidak layak huni melalui BSPS telah dilaksanakan sebanyak 125 unit di Tahun 2011, 187 unit di Tahun 2012, 744 unit di Tahun 2013, 788 unit pada Tahun 2014, 1.117 unit Tahun 2015 dan 700 unit tahun 2016 serta 813 unit pada Tahun 2017.

Melalui ketiga unit sumber pendanaan tersebut di atas, maka sampai dengan Tahun 2017 telah direhabilitasi sejumlah 4.894 unit. Sedangkan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 adalah sebanyak 191.550 unit dari 337.246 jumlah rumah diseluruh Kabupaten Magelang (56,70%).

Tabel 2.60.
Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016				2017)*			
		Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)
1	Salaman	19.854	19.032	822	4,14	20.699	19.032	1.667	8,05
2	Borobudur	18.117	16.940	1.177	6,50	18.457	16.940	1.517	8,22
3	Ngluwar	9.596	9.309	287	2,99	9.727	9.309	418	4,30
4	Salam	13.662	12.755	907	6,64	13.879	12.755	1.124	8,10
5	Srumbung	13.290	13.098	192	1,44	14.476	13.098	1.378	9,52
6	Dukun	13.542	13.790	-248	-1,83	14.014	13.790	224	1,60
7	Muntilan	22.036	22.576	-540	-2,45	22.567	22.576	(9)	-0,04
8	Mungkid	20.570	18.374	2.196	10,68	20.925	19.010	1.915	9,15
9	Sawangan	16.708	15.671	1.037	6,21	16.934	15.671	1.263	7,46
10	Candimulyo	13.324	12.954	370	2,78	13.540	12.954	586	4,33
11	Mertoyudan	31.796	27.557	4.239	13,33	32.488	27.557	4.931	15,18
12	Tempuran	12.989	12.901	88	0,68	13.403	12.901	502	3,75
13	Kajoran	15.143	15.432	-289	-1,91	15.633	15.432	201	1,29
14	Kaliangkrik	14.707	14.075	632	4,30	15.123	14.075	1.048	6,93
15	Bandongan	15.681	15.532	149	0,95	15.990	15.532	458	2,86
16	Windusari	12.619	13.219	-600	-4,75	13.082	13.219	(137)	-1,05
17	Secang	21.415	21.488	-73	-0,34	22.302	21.488	814	3,65
18	Tegalrejo	13.142	13.026	116	0,88	13.675	13.026	649	4,75
19	Pakis	14.012	13.910	102	0,73	15.406	13.910	1.496	9,71
20	Grabag	23.357	23.324	33	0,14	24.290	23.324	966	3,98
21	Ngablak	11.566	11.647	-81	-0,70	11.963	11.647	316	2,64
Jumlah		347.126	336.610	10.516	3,03	358.573	337.246	21.327	5,95

)* : Data sementara, 2018

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Menyesuaikan ketersediaan data kriteria rumah layak huni, dapat digunakan kriteria kesehatan, sehingga untuk memberikan gambaran umum kinerja pelayanan perumahan ini akan disajikan perkembangan rumah sehat.

Rumah dapat dikatakan sehat apabila bahan bangunan lantai, dinding, atap, genteng, ventilasi, cahaya, luas bangunan rumah, dan fasilitas-fasilitas lain memenuhi persyaratan kesehatan. Secara umum rumah dikatakan sehat apabila telah memenuhi kriteria tertentu antara lain bebas jentik nyamuk *aedes aegypti* yang merupakan pembawa penyakit demam berdarah. Nyamuk *aedes aegypti* berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti bak mandi/wc, tempat minuman burung, air tendon, air tempayan/gentong, kaleng bekas, dan sebagainya (*Profil Kesehatan Kabupaten Magelang, 2016*). Data Perkembangan Jumlah Rumah Sehat sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.61.
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Rumah		
		Jumlah yang Ada	Jumlah Yang Sehat	% Rumah Sehat
1	2013	294.013	168.614	66,30
2	2014	300.395	159.688	65,50
3	2015	301.657	171.361	56,81
4	2016	301.702	171.433	56,82
5	2017	323.290	220.931	68.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Salah satu cara yang dibutuhkan dalam keberhasilan penegakan perda adalah tersedianya jumlah satuan polisi pamong praja yang memadai. Jumlah polisi pamong praja pada Tahun 2015 sebanyak 53 orang, Tahun 2016 sebanyak 52 orang dan Tahun 2016 menjadi 50. Dengan jumlah penduduk 1.268.396 orang pada Tahun 2017, maka rasio jumlah polisi pamong praja pada Tahun 2017 sebesar 0,39. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Polisi Pamong Praja	55	55	53	52	50
Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
Rasio Jumlah Polisi Pamong per 10.000 penduduk	0,45	0,45	0,43	0,41	0,39

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang 2018

Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Tabel 2.63.
Cakupan Patroli Petugas Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3	9	9	300*	305	449

*Patroli gabungan dengan TNI dan Polri
Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Dari Hasil pemantauan dan penertiban dapat diketahui jumlah pelanggaran perda/K3.

Pada Tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan) adalah 80,45%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	152	200	3.141	216	251
2	Jumlah Pelanggaran K3	189	200	3.141	216	312
3	% penyelesaian pelanggaran K3	80,42	100	100	100	80,45

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2018

Anggota Linmas di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 11.579 orang. Dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 90 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Rasio Jumlah Tenaga Linmas per 10.000 Orang Penduduk Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	11.475	11.475	11.461	11.464	11.579
2	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	93,93	93,01	92,02	91,19	91,28

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2018

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan linmas dilakukan setiap tahun melalui berbagai upaya salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana. Sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Semakin besar persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk, maka semakin besar ketersediaan petugas perlindungan masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.66.
Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas

No.	Uraian	Jumlah Kejadian (kasus)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Penganiayaan berat	17	11	23	7	15
2	Bencana Alam	21	12	12	26	352
3	Curanmor	33	8	26	41	38
4	Curat/Curas	77	41	89	34	68
5	Judi	15	10	25	67	24
6	Kebakaran Hutan	N/A	0	8	0	0
7	Kebakaran Rumah	64	31	10	2	55
8	Keracunan	N/A	0	0	0	0
9	MD. Bunuh Diri	4	11	11	0	7
10	MD. Di Kolam / Sumur	N/A	0	10	0	0
11	MD. Di Sungai	N/A	0	0	0	0
12	MD. Keracunan	N/A	0	0	1	0
13	MD. Tanah Longsor	N/A	0	0	0	0
14	MD. Terkena Sengatan Listrik	N/A	0	0	0	0
15	MD. Tertimpa Pohon	N/A	0	0	0	0
16	Narkotika	32	16	23	27	25
17	Pembunuhan	8	3	6	0	2
18	Pencurian Hewan	N/A	0	0	0	0
19	Pencurian Kawat Listrik	N/A	0	0	0	0
20	Pencurian Lain-Lain	N/A	15	0	0	36
21	Penemuan Mayat	7	11	5	0	7
22	Pengrusakan Rumah	N/A	1	0	0	2
23	Perkosaan	13	3	3	0	1
24	Rumah Roboh	N/A	0	0	0	0
25	Unjuk Rasa	N/A	0	0	0	13
26	Uang palsu	64	2	0	1	0
	Jumlah	355	175	254	212	645

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah gangguan Kamtibmas di Kabupaten Magelang secara umum bersifat fluktuatif pada periode Tahun 2012-2016, dan dari Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan (254 gangguan turun menjadi 212 gangguan). Fluktuasi ini disebabkan karena kamtibmas dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu sosial budaya, ekonomi dan politik.

Pelayanan publik lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Magelang. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang. maka persentase

jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0.006 per seribu penduduk sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5	5	5	7	8
2.	Jumlah Mobil Tangki Air	0	0	2	2	2
3.	Jumlah Mobil Rescue	0	0	1	1	3
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	3	4	4	5

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang 2018

Sepanjang Tahun 2017 tercatat telah terjadi 55 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 55 kejadian. Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran 72 kejadian tetapi jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 54 kejadian sebagaimana tabel di bawah. Hanya 75% kejadian kebakaran yang dapat ditangani kurang dari 15 menit. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi kejadian kebakaran yang jauh dari jangkauan WMK (wilayah Manajemen Kebakaran). Adapun di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 telah memiliki 5 WMK yang berlokasi di Kecamatan Grabag, Bandongan, Muntilan, Salaman dan Tegalrejo. Guna memperluas cakupan pelayanan dan memenuhi waktu tanggap ≤ 15 menit, Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan akan membangun 12 WMK yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68.
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah
Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	5	23	75	54	55
2.	Jumlah Kejadian	29	46	94	72	55

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.6. SOSIAL

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target

pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data historis kinerja makro urusan sosial disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.69.
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	33	39	39	39	39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	50	890	3.080	40.016	38.001
PMKS yang tertangani (orang)	45	890	3.290	40.253	38.001

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.6.1. Sarana sosial

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Namun hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki sarana sosial. Satu-satunya lembaga sosial milik pemerintah adalah Panti Sosial Mardi Putra ANTASENA yang berada di bawah Kementerian Sosial.

2.1.4.1.6.2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2016 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 50 orang menjadi 40.016 di Tahun 2016 dan 38.001 orang di Tahun 2017.

2.1.4.1.6.3. PMKS yang Tertangani

Penanganan PMKS kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lanjut usia terlantar (orang)	3.731	4.592	4.592	4.500	4.500
Anak terlantar (anak)	1.263	2.313	2.313	1.919	2.092
Penyandang cacat (orang)	4.283	4.287	7.556	7.879	7.879
Tuna susila (orang)	15	40	20	11	11
Gelandangan dan pengemis (orang)	133	101	23	103	103
Bekas narapidana (orang)	294	228	228	216	216

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1.4.2.1. KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan. Indikator kinerja makro urusan ketenagakerjaan ditunjukkan dari angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah kasus dan status penyelesaian hubungan industrial.

2.1.4.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang pada Tahun 2013–2017 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Penduduk usia kerja (orang)	TPAK (%)
1.	2013	660.111	883.697	74,70
2.	2014	666.331	889.123	74,94
3.	2015	672.063	894.416	75,14
4.	2016	677.909	899.809	75,34
5.	2017	683.144	905.346	75,46

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 angkanya fluktuatif. Hal ini disebabkan angkatan kerja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja kurang terserap di pasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	TPT (%)
1.	2013	30.252	660.111	4,58
2.	2014	27.067	666.331	4,06
3.	2015	25.855	672.063	3,85
4.	2016	23.837	677.909	3,52
5.	2017	21.942	683.144	3,21

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Gambaran pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 tercatat sebanyak 634 orang dari 3.179 pencari kerja yang terdaftar atau sebesar 19,94%. Pada Tahun 2016 sebanyak 1.442 orang

pencari kerja ditempatkan dari 3.573 pencari kerja yang terdaftar (40,36%) dan pada Tahun 2017 prosentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 43,31.

Data perkembangan pencari kerja yang terdaftar meningkat. Pencari kerja yang ditempatkan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.73.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013–2017

No	Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar (orang)	Pencari Kerja yang Ditempatkan (orang)	Persentase
1.	2013	17.272	1.252	7,25
2.	2014	4.141	672	16,23
3.	2015	3.179	634	19,94
4.	2016	3.573	1.442	40,36
5.	2017	4.038	1.749	43,31

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.2.1.4. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibandingkan KHL di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. sehingga setara dengan KHL, yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mencapai kebutuhan hidup layak. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Rasio Rata-Rata UMK dibanding KHL
Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

No	Tahun	UMK (Rp/bln/org)	KHL (Rp/bln/org)	Rasio (%)
1.	2013	942.000	942.856	99,91
2.	2014	1.152.000	1.152.000	100,00
3.	2015	1.255.000	1.254.849	100,00
4.	2016	1.570.000	1.254.849	NA
5.	2017	1.742.000	1.254.849	NA

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015, sesuai hasil survey, KHL Kabupaten Magelang Rp.1.254.849,. Menurut Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 mengamanatkan penentuan UMK berdasarkan hasil survey KHL diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang mengamanatkan UMK ditentukan berdasarkan inflasi, dan berlaku dalam kurun waktu 5 tahun. Survey KHL Kabupaten Magelang akan dilaksanakan lagi pada Tahun 2018.

2.1.4.2.1.5. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) selama periode Tahun 2013–2014 mula-mula mengalami penurunan dan Tahun 2014–2015 mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja non formal. Namun pada Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun

2015. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2013–2017

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Berusaha Sendiri (orang)	Kesempatan Kerja (orang)
1.	2013	14,06	96.900	689.192
2.	2014	12,90	82.492	639.267
3.	2015	12,77	82.536	646.208
4.	2016	12,65	82.753	654.072
5.	2017	12,53	82.831	661.202

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.6. Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) yaitu sengketa jumlah pekerja dengan pengusaha dibagi jumlah perusahaan selama periode Tahun 2013–2017 menunjukkan jumlah yang fluktuatif, tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 11 kasus dan terendah pada Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus. Namun semua kasus tersebut dapat terselesaikan 100%. Data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.76.

Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kasus	Status
1.	2013	390	3	100% (terselesaikan)
2.	2014	407	6	100% (terselesaikan)
3.	2015	341	2	100% (terselesaikan)
4.	2016	372	11	100% (terselesaikan)
5.	2017	372	5	100% (terselesaikan)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.7. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode Tahun 2014–2016 mengalami penurunan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (buah)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	2013	390	24.141
2.	2014	404	24.131
3.	2015	341	11.801
4.	2016	372	13.143
5.	2017	372	13.143

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Pada Tahun 2017, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.304 jika dibandingkan dengan jumlah PNS di Kabupaten Magelang persentasenya sebesar 57,48%. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentasi perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,29 persen; pada eselon III sebesar 20 persen; dan pada eselon IV sebesar 34 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Tahun 2016, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.415 orang. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentase perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,24 persen; pada eselon III sebesar 37 persen; dan pada eselon IV sebesar 22,29 persen. Jika diperhitungkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan secara keseluruhan maka Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2016 hanya sebesar 1,88 persen. menurun jika dibandingkan dengan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2015 yang mencapai 2,14 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya PNS yang pensiun, dan kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			2017
		2014	2015	2016	
1	Jabatan eselon II				
1.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	5	5	5
1.2	Jumlah jabatan eselon II	29	29	29	29
1.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon II	10,34	17,29	17,29	17,29
2	Jabatan eselon III				
2.1	Jumlah perempuan yang menempati	28	32	30	37

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
	jabatan eselon III				
2.2	Jumlah jabatan eselon III	160	160	160	166
2.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon III	17,50	20,00	18,75	22,29
3	Jabatan eselon IV				
3.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	234	229	218	231
3.2	Jumlah jabatan eselon IV	648	648	648	579
3.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon IV	26,11	35,39	33,64	38,89
4	Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	5.877	5.926	5.415	5.304
4.1	Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	10.605	10.772	9.629	9.228
4.2	Persentase perempuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	55,42	55,01	56,24	57,48
5	Jumlah Pekerja Perempuan	275.073	276.997	279.504	281.958
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten (%) (4/5)*100	2,14	2,14	1,94	1,88

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Dinsos PPKB PPA Kabupaten Magelang, 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan mulai Tahun 2014. Peningkatan terbesar pada Tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 62,47% menjadi 62,73%. Walaupun secara umum peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan relatif kecil, namun jumlah angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup besar. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	273.886	275.073	276.997	279.504	281.958
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan	440.727	441.508	443.442	445.599	448.487
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	62.14	62.30	62.47	62,73	62,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
KDRT di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga	326.748	331.578	334.590	390.618	404.777
2	Jumlah KDRT	52	33	36	37	70
3	Rasio KDRT (%) (2/1)*100	0,016	0,001	0,011	0,009	0,017

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 36 kasus pada Tahun 2015, 37 kasus pada Tahun 2016 dan 70 kasus pada Tahun 2017. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya. Jenis kasus KDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian maka wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. minimal layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: pengaduan, medis, rumah aman, pendampingan psikososial, rehabilitasi sosial (pelatihan ketrampilan dan bimbingan rohani), pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, berupa konsultasi serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani,

pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, *shelter* (Rumah Aman). Akan tetapi shelter yang ada masih menggunakan shelter milik Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kabupaten Magelang sampai saat ini belum memiliki shelter sendiri.

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya. Bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang).

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan sebanyak 99 kasus pada Tahun 2015, 113 kasus pada Tahun 2016 dan 87 kasus pada Tahun 2017. Prosentase penyelesaian pengaduan, dari tahun ke tahun mencapai 100% terkecuali di Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81.
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	120	82	99	113	116
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	120	82	99	113	87
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%) $(2/1)*100$	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional, Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya pada Tahun 2015. Prestasi ini merupakan peningkatan dari pencapaian 2012 yang meraih predikat Pratama.

Data historis kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.82.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,44	2,44	2,14	1,94	1,88
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	33,6	41,28	33,96	34,79	31,14
Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%)	12	14	14	14	8
Indeks Pembangunan Perempuan (IPG)	92,20	92,79	92,91	92,91*	92,91*
Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	58,77	65,54	68,53	68,53*	68,53*
Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak)	2.295	1.166	1.167	1.130	1.130
Jumlah Anak Terlantar (anak)	1.263	2.319	2.309	1.923	2.092
Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak)	194	99	90	3	9
Jumlah Anak PMKS (anak)	3.776	2.313	2.313	3.243	3.258
Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak)	45	30	54	5	46
Rasio KDRT	0,03	0,01	0,01	0,009	0,017
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi pegawai antar daerah. Peran perempuan di lembaga swasta cenderung turun dari Tahun 2013 s/d 2015 namun ada sedikit kenaikan pada Tahun 2016. Keterlibatan perempuan di legislatif menunjukkan angka yang tetap dari tahun ke tahun ini disebabkan selama periode waktu tersebut masa bakti anggota Dewan yang perempuan tidak ada pergantian antar waktu (PAW). Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini disebabkan adanya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, dimana sebagian besar perempuan di Kabupaten Magelang adalah bekerja di sektor informal sebagai petani yang tidak terdata secara jelas.

Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang tinggi ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki. Budaya *assertive* pada anak rendah, dan kebijakan perlindungan anak masih bersifat sektoral. Media hiburan yang tidak mendidik juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh disamping kurangnya promosi kebijakan dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kerentanan anak.

Data penyandang masalah sosial anak di Kabupaten Magelang masih tinggi namun dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang turun. Tingginya jumlah anak PMKS ini antara lain disebabkan belum optimalnya penanganan anak PMKS karena beberapa masalah diantaranya belum adanya petugas/pekerja sosial yang akan mendampingi pola penanganan berbasis keluarga. Adapun penurunan jumlah anak PMKS dikarenakan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Magelang terhadap anak PMKS. Salah satu pola penanganan PMKS adalah dengan berbasis panti. Namun ada permasalahan di Kabupaten Magelang dalam penanganan PMKS ini, yaitu pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai panti/LKSA.

2.1.4.2.3. KETAHANAN PANGAN

Aspek pelayanan umum pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di masyarakat antara lain: jumlah produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, telur dan susu. Produksi pangan di Kabupaten Magelang bukan hanya mendukung ketersediaan pangan di dalam kabupaten tetapi juga mendukung ketersediaan pangan provinsi dan nasional.

Perwujudan swasembada pangan beras, gula dan daging dilakukan melalui berbagai strategi utama. Penerapan Sapta Usaha Tani secara konsisten dengan didukung modernisasi pertanian diharapkan menghasilkan capaian produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi komoditas tebu dilakukan melalui ekstensifikasi, pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB), dan peningkatan akses alsinbun bagi pembudidaya tebu. Dalam rangka mendukung program swasembada daging dilakukan peningkatan jumlah populasi ternak sapi potong dengan memacu produksi dan produktivitas ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan bibit ternak yang berkualitas. Ketersediaan pangan hasil pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.
Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2013– 2017 (Ton)

Jenis Pangan Strategis	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	354.966	345.883	354.296	422.153	287.170
Jagung	74.187	62.889	63.531	71.896	49.024
Kedelai	- 3.465	0	0	0	0
Bawang merah	103,1	180,9	217,9	433,8	459
Cabe merah	23.909	25.237	23.132	26.061	21.147
Daging sapi	1.653,55	11.076	14.264	3.391	13.679
Daging ayam	10.848.05	25.657.16	12.093	11.083	14.505
Telur	13.225.84	16.455.83	11.692	15.486	15.930
Gula pasir	-7.0.04.2	11.000.	11.500	11.975	3.532

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- 2) Distribusi dan Akses Pangan;
- 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Penyusunan target pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 dilakukan untuk dapat menjadi tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2015 dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017

SPM	Realisasi Pencapaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan energi dan protein per kapita**					
- Energi (Kkal)	1.841.7	1.936.4	2.876	2.683	2.832,92
- Protein (Gram)	49.5	56.0	73.7	76,61	72,17
Penguatan cadangan pangan** (%)	58	60	67	75,10	76,21
Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah** (%)	53.33	55.29	50.14	91,67	92,58
Stabilitas harga dan pasokan pangan** (%)	70	76.6	99	93,33	93,45
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	83.70	92.3	85.7	87,2	87,10
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan** (%)	NA	100	100	91,66	92,47
Penanganan daerah rawan pangan** (%)	40.24	81.13	87.5	69,64	70,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.4. PERHUBUNGAN

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan pada pelayanan umum urusan perhubungan yaitu terjadinya fenomena penurunan *load factor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.

Selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2011-2035, dalam penyelenggaraan layanan sektor transportasi, aspek keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu mendapat perhatian utama tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dilakukan upaya-upaya melengkapi prasarana jalan dengan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta pagar pengaman jalan (*guard rail*) disamping meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu untuk mendukung aspek keselamatan pula. Pada tempat-tempat berkumpulnya angkutan umum pedesaan, diperlukan pembangunan terminal *origin destination* (OD).

Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain dapat dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan pagar pengaman jalan, jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan perhubungan selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	61,53	64,80	32,84	61,24	106,38
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	28,75	28,22	20,51	78,39	78,39

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	6	7	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	93,69	96,01	97,50	97,32	98,39

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas selama tiga tahun (2013-2017) mengalami kenaikan, namun turun pada Tahun 2015 dan mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2016. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini adalah dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Magelang, agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal.

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka persentase uji kendaraan bermotor cenderung naik selama lima tahun.

2.1.4.2.5. LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase luas pemukiman yang tertata, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86.
Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan sampah (%)	18	21,1	23,81	25,62	28,14
Persentase penduduk berakses air minum (%)	66,12	84,79	77,87	80,13	83,69
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,94	0,98	0,97	0,98	1,04
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%)	100	100	100	100	100
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	0.20	20.57	40	58,03	82,81
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	100	166.67	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Pelayanan persampahan baru mampu menjangkau wilayah di 10 (sepuluh) ibu kota kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Magelang. Target selama kurun waktu sampai dengan 2019 seluas 25.176.477 ha (lahan untuk produksi biomassa yang memiliki potensi kerusakan tanah sangat tinggi (PR V) dan potensi kerusakan tanah tinggi (PR IV). sampai dengan Tahun 2016 telah ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa seluas 14.651.919 ha dari target pada PR V dan PV IV seluas 25.246.399 ha atau 58%.

Sementara itu dari sisi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah tercapai 100% pada Tahun 2013 dan tetap menjadi 100% pada Tahun 2017. Begitu juga dengan persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan meningkat, yaitu 0,20 pada Tahun 2013 menjadi 82,81 pada Tahun 2017. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada Tahun 2012 mencapai 100% dan stabil 100% pada Tahun 2017.

2.1.4.2.6. PERTANAHAN

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Adapun jumlah tanah bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87.
Jumlah Tanah Bersertifikat Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Tanah Bersertifikat				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hak Milik	352.365	367.807	375.586	380.322	14.141.503
Hak Guna Bangunan	4.925	5.566	6.438	7.829	276.986
Hak Guna Usaha	1	31	31	31	1
Hak Pakai	1.689	1.758	1.861	1.934	475.849
Hak Pengelola	9	9	9	10	0
Jumlah	358.989	375.171	383.925	390.126	14.617.353

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2018

Sementara itu jumlah penerbitan sertifikat di Kabupaten Magelang dilihat pada Tabel 2.67 berikut

Tabel 2.88.
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hak Milik	17.401	7.727	7.779	4.736	22.430
Hak Guna Bangunan	279	827	872	1.391	494
Hak Guna Usaha	22	1	-	-	1
Hak Pakai	12	58	103	73	144
Hak Pengelola	-	-	-	1	0
Jumlah	17.714	8.634	8.754	6.201	23.069

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator penyelesaian izin lokasi. Dari data historis kinerja makro urusan pertanahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.89.
Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				2017
	2013	2014	2015	2016	
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	33,55	51,38	51,80	52,10	53,41
Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	100	100	100
Penyelesaian izin lokasi (%)	80	90,57	122,73	N/A	N/A

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2017

2.1.4.2.7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk. Data historis indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.90.
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	86,93	93,91	88,62	94,90	96,62
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	71,5	91,40	61	87,43	98,26
Rasio pasangan berakte nikah	1,62	62,17	36,76	38,75	40,12

*Angka absolut

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang, 2018

Pasangan yang mencatatkan pernikahannya di catatan sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, yang kemudian diterbitkan Akta nikah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Sedangkan pasangan yang beragama islam, memcatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diterbitkan surat nikah.

2.1.4.2.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Magelang telah mampu memberikan

kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB baik sebagai akseptor KB maupun Peserta Program KB aktif. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91.
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	222.953	219.756	222.953	225.057	227.752
2	Jumlah Akseptor KB	173.749	169.848	173.749	179.528	181.542
3	Persentase Akseptor KB (%)	77,99	77,29	77,93	79,77	79,71

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, rasio *Drop out* KB (DO KB), rasio *Total Fertility Rate* (TFR) dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Tabel 2.92.
Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,6	1,73	1,31	1,27	1,13
Rasio akseptor KB	75,2	77,29	77,93	79,77	79,71
Rasio <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,35	2,35	2,51	2,51	2,31
Rasio <i>Drop Out</i> (DO) KB	17,85	7,18	5,14	5,97	7,91
Keluarga Pra Sejahtera	93.256	92.743	91.815	91.106	90.389
Keluarga Sejahtera I (KK)	60.528	63.778	64.327	66.341	66.341
Keluarga Sejahtera II (KK)	71.100	72.274	75.526	77.877	80.136
Keluarga Sejahtera III (KK)	103.436	104.423	121.328	131.821	141.283
Keluarga Sejahtera III Plus (KK)	19.822	20.902	22.164	23.473	26.628

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.9. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jumlah koperasi sampai dengan Tahun 2016 adalah mencapai 587 atau meningkat 1,19 % dengan Tahun 2015 sebanyak 580 Unit. Perkembangan jumlah koperasi secara kuantitas diikuti dengan perbaikan kualitas pengelolaan oleh pengurus-pengurus koperasi yang ada. dimana hal tersebut tercermin dari jumlah koperasi aktif di Tahun 2016 yang mencapai 80,41%, sedangkan jumlah koperasi aktif pada Tahun 2015 hanya mencapai 82,75 %. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase koperasi aktif (%)	74,78	78,25	82,75	80,41	94
Jumlah koperasi (buah)	576	570	580	587	421
Jumlah koperasi aktif (buah)	445	446	480	472	394
Jumlah koperasi tidak aktif (buah)	131	24	100	115	27
Jumlah koperasi sehat/berkualitas (buah)	101	163	208	212	217
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM (buah)	106.136	106.403	106.650	106.200	106.200
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina (%)	0,415	0,396	1,2	1,6	20,56

Sumber:Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.412 UMKM yang terdiri dari 105.896 usaha mikro, 304 usaha kecil dan 212 usaha menengah. Sedangkan pada Tahun 2016, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.515 UMKM. Perkembangan jumlah UMKM dari Tahun 2013 s/d 2016 bersifat fluktuatif, dikarenakan adanya perubahan situasi perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya UMKM.

Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94.
Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Seluruh UMKM	106.403	106.650	106.412	106.515	106.515
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	106.190	106.437	106.200	106.200	108.275
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.8	99.8	99.8	99,71	101.,65

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.10. PENANAMAN MODAL

Penanaman modal atau investasi didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang maupun jasa yang berlanjut dengan suatu proses produksi. Dengan demikian investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi barang atau jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, serta menyebabkan adanya interaksi antara produsen (dalam hal ini investor) dan konsumen sehingga pada giliranya akan menciptakan kemajuan perekonomian.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portfolio investment*). Jumlah proyek PMDN dan PMA Kabupaten Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMDN	687	820	594	517	730
Jumlah Nilai PMA	-	1	-	1	-
Total	687	821	594	518	730

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.96.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA
Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persetujuan	687	821	594	518	730
1.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
1.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689
1.3	(USD Juta)					
2	Realisasi	687	821	594	518	730
2.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
2.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	368.528	374.769	476.281	490.490	1.030.689
2.3	(USD Juta)					

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Investasi/penanaman modal langsung berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Berikut ini rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung pada tabel berikut.

Tabel 2.97.
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	687	821	594	518	730
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13,19	1,20	7,50	14.64	11,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN Tahun 2016 terdapat 518 proyek PMA dan PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 7.583 orang, sehingga didapatkan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,64. Pada Tahun 2017, jumlah proyek PMA dan PMDM lebih besar dari Tahun 2016 yaitu sebesar 730, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap naik menjadi 8.297 tetapi rasio daya serap turun menjadi 11,37. Hal ini disebabkan sebagian PMA dan PMDN di Tahun 2016 bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kinerja makro urusan penanaman modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	429	821	594	518	730
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta US \$)	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	13,19	14,39	7,50	14.64	11,37
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	780	6.241	88.46	14.709	539.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Kebutuhan pelayanan perijinan menjadi hal yang penting pada era reformasi ini, utamanya dalam Penanaman modal. Orang menuntut perubahan dalam kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan memadai. Data pelayanan perijinan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99.
Data Pelayanan Perijinan

No.	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
1.	Pendaftaran Penananaman Modal	-	0	0	0	0
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	31	0	0	0	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	0	0	0	0
4.	Izin Prinsip Perub Pen Modal	-	0	0	0	0
5.	Izin Usaha Perdagangan	611	683	717	673	506
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	637	706	769	739	602
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	12	13	10	11	21
8.	Izin Perluasan Industri	-		0	0	0
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	32	30	34	31	13
10.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	28	157	0	56	82
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi	14	7	0	6	5
12.	Izin Usaha Angkutan Jalan	22	11	0	22	5
13.	Izin Usaha Jasa Pariwisata	68	43	0	63	65
14.	Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet	-		0	0	0
15.	Izin Usaha Peternakan	0		0	0	1
16.	Izin Usaha Perikanan	-		0	0	0
17.	Izin Usaha Pertambangan (rekomendasi)	-		0	14	0
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi S/d 2000 M3 per tahun	-		0	0	0
19.	Izin Usaha Perluasan	-		0	0	0
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan	-		0	0	0

No.	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
	Penanaman Modal (merger)					
21.	Izin Usaha Perubahan	-		0	0	0
22.	Izin Lokasi	5	93	31	3	3
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	-		14	8	8
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	-		67	39	65
25.	Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha	795	878	914	801	648
26.	Izin Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan Bangunan (IMB)	461	429	594	1.101	573
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan			0	-	0
28.	Izin Pemasangan Reklame	275	252	303	255	259
29.	Izin Trayek	0	0	0	-	0
30.	Dokumen AMDAL, UKL/UPL/ dan SPPL	0	0	0	-	0
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan	0	0	0	-	0
32.	Izin Riset/ Penelitian	349	394	381	459	476
33.	Izin Rumah Potong Hewan	0	0	0	-	0
34.	Izin Air Tanah	0	0	0	-	0
35.	Izin Jagal	0	0	0	-	0
36.	Izin Ketenagakerjaan	0	0	0	-	0
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	0	0	0	-	0
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah	0	0	0	0	0
39.	Izin Penggunaan Alat Berat	0	0	0	0	0
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	3.340	3.696	4.060	4.295	3.332

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018.

Prosentase pertambahan berijin sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 16,22%. Luas pertambahan sampai dengan Tahun 2016 sebesar 1.165 ha, yang diterbitkan dan difasilitasi pengajuan ijinnya ke tingkat provinsi Jawa tengah seluas 188.95 ha atau sejumlah 14 buah surat keterangan tata ruang

2.1.4.2.11. KEBUDAYAAN

Kinerja makro urusan kebudayaan antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda serta situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data historis kinerja makro urusan kebudayaan selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100.
Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	36	54	44	81	38
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	18	25	25	25	27
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	600	681	681	681	683

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kinerja makro urusan pemuda dan olahraga antara lain jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olah raga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olah raga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olah raga. Data historis kinerja makro Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.101.

Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi pemuda (buah)	21	14	24	26	26
Jumlah organisasi olah raga (buah)	28	28	34	22	29
Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)	17	17	17	17	17
Jumlah kegiatan olah raga (buah)	23	23	23	24	24
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0
Lapangan olah raga (buah)	253	253	253	253	253

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pemyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu dan PKK, serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).

Saat ini urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mendapatkan porsi yang lebih besar di Kabupaten Magelang. Dengan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) pada Tahun 2017, diharapkan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam pengembangan bidang ekonomi yang berbasis potensi lokal yang ada di desa, sehingga kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan Ekonomi Desa dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya mewujudkan dua misi Bupati Magelang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM terkait dengan pemberdayaan masyarakat; dan
2. Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.

Kedua misi tersebut merupakan bentuk upaya perwujudan visi “Sejahtera”. Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.102.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	60
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	87
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK)	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

Arah pengembangan ekonomi desa terkait dengan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal di Tahun 2018 agar bisa mencapai target RPJMD Kabupaten Magelang adalah :

1. Arah kebijakan yang didukung oleh berbagai sektor antara lain pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
2. Pendekatan *One Village One Product*; dan
3. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Usaha Ekonomi Desa serta pengembangan potensi wisata.

Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.103.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	87
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	54
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.14. STATISTIK

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Magelang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel 2.104.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.15. KEARSIPAN

Pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. hal tersebut antara lain dengan telah terbangunnya sistem jaringan kearsipan diseluruh SKPD, peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui bintek pengelola kearsipan tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa, peningkatan sarana kearsipan, pelestarian dan penyelamatan dokumen Arsip daerah, serta peningkatan kesadaran arsip masyarakat melalui pameran. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105.
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku	81.16	23.03	38.47	56.27	73,03
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	176	(232) 56	(439) 207	(170) 609	(182) 793
3	Pembenahan kearsipan desa (desa)	47	0	1	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4	Bintek SDM Kearsipan (Sekdes)	13	15	15	0	0
5	Penyelamatan dan pelestarian arsip (Berkas)	6.000	6.000	11.813	28.033	28.033

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang semakin ditingkatkan untuk mendukung semakin terbukanya jaringan komunikasi dan informasi masyarakat, melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan media tradisional (FK Metra), pemantauan isi siaran, pengembangan sumber daya informasi, fasilitasi peningkatan pelayanan informasi, penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui media massa serta penyelenggaraan dialog interaktif.

Selama Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pembangunan beberapa sistem informasi manajemen guna mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen tersebut antara lain:

- a. Sistem informasi pos dan telekomunikasi
- b. Portal informasi desa
- c. Portal SKPD.

Pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106.
Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi	32	47	47	48	123
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.25	0.25	0.25	0.15	0,07
3	Jumlah surat kabar nasional/local	9/3	9/3	9/3	10/3	10/3
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	7	7/1	8/1	8/0
5	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pameran/expo	8	8	1	1	3
7	Pengawasan isi siaran (Lembaga Penyiaran	4	4	4	4	1
8	Pelayanan Perijinan (Lembaga Penyiaran	1	1	1	1	0
9	Fasilitasi FK-METRA	1	4	12	12	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.17. PERPUSTAKAAN

Jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 senantiasa mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran dan minat baca masyarakat. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107.
Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013-2017

N o	Uraian	Tahun					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Pengunjung	40.259	36.595	33.726	55.854	39.967	
2.	Jumlah Eksemplar Koleksi	44.925	47.345	49.990	52.683	56.724	
3.	Jumlah Judul Koleksi	22.972	23.984	24.512	24.955	26.179	
4.	Jumlah Anggota	11.481	12.133	1.491	1.779	9.082	Sejak tahun 2015 keanggotaan non akumulatif dari tahun sebelumnya.
5.	Jumlah Peminjam	15.288	13.987	8713	9048	9.194	
6.	Jumlah Buku yang Dipinjam	18.762	18.186	11358	14483	10.888	
7.	Jumlah Perpustakaan	698	714	716	791	793	akumulatif
7.1	Perpustakaan Desa	149	164	164	166	166	
7.2	Perpustakaan Masjid	8	8	8	8	8	
7.3	Perpustakaan Kelompok Tani	1	1	1	1	1	
7.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	Wesleyan, STTP Tegalrejo
7.5	Perpustakaan Khusus	4	4	5	5	7	Pengadilan Agama Setwan Puskesmas Salam Puskesmas Grabag, Kejaksaan (Ds Daleman Kidul, Losari penambahan th 2017)
7.6	Perpustakaan Sekolah	529	529	529	603	603	
7.7	Perpustakaan Keliling	2	2	2	3	3	
7.8	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1	
7.9	Perpustakaan Cabang	2	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.1.4.3.1. PERTANIAN

2.1.4.3.1.1. Produksi Pertanian

Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Kabupaten Magelang untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada Tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, pisang, durian, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2014. Adapun komoditas mangga, kentang mengalami penurunan, penurunan terbesar pada produksi mangga sebesar 50,7% dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Pada Tahun 2016 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, kentang, pisang, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2015. Adapun komoditas mangga dan durian mengalami penurunan. Penurunan produksi mangga dan durian dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya bunga dan buah muda yang rontok, selain itu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga menyebabkan penurunan produksi

Pada Tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, pisang, durian, mangga, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2014. Adapun komoditas cabe merah kentang mengalami penurunan.

Tabel 2.108.
Produksi Hortikultura Tahun 2013-2017 (Ton)

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mangga	1.098,5	541,3	1.504,6	345,0	342,1
2	Durian	1.520,1	2.335,2	5.139,6	2.251,4	1.891,4
3	Salak	33.897,7	41.756,7	60.021,6	67.643,2	73.092,6
4	Pisang	9.423,6	12.931,3	13.069,5	18.347,1	19.743,5
5	Cabai Merah	23.908,8	25.237,1	24.195,3	26.061,1	25.584,9
6	Bawang Merah	103,1	160,9	217,9	433,8	473,7
7	Kentang	5.204,6	4.355,2	2.889,1	4.885,3	4.121,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tahun 2014 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu Kakao sebesar 13%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tahun 2015 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013.

Tahun 2016 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu kakao. Penurunan produksi kakao sebesar 37,5% hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tabel 2.109.
Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelapa	7.483	7.958	8.192	10.354	9.973
2	Kakao	80	74	80	30	142
3	Kopi	889	1.096	965	1.381	898
4	Nilam	2.309	3.284	4.298	1.277	3.417

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2017 jumlah populasi ternak sapi potong: 78.286; sapi perah: 2.440 dan kambing: 87.750. Pada Tahun 2014 Populasi sapi potong meningkat dari 78.153 ekor menjadi 78.325 ekor pada Tahun 2015 atau naik 0,22 %. Populasi sapi potong pada Tahun 2016 menjadi 78.246 ekor atau turun 0,10% dibanding Tahun 2015.

Sedangkan populasi sapi perah meningkat dari 2.440 ekor pada Tahun 2013 menjadi 2.451 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,45%. Populasi sapi perah menjadi 2.528 ekor pada Tahun 2015 atau naik 3,05 %. Pada Tahun 2016 populasi sapi perah naik menjadi 2.561 (1,31%) dibanding Tahun 2015

Populasi kambing meningkat dari 86.963 ekor pada Tahun 2013 menjadi 87.397 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,5 %. Tahun 2015 Populasi kambing menjadi 87.671 ekor atau naik 0,31% dan pada Tahun 2016 menjadi 87.701 atau naik 0,03% .

Tabel 2.110.
Populasi Ternak Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ekor)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi potong	77.764	78.153	78.325	78.246	78.286
2	Sapi Perah	2.440	2.451	2.528	2.561	2.440
3	Kambing	86.963	87.397	87.671	87.701	87.750
4	Unggas	4.556.040	4.633.165	4.608.910	4.638.777	4.606.238

Sumber: Dinas Peterikan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.3.1.2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Kabupaten Magelang pada kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2014 relatif stabil. Kontribusi sub sektor tanaman pangan menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi. Namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan tetap meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bukan berarti kurang berhasilnya pembangunan sektor pertanian karena perlu dilihat juga nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,277,173.90		4,663,034.20		4,905,199.81		5,102,388.84	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,983,610.70	93.14%	4,343,228.38	93.14%	4,548,877.77	92.74%	4,731,955.41	92.74%
	a. Tanaman Pangan	1,439,822.64	36.14%	1,491,797.91	34.35%	1,286,051.86	28.27%	1,337,811.29	28.27%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	517,467.81	12.99%	544,163.78	12.53%	615,179.56	13.52%	639,938.55	13.52%
	c. Perkebunan Semusim	53,566.48	1.34%	56,968.01	1.31%	65,134.40	1.43%	67,755.84	1.43%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	984,393.73	24.71%	1,121,029.30	25.81%	1,379,505.85	30.33%	1,435,026.50	30.33%
	e. Perkebunan Tahunan	169,199.52	4.25%	177,403.72	4.08%	211,420.28	4.65%	219,929.27	4.65%
	f. Peternakan	731,149.45	18.35%	849,857.40	19.57%	888,278.47	19.53%	924,028.81	19.53%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	88,011.06	2.21%	102,008.25	2.35%	103,307.35	2.27%	107,465.14	2.27%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	182,274.13	4.26%	194,007.49	4.16%	217,976.37	4.44%	226,546.06	4.44%
3	Perikanan	111,289.07	2.60%	125,798.33	2.70%	138,345.66	2.82%	143,887.37	2.82%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018.

Tabel 2.112.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,827,627.05		3852303.183		3,757,550.06		3,937,767.02	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,557,567.65	92.94%	3578718.584	92.90%	3,486,251.74	92.78%	3,648,734.93	92.66%
	a. Tanaman Pangan	1,200,901.98	34.45%	1,175,055.37	33.71%	999,863.89	28.68%	862,925.81	23.65%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	475,089.66	13.63%	478,115.50	13.71%	475,880.00	13.65%	495,863.08	13.59%
	c. Perkebunan Semusim	51,624.78	1.48%	53,459.61	1.53%	55,659.92	1.60%	60,569.00	1.66%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	934,488.74	26.80%	920,576.18	26.41%	958,311.56	27.49%	1,042,443.57	28.57%
	e. Perkebunan Tahunan	151,246.94	4.34%	156,475.29	4.49%	163,899.95	4.70%	179,152.88	4.91%
	f. Peternakan	671,091.81	19.25%	713,226.44	20.46%	749,848.25	21.51%	823,154.60	22.56%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	73,123.74	2.10%	81,810.20	2.35%	82,788.16	2.37%	87,569.64	2.40%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	169,452.36	4.43%	166,000.65	4.31%	165,146.72	4.40%	176,411.96	4.48%
3	Perikanan	100,607.04	2.83%	107,583.95	3.01%	106,151.61	3.04%	121,283.22	3.08%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018. Diolah

2.1.4.3.2. PARIWISATA

2.1.4.3.2.1. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung

Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata sebanyak 131 obyek wisata yang berupa wisata alam 19 obyek, wisata budaya 25 obyek, wisata

buatan 32 obyek, desa wisata 50 desa, lokasi kerajinan 6 lokasi, museum 6 unit dan 3 obyek wisata minat khusus. Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah merintis kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik desa seperti Candi Selogriyo, Candi Ngawen dan lain-lain. Data kunjungan wisata untuk setiap destinasi wisata secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.113.
Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata (orang)	3.909.593	3.921.463	4.401.733	5.166.561	5.402.084
Wisatawan Manca Negara (orang)	303.036	301.909	253.358	413.306	337.515
Wisatawan Nusantara (orang)	3.606.557	3.619.554	4.148.375	4.753.255	5.064.569

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.114.
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Candi Borobudur	3.581.726	3.376.304	3.578.387	3.759.300	3.775.799
Candi Mendut dan Candi Pawon	84.022	78.141	60.051	75.168	76.918
PAH Candi Umbul	19.971	27.528	31.706	37.258	40.014
TR Mendut	61.876	68.858	75.216	91.385	94.682
Telaga Bleder	3.074	3.294	4.057	8.836	13.506
Ketep Pass	342.944	329.480	354.084	337.994	320.929
Sekar Langit	11.683	13.573	15.169	16.116	9.312
Seloprojo	2.549	2.874	3.891	5.475	2.848
Kedung Kayang	13.132	13.534	12.075	4.662	6.541
Curug Silawe	6.579	7.877	6.239	5.471	3.596
Candi Selogriyo	NA	NA	NA	NA	14.700
Punthuk Setumbu	NA	NA	NA	NA	122.879
Candi Ngawen	NA	NA	NA	NA	28.639
JUMLAH TOTAL					4.510.363

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.3.2.2. Hotel / Penginapan

Sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Magelang terdapat 5 hotel bintang, 31 hotel melati dan 245 *homestay*. Hotel dan *homestay* merupakan salah satu akomodasi pariwisata yang menjadi kebutuhan dasar bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Tingkat hunian hotel tercatat berkisar lebih dari 28,10% pada Tahun 2015.

Tahun 2016 jumlah hotel berbintang sama dengan tahun 2015 (5 hotel), jumlah hotel melati naik, dari 31 hotel pada Tahun 2015 menjadi 32 dan jumlah *homestay* turun dari 245 pada Tahun 2015 menjadi 243.

Tahun 2017 jumlah hotel berbintang naik dari 5 hotel Tahun 2016 menjadi 6 hotel, jumlah hotel melati naik, dari 32 hotel pada Tahun 2016 menjadi 50 dan jumlah *homestay* sama pada Tahun 2016 sejumlah 243.

Tabel 2.115.
Jumlah Hotel dan *Homestay*

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Hotel Bintang 5	1	2	1	1	1
2	Hotel Bintang 4	-	1	1	1	2
3	Hotel Bintang 3	3	2	3	3	3
4	Hotel Melati	29	31	31	32	50
5	<i>Homestay</i>	245	245	245	243	243

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.3.2.3. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 rata-rata lama menginap wisnus maupun wisman stagnan. Perkembanganya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.116.
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2013–2017 (hari)

No	Tahun	Wisman	Wisnu
1	2013	1,38	1,28
2	2014	1,26	1,35
3	2015	1,67	1,32
4	2016	1,15	1,02
5	2017	1,14	1,02

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Dalam perhitungan PDRB kontribusi pariwisata dihitung melalui 4 subsektor, yaitu: (1). Sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi pada sektor jasa-jasa, (2). Subsektor Hotel dan (3). subsektor Restoran/Rumah Makan pada sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran serta (4). Sub-sub sektor agen perjalanan pada sub-sektor Jasa penunjang angkutan pada sector perhubungan dan komunikasi.

- Kegiatan yang dicakup dalam sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi ini adalah jasa bioskop, panggung hiburan, studio radio swasta. taman hiburan, obyek wisata dan jasa hiburan lainnya;
- Sub sektor hotel ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya;
- Kegiatan sub sektor restoran Restoran/Rumah Makan mencakup usaha penyediaan makanan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan;
- Jasa penunjang angkutan, meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal, parkir, ekspedisi serta jasa penunjang lainnya. Data perkembangan Pembentukan PDRB dari Kegiatan Ekonomi Pariwisata disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.117.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHB)
Tahun 2013–2016

Uraian		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		774,872.17	3.939%	880,266.29	4.030%	999,331.85	4.122%	1.096.806,75	4,18%
1	Penyediaan Akomodasi	275,427.93	1.400%	316,912.52	1.451%	363,657.88	1.502%		
2	Penyediaan Makan Minum	499,444.24	2.539%	563,353.77	2.579%	635,189.09	2.620%		

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

Tabel 2.118.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHK)
Tahun 2013–2016

Uraian		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		663,721.12	3.89%	712,338.27	3.98%	768,184.23	4.07%	823.333,08	4,15%
1	Penyediaan Akomodasi	199,553.79	1.17%	215,324.02	1.20%	234,041.39	1.24%		
2	Penyediaan Makan Minum	464,167.33	2.72%	497,014.25	2.77%	534,142.84	2.83%		

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

2.1.4.3.3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat.

Pada Tahun 2015 jumlah produksi perikanan darat 8.307,80 ton. Luas kolam yang ada adalah 257,70 ha. Untuk perikanan perairan umum, produksi (rawa, danau, sungai, dan lain-lain) mencapai 229,79 ha. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan.

Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan mas, nila, tawes, lele, gurami, bawal, patin dan lainnya. Selain produksi benih ikan dan ikan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan koi, koko, komet, silkid serta pembesaran arwana *silver* maupun arwana *red*. Produksi benih terbesar adalah benih ikan nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di tingkat Jawa Tengah dan juga dikirim ke Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatra dan Kalimantan. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan, dan Sawangan.

Kinerja makro urusan kelautan dan perikanan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan (konsumsi, benih dan tangkap) dan konsumsi ikan.

Tabel 2.119.
Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi perikanan konsumsi (ton)	13.246	15.488,90	16.686,10	17.483,12	21.058,46
Produksi perikanan benih (x 1000 ekor)	1.014.518	1.202.663	1.269.407,80	1.419.973,14	1.717.550
Konsumsi ikan (kg/kap/th)	14,30	14,59	14,59	15,50	18,61
Produksi perikanan tangkap (ton)	208,25	272,70	285,34	282,98	275,90

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.120.
Produksi Benih Ikan Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ribuan Ekor)

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	305.737	387.179	407.411	496.096,50	560.922,20
Karper	104.009	116.554	149.680	151.383,67	156.237,50
Tawes	64.789	68.509	81.484	81.797,77	100.406,80
Bawal	88.765	146.410	162.914	166.443,83	205.753,70
Nila	439.529	467.786	442.835	498.755,82	676.018,10
Gurame	7.489	12.117	19.881	19.812,95	11.413,70
Lainnya	4.193	4.105	5.202	5.683,61	3.325,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.121.
Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ton)

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	4.093	4.321	4.870	5.250,93	6.954,33
Karper	1.642	2.043	1.966	2.025,08	2.119,11
Tawes	588	774	897	938,09	937,96
Bawal	2.368	2.967	3.323	3.478,87	3.944,03
Nila	3.962	4.293	4.464	4.811,36	5.777,76
Gurame	402	450	481	507,05	615,91
Lainnya	191	637	684	471,75	79,04

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.3.4. PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2015, kontribusinya mencapai 10,88%. Salah satu indikator perdagangan adalah nilai ekspor. Kegiatan ekspor di Kabupaten Magelang melibatkan relatif banyak komoditas antara lain kayu olahan, kulit samak, dan mebel. Kinerja makro urusan perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB naik sebanyak 2,56% menjadi 13,44. Kenaikan tersebut

disebabkan semakin kondusifnya iklim perdagangan di Kabupaten Magelang dan makin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Magelang. Kinerja makro urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.122.
Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,87	11,29	10,88	13,44	13,41
Ekspor Bersih Perdagangan (000 US \$)	76.505,81	102.000	93.076,81	101,83	88.500
Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0	2,26	2,50	4,84	20,56

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Kabupaten Magelang memiliki 81 pasar tradisional yang terdiri dari 21 pasar Pemerintah Kabupaten dan 60 pasar desa pada Tahun 2016. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jumlah pasar desa ini mengalami peningkatan pada Tahun 2013 terdapat 58 pasar, pada Tahun 2015 menjadi 60 pasar desa dan pada Tahun 2016 menjadi 61 pasar Desa. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.123.
Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PASAR TRADISIONAL	80	82	81	81	81
a.	Pasar Pemerintah Kabupaten	22	22	21	21	21
	- Pasar Umum	17	17	17	17	17
	- Pasar Hewan	2	2	2	2	2
	- Pasar Ikan	2	2	2	2	2
	- Pasar Kayu	1	1	0	0	0
b.	Pasar Desa	58	60	60	61	61
2	PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	42	52	1467	1467	1.467
a.	Minimarket	35	45	1460	1460	1.460
b.	<i>Supermarket/ Hypermarket/ Dept. Store/Perkulakan</i> (Grosir)	5	5	5	5	5
c.	Pusat Perbelanjaan/Mal	2	2	2	2	2

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Hampir setiap pasar tradisional memiliki kelemahan yang sama, diantaranya adalah tampilan pasar yang terlihat kumuh, kotor, becek (jika musim hujan), pembuangan sampah yang kurang terpelihara sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Selain itu pasar tradisional juga kurang lahan parkir, tata ruang tidak beraturan, sirkulasi udara yang buruk, jam operasional yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang masih rendah. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima

(PKL). Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar ataupun naik ke lantai dua untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.

Kelemahan pasar tradisional tersebut masih ditambah dengan maraknya pembangunan pasar modern seperti *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* telah menyudutkan pasar tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Salah satu perubahan perkembangan daerah *rural* (pedesaan) mejadi daerah *urban* (perkotaan) yaitu munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang konsumtif. Munculnya pasar modern memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik.

Untuk melindungi pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penataan dan pembinaan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan daerah ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.1.4.3.5. PERINDUSTRIAN

Kinerja makro urusan industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2.124.
Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)	18,71	18,77	18,80	18,94	19,38
Pertumbuhan Industri	6,9	6,03	7,8	3,7	2,88
Cakupan Bina Kelompok pengrajin	N/A	2,76	3,70	0,71	0,72

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2018

Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Kontribusinya terhadap pendapatan regional mengalami peningkatan pada periode Tahun 2012-2016. Pada Tahun 2012 sebesar 18,59 dan terus meningkat mencapai 18,94% pada Tahun 2016. Mesti kenaikan sektor industri terhadap PDRB tidak terlalu besar, namun hal ini menunjukkan indikasi bahwa sektor industri semakin berkembang di Kabupaten Magelang.

Data cakupan bina kelompok pengrajin pada Tahun 2012 dan 2013 belum tersedia karena indikator kinerja ini baru muncul pada Renstra SKPD

Tahun 2014-2019, sehingga pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 belum dilakukan perhitungan data.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajagsari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah. Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.1.4.3.6. KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam rangka menciptakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk. Migrasi penduduk dari Kabupaten Magelang ke pulau-pulau di luar Jawa yang kurang padat penduduknya tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja demi peningkatan taraf hidup.

Tabel 2.125.
Data Transmigrasi Tahun 2012–2017

Tahun	Tujuan	Lokasi	Keterangan
2012	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur	UPT Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas	Transmigrasi Umum: 25 KK (92 Jiwa)
	2. Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	UPT Permata Kecamatan Terentang	Transmigrasi Umum: 10 KK (37 Jiwa)
	3. Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	UPT Lengkong Yadom Kecamatan Ela Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (18 Jiwa)
2013	1. Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Telangsiong Kecamatan Paju Apat	Transmigrasi Umum: 10 KK (40 Jiwa)
	2. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	UPT Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (20 Jiwa)
	3. Kecamatan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	UPT Sei Mata Sp.4 Kecamatan Simpang Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (17 Jiwa)
2014	4. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Desa Umpanga Kec. Bungku Barat	2 KK (6 jiwa)
2015	1. Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	SP. Watu Ds. Watu Kec. Marioriwawo	3 KK (10 jiwa)
	2. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	SP. Umpaga Ds. Umpaga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali	2 KK (6 jiwa)
2016	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	UPT Sepunggur Kelurahan Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor	10 KK (40 jiwa)
	2. Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	UPT Bukit Merbau SP2 Desa Bukid Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding	5 KK (19 jiwa)
	3. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Kalbera Kecamatan Bungku	5 KK (19 jiwa)
2017	Kab. Morowali Prov. Sulteng	UPT Kabera Desa Bauhe Riki-riko Kec. Bungku Barat	3 KK (8 jiwa)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jenis transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan transmigrasi umum. Pada Tahun 2016 jumlah transmigran sebanyak 20 KK yang terdiri dari 58 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10 KK (40 jiwa), Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 5 KK (19 Jiwa) dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK (19 jiwa)

Kinerja makro urusan ketransmigrasian Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dibawah ini. Dilihat dari tabel tersebut ada peningkatan yang cukup banyak pada Tahun 2015 (5 KK) menjadi 20 KK pada Tahun 2016. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3 KK.

Tabel 2.126.
Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Transmigrasi umum	20	2	5	20	3

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.4. FOKUS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.1.4.4.1. PERENCANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127.
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada Tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 176 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.128.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	182	184	176	185
Jumlah Program RKPD	177	182	184	176	161
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	87,03

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 2018

2.1.4.4.2. KEUANGAN

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui SIM Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, konsisten, periodesitas, pengungkapan secara lengkap dan nilai kewajaran yang transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 27A/LHP/BPK/XVIII-SMG/05/2014. tanggal 5 Mei 2014 Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 257/XVIII-SMG/05/2015. tanggal 28 Mei 2015. Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap dan piutang PBB P2 masih proses verifikasi. Untuk Tahun 2016, hingga saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK.

2.1.5.1.20.8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.4.4.3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjurangan yang terdiri dari :

- Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
- Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi;
- Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian dan Pensiun.

Tabel 2.129.
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Golongan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	I	236	211	213	185	170
2	II	1.904	1.544	1.697	1.487	1.380
3	III	4.360	4.534	4.811	4.511	4.469
4	IV	4.505	4.313	4.051	3.446	3.209
Jumlah		11.677	11.005	10.605	9.629	9.229

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2018
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 673. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976 Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.130.
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017 (orang)

No	Pendidikan	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	250	128	297	163	313	199	281	181	291	192
3	S1 /D - IV	2.368	3.247	2.307	3.344	2.312	3.514	1.970	3.214	1.885	3.176
4	D – III	323	638	303	688	302	734	270	713	232	773
5	D – II	544	888	424	693	344	583	269	483	203	405
6	D – I	60	193	51	126	42	116	32	104	30	91
7	SMA	1.119	795	1.065	712	1.077	752	977	695	912	644
8	SMP	272	28	265	25	317	24	293	21	263	19
9	SD	150	2	138	2	139	4	122	4	108	4
Jumlah		6.182	5.086	5.919	4850	5753	4.846	4.214	5.415	3.924	5.304
		11.677		11.005		10.603		9.629		9.228	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2016 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 53,84%; kemudian lulusan SMA sebesar 17,36%. lulusan D-III sebesar 10,21%; lulusan D-II sebesar 7,81%; lulusan S2 sebesar 4,85%; lulusan SMP sebesar 3,26%; lulusan D-I sebesar 1,41%; serta lulusan SD sebesar 1,31%.

Tabel 2.131.
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2013– 2017 (Orang)

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Adum (Diklat Pim IV)	14	41	33	30	27
2	Spama (Diklat Pim III)	9	43	14	9	7
3	Spamen (Diklat Pim II)	2	3	3	6	-

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018.

Tabel 2.132.
Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Lokakarya,
Seminar Tahun 2013-2017 (Orang)

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengiriman peserta diklat teknis/ fungsional ke lembaga diklat	78	145	212	101	270
2	Pelatihan Operator Komputer bagi Aparatur oleh Kantor Diklat Naker Aparatur (BLK)	16	15	16	6	16
3	TF yang difasilitasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Magelang					
	- Diklat Teknis Kompetensi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Persiapan Penyusunan SPM	0	0	0	0	0
	- Pengelolaan keasipan bagi sekdes	15	0	0	0	0

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Diklat Pengelolaan Keuangan Desa		0	240	0	0
4	Penyelenggaraan oleh BKD					
	- Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	0	80	0	0	0
	- Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	0	50	0	0	0
	- Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa	219	45	0	0	
	- Bimtek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	116	0	0	0	0
	- Bimtek Penanganan Kasus Kepegawaian	200	0	0	0	0
	- Bimtek manajemen kepegawaian	0	45	0	0	30
	- Bimtek Fasilitator Pemerintahan Desa	0	0	42	0	0
	- Diklat Purna Tugas	0	0	30	0	0
	Diklat Penyusunan DUPAK	0	0	0	60	0
	Bimtek BLUD					60
	Bimtek Legal Drafting					60
	Jumlah	659	380	540	178	436

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015 terdapat 6 orang aparatur yang mendapatkan sanksi, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 8 orang aparatur yang mendapatkan sanksi dari tahun 2012 sampai 2016 aparatur yang dikenakan sanksi cenderung mengalami penurunan. Penurunan pada Tahun 2014 sangat signifikan dibanding Tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran aparatur untuk meningkatkan disiplin PNS. Secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.133.
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Teguran Lisan	0	1	1	3	0
2	Teguran Tertulis	0	2	0	5	0
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	6	6	0	0	3
4	Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling Lama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
5	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun (PP 30 Tahun 1980)	0	0	0	0	0
6	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling Lama 1 (satu) tahun	2	0	1	0	0
7	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	3	0	1	0	2
8	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0
9	Pembebasan dari jabatan	8	0	0	0	1
10	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	3	0	0	0	1

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
11	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	2	0	0	0	0
12	Pemberhentian tidak dengan hormat	0	0	0	0	0
13	Pemberhentian senentara (PP No. 04 Tahun 1966)	1	1	0	0	1
14	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS (karena sanksi) PP 11 Tahun 2001	0	0	0	0	0
15	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun	5	0	2	0	0
16	Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri / Pensiun dini /Mengundurkan diri	0	1	1	0	1
17	Pemberhentian dengan hormat karena menjadi anggota Parpol	0	0	0	0	0
18	Pencabutan pemberhentian sementara	0	0	0	0	0
19	Rehabilitas	0	1	0	0	0
	JUMLAH	30	12	6	8	9

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin, maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, serta pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner. Sanksi tegas tersebut merupakan langkah yang berimplikasi kepada seluruh pegawai, sedangkan dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, penerimaan tambahan penghasilan PNS diperhitungkan atas dasar kehadiran pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang No. 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2.1.4.5. FUNGSI LAIN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.1.4.5.1. PENGAWASAN

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang meliputi pemeriksaan internal secara berkala dan pemeriksaan khusus/kasus. Pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang setiap tahun diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang dengan jumlah obyek pemeriksaan sebanyak 216 obyek pemeriksaan/tahun. Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang juga melaksanakan pemeriksaan khusus/kasus.

Rekomendasi LHP dari Tahun 2012-2016 yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.134.

Rekomendasi LHP dari Tahun 2013 s/d 2017 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemeriksaan berdasarkan PKPT	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah LHP terbit	216 LHP	216 LHP	216 LHP	216 LHP	206 LHP
2	Pemeriksaan berdasarkan PKPT					
	a. Nilai Kerugian Negara/Daerah (Rp)	636.501.941,80	895.882.739,39	817.926.739,39	391.186.741,97	63.921.189,65
	b. Nilai Kerugian Negara/Daerah yang telah ditarik (Rp)	636.501.941,80	838.418.639,39	746.951.375,58	262.281.750,58	53.456.020,65
	c. Sisa yang belum ditarik/ disetor (Rp)	0	57.464.100,00	57.464.100,00	128.904.991,39	10.465.169,00
3	a. Nilai Kewajiban setor kepada Negara/Daerah (Rp)	340.885.191,50	478.926.062,35	448.445.311,60	697.278.563,33	626.909.361,47
	b. Nilai kerugian setor kepada negara/daerah yang telah setor	244.949.915,50	408.276.877,35	417.443.623,60	556.025.434,96	313.269.703,26
	c. Sisa yang belum setor	95.935,28	70.649.125,00	31.011.688,00	141.253.088,37	313.639.658,21

Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.5.2. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas). Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang keberadaannya, sehingga nantinya seluruh Orkemas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jadi tiap organisasi kemasyarakatan (orkemas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, Orkemas akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang.

Bagi Orkemas yang telah mendapat SKT mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan bagi Orkemas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 akan dibekukan SKT-nya.

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kab. Magelang juga telah melakukan pembinaan terhadap organisasi politik, Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan

dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Data historis kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama rentang waktu 5 tahun terakhir, antara Tahun 2013-2017 selengkapnya disajikan tabel berikut ini:

Tabel 2.135.
Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	12	12	5	9	12
Kegiatan pembinaan politik daerah	12	3	2	6	7

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tahun 2017 sebanyak 12 kegiatan pembinaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan setiap tahun. banyak LSM, Ormas dan OKP yang mendaftar untuk mendapatkan SK Terdaftar sebagai Ormas. Hal yang perlu untuk mendapatkan penekanan terhadap kedua indikator diatas adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap ormas yang telah dilakukan pembinaan.

Dari aspek politik dan demokrasi, kondisi politik di Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Tingkat persentase pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebesar 64,96%; serta Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2009 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 79,93% dan 79,50%. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebesar 71,15%. Sedangkan pada Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2014 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83% dan 81%. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan dari Tahun 2015 sebanyak 2 kegiatan dan Tahun 2016 sebanyak 6 kegiatan.

2.1.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

2.1.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin berpengaruh bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.136.
Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2013-2016

	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	15.043.207,89	16.562.970,15	18.373.763,09	20.157.675,80
2	Jumlah RT	336.432	341.780	347.127	365.671
3	Rasio (½)	44,71	48,46	52,93	55,13

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.2. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.137.
Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2013-2016

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT non pangan	45,56	46,54	40,00	46,44
2	Total Pengeluaran	76,43	76,52	66,05	70,99
3	Ratio (1/2)	59,61	60,80	60,00	65,41

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.138.
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2013

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Indeks yang diterima petani (It)	137.21	145.98	157.99
Indeks yang dibayar petani (Ib)	131.65	137.72	150.38
NTP	104.58	105.99	105.11

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data produktivitas per sektor disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.139.
 Angkatan Kerja Per Sektor Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian	4,92	5,02	5,14	5,26
Pertambangan & Penggalian	20,42	21,20	22,42	23,75
Industri Pengolahan	9,59	9,91	10,29	10,69
Listrik. Gas & Air bersih	156,72	148,95	149,05	142,70
Bangunan dan Konstruksi	9,44	9,87	10,31	10,94
Perdagangan. Hotel & Restoran	5,20	5,40	5,56	5,74
Pengangkutan & Komunikasi	13,67	14,33	15,06	15,86
Keuangan. Persewaan. & Jasa Perusahaan	16,47	16,81	16,99	17,22
Jasa-jasa	10,68	11,27	11,93	12,67
Jumlah	7,53	7,84	8,17	8,53

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.5.2.1. Aksesibilitas Daerah

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya yang terletak di antara 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu

Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.140.
Aksesibilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang melalui terminal per tahun (000 orang)	3.705	3.448	3.656	3.286	2.794
Jumlah bus AKAP (unit)	139	139	139	139	139
Jumlah angkutan pedesaan (unit)	841	862	862	862	860
Jumlah ijin trayek	1.023	1.088	1.129	1.143	1.089
Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)	7.607	8.052	8.438	8.751	8.794

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.2. Ketersediaan Air Bersih

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Akses air minum tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 80,88% dan di wilayah perdesaan mencapai 78,55%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan pada Tahun 2016 tercatat 76,20%. Sedangkan target sampai Tahun 2017 sebesar 76,40%.

Peningkatan cakupan air minum diwilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,83% dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebanyak 55.941 Sambungan Rumah (SR). Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.141.
Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	48.208
2014	49.662
2015	50.566
2016	53.693
2017	55.941

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Kualitas air selalu dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.

Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 16 (enam belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.142.
Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang

No	Nama Sumber/ Mata Air	Lokasi Sumber/Mata Air
1	Sijajurang & Silincat	Desa Bumirejo Kecamatan Kaliangkrik
2	Semaren	Desa Sawangan Kecamatan Sawangan
3	Citroso	Desa Citrosono Kecamatan Grabag
4	Tlogorejo	Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag
5	Blambangan	Desa Mungkid Kecamatan Mungkid
6	Karangampel	Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo
7	Banyutemumpang	Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan
8	Combrang	Desa Paremono Kecamatan Mungkid
9	Sidandang	Desa Tejosari Kecamatan Ngablak
10	Sidosari	Desa Sidosari Kecamatan Salaman
11	Sipragak	Desa Mangunrejo Kecamatan Salaman
12	Sigandulan	Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran
13	Kanoman	Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo
14	Nglimut/Rucah-Rucah	Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak
15	Lebak	Desa Lebak Kecamatan Grabag
16	Gending	Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
17	Sumur Bor Gento	Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK. Terdapat 112 desa Pamsimas sampai dengan Tahun 2016.

2.1.5.2.3. Fasilitas Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Magelang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri.

Tabel 2.143.
 Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai disalurkan
 Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Listrik (kWh)	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
2013	307.588	537.922.287	384.154.574.154
2014	322.121	560.728.978	441.718.987.596
2015	338.013	572.203.342	488.818.744.647
2016	337.587	602.144.192	499.001.173.690
2017	369.197	587.787.815	556.811.705.865

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Magelang adalah untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk keperluan sosial, untuk keperluan usaha, keperluan pemerintah dan keperluan industri.

2.1.5.2.4. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau *catering*. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.144.
 Jenis. Kelas dan Jumlah Restoran
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jml Usaha	Jml kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	2	765	2	1.050	3	1.050	3	1.050
2.	Usaha restoran golongan menengah	2	550	1	200	3	200	3	200
3.	Usaha restoran golongan terendah	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Usaha rumah makan kelas A	6	1.200	6	1.200	6	1.200	6	1.200
5.	Usaha rumah makan kelas B	33	2.130	33	2.130	3	2.130	3	2.130
6.	Usaha rumah makan kelas C	3	77	3	77	3	77	3	77
7.	Usaha rumah makan kelas D	35	2.200	35	2.200	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.5. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan

wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

- Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang. kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan, Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

- Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.145.
Jenis. Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Jenis Penginapan / Hotel	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	1	22	32	1	22	32	1	22	32	1	22	32
2.	Hotel Bintang 4	2	191	191	2	191	191	2	191	191	2	191	191
3.	Hotel Bintang 3	3	67	74	3	67	74	3	67	74	4	77	85
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	32	662	823	32	662	823	32	662	823	50	845	823
7.	Total Jumlah penginapan /Hotel	37	942	1120	37	942	1120	37	942	1120	57	1.135	1.178

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah.

2.1.5.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim

dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida untuk merumuskan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Magelang.

2.1.5.3.2. Angka kriminalitas

Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2014 terdiri dari 73 perkara, yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 27, perkara perdata 50, serta 525 perkara lalu-lintas. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2015 terdiri dari 243 perkara. Data kriminalitas selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.146.
Angka Kriminalitas Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus Narkoba	32	16	23	26	25
2	Jumlah kasus Pembunuhan	8	3	6	-	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	13	3	3	1	22
4	Jumlah kasus Penganiayaan	17	11	23	26	15
5	Jumlah kasus Pencurian	110	49	16	107	173
6	Jumlah kasus Penipuan	-	-	31	18	27
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	64	2	3	1	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	355	175	243	286	339
9	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	.257.123	1.268.396
10	Angka Kriminalitas per seribu penduduk (8)/(9)	0.29	0.14	0.19	0.22	0,26

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.3. Jumlah Demonstrasi

Untuk meningkatkan iklim investasi Pemerintah Kabupaten Magelang perlu pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Dari tabel 2.160 dapat dijelaskan bahwa jumlah unjuk rasa yang terjadi secara keseluruhan mengalami kenaikan, jika pada Tahun 2016 terdapat 2 kasus, unjuk rasa di Tahun 2014 dan 2015 terdapat sebanyak 3 kasus, pada Tahun 2017 terjadi 13 demonstrasi. Jumlah unjuk rasa di Tahun 2017 terkait bidang ekonom 8 kali, sementara 5 kali unjuk rasa terkait bidang agama, antara lain aksi damai Rohingya.

Tabel 2.147.
Jumlah Demo Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Politik	5			1	5
2	Bidang Ekonomi	5	3	3	1	8
3	Kasus Pemogokan Kerja				0	0
4	Jumlah Unjuk Rasa	10	3	3	2	13

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.4. Kemudahan Perijinan

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha/investasi. Masing-masing adalah Memulai Usaha (*Starting Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permit*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*), Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*).

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu. DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat. Data pelayanan perizinan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.148.

Lama dan Jenis serta SKPD Penyedia Layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
1.	Pendaftaran penanaman Modal	1	5	0	1	5	0				DPMPTSP
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	5		3	5	0				DPMPTSP
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
5.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	7	0	3	7	0				DPMPTSP
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	0	3	3	0				DPMPTSP
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
8.	Izin Perluasan Industri	7	7	0	7	7	0				DPMPTSP
9.	Tanda Daftar Industri	14	5	0	14	5	0				DPMPTSP
10.	Izin Usaha Pariwisata	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	15	28	0	15	28	0				DPMPTSP
12.	Izin Usaha Penggilingan Padi	4	8	0	4	8	0				DPMPTSP
13.	Izin Usaha Angkutan Jalan	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
14.	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet										Distan dan Pangan
15.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan
16.	TDUP Perikanan: 1. Usaha Pembudidayaan Ikan, 2. Usaha Penangkapan Ikan	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
17.	Izin Usaha Pertambangan										-
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu										Distan dan Pangan
19.	Izin Perluasan	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP
21.	Izin Usaha Perubahan	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
22.	Izin Lokasi	18	11	0	18	11	0				DPMPTSP
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
25.	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	14	8	250.000.-	14	8	250.000				DPMPTSP
26.	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	14	10	4.542.962.-	14	10	4.542.962				DPMPTSP
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan	1	2	0							DPMPTSP
28.	Izin Pemasangan Reklame	2	3	0							DPMPTSP
29.	Izin Trayek										Dishub
30.	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL										DLH
	UKL-UPL	14	± 5	0							DLH
	SPL	1	± 3	0							DLH
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan										Dinkes
32.	Izin Riset/ Penelitian	1	3	0	1	3	0				DPMPTSP
33.	Izin Rumah Potong Hewan		Izin RPH: ‘- Sapi. kerbau. kuda								Dinas Peterikan

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
			: Rp.200.000 ‘- Babi : Rp. 400.000 ‘- Kambing. domba : Rp. 100.000								
34.	Izin Air Tanah										DPUPR
35.	Izin Jagal	1	Izin Jagal Sapi. kerbau.kuda : Rp.50 000 Izin Jagal babi : Rp.100.000 Izin Jagal kambing. domba : Rp.25.000	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	Dis Peterikan
36.	Izin Ketenagakerjaan										Dinas Perin- dustrian dan Tenaga Kerja
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	DPU & ESDM
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah										DPU & ESDM
39.	Izin penggunaan Alat Berat										DPU & ESDM
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen										Disdakop UKM

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

Biaya resmi rata-rata (Rp.) :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a.Cocok tanam | 160,-/m |
| b.Jembatan | 1000,-/m |
| c.Rumah, Toko dan Warung | 500,-,m |
| d.Rumah dinas | 300.000,-/thn. |

** Persyaratan ada 4 dokumen :

1. FC KTP
2. Gambar situasi lahan – gambar yang dimohon
3. Surat ijin pemakaian tanah pengairan yang lama
4. Surat keterangan bersedia membongkar
5. Surat keterangan dari lingkungan tidak ada permasalahan diketahui RT/RW, Kepala Dusun

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Magelang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parker, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan diwilayah Kabupaten Magelang mulai 1 Januari 2013. Pajak PBB-P2 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2.149.
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11	11	11	11	11
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	1	1	1	1	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	3	3	3	3	3
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	0	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.150.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perda terkait perijinan	9	9	10	12	12
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	-	-	-

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat akan diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing unsur-unsur pelayanan.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan publik;
4. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya;
5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
6. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
8. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Unsur pelayanan yang menjadi indikator kepuasan pelayanan meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu :

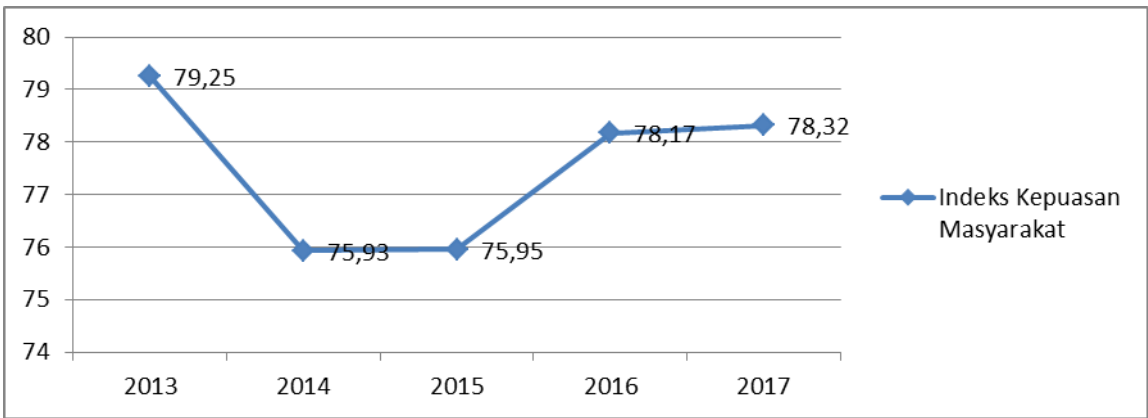
1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;

4. Biaya/tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; dan
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 dilaksanakan menggunakan metode kuesioner. Responden tinggal mengisi kuesioner sesuai pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner. Sedangkan olah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi excel.

Perkembangan IKM di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.14.
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

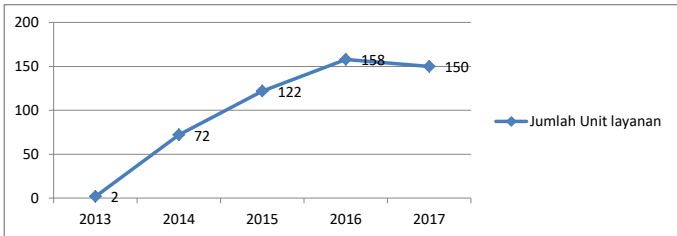


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 meningkat 0, 15 point dibandingkan Tahun 2016, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kulaitas pelayanan puklik kepada masyarakat. Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 adalah pengguna layanan. Khusus responden pada Sekolah Menengah Pertama terbagi dalam komposisi 75% responden siswa, 20% responden wali siswa, dan 5% responden komite sekolah.

Jumlah Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.15.
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

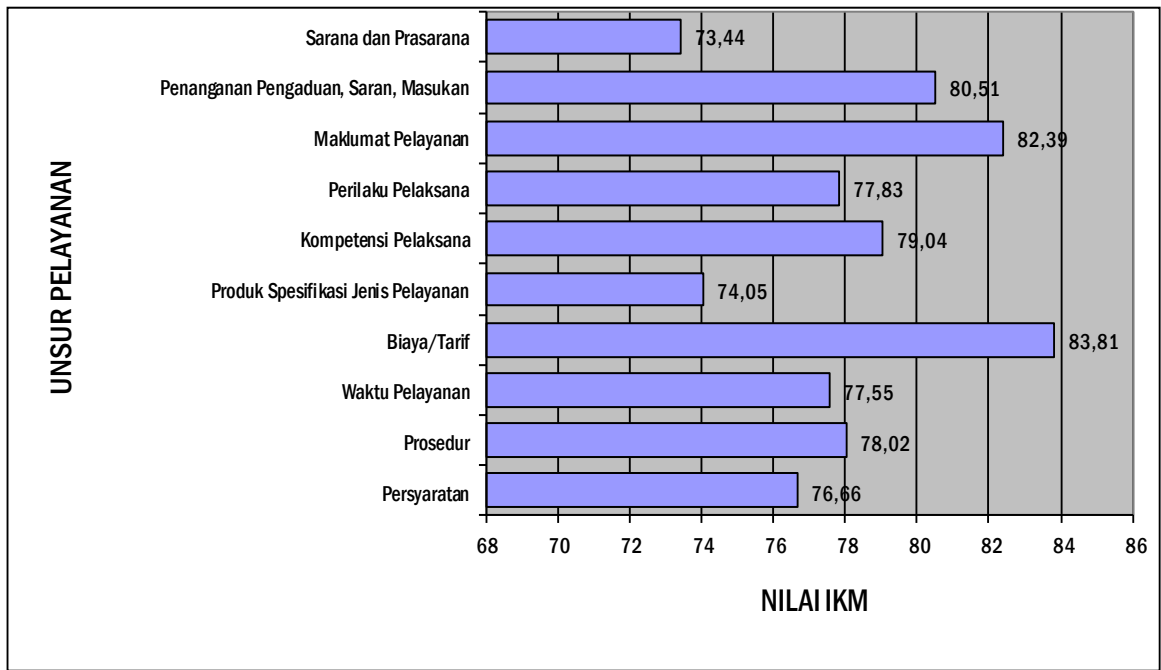


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas jumlah unit layanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8 unit dibandingkan Tahun 2016.

Nilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perunsur pelayanan pada Unit Pelayanan Publik pada Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.16.
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

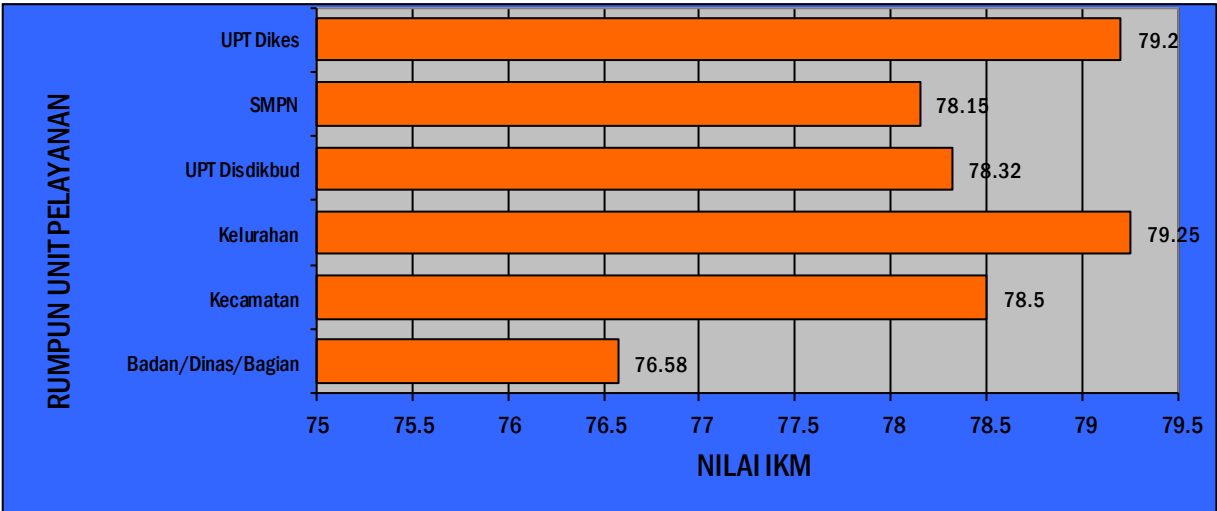


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang paling tinggi atas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik terletak pada kejelasan “**Biaya/Tarif**” pelayanan, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah terletak pada kurang lengkapnya “**Sarana dan Prasarana**” pelayanan.

Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi diraih oleh Unit Pelayanan Publik rumpun Kelurahan dengan IKM kumulatif sebesar 79,25. Capaian IKM kumulatif masing-masing rumpun Unit Pelayanan Publik sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17.
Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat
per Rumpun Unit Pelayanan Publik Tahun 2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

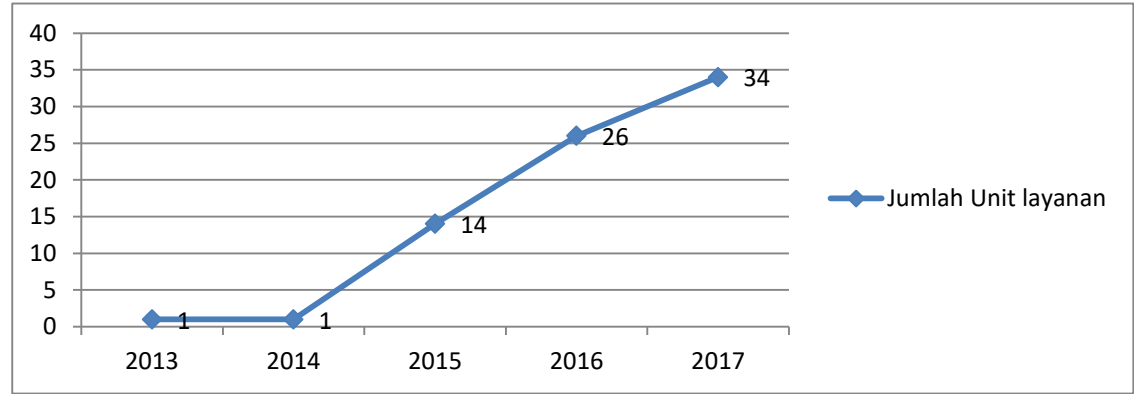
Pada grafik tersebut menunjukkan masyarakat paling puas terhadap kinerja pelayanan pada Kelurahan dan kepuasan masyarakat paling rendah terdapat pada kinerja layanan Badan/Dinas/Bagian.

Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori A (Sangat Baik) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Unit Pelayanan Publik, dengan rincian:

- a. Badan/Dinas/Kantor/Bagian : 2 Unit Pelayanan Publik.
- b. Kecamatan : 7 Unit Pelayanan Publik.
- c. Kelurahan : 2 Unit Pelayanan Publik.
- d. UPT Disdikpora : 4 Unit Pelayanan Publik.
- e. SMP Negeri : 14 Unit Pelayanan Publik.
- f. UPT Puskesmas : 5 Unit Pelayanan Publik.

Jumlah Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat kategori A (Sangat Baik) Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,77% (tiga puluh koma sembilan puluh dua persen) dari tahun sebelumnya (2016) yang sebanyak 26 (dua puluh enam) Unit Pelayanan Publik, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.18.
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Mencapai IKM Kategori A Tahun 2013-2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasar grafik diatas terdapat peningkatan mutu lapayanan publik di Kabupaten Magelang.

2.1.5.3.7. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk. dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Tabel 2.151.
Status Desa Tahun 2016

No.	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah Desa Pemula	144	0
2.	Jumlah Desa Prakarsa	223	279
3.	Jumlah Desa Berdikari	0	88
4.	Jumlah Desa (1) + (2) + (3)	367	367
5.	Presentase Desa Berstatus Prakarsa	60.76	76,02

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.8. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.5.3.9. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah diselesaikan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Periode Tahun 2012-2016 angkatan kerja berpendidikan SMP ke atas cenderung meningkat.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan persentase angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 2015 ke 2016 presentase angkatan kerja berpendidikan SD menurun dari 54,47 menjadi 53,67. Prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMP naik dari 19,53 menjadi 19,67; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMA naik dari 12,60 menjadi 12,94; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMK naik dari 7,75 menjadi 7,85; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Diploma naik dari 1,65 menjadi 1,67 dan prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Universitas naik dari 4 menjadi 4,18. Kenaikan ini mempunyai makna bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Magelang semakin meningkat.

Data peningkatan kualitas angkatan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.152.
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
≤ SD	365.032	365.673	366.067	363.860	363.242
SMTp	128.499	130.325	131.261	133.371	134.686
SMTA Umum	81.404	82.428	84.672	87.747	90.142
SMTA Kejuruan	50.468	51.324	52.097	53.241	53.927
Diploma I/II/III/Akademi	10.808	10.940	11.117	11.328	11.432
Universitas	24.398	25.642	26.849	28.362	29.715
	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2018

2.1.5.3.10. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban

yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.153.
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	220.129	272.003	303.495	279.395	275.853
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	111.824	103.998	106.208	112.479	110.599
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	331.953	376.001	409.703	391.874	386.452
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	928.551	886.499	835.779	886.750	894.227
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0,42	0,49	0,44	0,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, namun pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada komposisi penduduk produktif dan penduduk belum produktif/tidak produktif di Kabupaten Magelang.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 – 2019

2.2.1.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.154.
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Sta-tus*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,45	73,25	73,25	73,27*	70,50	>
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,305	0,31	0,34	0,34*	0,295	<
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0.4066	0,42	0,4073	0,4073*	0,4046	<
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,99	12,42	12,98*	13,07*	9,00	<
5	IPM	75,94	Indeks	75,14	74,74	66,35*	67,92	75,94	<
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6.0 -6,5	5,43	5,69	5,49	6,20 – 6,70	<
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp.	12,58	22,35	10,48	20,69*	13,75	>
8	Laju inflasi	4±1	Persen	5±1	3,47	3,60	2,86	4±1	>
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	96,77	96,79	97,17	96,77	73,66	>
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk **	1,45	Indek	2,13	2,65	3,48	2,02	1,82	<

2. Data Tahun 2014; ** Data Tahun 2012.

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** : Indikator Negatif

Indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 10 indikator. Pada tahun 2017 sebanyak 6 indikator belum mencapai target dan 4 indikator melampaui target. Kondisi ini menurun dibanding capaian pada tahun 2016, dimana indikator yang telah berhasil pada 7 indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial, yaitu di dalam meningkatkan usia harapan hidup, mengurangi ketimpangan regional, meningkatkan IPM, PDRB perkapita dan rasio penduduk yang bekerja, menekan inflasi serta menekan angka kriminalitas, yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
- b. Ketersediaan dana yang dimanfaatkan secara optimal
- c. Iklim sosial, ekonomi dan politik yang cukup kondusif
- d. Partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Pada tahun 2017, dari 10 indikator tersebut sebanyak 6 indikator berstatus belum tercapai, yaitu indek gini, Indeks wilianson, prosentase penduduk miskin, IPM dan angka kriminalitas. Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal
- b. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- c. Kenaikan biaya hidup masyarakat seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

2.2.2. ASPEK DAYA SAING

Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.155.
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

N o.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014- 2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38.38	Rp. (juta)	32.47	51,74	27.90	60,03	35,30	>
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	37.03	Persen	36.09	55,80	40.80	59.85	36,56	>
3	Nilai tukar petani	106.99	-	106.70	106.70	106.48	106.56	106,85	=
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0017	-	0.0021	0.0029	0.0029	0.0029	0,0019	>
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	95.66	persen	76.40	83,09	77.87	80.13	56,60	>
6	Luas Wilayah Industri	0.37	Persen	0.37	0,34	0.39	1,6	0,37	<
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	Hari	9	9	9	9	9	=
8	Opini BPK ‘WTP’	WTP	-	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	=
9	Nilai AKIP	B	-	B	CC	CC	cc	B	<

*Data sementara

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 9 indikator kinerja program aspek daya saing, 2 Indikator status capaiannya belum tercapai, 1 indikator tercapai dan 6 indikator melampaui target. Capaian pada tahun 2016, dari 9 indikator kinerja program aspek daya saing sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai, 2 indikator berstatus tercapai dan 5 indikator berstatus melampaui

target. indikator yang belum tercapai adalah luas wilayah industry dan pencapaian nilai AKIP. Walaupun indikator nilai AKIP belum sesuai target, namun telah terjadi peningkatan point hasil Evaluasi AKIP Kabupaten, dari 58,17 pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 58,82 Di tahun 2017.

Pada tahun 2016 indikator opini BPK “WTP” belum tercapai namun pada tahun 2017 ini opini BPK “WTP” dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah dalam mencapai indicator ini adalah:

- melakukan pelatihan bagi petugas penyimpan barang di setiap SKPD, dan mengupayakan agar petugas yang sudah terlatih jangan sampai ikut dimutasi pada saat adanya perubahan OPD baru diakhir tahun 2016 lalu.
- Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Melaksanakan Action Plan yang telah dibuat oleh masing- masing bidang berdasarkan hasil rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Kekhususan penanganan aset tetap yang menjadi Opini pengecualian BPK RI Provinsi Jateng.

2.2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.2.3.1.1. PENDIDIKAN

Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukan dengan 23 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.156.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	APK PAUD	54,54	persen	54,23	62,64	56,29	60,27	54,54	>
2	Angka melek huruf	93,95	persen	93,75	94,63	99,98	99.98	93,85	>
3	Angka rata-rata lama sekolah	10,00	tahun	9,00	7,40	7,02	7.19	9	<
4	Angka PartisipasiMurni (APM) SD/ MI/Paket A	97,09	persen	96,09	92,66	86,74	89,70	96,79	<
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen	80,85	67,76	64,86	62,78	81,96	<
6	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen	51,56	46,88	37,58	42,70	64,08	<
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	101,84	persen	101,04	105,77	99,87	103,69	101,94	<
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	97,56	persen	96,56	88,36	85,92	82,40	97,08	<
9	Angka Partisipasi	80,00	persen	73,40	64,23	54,18	60,48	75,10	<

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
	Kasar SMA/SMK/MA/Paket C								
10	Angka Putus Sekolah SD/MI **	0,14	persen	0,15	0,05	0,10	0.19	0,14	>
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	0,57	persen	0,61	0,24	0,31	0.35	0,59	>
12	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	0,81	persen	0,82	0,13	0,55	0.40	0,81	>
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen	99,91	99,99	99,98	100,00	99,98	>
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	99,96	99,77	100,00	99,98	99,99	<
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen	99,10	99,90	99,94	99.95	99,98	>
16	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	persen	7,70	7,59	7,25	7.845	7,72	<
17	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,49	persen	6,46	5,78	6,19	5.813	6,48	<
18	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,18	persen	7,14	5,77	6,45	6.106	7,16	<
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	persen	85,00	87,42	80,88	84,16	86,00	>
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen	89,42	91,78	90,08	90.57	89,62	>
21	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/MK/MA	71,55	persen	69,87	79,18	75,30	76,33	70,70	>
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,74	persen	82,61	85,58	62,68	75.52	84,68	>
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen	88,57	90,70	69,09	81.80	90,00	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = indikator negatif

Tahun 2017, dari 23 indikator kinerja program urusan pendidikan, sebanyak 11 indikator berstatus belum tercapai dan 12 indikator berstatus melampaui target. Capaian tahun 2017 ini sama dengan tahun 2016, dimana tahun 2016 jumlah indicator kinerja program yang belum tercapai sebanyak 11 indikator dan indicator yang melampaui target sebanyak 12 indikator.

Indikator yang belum tercapai adalah pada tahun 2017 adalah:

1. Angka rata-rata lama sekolah
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
6. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
7. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
9. Rerata Nilai UN SD/MI
10. Rerata Nilai UN SMP/MTs
11. Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dialokasikan
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menggarap pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Ketersediaan dana.
- f. Semangat kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program, khususnya tidak tercapainya target APM dan APK adalah :

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu
- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan

Faktor penghambat belum tercapainya indikator program terkait nilai UN adalah

- a. Belum optimalnya proses belajar mengajar di Sekolah
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Partisipasi orangtua dan masyarakat kurang optimal

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan factor pendorong adalah :

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan)

2.2.3.1.2. KESEHATAN

Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.157.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus	11	8	10	13	11	>
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,50	kasus	6,60	6,63	7,3	8,17	6,50	<
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	Persen	0,15	0,02	0,03	0,03	0,15	>
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil	8,00	7,5	9,09	1,75	8	>
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	100	Persen	100	100	100	100	100	=
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	100	Persen	100	100	100	100	100	=
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	Persen	100	100	100	100	100	=
8	Cakupan Penemu-an Dan Penangan-an Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	Persen	90	90	29,2	49,51	90	=
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	Persen	100	100	7,31	100	100	=
10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	Persen	95	95,56	99,91	99,68	95	>

Status*: <: Belum Tercapai; =: Tercapai; >: Melampaui

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dari 10 indikator kinerja program urusan kesehatan pada tahun 2017 sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai, 5 indicator berstatus tercapai dan 4 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding capaian tahun 2016, dimana sebanyak 3 indikator berstatus belum tercapai, 4 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus melampaui target. Indikator yang belum tercapai pada tahun 2017 adalah:

1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Indikator ini tidak tercapai karena adanya kasus kematian bayi yang disebabkan berat badan lahir rendah dan cacat lahir. Walaupun belum mencapai target RPJMD, penanganan kematian bayi di Kabupaten Magelang telah berhasil jauh dibawah target Indonesia sehat dan target SDG's, keberhasilan ini tetap harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kejadian kematian bayi semakin menurun dari tahun ke tahun.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- Pembangunan kesehatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- Ketersediaan anggaran yang cukup dari APBD Kabupaten Magelang dan anggaran DAK;

2.2.3.1.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2.3.1.3.1. PEKERJAAN UMUM

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 3 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.158.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPDP 2018	Status
				Target RKPDP 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen	69,25	73,63	68,52	66,98	69,49	>
2	Luas Jaringan Irigasi	30,57	persen	30,57	41,31	33,96	41,30	30,57	>
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	Persen	62,7	64,55	59,58	61,22	64,60	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pekerjaan umum, semua indikator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2016 dimana sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019, sehingga banyak dana, tenaga dan upaya diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, SKPD teknis yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

2.2.3.1.3.2. PENATAAN RUANG

Kinerja Urusan Penataan Ruang ditunjukkan dalam 7 indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.159.
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen	>30	31	4,11	4,54	>30	>
2	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	4.00	persen	3.70	3,6	0,82	2,4	3,85	<
3	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	0	Persen	0	0	0	0	0	=
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha	25. 886	25. 886	52.485	25. 886	25.886	=
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82.687	Ha	82.687	82.687	86.405	82.687	82.687	=
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	676	-	613	577	594	384	645	<
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kot a Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38		38	35	32	32	38	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Capaian Indikator kinerja program urusan penataan ruang pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil pada 4 indikator kinerja program yaitu : (1) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target; (2) Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya; (3) Luas Kawasan Lindung (ha) dan (4) Luas Kawasan Budidaya (ha).

Indikator kinerja urusan penataan ruang yang tidak mencapai target adalah:

1. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan. Indikator ini tidak tercapai karena :
 - a. Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB relatif masih rendah
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang tidak ber-IMB

- c. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengurusan IMB masih kurang
 - d. Kurangnya sosialisasi tentang proses pengurusan IMB
 - e. Prosedur pengurusan IMB kurang sederhana
2. Jumlah IMB Yang Dikeluarkan. Indikator ini belum tercapai karena terbatasnya SDM yang menangani IMB
 3. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital. Indikator ini belum tercapai karena :
 - a. Keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa melaksanakan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi RTR melalui peta analog dan peta digital
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang RTR, peta analog dan peta digital.

2.2.3.1.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.160.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	Persen	82	81,42	80,38	80,62	83,00	<
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	Persen	2,55	2,24	2,52	2,52	2,50	>
3	Rumah Layak Huni (%)	85,00	Persen	75	56,7	53,13	55,45	80,00	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan perumahan, sebanyak 2 indikator berstatus belum mencapai target dan 1 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2016.

Faktor yang mendukung indikator kinerja prosentase Lingkungan Pemukiman Kumuh melampaui target, adalah sudah adanya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator Rumah Tangga Ber-Sanitasi dan penghambat tidak tercapainya indikator Rumah Layak Huni (%) adalah karena jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai, namun adanya bantuan penanganan rumah tidak layak huni dari provinsi, BSPS dari pusat dan

program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan rumah tangga bersanitasi dan rumah tidak layak huni.

2.2.3.1.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat daerah ditunjukan dengan 4 indikator kinerja, yaitu: Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk, Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah, dan Penegakan PERDA, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.161.
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44	-	0.44	0,39	0.44	0.43	0,44	<
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100.87	-	98.41	91,32	92.59	91.37	99,64	<
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah	4	-	4	2	2	2	4	<
4	Penegakan PERDA	75	Persen	75	80,45	75	100	75	>
5	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12.02	7,42	39.74	10,30	12,02	<
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		ada	Ada	ada	ada	ada	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan otonomi daerah, 4 indikator kinerja berstatus belum tercapai, 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja melampaui target. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah kinerja yang efektif dan efisien. Faktor penghambat tidak tercapainya rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk adalah karena kondisi jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Magelang belum mencapai kondisi yang ideal sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah minimal Anggota Satpol PP Kabupaten/ Kota minimal 150 orang sedangkan saat ini baru mencapai 53 orang. Adanya kebijakan moratorium pengadaan CPNS dan juga kebijakan rekrutment tenaga kontrak yang semakin ketat menyebabkan kesulitan menambah pegawai sehingga rasio jumlah Satpol PP per sepuluh ribu jumlah penduduk semakin sulit tercapai.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah 10.000 penduduk adalah karena selama ini menjadi Anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Rekrutment anggota baru tidak sebanding dengan jumlah Anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dari aspek kelembagaan Pengorganisasian Linmas, berdasarkan sejarahnya kelembagaan Linmas pernah berdiri sendiri menjadi Mawil Hansip sejajar dengan Kantor eselon III, namun seiring dengan perubahan SKPD di Kabupaten Magelang kelembagaan Linmas mulai menurun hanya ditangani oleh Kasi/ Kasubid Linmas (eselon IV). Penggabungan Linmas ke Satpol PP di Kabupaten Magelang, diawali dari Penggabungan Mawil Hansip dan Kantor Sospol Menjadi Kantor Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) sehingga Lembaga Linmas dibawah Kasi Linmas (eselon IV.a).

Pada Tahun 2009, Kelembagaan Linmas masuk di Badan Kesbangpol dan PB. Kelembagaan Linmas dibawah Bidang Penanggulangan Bencana melalui Kasubid Bina Linmas (eselon IV.a).

Setelah terbitnya PP 6 Tahun 2010 bahwa fungsi Linmas berada di Satpol PP maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kelembagaan Linmas masuk dalam Satpol PP Kabupaten Magelang di bawah Seksi Pengamanan dan Bina Linmas (eselon IV.a).

Dengan kapasitas kelembagaan yang semakin kecil menyebabkan kesulitan dalam pengorganisasian potensi Linmas.

2.2.3.1.13. SOSIAL

Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.162.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	Unit	34	39	39	39	34	>
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20.00	Persen	17.40	28,95	2.90	30,49	18,50	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinsos PPKBPPPA Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan sosial, 2 indikator tersebut telah melampaui target. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- a. Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang

- b. Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah
- c. Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sasarannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.

2.2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.2.3.2.1. KETENAGAKERJAAN

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.163.
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	Persen	75,47	75,46	75,14	75,34	75,65	<
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	Persen	1,28	1,34	0,53	0	1,28	<
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,27	Persen	38,42	43,31	19,96	40,36	48,32	>
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	3,02	Persen	3,16	3,21	3,85	3,49	3,10	<
5	Keselamatan dan Perlindungan	79,00	Persen	75,00	75	80,32	80,32	77,00	=
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = Indikator negatif

Sumber: Disperinnake Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan, 3 indikator berstatus belum tercapai, 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah

- a. Optimalnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja
- b. Tersedianya berbagai fasilitas yang mempermudah pencari kerja mengakses lowongan kerja yang tersedia

- c. Dilakukannya kegiatan pembinaan secara kontinue disertai bombing teknis penyelesaian PHI/PHK serta kegiatan pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK.

Indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan yang tidak tercapai adalah prosentase angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan prosentase tingkat pengangguran terbuka. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator prosentase angka partisipasi angkatan kerja adalah adanya kekurangsesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia (*job Maching*), sehingga jumlah pencari kerja yang terserap tidak maksimal. Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator tingkat pengangguran terbuka adalah banyaknya pekerja musiman di sektor pertanian dan keberadaan para pekerja kontrak (*outsourcing*).

2.2.3.1.7. PERHUBUNGAN

Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 7 indikator. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.164.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang	3.705.271	2.794.562	3.656.365	3.286.049	3.705.271	<
2	Jumlah Ijin Trayek	1.069	-	1.036	1.089	1.129	1.143	1.057	>
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	96.7	Perse n	95.5	98,39	97.53	97,32	96,30	>
4	Jumlah Terminal Bis	8	termin al	7	6	6	7	8	<
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit	32	32	32	32	32	=
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji	ada		Ada	Ada	Ada	ada	ada	=
7	Pemasangan Rambu-Rambu	94,00	perse n	75	106,36	52,00	61,24	79,00	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Indikator kinerja program urusan perhubungan pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 7 indikator. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil pada 5 indikator kinerja program, yaitu: (1).Jumlah Ijin Trayek; (2). Rasio Uji Kir Kendaraan; (3). Lama Pengujian

Kelayakan Angkutan Umum (KIR); (4) Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji dan (5). Pemasangan Rambu-Rambu.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- a. Perencanaan kegiatan/program yang baik
- b. Dukungan ketersediaan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan/program yang baik
- d. Sarana dan prasarana mendukung.

Indikator kinerja program urusan perhubungan yang belum tercapai ada 2, yaitu:

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum. Indikator ini tidak tercapai karena:
 - a. Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum
 - b. Kurang nyamannya fasilitas Angkutan umum dan fasilitas di terminal
 - c. Waktu tunggu angkutan Umum yang semakin lama
 - d. Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

2. Jumlah Terminal Bis.
 Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena sejak tahun 2017 terminal Muntilan sebagai terminal type B bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang tetapi menjadi kewenangan Provinsi

2.2.3.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam 5 indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.165.
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Penanganan Sampah	31.00	Persen	27	28,14	23.81	25,62	29,00	>
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air	2.10	Persen	2.10	2,85	1.90	2,15	1,90	>
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	25	33,06	20	26	30	>

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1.08		0,078	0,99	0,95	0,98	1,78	>
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³	100.000	186.585	153.167	168.376	2.300.000	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup, semua indikator berstatus melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase Penanganan Sampah adalah relatif terpenuhinya sarana prasarana pengelolaan sampah. Walaupun telah melampaui target, namun penanganan sampah mengalami kendala yaitu terkait laju pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan sampah dan luas lahan TPA yang sangat terbatas.

Indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air juga melampaui target. Hal ini didukung dengan adanya Perda RTRW nomor 5 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010-2013 dan perda nomor 14 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air juga mengalami kendala yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, adanya penebangan liar yang tidak disertai penanaman kembali, alih fungsi lahan dari tanaman tahunan menjadi tanaman semusim serta bencana alam seperti letusan gunung Merapi.

Secara Umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Ketersediaan dana
- Adanya dukungan Sumber Daya Manusia
- Adanya sinergitas dengan stakeholder dan instansi terkait
- Pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif

Namun demikian, beberapa kendala tetap dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program urusan Lingkungan hidup, yaitu:

- Pemahaman terkait peraturan perundang-undangan di Lingkungan Hidup kurang
- Adanya kendala pembebasan tanah dan perluasan lahan untuk TPA dan TPST

2.2.3.1.9. PERTANAHAN

Kinerja Urusan Pertanahan ditunjukkan dalam 2 indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.166.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2017	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33.83	Persen	33.83	53,41	51.80	52,10	33,80	>
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100	Persen	100	100	100	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, 2 indikator urusan Pertanahan, 1 indikator melampaui target dan 1 indikator tercapai. Pada tahun 2016, 2 indikator urusan Pertanahan, 1 indikator melampaui target dan 1 indikator tercapai. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pertanahan adalah: (a). Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi; (b). Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan ijin lokasi tidak berbelit-belit; (c) biaya sertifikat dan ijin lokasi terjangkau.

2.2.3.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator.

Tabel 2.167.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	Persen	91,79	88,66	88,62	97,78	91,81	<
2	Bayi Berakte Kelahiran	100	persen	93,37	86,44	61	87,43	98,77	<
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.80	persen	1,70	39,37	10,600	1,7	1,80	>
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 4 indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, 1 indikator melampaui target, 1 indikator tercapai dan 2 indikator belum tercapai. Dibanding tahun 2016, terjadi penurunan jumlah indikator yang tercapai, yaitu 1 indikator melampaui target, 2 indikator tercapai dan 1 indikator belum tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: (1) Disdukcapil mengadakan jemput bola terkait peristiwa penting yang dialami seperti akta, KTP, kematian ke Desa dan Sekolah untuk memudahkan pelayanan masyarakat (2). Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan (3). Bebas biaya

Indikator kinerja program yang belum tercapai salah satunya adalah prosentase bayi berakte kelahiran. Indikator ini tidak tercapai karena ada beberapa faktor penghambat, yaitu:

- Faktor geografis, yaitu domisili pemohon akte kelahiran jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kendala jaringan internet yang kurang lancar di 6 kecamatan, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan
- Keterbatasan blangko E-KTP dari pusat sehingga pencetakan E-KTP tidak sesuai standar waktu.
- Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat dokumen kependudukan manakala dibutuhkan.

2.2.3.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator sebagai berikut:

Tabel 2.168.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2.56	Persen	2.52	1,88	2.11	1,94	2,54	<
2	Rasio KDRT	0.024	Persen	0.026	0,017	0.01	0,009	0,025	>
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	100	Persen	100	75	100	100	100	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Tabel capaian di atas menunjukkan pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator berstatus tidak tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target. Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2016 statusnya tercapai, namun pada tahun 2017 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kasus yang

tidak tertangani. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program, 1 indikator berstatus tidak tercapai, 1 indikator tercapai dan 1 indikator melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: (1) semakin mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A semanah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan (2). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT cukup tinggi.

Salah satu indikator kinerja program yang belum tercapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah adanya PNS perempuan yang pensiun dan adanya kebijakan moratorium PNS sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat menambah PNS perempuan.

2.2.3.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator.

Tabel 2.169.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.57	Anak	1.63	1,13	1.27	1.27	1,60	>
2	Rasio Akseptor KB	81.50	Persen	81.40	79,71	81.30	79.77	81,45	<
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80.89	Persen	80.79	79,71	77.93	79.77	80,84	<
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	20.18	Persen	22.38	22,33	23.58	23.58	21,28	<
5	Keluarga Sejahtera I (%)	14.38	Persen	15.38	16,39	17.21	17.21	14,88	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2016, yaitu, 4 indikator berstatus belum tercapai, dan 1 indikator berstatus melampaui target. Indikator yang melampaui target pada tahun 2017 adalah indikator rata-rata jumlah anak per keluarga dan prosentase keluarga sejahtera 1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- a. Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat
- b. Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah
- c. Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- d. Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang

e. Membaiknya kondisi perekonomian

Sementara itu indikator yang belum mencapai target ada 3 yaitu :

1. Rasio Akseptor KB

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif (%) adalah

- a. Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan berKB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan anak segera
- b. Adanya PUS yang drop out KB karena ingin punya anak lagi, ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak berKB padahal masih termasuk subur.

2. Cakupan Peserta KB Aktif (%), penghambatnya sama dengan penyebab tidak tercapainya rasio akseptor KB

3. Prosentase Keluarga Pra Sejahtera

2.2.3.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.170.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi Tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	78.18	Persen	77.76	94	82.75	75.98	77,95	>
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	-	106.391	106.200	106.412	106.200	106.387	<
3	Jumlah BPR/LKM	382	-	375	297	280	307	379	<
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0.38	Persen	0.36	20,56	0.51	1.36	0,37	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 4 indikator kinerja program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 dimana dari 4 indikator kinerja program, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target, yaitu indikator usaha mikro dan kecil yang dibina.

Faktor pendorong keberhasilan indikator program adalah adanya ketersediaan dana untuk kegiatan pembinaan, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan peran aktif para pengusaha mikro dan kecil yang dibina.

Indikator yang tidak tercapai ada 2, yaitu :

1. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, indikator ini belum tercapai karena masih banyak UKM non BPR/LKM UKM yang belum terdata
2. Jumlah BPR/LKM

2.2.3.1.16. PENANAMAN MODAL

Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.171.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No .	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	-	1.005	730	594	518	1.085	<
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah	605.681	1.030.689	476.231	490.940	665.163	>
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31.19	-	25.19	11,37	7.50	14.64	2,19	<
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	359	Milyar rupiah	254	539.750	88.46	14,709	164	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang. 2018

Tahun 2017, dari 4 indikator kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah berhasil pada indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA dan Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), dengan status melampaui target. Adapun 2 indikator lainnya, yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja berstatus belum mencapai target. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, dimana dari 4 indikator kinerja program semua indikator berstatus belum tercapai.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan Penanaman Modal adalah jenis investasi yang diajukan para investor sebagian besar tidak sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

2.2.3.1.17. KEBUDAYAAN

Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.172.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2016		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2016	Realisasi tahun 2016				
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	-	38	38	44	38	38	=
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	18	Unit	18	27	25	15	18	>
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	70,00	persen	66,85	66,85	66,65	66,66	66,95	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan kebudayaan, 2 indikator terlampaui dan 1 indikator tercapai. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2016, dimana dari 3 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja berstatus belum tercapai dan 1 indikator kinerja tercapai.

Faktor pendorong tercapainya indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya Budaya yang oleh pemerintah daerah di dukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan festival.

2.2.3.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.173.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Organisasi Pemuda	27	-	26	26	24	25	26	=
2	Jumlah Organisasi Olahraga	36	-	33	29	34	59	35	<
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	-	18	17	17	17	18	<
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	24	-	24	24	23	24	24	=

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
5	Lapangan Olahraga	2.00	permil	1.00	0.02	0.20	0.02	1,50	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olah raga, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus tercapai. Pada tahun 2016, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olah Raga, 1 indikator kinerja berstatus belum tercapai, 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan pemuda dan olah raga adalah :

- Kegiatan difokuskan pada ketercapaian indikator program
- Peran aktif masyarakat dan SKPD terkait dalam upaya pencapaian target
- Ketersediaan anggaran

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja lapangan olah raga permil adalah keterbatasan lahan dan sulitnya proses pembebasan tanah.

2.2.3.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.174.
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	12	-	12	12	5	10	12	=
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	-	10	7	5	6	12	<
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	Persen	80	70	60	100	100	<
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	Persen	100	100	100	100	100	=

5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	80	70	55	88,61	90	<
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	100	100	80	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 3 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus belum tercapai. Pada tahun 2016, 1 indikator kinerja berstatus belum tercapai dan 3 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Adanya Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebencanaan
- Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder
- Ketersediaan SDM yang serius menangani masalah kebencanaan
- Amanat Undang-undang tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah adanya kesalahpahaman atau ketidaktepatan perumusan target indikator kinerja pada level perencanaan SKPD.

2.2.3.1.21. KETAHANAN PANGAN

Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.175.
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188.1	Ton	188.04	287.172	218.04	287,25	188,06	>
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93.1	-	91.5	87,10	85.90	87.20	93,01	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan ketahanan pangan, 1 indikator kinerja berstatus melampaui target, yaitu indikator

ketersediaan pangan utama beras dan 1 belum tercapai yaitu PPH daerah. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

Ketersediaan pangan utama beras menunjukkan banyaknya beras yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pada tahun 2016, indikator ini dapat melampaui target karena produksi padi yang terus meningkat. Sedangkan PPH Daerah mencerminkan susunan pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif berdasarkan skor pangan dari 9 (Sembilan) bahan pangan, dan ini menjadi salah satu indikator dalam pencapaian ketahanan pangan di daerah. Semakin tinggi skor PPH Daerah, maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan pangan suatu daerah.

Indikator Skor PPH Daerah dalam hal ini belum tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, antara lain :

- 1. Masih rendahnya mutu gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- 2. Pola konsumsi pangan masih tergantung pada salah satu atau beberapa kelompok pangan saja.
- 3. Masih tingginya angka kemiskinan, yang berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat akan produk pangan.
- 4. Budaya konsumsi masyarakat.

2.2.3.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.176.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19.00	persen	17.00	20	18.18	22.47	17,00	>
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39.52	persen	28.23	28,24	20.14	81.62	33,87	>
3	Jumlah LSM	6	buah	4	4	4	5	6	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target.

Target capaian pembinaan LPM dicapai melalui :

- Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat perwakilan masing-masing kecamatan sebanyak 3 desa sehingga LPM yang dibina sebanyak 155 LPM dari 372 LPM atau 30,91 persen;
- Kelompok binaan PKK yang masuk dalam data cakupan kelompok binaan PKK yaitu UP2K PKK/Pra koperasi PKK warung PKK. koperasi PKK. kelompok PKBN kelompok kadarkum kelompok pola asuh.

Jumlah PKK aktif tahun 2014 : 32,53 persen, dan jumlah kelompok binaan seluruhnya 3.420 kelompok. Pada tahun 2015 Jumlah PKK aktif menjadi 20,14 persen, sedangkan jumlah kelompok binaan seluruhnya 3.233 kelompok, dengan rincian:

		2014	2015	2016
a.	UP2K PKK	1.845	1.774	1.882
b.	Warung PKK	135	139	165
c.	Koperasi PKK	44	43	28
d.	PKBN	466	4.377	4,409
e.	Kadarkum	395	5.810	5.769
f.	Pola Asuh	535	4.251	4.184

2.2.3.1.23. STATISTIK

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.177.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	=
2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan Statistik, semua indikator kinerja berstatus tercapai. Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah: (1). Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara Bappeda dengan BPS; (2). Hubungan dan kerjasama yang baik dengan Stakeholder pengampu data; (3). Ketersediaan Dana

2.2.3.3.1.24. KEARSIPAN

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.178.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen	72.87	73,02	39.37	56,27	89,61	>

2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	734	orang	534	791	439	609	282	>
---	-------------------------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. 2018

Realisasi capaian indikator kinerja pengelolaan arsip secara baku, dan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2017, telah melampaui target. Berarti bahwa semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2017 telah tercapai. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2013. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan juga realisasinya melampaui target pada tahun 2017 karena didukung oleh kegiatan sosialisasi dan kegiatan workshop. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

2.2.3.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.179.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	-	6	8/0	7/1	8/1	6	>
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	ada	-	ada	Ada	ada	ada	Ada	=
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	-	9/3	9/3	9/3	10/3	9/3	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program komunikasi dan informatika, 2 indikator kinerja berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target. Sedangkan pada tahun 2016, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- (1). Partisipasi masyarakat yang tinggi
- (2). Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi

2.2.3.1.26. PERPUSTAKAAN

Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.180.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Perpustakaan	815	Unit	773	793	716	791	794	>
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	orang	43.576	39.967	33.726	55.854	44.447	<
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	2.24		2.15	2.16	2.04	2.11	2,20	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. 2018

Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil melampaui target pada indicator jumlah perpustakaan dan rasio koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah, 1 indikator yaitu jumlah pengunjung per tahun tidak mencapai target. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program urusan Perpustakaan, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah: (1). Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; (2). Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan; (3). Meningkatnya jam kunjung pemustaka; (4). Ketersediaan dana dan (5). Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

Faktor penghambat tidak tercapainya indicator jumlah pengunjung pada tahun 2017 dikarenakan gedung perputakaan dan arsip sedang dibangun dan pelayanan dipindah ke tempat lain yang kurang representatif sehingga pelayanan perpustakaan menjadi tidak optimal.

2.2.3.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

2.2.3.3.1. PERTANIAN

Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.181.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar :							
1	Produktivitas Padi	60.10	Kw/ha	60.08	62,90	61.95	63.42	60,09	>
2	Produksi Padi	355.676	Ton/Th	355.534	483.331	378.339	422.153	355.617	>
3	Produktivitas Jagung	59.30	Kw/ha	59.25	58,73	59.23	59	59,28	<
4	Produksi Jagung	74.337	Ton/Th	74.277	55.083	67.296	71.896	74.307	<
5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB **	20.03	Persen	21.75	22,78	24.10	20,10	20,89	>
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)sektor pertanian	71.84	Persen	72.61	72,83	73.35	71.896	72,22	>
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian	7.73	Persen	7.46	5,25	7.30	7,45	7,60	<
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian	13.09	Persen	12.64	17,65	12.28	19,45	12,86	>
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	14.9	Persen	2.3	2.6	1.3	2.06	2,5	>
Produksi Hewan ternak									
10	Sapi potong	1.862.169	Kg	1.789.859	1.791.694	1.781.147	1.767.047	1.825.656	>
11	Kerbau	541	kg	520	520	564	561	530	=
12	Kambing		Kg	762.462	749.957	763.706		777.711	<

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
		793.265					749.409		
13	Domba	1.115.626	Kg	1.072.305	1.053.911	1.072.267	1.053.382	1.093.751	<
Produksi Hewan Unggas									
14	Ayam Pedaging	9.957.100	ton	9.570.500	9.417.335	9.181.363	9.410.958	9.761,90	<
15	Ayam Ras Petelur	1.019.5	ton	980.000	967.668	941.675	966.654	999,59	<
16	Ayam Buras	1.239.98	ton	1.191.83	1.170.022	1.139.035	1.169.630	1.215,67	<
17	Itik	94.106	ton	90.451	90.445	86.891	89.618	92.260	<
18	Sapi Perah	746.158	liter	717.184	725.679	709.155	705.231	731.528	>
Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)									
19	a. daging	6.20	Gr/kap/hr	5.75	5,87	5.82	5,914	5,95	>
20	b. telur	4.65		4.10	3,97	3.89	3.977	4,35	<
21	c. susu	0.11		0.06	0,02	0.02	0.03	0,08	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = Indikator negatif, diseimbangkan/diseraskan dengan kontribusi sektor penyumbang PDRB lainnya.
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2017 dan Dispeterikan, 2018.

Indikator kinerja pembangunan urusan pilihan pertanian yang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 diukur dari 21 indikator, diampu oleh dua SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Pangan (9 indikator) dan Dinas Peternakan dan Perikanan (12 indikator).

Hasil evaluasi menunjukkan, pada tahun 2017 dari 9 indikator kinerja program yang diampu Dinas Pertanian dan pangan, sebanyak 6 indikator berstatus melampaui target dan 3 indikator berstatus belum tercapai. Capaian ini menurun dibanding tahun 2016, dimana dari 9 indikator, 7 indikator berstatus melampaui target dan 2 indikator berstatus belum tercapai.

Indikator produksi jagung dan produktivitas jagung belum tercapai karena lahan yang digunakan untuk komoditas padi dan jagung adalah sama, padi dan jagung ditanam secara bergiliran. Padi ditanam saat air mencukupi dan jagung ditanam saat musim kering. Sementara itu, pada tahun 2017, curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun, lahan cenderung basah, sehingga pertanaman padi lebih luas dibanding jagung. Luas tanaman padi yang lebih luas, mengakibatkan luas tanaman jagung menurun, dan produktivitasnya juga menurun, sehingga target tidak tercapai.

Hasil evaluasi kinerja urusan pertanian yang diampu Dinas Peternakan dan Perikanan terlihat dari sebanyak 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, pada tahun 2017 sebanyak 3 indikator melampaui target, 1 indikator tercapai dan 8 indikator belum tercapai. Apabila dibandingkan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami penurunan, karena tahun 2016 dari 12 indikator kinerja 9 indikator berstatus melampaui target, 3 indikator berstatus belum tercapai.

2.2.3.3.2. KEHUTANAN

Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut

Tabel 2.182.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	2.822	ha	2.538	NA	1.834	2,478	2.680	Kewenangan provinsi
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan (%)	4.66	Persen	4.75	3,92	4.66	5,96	4,70	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja pembangunan urusan kehutanan, 1 indikator kinerja berstatus melampaui target yaitu Indikator prosentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sector pertanian/perkebunan dan 1 indikator tidak bisa dievaluasi karena sudah menjadi kewenangan Provinsi. Indikator diatas melampaui target karena hasil hutan rakyat sebagai penyumbang PDRB mengalami kenaikan.

2.2.3.3.3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.183.
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Pertambangan Berijin	50	Persen	30	NA	28.69	14	40	Kewenangan provinsi
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2.64	Persen	2,63	4,35	2.90	5,02	2,64	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: DPU & BPS Kabupaten Magelang. 2017

Tabel capaian indikator kinerja di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator capaian kinerja urusan pertambangan, 1 indikator berstatus telah melampaui target dan 1 indikator berstatus tidak bisa dievaluasi.

Indikator kinerja program yang tercapai adalah indikator Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%). Indikator ini dapat melampaui target karena potensi pertambangan di Kabupaten Magelang cukup besar dan terjadi peningkatan pemanfaatan sektor pertambangan sehingga sumbangannya terhadap pendapatan daerah meningkat.

Indikator program urusan pertambangan yang tidak tercapai adalah Persentase Pertambangan Berijin. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah karena pada tahun 2016 target pertambangan berijin di RKPD sejumlah 20 surat ijin pertambangan, namun realisasinya sampai akhir tahun 2016 yang diterbitkan adalah 14 surat rekomendasi. Hal ini disebabkan mulai tahun 2016 urusan pertambangan berpindah menjadi kewenangan Provinsi.

2.2.3.3.4. PARIWISATA

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.184.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2016		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kunjungan Wisata: Manca Negara	860.549	Orang	607.689	337.515	253.358	413.306	723.151	<
2	Kunjungan Wisata: Nusantara	6.594.051	Orang	5.392.611	4.510.363	4.148.375	4.753.255	5.963.149	<
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.89	persen	6.36	4,30	4,75	4,10	6,63	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan pariwisata, semua indikator tersebut belum mencapai target. Kondisi capaian ini sama dengan tahun 2016 dimana ketiga indikator kinerja program tidak tercapai.

2.2.3.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.185.
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Produksi Perikanan (Benih)	2 .000	Juta ekor	1.500.000	1.717.550	1.269.41	1.419.973,14	1.750	>
2	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	Ton	16.000.000	21.058.460	16.868.11	17.483,12	16.800	>
3	Produksi Perikanan Tangkap	263.57	Ton	243,68	275,90	285.3	282,98	253,43	>
4	Konsumsi Ikan	15.75	Kg/kap/ tahun	15,00	18,61	14.51	15,50	15,30	>
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sector Pertanian	2.68	Persen	2,55	2,82	2.38	3,07	2,62	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan, semua indikator kinerja berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah :

- (1). Perbaikan sarana dan prasarana perikanan
- (2). Perbaikan mutu benih ikan
- (3). Pembinaan kelembagaan dan kelompok pembudidayaan ikan
- (4). Peningkatan pelayanan kesehatan ikan
- (5). Gerakan memasyarakatkan makan ikan

2.2.3.2.6. PERDAGANGAN

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.186.
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9.98	Persen	10.04	13,41	124,09	13,75	10,01	>
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$	88.6	88,5	115,19	101,83	88,80	<

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13.55	Persen	1.80	20,56	169,23	4,84	1,79	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja urusan perdagangan, 2 indikator berstatus melampaui target dan 1 indikator berstatus tidak mencapai target. Yang mencapai target indikator kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB dan cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2016 yang mana ketiga indikator tersebut mencapai target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan perdagangan adalah

- Pemberikan pelayanan yang baik di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar pada masyarakat
- Memfokuskan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategik SKPD dan RPJMD sehingga indikator kinerja dapat tercapai.
- Melakukan penjadwalan pada awal tahun anggaran dan menepati jadwal yang ditetapkan.
- Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun.
- Menjadikan hasil evaluasi dan pelaporan tahun ini sebagai pedoman perbaikan untuk proses pencapaian kinerja pada tahun berikutnya,
- Pemanfaatan sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien

2.2.3.2.7. PERINDUSTRIAN

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.187.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16.83	Persen	2,81	0,72	3.7	0,71	2,81	<
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17.95	Persen	18,11	22,66	18.80	22,50	18,03	>
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	3.76	Persen	3,76	2,88	2.95	2,95	3,76	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan perindustrian, 2 indikator berstatus belum tercapai dan 1 indikator kinerja berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) adalah : (1). Peluang pasar yang semakin terbuka di tingkat regional, nasional maupun ekspor luar negeri bagi produk-produk industri Kabupaten Magelang memberikan efek bagi peningkatan kapasitas industri dan tenaga kerja; (2). Tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi serta meningkatnya pendapatan perkapita berimbas pada naiknya permintaan produk produk industri khususnya industri yang berada di Kabupaten Magelang.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin adalah adanya keterbatasan SDM aparatur pembina industri kecil menengah dan sebagian besar kelompok pengrajin belum siap menerima program pembinaan lanjutan sehingga hanya pengrajin yang siap yang diikutsertakan dalam program pembinaan menuju pengrajin/industri mandiri. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator Pertumbuhan Sektor Industri adalah adanya pengrajin/industri kecil yang beralih profesi menjadi tenaga kerja di industri menengah/besar. Selain itu, sebagian besar pengrajin/industri kecil baru belum mampu menciptakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pendampingan/program pemerintah sehingga belum mampu melakukan aktivitas usaha secara kontinue, belum bisa dianggap sebagai indutri baru yang dihitung dalam perhitungan pertumbuhan sektor industri.

2.2.3.4. FOKUS LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.3.4.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 4 indikator. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.188.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	ada	Dokumen	ada	ada	Ada	ada	Ada	=
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	Dokumen	ada	ada	Ada	ada	Ada	=
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Dokumen	ada	ada	Ada	ada	Ada	=
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	87,03	100	100	100	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 4 indikator kinerja program urusan perencanaan pembangunan, yang tidak tercapai hanya 1 indikator dan 3 indikator lain tercapai. Keberhasilan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan di dorong oleh:

1. Ketersediaan anggaran untuk menyusun dokumen perencanaan
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Adanya partisipasi aktif seluruh SKPD di Kabupaten Magelang dan stakeholder perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
4. Adanya ketaatan perumusan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan kabupaten.

2.2.3.4.1. KEUANGAN

Kinerja pembangunan Urusan diukur dengan satu indikator, yaitu: Prosentase peningkatan PAD. Dari target peningkatan PAD 12,02 per tahun, pada tahun 2017 hanya tercapai 7,42 persen, dengan demikian capaian kinerja hanya sebesar 67,73 persen.

Tabel 2.189.
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12.02	7,42	39.74	10,30	12,02	<

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran.

Untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja indikator program target akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2017 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2017 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut:

$$Rp = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

- Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran
- X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2017
- Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan SKPD selengkapny tersaji pada uraian berikut:

2.3.1. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISDIKBUD)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 7 (tujuh) urusan dan 21 (dua puluh satu) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar

101,35% dengan predikat **‘sangat tinggi’** sementara capaian kineja anggaran sebesar 92,25% dengan predikat **‘sangat tinggi’**

Tingkat ketercapaian target kinerja program ssampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	4	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 239.389.196.612, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.824.434.807,-, atau 92,25% dengan predikat kinerja **“sangat tinggi”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	7	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	12	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.190.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	290,82	Sangat Tinggi	1.190.000.000	1.190.000.000	989.958.107	83,19	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	94,25	Sangat Tinggi	4.038.141.600	4.038.141.600	3.685.466.996	91,27	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan disiplin aparatur	73,85	Sedang	360.000.000	360.000.000	335.109.860	93,09	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.499.350	98,00	Sangat Tinggi
5	Program Pendidikan anak usia dini	42,86	Sangat Rendah	728.200.335	728.200.335	678.668.041	93,20	Sangat Tinggi
6	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	95,79	Sangat Tinggi	197.466.972.597	197.466.972.597	181.276.768.057	91,80	Sangat Tinggi
7	Program Pendidikan Menengah	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
8	Program Pendidikan Non Formal	40,00	Sangat Rendah	1.970.845.000	1.970.845.000	1.720.538.190	87,30	Tinggi
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	105,42	Sangat Tinggi	4.253.586.700	4.253.586.700	4.113.854.470	96,71	Sangat Tinggi
10	Program Pendidikan Tinggi	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	114,29	Sangat Tinggi	22.483.168.380	22.483.168.380	21.680.877.876	96,43	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
12	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	300,00	Sangat Tinggi	250.000.000	250.000.000	244.509.750	97,80	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	49.881.800	99,76	Sangat Tinggi
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
14	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	80,68	Tinggi	150.000.000	150.000.000	130.087.310	86,72	Tinggi
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100,00	Sangat Tinggi	180.000.000	180.000.000	121.222.770	67,35	Sedang
16	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100,00	Sangat Tinggi	310.000.000	310.000.000	303.430.710	97,88	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
17	Program Pengembangan Nilai Budaya	90,69	Sangat Tinggi	2.294.147.000	2.294.147.000	2.115.687.395	92,22	Sangat Tinggi
18	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	87,50	Tinggi	288.883.000	288.883.000	268.698.020	93,01	Sangat Tinggi
19	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	91,07	Sangat Tinggi	1.160.652.000	1.160.652.000	1.124.070.525	96,85	Sangat Tinggi
	KEUANGAN							

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat tinggi	2.014.600.000	2.014.600.000	1.787.090.700	88,71	Tinggi
	KEPEGAWAIAN							
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	120,83	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	174.014.880	99,44	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		101,34	Sangat Tinggi	239.389.196.612	239.389.196.612	220.824.434.807	92,25	Sangat Tinggi

2. DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan 21 (dua puluh satu) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **113,38 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	18	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.179.420.459.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.123.792.159.284,- atau **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	8	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	11	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Telah tersusunnya rencana kerja di tiap kegiatan.
- 2) Komitmen bersama pegawai Dinas Kesehatan untuk merealisasikan anggaran.

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja sangat rendah tidak terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Khususnya kegiatan Jampersal. Hal ini dikarenakan adanya regulasi penggunaan anggaran yang belum jelas.

Tabel 2.191.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,20	Sangat Tinggi	761.219.000	761.219.000	673.017.858	88,41	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201,92	Sangat Tinggi	4.453.596.963	4.453.596.963	4.003.594.715	89,90	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,98	Sangat Tinggi	145.695.000	145.695.000	136.857.110	93,93	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.454.900	97,82	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB KESEHATAN							
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	110,54	Sangat Tinggi	7.982.912.400	7.982.912.400	7.501.539.235	93,97	Sangat Tinggi
6	Program upaya kesehatan masyarakat	94,50	Sangat Tinggi	15.104.878.321	15.104.878.321	8.793.474.775	58,22	Sedang
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	58,48	Sedang	110.000.000	110.000.000	106.005.660	96,37	Sangat Tinggi
8	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	250,00	Sangat Tinggi	470.000.000	470.000.000	461.799.880	98,26	Sangat Tinggi
9	Program Perbaikan gizi masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	700.934.000	700.934.000	667.208.229	95,19	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	103,70	Sangat Tinggi	347.200.000	347.200.000	340.181.780	97,98	Sangat Tinggi
11	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	86,90	Tinggi	1.728.244.000	1.728.244.000	1.472.861.889	85,22	Tinggi
12	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	156,07	Sangat Tinggi	512.528.000	512.528.000	465.382.230	90,80	Sangat Tinggi
13	Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	297,85	Sangat Tinggi	29.735.606.632	29.735.606.632	24.059.095.033	80,91	Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	116,67	Sangat Tinggi	19.375.345.463	19.375.345.463	15.367.221.606	79,31	Tinggi
15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	35.625.400	71,25	Sedang
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	300,00	Sangat Tinggi	16.000.000	16.000.000	13.599.600	85,00	Tinggi
17	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100,00	Sangat Tinggi	21.961.600	21.961.600	21.120.600	96,17	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak.	91,67	Sangat Tinggi	3.379.994.000	3.379.994.000	63.470.500	1,88	Sangat Rendah
19	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	75,26	Tinggi	94.472.601.621	94.472.601.621	59.561.083.484	63,05	Sedang
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	13.085.240	87,23	Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	11.742.000	11.742.000	11.479.560	97,76	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		113,38	Sangat Tinggi	179.420.459.000	179.420.459.000	123.792.159.284	69,00	Sedang

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN (RSUD MUNTILAN)

RSUD Muntilan pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **102,75 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **83,71%** dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 86.785.995.561,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 66.104.867.024,- atau **83,71%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD RSUD Muntilan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	1	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Kesiapan SDM Pemberi Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kesiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 2.192.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD MUNTILAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	BIDANG KESEHATAN							
1	Program pengadaan Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata	100	Sangat Tinggi	9.609.261.900	9.609.261.900	8.973.970.580	93,39	Sangat Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	105	Sangat Tinggi	77.176.733.661	77.176.734.161	57.130.896.444	74,03	Sedang
TOTAL RATA-RATA		102,75	Sangat Tinggi	86.785.995.561	86.785.996.061	66.104.867.024	83,71	Tinggi

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)

DPUPR pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 6 (enam) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan dan 24 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **91,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	23	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.365.140.922.163,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.302.355.605.394,- atau **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPUPR, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :

- 1) Memacu pelaksanaan pekerjaan dengan penambahan jam kerja / lembur
- 2) Pengawasan pekerjaan oleh pengawas dan penanggung jawab pekerjaan lebih intensif agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan target fisik tercapai

- 3) Koordinasi ke ULP lebih diintensifkan, agar penyerahan dokumen pemenang lelang segera disampaikan ke SKPD
- 4) Diadakan rapat tiap bulan untuk pejabat struktural , PPKom, pengawas sebagai sarana monitoring dan mendorong capaian target pekerjaan

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Adanya jadwal mundur pelaksanaan pengadaan/lelang di ULP.
- 2) Adanya review desain di beberapa paket kegiatan .
- 3) Pelimpahan berkas pemenang lelang dari ULP ke SKPD terlambat

Tabel 2.193.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPU-PR

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	PEKERJAAN UMUM							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	677.381.825	677.381.825	625.511.551	92,34	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	45.478.716.350	45.478.716.350	42.549.498.094	93,56	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	34.340.000	34.340.000	33.233.500	96,78	Sangat Tinggi
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	90,79	Sangat Tinggi	132.586.251.140	132.586.251.140	109.125.886.268	82,31	Tinggi
5	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	94,45	Sangat Tinggi	10.019.921.000	10.019.921.000	7.676.133.145	76,61	Tinggi
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	49.224.847.679	49.224.847.679	45.517.788.529	92,47	Sangat Tinggi
7	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	86.798.000	86.798.000	52.907.500	60,95	Rendah
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100,00	Sangat Tinggi	1.119.787.550	1.119.787.550	1.076.628.206	96,15	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	365.644.000	365.644.000	356.405.100	97,47	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	99,24	Sangat Tinggi	35.024.614.549	35.024.614.549	28.731.007.483	82,03	Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan R.S. Mata	15,00	Sangat Rendah	35.287.285.000	35.287.285.000	16.024.805.250	45,41	Sangat Rendah
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	100,00	Sangat Tinggi	9.014.684.720	9.014.684.720	8.418.240.488	93,38	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	Sangat Tinggi	42.500.000	42.500.000	41.525.800	97,71	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100,00	Sangat Tinggi	929.911.000	929.911.000	805.981.311	86,67	Tinggi
15	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	100,00	Sangat Tinggi	143.375.000	143.375.000	139.839.738	97,53	Sangat Tinggi
	PERUMAHAN							
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	140.000.000	140.000.000	137.861.500	98,47	Sangat Tinggi
	PENATAAN RUANG							
17	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	300.000.000	300.000.000	276.334.050	92,11	Sangat Tinggi
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	287.150.000	287.150.000	231.244.669	80,53	Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
19	Program Pengembangan Data / Informasi	50,00	Sangat Rendah	24.415.350	24.415.350	4.411.000	18,07	Sangat Rendah
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	22.645.000	22.645.000	22.373.900	98,80	Sangat Tinggi
	LINGKUNGAN HIDUP							
21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	378.600.000	378.600.000	324.425.300	85,69	Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	44.430.000	44.430.000	42.774.325	96,27	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	Sangat Tinggi
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERDAGANGAN							
24	Program Peningkatan Sarana Perdagangan	41,00	Sangat Rendah	43.763.724.000	43.763.724.000	40.002.151.787	91,40	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,27	Sangat Tinggi	365.140.922.163	365.140.922.163	302.355.605.394	82,81	Tinggi

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 8 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,31% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.814.745.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 2.570.104.650,- atau sebesar 91,31% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPRKP , sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada SKPD DPRKP adalah adanya anggaran perubahan yang sudah bisa direalisasi dari bulan November sampai dengan Desember dengan keterbatasan waktu, maka ada beberapa yang belum terserap. Terdapat 21 pengadaan, baik pengadaan barang maupun jasa di anggaran perubahan sudah terealisasi semua.

Tabel 2.194.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Wajib							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	256.113.675	256.113.675	216.421.594	84,50	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	398.125.600	398.125.600	350.952.634	88,15	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	11.831.000	11.831.000	11.680.550	98,73	Tinggi
4	Program Pembangunan Perumahan	100,00	sangat tinggi	1.374.319.225	1.374.319.225	1.248.304.962	90,83	Tinggi
5	Program Lingkungan sehat Perumahan	100,00	sangat tinggi	353.400.500	353.400.500	332.796.900	94,17	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	11.355.000	11.355.000	9.899.700	87,18	Tinggi
7	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	sangat tinggi	149.600.000	149.600.000	147.582.810	98,65	sangat tinggi
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	100,00	sangat tinggi	260.000.000	260.000.000	252.465.500	97,10	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	sangat tinggi	2.814.745.000	2.814.745.000	2.570.104.650	91,31	sangat tinggi

5. SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satpol PP dan PK pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 125,36% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,61% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 11.156.295.180,-. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 10.443.228.709,- atau 93,61%, dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Satpol PP dan PK, sebagai berikut:, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 2) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis;
- 3) Hanya ada 1 kegiatan yang capaian kinerjanya kurang dari 100%, yaitu kegiatan Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi). Hal ini disebabkan ada 1 subkegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu backup pengamanan eksekusi Plaza Muntilan.

Tabel 2.195.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,38	Sangat Tinggi	262.092.500	262.092.500	253.746.856	96,82	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	539.431.000	539.431.000	472.440.883	87,58	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	369.319.000	369.319.000	339.618.500	91,96	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	6.525.000	6.525.000	5.443.500	83,43	Tinggi
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	137,27	Sangat Tinggi	1.171.118.380	1.171.118.380	1.152.620.800	98,42	Sangat Tinggi
6	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	367.392.000	367.392.000	360.484.235	98,12	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	100,00	Sangat Tinggi	7.785.912.920	7.785.912.920	7.359.719.635	94,53	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	Sangat Tinggi	22.134.000	22.134.000	22.066.400	99,69	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	395.390.000	395.390.000	377.261.400	95,42	Sangat Tinggi
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	61,07	Rendah	236.980.380	236.980.380	99.826.500	42,12	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA		125,36	Sangat Tinggi	11.156.295.180	11.156.295.180	10.443.228.709	93,61	Sangat Tinggi

6. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPKB PPPA)

Dinsos PPKB PPPA pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 23 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **83,37 %** dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	4	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.9.686.038.235,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.8.395.172.340,- atau **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	10	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinsos PPKB PPPA, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	4	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra dan Renja Dinsos PPKB PPPA adalah :

1. Terdapat beberapa kegiatan baru yang tidak direncanakan di dalam Renstra diusulkan dalam Renja.
2. Beberapa usulan baru di dalam Renstra merupakan kebijakan baru di bidang sosial, tetapi masih terdapat usulan dengan skala prioritas yang masih kurang.
3. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang.
4. Ada kegiatan yang dapat dilaksanakan setelah anggaran perubahan, sehingga pelaksanaan menjadi terlambat, yaitu kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (Silpa DAK 2016) dan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Silpa DAK Non Fisik 2016).

Tindak Lanjut

1. Kegiatan baru bisa diusulkan dalam renja sepanjang terdapat dasar yang kuat dan merukan tindak lanjut suatu kebijakan atau merupakan kegiatan yang mendesak untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan.
2. Pengusulan kegiatan baru harus disertai bukti dukung kebijakan atau data yang valid, sehingga dapat diajukan kegiatan baru.
3. Dilakukan Penggabungan beberapa kegiatan yang sejenis untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan.

Tabel 2.196.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52,08	Rendah	380.933.000	380.933.000	337.122.819	88,50	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66,67	Sedang	1.257.599.000	1.257.599.000	767.553.847	61,03	Rendah
3	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	64.400.000	64.400.000	57.555.250	89,37	Tinggi
4	Program Keluarga Berencana	80,10	Tinggi	2.285.956.235	2.285.956.235	2.072.250.550	90,65	Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	6.050.000	6.050.000	5.503.000	90,96	Tinggi
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94,76	Sangat Tinggi	373.100.000	373.100.000	322.444.250	86,42	Tinggi
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	89,60	Tinggi	2.139.176.000	2.139.176.000	1.992.813.325	93,16	Sangat Tinggi
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75,00	Sedang	74.300.000	74.300.000	74.299.400	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	88,33	Tinggi	863.444.000	863.444.000	716.621.170	83,00	Tinggi
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98,81	Sangat Tinggi	360.000.000	360.000.000	313.815.030	87,17	Tinggi
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	76.592.000	76.592.000	73.520.400	95,99	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	94,86	Sangat Tinggi	434.495.000	434.495.000	385.135.600	88,64	Tinggi
13	Program Pembinaan Anak Terlantar	100,00	Sangat Tinggi	100.000.000	100.000.000	97.259.345	97,26	Sangat Tinggi
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	74,13	Sedang	40.000.000	40.000.000	29.650.000	74,13	Sedang
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	285.800.000	285.800.000	271.953.964	95,16	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	284.395.000	284.395.000	267.500.170	94,06	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100,00	Sangat Tinggi	253.507.000	253.507.000	247.122.335	97,48	Sangat Tinggi
18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	99,91	Sangat Tinggi	232.903.000	232.903.000	232.833.000	99,97	Sangat Tinggi
19	Program Pembinaan Panti Jompo	74,36	Sedang	20.000.000	20.000.000	15.399.950	77,00	Tinggi
20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	100,00	Sangat Tinggi	36.890.000	36.890.000	36.504.410	98,95	Sangat Tinggi
21	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100,00	Sangat Tinggi	48.500.000	48.500.000	48.314.600	99,62	Sangat Tinggi
22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	29.999.925	100,00	Sangat Tinggi
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	37.998.000	37.998.000	34.149.310	89,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		83,37	Tinggi	9.686.038.235	9.686.038.235	8.395.172.340	86,67	Tinggi

7. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **90,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,21%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.125.747.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.960.098.045,- atau **92,21 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kesbangpol, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah fasilitas Kantor yang memadai. Sedangkan faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah jumlah beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada.

Tabel 2.197.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Kesbangpol

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	106,33	Sangat Tinggi	213.772.000	213.772.000	203.077.491	95,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	140.274.000	140.274.000	119.516.008	85,20	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	12.969.000	99,76	Sangat Tinggi
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	500.900.000	500.900.000	464.915.752	92,82	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76,25	Tinggi	236.116.000	236.116.000	230.215.140	97,50	Sangat Tinggi
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	96,51	Sangat Tinggi	526.685.000	526.685.000	493.046.448	93,61	Sangat Tinggi
7	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	100,00	Sangat Tinggi	350.000.000	350.000.000	294.527.600	84,15	Tinggi
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	135.000.000	135.000.000	133.745.606	99,07	Sangat Tinggi
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	33,33	Sangat Rendah	10.000.000	10.000.000	8.085.000	80,85	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		90,27	Sangat Tinggi	2.125.747.000	2.125.747.000	1.960.098.045	92,21	Sangat Tinggi

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BPBD pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 117,08% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 90,40% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 4.737.285.000,-. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 4.163.597.697,- atau sebesar **90,40%**, dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.
2. Adanya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan.
3. Ketersediaan dana tepat waktu.
4. Tercukupinya sarana prasarana pendukung.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.

Tabel 2.198.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120,89	Sangat Tinggi	361.711.000	361.711.000	320.720.348	88,67	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	98,34	Sangat Tinggi	792.560.000	792.560.000	655.356.050	82,69	Tinggi
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94,00	Sangat Tinggi	80.000.000	80.000.000	75.206.430	94,01	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Sangat Tinggi	16.366.000	16.366.000	14.240.840	87,01	Tinggi
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	121	Sangat Tinggi	73.930.000	73.930.000	68.589.325	92,78	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	200,00	Sangat Tinggi	8.275.000	8.275.000	7.664.000	92,62	Sangat Tinggi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	100,00	Sangat Tinggi	70.000.000	70.000.000	62.026.798	88,61	Tinggi
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	119,15	Sangat Tinggi	3.241.914.000	3.241.878.000	2.868.419.536	88,48	Tinggi
9	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100,00	Sangat Tinggi	92.529.000	92.529.000	91.374.370	98,75	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	117,08	Sangat Tinggi	4.737.285.000	4.737.249.000	4.163.597.697	90,40	Tinggi

2.3.1.2. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 6 urusan dan program. Tingkat ketercapaian target kinerja akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, secara total 100,74 % dengan status **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2017 sebesar Rp 7.799.539.000,00 dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 7.075.653.222,00 atau 90,72 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Secara umum, tidak ada permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja fisik maupun penyerapan anggaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2017, hal ini terlihat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai. Hal ini dapat tercapai berkat komitmen bersama, etos kerja serta kerjasama yang baik pada internal SKPD maupun dengan pihak lain yang berkepentingan dan berperan

dalam pencapaian kinerja serta melakukan pembenahan dan perbaikan serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.

Tabel 2.199.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	116,52	Sangat Tinggi	446.930.000	446.930.000	433.884.867	97,08	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,08	Sangat Tinggi	1.372.897.000	1.372.897.000	1.208.567.545	88,03	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94,23	Sangat Tinggi	39.759.000	39.759.000	35.363.330	88,94	Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.129.450	96,52	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	26.707.890	97,12	Sangat Tinggi
	KETENAGAKERJAAN							
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	1.981.414.000	1.981.414.000	1.925.079.438	97,16	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100,74	Sangat Tinggi	1.695.453.000	1.695.453.000	1.596.865.371	94,19	Sangat Tinggi
8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	99,61	Sangat Tinggi	288.759.000	288.759.000	281.497.760	97,49	Sangat Tinggi
	KOPERASI & UKM							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	80.180.000	80.180.000	73.946.800	92,23	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	170.000.000	170.000.000	165.127.350	97,13	Sangat Tinggi
	PERINDUSTRIAN							
11	Program Penataan Struktur Industri	100,00	Sangat Tinggi	87.122.000	87.122.000	76.294.500	87,57	Tinggi
12	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	100,00	Sangat Tinggi	1.410.893.000	1.410.893.000	1.083.789.941	76,82	Tinggi
	TRANSMIGRASI							
13	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	84,90	Sangat Tinggi	173.632.000	173.632.000	144.398.980	83,16	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,74	Sangat Tinggi	7.799.539.000	7.799.539.000	7.075.653.222	90,72	Tinggi

2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 9 (sembilan) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,18 dengan predikat **‘sangat tinggi’** sementara capaian kinerja anggaran sebesar 21,56% dengan predikat **‘sangat rendah’**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 8,318,454,350, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,793,381,754,-, atau 21,56% dengan predikat kinerja **“sangat rendah”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dialokasikan Rp. 6.160.872.000 belum dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terkait pengukuran awal sebelum appraisal
 - b. Konsultasi publik atas rencana pengadaan tanah sesuai lokasi tanah yang dipilih.
 - c. Penganggaran biaya pengukuran awal sebelum appraisal guna memastikan luasan tanah yang akan dilakukan pembayaran.
 - d. Melakukan sinergisitas program kegiatan yang dirancang dalam masterplan pengembangan Perpustakaan dengan rencana program kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 2.200.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN 1 Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130	Sangat tinggi	311,733,000	311,733,000	265,659,687	85.22	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.95	Tinggi	6,524,543,500	6,524,543,500	296,473,427	4.54	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	4,658,865	93.18	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	103.38	Sangat tinggi	993,336,150	993,336,150	754,904,420	76.00	Tinggi
5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	Sangat tinggi	22,814,000	22,814,000	22,248,900	97.52	Sangat Tinggi
6	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	100	Sangat tinggi	211,000,000	211,000,000	208,131,400	98.64	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	100	Sangat tinggi	231,877,700	231,877,700	223,986,000	96.60	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat tinggi	14,650,000	14,650,000	14,282,050	97.49	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.33	Sangat rendah	3,500,000	3,500,000	3,037,005	86.77	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		94.18	Sangat tinggi	8,318,454,350	8,318,454,350	1,793,381,754	21.56	Sangat Rendah

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 10.221.263.175,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.651.110.341,-. atau 94,91% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.201.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	93,52	Sangat Tinggi	551.696.600	551.696.600	515.938.474	93,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	92,86	Sangat Tinggi	5.190.278.100	5.190.278.100	4.819.461.903	92,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,64	Sangat Tinggi	22.000.000	22.000.000	21.480.500	97,64	Sangat Tinggi
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	96,92	Sangat Tinggi	3.118.832.500	3.118.832.500	3.022.894.657	96,92	Sangat Tinggi
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90,10	Sangat Tinggi	355.087.000	355.087.000	319.922.380	90,10	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	96,78	Sangat Tinggi	853.368.975	853.368.975	825.865.547	96,78	Sangat Tinggi
	URUSAN STATISTIK							
7	Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	96,57	Sangat Tinggi	130.000.000	130.000.000	125.546.880	96,57	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		94,91	Sangat Tinggi	10.221.263.175	10.221.263.175	9.651.110.341	94,91	Sangat Tinggi

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 8 (delapan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 102,8 % dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,18% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.1.973.105.800,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.799.005.437,- atau 91,18%% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPMPTSP secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Adanya dukungan anggaran dari APBD.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- 3) Adanya dukungan SDM yang cukup memadai

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Penetapan APBD yang tidak tepat waktu, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat.
- 2) Rata-rata, setiap pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 1 th, sehingga target 100 % baru akan tercapai pada akhir tahun, karena dalam laporan Evaluasi Realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) Tribulan, maka pada umumnya capaian kinerja untuk tribulan I, II dan III masih rendah.
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada tribulan IV.

Tabel 2.202.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,72	Sangat Tinggi	252.521.000	252.521.000	241.263.892	95,54	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	472.839.000	472.839.000	417.237.456	88,24	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.419.400	94,19	sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB							
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100,00	Sangat Tinggi	507.051.000	507.051.000	435.653.834	85,92	Tinggi
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	99,80	Sangat Tinggi	545.594.800	545.594.800	514.745.705	94,35	Sangat Tinggi
6	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	100,00	Sangat Tinggi	52.500.000	52.500.000	51.790.375	98,65	Sangat tinggi
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasin	100,00	Sangat Tinggi	49.600.000	49.600.000	47.503.875	95,77	Sangat Tinggi
8	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	97,83	Sangat Tinggi	83.000.000	83.000.000	81.390.900	98,06	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		102,79	Sangat Tinggi	1.973.105.800	1.973.105.800	1.799.005.437	91,18	Sangat Tinggi

5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 12 (dua belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **108,01%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **67,78 %** dengan predikat **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.37.449.020.188,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.25.382.634.623,- atau **67,78 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

- 1) Terbatasnya SDM karena adanya Diklat teknis pegawai maupun Diklat PIM III dan PIM IV.
- 2) Sulitnya mencari lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Saran Tindak Lanjut:

- 1) Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak yang berjauhan, baik saat diklat maupun tugas luar.
- 2) Pendekatan kepada warga calon lokasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 3) Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
- 4) Memaksimalkan bantuan kerja supporting staf.
- 5) Menambah jam kerja dengan memanfaatkan anggaran lembur.

Tabel 2.203.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	115,13	Sangat Tinggi	452.900.000	452.900.000	432.609.585	95,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.251.565.000	1.251.565.000	1.199.751.925	95,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.779.950	98,90	Sangat Tinggi
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	90,10	Tinggi	22.175.197.000	22.175.197.000	10.534.426.970	47,51	Sangat Rendah
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	152,44	Sangat Tinggi	2.803.304.500	2.803.304.500	2.672.013.500	95,32	Sangat Tinggi
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	109,09	Sangat Tinggi	3.095.115.587	3.095.115.587	3.063.405.487	98,98	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi	265.000.000	265.000.000	254.243.866	95,94	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100,00	Sangat Tinggi	228.221.101	228.221.101	211.859.500	92,83	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.441.025	97,21	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,00	Sangat Tinggi	359.726.000	359.726.000	356.118.590	99,00	Sangat Tinggi
11	Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	147,22	Sangat Tinggi	110.000.000	110.000.000	81.610.850	74,19	Sedang
12	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.667.991.000	6.667.991.000	6.537.373.375	98,04	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	108,01	Sangat Tinggi	37.449.020.188	37.449.020.188	25.382.634.623	67,78	Sedang

6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 2 urusan dan 4 program. Tingkat ketercapaian target kinerja program RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara total **91,85%** atau dengan predikat **Sangat Tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 sebesar Rp. 8.279.247.400,00 Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 6.674.771.528,00 maka prosentase realisasi capaian anggaran sebesar **80,62%** dengan status capaian **tinggi**. Perincian jumlah program sesuai status capaian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.204.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	90,94	Tinggi	310.266.000	310.266.000	281.764.820	90,81	Tinggi
2	Program Pening. Sarpras Aparatur	87,18	Tinggi	1.349.575.020	1.349.575.020	1.170.071.751	86,70	Tinggi
3	Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Kinerja	100,00	Sangat Tinggi	15.300.000	15.300.000,00	14.041.875	91,78	Sangat Tinggi
	URUSAN Kependudukan & Capil							
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	89,26	Tinggi	6.604.106.380	6.604.106.380	5.208.893.082	78,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,85	Sangat Tinggi	8.279.247.400	8.279.247.400	6.674.771.528	80,62	Tinggi

7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMADES)

Kinerja dan anggaran yang akan dievaluasi pada pelaksanaan program pada SKPD Dispermasdes yang terdiri dari 13 (Tiga belas) program. Tingkat ketercapaian target kinerja RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dari seluruh program diperoleh hasil rata-rata kinerja fisik sebesar **97,98%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. **5.602.019.225,-**. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. **5.159.781.508,-** atau **92,11%**, dengan status capaian **sangat tinggi**. Perincian prosentase realisasi capaian anggaran dan status capaian per program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Terjalinya koordinasi yang baik antar lini di SKPD;
- 2) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 3) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.

Tabel 2.205.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	285.200.000	285.200.000	296.855.627	104,09	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	682.957.000	682.957.000	564.528.715	82,66	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	12.161.500	12.161.500	11.120.475	91,44	Sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	19.378.925	19.378.925	19.274.000	99,46	sangat tinggi
	PERTANAHAN							
5	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	100,00	sangat tinggi	248.440.000	248.440.000	240.786.990	96,92	sangat tinggi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK							
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	sangat tinggi	76.184.000	76.184.000	72.416.100	95,05	sangat tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	99,00	sangat tinggi	486.740.000	486.740.000	477.070.428	98,01	sangat tinggi
	OTONOMI, PEMERINTAHAN & KEUANGAN							
8	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	sangat tinggi	242.690.000	242.690.000	218.828.045	90,17	Tinggi
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100,00	sangat tinggi	178.900.000	178.900.000	157.260.845	87,90	Tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	sangat tinggi	430.662.000	430.662.000	397.137.700	92,22%	sangat tinggi
11	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100,00	sangat tinggi	659.893.800	659.893.800	628.375.540	95,22%	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99,00	sangat tinggi	1.014.280.000	1.014.280.000	945.383.678	93,21%	sangat tinggi
13	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	75,75	sedang	1.264.532.000	1.264.532.000	1.130.743.365	89,42%	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,98	sangat tinggi	5.602.019.225	5.602.019.225	5.159.781.508	92,11%	sangat tinggi

8. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 95,91% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 67,21% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai aakhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 43.215.485.500,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 29.045.199.904,- atau sebesar 67,21% dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- kurangnya pencermatan dalam rencana pelaksanaan dan alur kas yang telah dibuat; dan
- kurangnya koordinasi antara PPKom, Panitia Pengadaan dan PPTK.

Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya kinerja program adalah : telah terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang aktif antara PPTK dengan PPKom, Panitia Pengadaan dan Instansi terkait.

Tabel 2.206.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	75,00	Sedang	37.501.825.000	37.501.825.000	24.104.704.247	64,28	Rendah
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	694.891.000	694.891.000	593.807.946	85,45	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.721.529.650	1.721.529.650	1.577.767.140	91,65	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	14.500.000	14.500.000	14.492.375	99,95	Sangat Tinggi
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.979.225	99,77	Sangat tinggi
	URUSAN PEMBANGUNAN							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	813.301.000	813.301.000	718.408.376	88,33	Tinggi
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100,00	Sangat Tinggi	356.300.000	356.300.000	301.382.075	84,59	Tinggi
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100,00	Sangat Tinggi	913.921.850	913.921.850	826.962.330	90,49	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	286.000.000	286.000.000	279.796.505	97,83	Sangat Tinggi
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	80,00	Tinggi	701.050.000	701.050.000	419.293.785	59,81	Rendah
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100,00	Sangat Tinggi	203.167.000	203.167.000	199.605.900	98,25	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		95,91	Sangat Tinggi	43.215.485.500	43.215.485.500	29.045.199.904	67,21	Sedang

2.3.1.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 5 (lima) urusan dan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,45% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 68,84% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 28.400.013.498,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.19.550.029.291,- atau 68,84% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Tertib secara administrasi
- 2) Mematuhi Rencana Kerja Operasional (RKO) yang sudah disusun oleh masing-masing PPTK
- 3) Mematuhi rencana penarikan anggaran kas setiap bulan

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- 1) Penetapan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 mengalami keterlambatan karena adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.
- 2) Sebagian kegiatan teknis yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan tergantung pada musim.

Tabel 2.207.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,67	sangat tinggi	539.390.000	539.390.000	517.300.417	95,90	sangat tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	sangat tinggi	1.564.476.000	1.564.476.000	1.203.500.319	76,93	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	20.000.000	20.000.000	19.429.085	97,15	sangat tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	sangat tinggi	20.064.000	20.064.000	18.557.995	92,49	sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	KETAHANAN PANGAN							
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	sangat tinggi	1.152.767.500	1.152.767.500	1.045.311.160	90,68	tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	sangat tinggi	336.823.500	336.823.500	335.532.165	99,62	tinggi
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	sangat tinggi	45.000.000	45.000.000	42.696.840	94,88	tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100	sangat tinggi	27.207.800	27.207.800	27.097.450	99,59	sangat tinggi
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	sangat tinggi	25.774.000	25.774.000	23.716.135	92,02	sangat tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	sangat tinggi	918.332.400	918.332.400	780.066.510	84,94	tinggi
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	542.299.000	542.299.000	534.099.025	98,49	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	1.211.597.000	1.211.597.000	1.162.104.565	95,92	sangat tinggi
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	82,71	tinggi	21.012.321.098	21.012.321.098	12.862.150.190	61,21	rendah
14	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	82,98	tinggi	975.611.200	975.611.200	970.187.405	99,44	sangat tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	8.350.000	8.350.000	8.280.030	99,16	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,49	sangat tinggi	28.400.013.498	28.400.013.498	19.550.029.291	68,84	sedang

2. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISPETERIKAN)

Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **124,00 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **91,18 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.6.049.729.600,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.5.516.072.616,- atau **91,18 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.208.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	542.534.680	542.534.680	514.499.258	94,83	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	936.239.420	936.239.420	794.376.398	84,85	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	23.125.000	23.125.000	22.203.250	96,01	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	15.266.600	76,33	Tinggi
5	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	100,00	Sangat Tinggi	28.000.000	28.000.000	27.386.000	97,81	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.958.800	99,59	Sangat Tinggi
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	35.000.000	35.000.000	29.231.900	83,52	Tinggi
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	70.745.000	70.745.000	36.683.500	51,85	Rendah
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	100,00	Sangat Tinggi	561.998.500	561.998.500	537.238.955	95,59	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100,00	Sangat Tinggi	2.241.582.500	2.241.582.500	2.088.029.480	93,15	Sangat Tinggi

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
11	Program Peningkatan Pemasaran dan Hasil Produksi Peternakan	85,99	Tinggi	762.450.000	762.450.000	655.607.175	85,99	Tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	109,80	Sangat Tinggi	60.000.000	60.000.000	57.990.100	96,65	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	89,90	Tinggi	461.182.000	461.182.000	370.231.960	80,28	Tinggi
14	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	124,00	Sangat Tinggi	253.372.500	253.372.500	244.854.140	96,64	Sangat Tinggi
15	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100,00	Sangat Tinggi	43.500.000	43.500.000	36.003.300	82,80	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,65	Sangat Tinggi	6.049.729.600	6.049.729.600	5.516.072.616	91,18	Sangat Tinggi

3. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 81,04 % dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 41,67% dengan predikat **Sangat Rendah**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 31.440.642.350,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 13.100.031.404,- atau sebesar 41,67% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	3	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dengan capaian kinerja sebesar 67,35%, dikarenakan luasan yang terbeli lebih kecil dari rencana, dari 13.800 m2

- menjadi 10.307 m². Selain itu nilai appraisal rendah, hanya Rp. 133.000,00 per m²;
- 2) Kegiatan Pengiriman Peserta Rakor Kepemudaan dengan capaian 70,19%, dikarenakan tidak ada pengiriman peserta Rakor ke propinsi, sehingga perjalanan luar daerah tidak telaksana;
 - 3) Kegiatan Upacara Hari Besar dengan capaian 53,24%, dikarenakan peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Propinsi tidak dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
 - 4) Kegiatan Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi dengan capaian 63,28%, Peserta dari Kab. Magelang Tidak Lolos seleksi di Tingkat Provinsi sehingga tidak mengirimkan ke Tingkat Nasional, hal ini mengakibatkan SPPD dalam Daerah dan beberapa rekening belanja lain tidak direalisasikan;
 - 5) Kegiatan Sarana Prasarana Olahraga dengan capaian 1,02%, pengadaan tanah tidak dilaksanakan karena SKRK dari DPU menyatakan bahwa tanah yang akan dibeli peruntukannya adalah untuk tanah pertanian dan tidak direkomendasikan didirikan bangunan;
 - 6) Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengalami 2 (dua) kali gagal lelang.

Tabel 2.209.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	489.668.000	489.668.000	421.671.245	86,11	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,11	Tinggi	2.813.181.500	2.002.120.220	2.002.120.220	71,17	Sedang
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	31.000.000	30.952.415	30.952.415	99,85	Sangat Tinggi
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	51,19	Rendah	466.000.000	363.081.262	363.081.262	77,91	Tinggi
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	29,17	Sangat Rendah	185.000.000	163.084.250	163.084.250	88,15	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	91,67	Sangat Tinggi	2.411.675.000	2.361.452.800	2.361.452.800	97,92	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	Sangat Tinggi	15.697.815.000	1.492.046.306	1.492.046.309	9,50	Sangat Rendah
	Urusan Pariwisata							
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	1.268.814.000	1.259.543.283	1.259.543.283	99,27	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	75,00	Sedang	7.699.158.850	4.677.806.135	4.677.806.135	60,76	Rendah
10	Program Pengembangan Kemitraan	58,33	Rendah	369.330.000	341.450.685	341.450.685	92,45	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.969.050	99,66	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	81,04	Tinggi	31.440.642.350	13.190.205.356	13.100.031.404	41,67	Sangat Rendah

4. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 24.077.963.565,00 yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) urusan dan 17 (tujuh belas) program. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 21.018.809.937,- atau 87,29% dengan predikat kinerja **tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	7	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Tabel 2.210.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			237.130.000	237.130.000	205.112.300	86,50	Tinggi
	Urusan Pada Semua SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			836.478.950	836.478.950	666.891.176	79,73	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur			3.229.369.850	3.229.369.850	2.666.054.770	82,56	Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			9.438.000	9.438.000	8.762.500	92,84	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan pengembangan sintem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.399.000	42.399.000	42.395.000	99,99	Sangat Tinggi
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			469.704.500	469.704.500	434.560.837	92,52	Sangat Tinggi
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			314.064.000	314.064.000	308.791.200	98,32	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			574.710.000	574.710.000	562.666.225	97,90	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			260.926.000	260.926.000	234.886.640	90,02	Tinggi
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			872.433.965	872.433.965	855.423.463	98,05	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			231.858.500	231.858.500	227.295.600	98,03	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			298.516.300	298.516.300	295.255.425	98,91	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			4.265.150.000	4.265.150.000	3.567.137.931	83,63	Tinggi
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			9.016.070.500	9.016.070.500	8.034.966.970	89,12	Tinggi
15	Program Penataan Struktur Industri			3.209.000.000	3.209.000.000	2.707.808.750	84,38	Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			192.315.000	192.315.000	183.472.350	95,40	Sangat Tinggi
17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			18.399.000	18.399.000	17.328.800	94,18	Sangat Tinggi
JUMLAH				24.077.963.565	24.077.963.565	21.018.809.937	87,29	Tinggi

2.3.1.4. **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA DAN LITBANGDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 urusan dan 15 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,42% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 6.077.139.960,-. Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 5.737.8009.715,- atau 94,42% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.211.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan pada semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	469.980.000	469.980.000	464.010.303	98,73	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	702.209.000	702.209.000	660.689.363	94,09	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
1	Program Pengembangan Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	92.553.750	92.553.750	88.290.934	95,39	Sangat Tinggi
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	107.640.000	107.640.000	100.842.653	93,69	Sangat Tinggi
3	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	442.740.000	442.740.000	417.071.687	94,20	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	146.427.000	146.427.000	141.054.677	96,33	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Data/Informasi	100,00	Sangat Tinggi	788.890.460	788.890.460	742.520.500	94,12	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	163.284.331	93,31	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	336.756.000	336.756.000	320.109.373	95,06	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	1.294.817.000	1.294.817.000	1.189.921.559	91,90	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	Sangat Tinggi	314.448.000	314.448.000	308.569.155	98,13	Sangat Tinggi
10	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00	Sangat Tinggi	807.222.000	807.222.000	760.384.220	94,20	Sangat Tinggi
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100,00	Sangat Tinggi	53.758.750	53.758.750	50.319.000	93,60	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otda, Pum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	238.523.000	238.523.000	228.371.215	95,74	Sangat Tinggi
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	106.175.000	106.175.000	102.370.745	96,42	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat Tinggi	6.077.139.960	6.077.139.960	5.737.809.715	94,42	Sangat Tinggi

2. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator progam dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,73% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 86,45% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 7.863.020.795,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.797.504.823,- atau 86,45% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.212.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104,52	Sangat Tinggi	354.558.970	354.558.970	348.242.406	98,22	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Sangat Tinggi	637.203.250	637.203.250	571.279.616	89,65	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat Tinggi	25.559.000	25.559.000	25.029.000	97,93	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Sangat Tinggi	70.645.000	70.645.000	70.626.300	99,97	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	101,42	Sangat Tinggi	2.613.667.875	2.613.667.875	2.596.282.939	99,23	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	98,32	Sangat Tinggi	2.825.791.200	2.825.791.200	1.890.359.630	89,87	Tinggi
7	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	100,06	Sangat Tinggi	1.335.595.500	1.335.595.500	1.295.684.932	97,01	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,73	Sangat Tinggi	7.863.020.795	7.863.020.795	6.797.504.823	86,45	Tinggi

3. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPPKAD)

Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan dan 6 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 88,51% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 82,74% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	5	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 57.592.040.330,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.649.618.806,- atau 82,74% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.213.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Pendapatan
Keuangan dan Asset Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGAR AN TAHUN 2017	TARGET ANGGAR AN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDI KAT KINER JA			SPJ	%	PREDIK AT KINERJ A
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Program Pengembangan Dastinasi Pariwisata (Aset Daerah)	40,00	Sangat Rendah	132.556.000	132.556.000	44.752.125	33,80	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	BIDANG PERENCANAAN							
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	6.614.150	94,49	Sangat Tinggi
	BIDANG KEUANGAN							
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,40	Sangat Tinggi	866.553.000	866.553.000	712.235.567	82,19	Tinggi
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,84	Sangat Tinggi	39.616.537.000	39.616.537.000	31.502.970.619	79,52	Tinggi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	142.900.000	142.900.000	131.111.794	91,75	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,85	Sangat Tinggi	16.826.494.330	16.826.494.330	15.251.934.551	90,64	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		88,51	Tinggi	57.592.040.330	57.592.040.330	47.649.618.806	82,74	Tinggi

3. INSPEKOTRAT

Inspektorat pada tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **109,80%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,99%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.918.242.336,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 2.713.792.446,- atau **92,99 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Inspektorat, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Pada program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatannya telah Selesai dilaksanakan, serta program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaian kinerjanya tinggi karena beberapa kegiatan hamper selesai dilaksanakan.
- 2) Tersedianya Uang Persediaan yang cukup

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Adanya beberapa kegiatan yang belum selesai secara tuntas untuk jadwal tribulan III sehingga laporan kegiatan baru dalam proses penyelesaian
- 2) Untuk Kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat terealisasi sesuai aduan yang masuk dan ditangani

- 3) Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan mengalami keterlambatan disebabkan jumlah tenaga sekretariat yang semula menangani LHP beralih menjadi tenaga fungsional Auditor sehingga penyelesaian LHP dibebankan pada masing-masing auditor.

Tabel 2.214.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat

No.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA					
						SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167,6	Sangat tinggi	208.188.000	208.188.000	206.151.704	99,00	sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	99,3	Sangat tinggi	621.432.185	621.432.185	555.622.919	90,00	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	35.000.000	35.000.000	34.940.000	99,00	sangat tinggi
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	89,3	tinggi	1.615.574.000	1.615.574.000	1.497.976.160	93,00	sangat tinggi
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemerintah	112,5	Sangat tinggi	120.725.151	120.725.151	117.746.098	98,00	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	3.000.000	3.000.000	2.789.975	93,00	sangat tinggi
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan	100	Sangat tinggi	314.323.000	314.323.000	298.565.590	95,00	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		109,8	Sangat tinggi	2.918.242.336	2.918.242.336	2.713.792.446	93,00	sangat tinggi

2.3.1.4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (LANJUTAN)

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran.

Untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja indikator program target akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2017 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2017 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut:

$$Rp = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

- Keterangan:
- Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran
 - X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2017
 - Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan SKPD selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

A. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 89,63% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 82,42% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	2	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 26.992.508.100,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 22.246.256.530,- atau 82,42% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	3	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dimasing-masing bagian.
2. Rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
3. Kurangnya Apresiasi Kerja baik itu *reward* atau *punishment* dari unsur pimpinan sehingga motivasi dan disiplin kerja aparat rendah.
4. Kurang memahami SOP yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
5. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
6. Terjadinya miskomunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.

7. Kurang tertib penyampaian materi-materi rapat yang diserahkan untuk anggota DPRD
8. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
9. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu.
10. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
11. Kurang disiplinnya anggota DPRD menjadikan kendala dalam penyelesaian tugas dan pertanggungjawaban kegiatan.

Tabel 2.215.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,64	Sangat Tinggi	2.226.349.100	2.226.349.100	1.845.741.980	82,90	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,85	Tinggi	1.204.164.000	1.204.164.000	975.619.640	81,02	Tinggi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	146.964.000	146.964.000	126.275.710	85,92	Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72,73	Sedang	668.425.000	668.425.000	378.770.000	56,67	Rendah
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75,00	Sedang	9.477.000	9.477.000	5.637.050	59,48	Rendah
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	87,09	Tinggi	21.854.971.500	21.854.971.500	18.334.657.600	83,89	Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	5.668.000	5.668.000	5.636.000	99,44	Sangat Tinggi
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100,00	Sangat Tinggi	24.612.000	24.612.000	22.857.150	92,87	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.359.500	8.359.500	8.222.800	98,36	Sangat Tinggi
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	80,00	Tinggi	843.518.000	653.099.300	542.838.600	64,35	Rendah
TOTAL RATA-RATA		89,63	Tinggi	26.992.508.100	26.802.089.400	22.246.256.530	82,42	Tinggi

B. SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 6 (enam) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 91,50% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 68,82% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.018.810.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 807.368.190,- atau 68,82% dengan predikat kinerja **sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Organisasi, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.216.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	137,72	Sangat Tinggi	102.100.000	102.100.000	85.402.100	81,03	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	103.710.000	103.710.000	100.270.000	98,21	Sangat Tinggi
	Urusan : Perencanaan Pembangunan							
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	4.277.750	53,47	Rendah
	Urusan : Otonomi, Pemerintahan dan Keuangan							
4	Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	122,22	Sangat Tinggi	780.000.000	780.000.000	592.719.640	81,43	Tinggi
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	89,05	Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.698.700	98,79	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,50	Sangat Tinggi	1.018.810.000	764.945.000	807.368.190	68,82	Sedang

2. Bagian Humas dan Protokol

Humas dan Protokol Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 6 (enam) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 101,02% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 84,88% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 4.457.568.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 3.453.548.800,- atau 84,88% dengan predikat kinerja tinggi. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program Bagian Humas dan Protokol, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Bagian Humas dan Protokol yaitu kekurangcermatan dalam merencanakan kegiatan beserta anggaran yang pada akhirnya menyebabkan kelebihan anggaran. Adapun saran tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah lebih cermat lagi dalam merencanakan program/kegiatan pada masa yang akan datang.

Tabel 2.217.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Humas dan Protokol

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,45	Sangat Tinggi	329.452.000	329.452.000	327.139.630	99,40	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	90,00	Tinggi	50.610.000	50.610.000	47.415.000	89,83	Tinggi
3	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	165,00	Sangat Tinggi	103.721.000	103.721.000	99.957.050	96,37	Sangat Tinggi
	Urusan Komunikasi dan Informasi							
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	33,33	Sangat Rendah	622.375.000	622.375.000	200.075.000	32,15	Sangat Rendah
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	93,33	Sangat Tinggi	302.498.000	302.498.000	300.800.585	96,66	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100,00	Sangat Tinggi	984.854.000	984.854.000	914.956.950	94,84	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		101,02	Sangat Tinggi	4.457.568.000	4.457.568.000	3.453.548.800	84,88	Tinggi

3. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 56,72% dengan predikat **rendah**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,15% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	0	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	3	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 2.845.000.300,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 2.621.740.301,- atau 92,15% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	0	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program Bagian Adminitrasi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	5	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Keterbatasan SDM dari segi kuantitas, sehingga beban kerja melebihi normal atau tidak sesuai menurut analisis jabatan.
- 2) Adanya kegiatan yang sudah bukan menjadi tupoksi.

Adapun saran tindak lanjut dalam upaya meningkatkan ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran adalah dengan penambahan personil dan penyerahan kegiatan yang menjadi tupoksi OPD yang menangani.

Tabel 2.218.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Wajib Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58,68	Rendah	82.755.000	82.755.000	80.760.352	97,59	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66,67	Rendah	34.190.000	34.190.000	30.175.910	88,26	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87,50	Tinggi	522.392.800	522.392.800	490.664.183	93,93	Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	sangat rendah	197.430.000	197.430.000	181.330.175	91,85	Tinggi
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	70,33	Rendah	1.746.672.500	1.746.672.500	1.634.717.131	93,59	Tinggi
6	Pogram peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13,89	sangat rendah	123.653.000	123.653.000	72.174.475	58,37	Rendah
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	100,00	Tinggi	137.907.000	137.907.000	131.918.075	95,66	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		56,72	Rendah	2.845.000.300	2.845.000.300	2.621.740.301	92,15	Tinggi

4. Bagian Umum

Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) satu urusan dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 72,80% dengan predikat **sedang**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,05% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 9.634.180.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.060.828.532,- atau 94,05% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Umum adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada Bagian Umum yaitu belum adanya undangan diklat untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Depdagri atau instansi lain, sehingga anggaran belum terserap.

Tabel 2.219.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Umum

NO.	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,00	Tinggi	5.642.877.000	100%	5.300.770.438	93,94	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,00	Sangat Tinggi	3.812.993.000	100%	3.625.129.999	95,07	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	96,00	Sangat Tinggi	86.850.000	100%	84.418.000	97,20	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Sangat Rendah	30.000.000	100%	-	-	Sangat Rendah
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	82,00	Tinggi	61.460.000	100%	50.510.095	82,18	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		72,80	Sedang	9.634.180.000		9.060.828.532	94,05	Sangat Tinggi

5. Bagian Hukum

Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 127,37% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 87,79% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.639.107.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.060.828.532,- atau 87,79% dengan predikat **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Hukum, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	1	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.220.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum

NO.	URUSAN PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,40	Sangat Tinggi	117.907.000	117.907.000	117.634.750	99,77	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	108.850.000	108.850.000	98.018.440	90,05	Tinggi
3	Penataan Peraturan Perundang- undangan	109,08	Sangat Tinggi	1.364.969.000	1.364.969.000	1.183.713.055	86,72	Tinggi
4	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	200,00	Sangat Tinggi	47.381.000	47.381.000	39.680.575	83,75	Tinggi
TOTAL RATA_RATA		127,37	Sangat Tinggi	1.639.107.000	1.639.107.000	1.439.046.820	87,79	Tinggi

6. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 103,60% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,49% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 895.092.500,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 836.777.752,- atau 93,49% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Perekonomian, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada Bagian Perekonomian yaitu bahwa dalam proses pencairan dan penyusunan SPJ kadang ada perbedaan persepsi dengan Bagian Umum. Dengan demikian saran dan tindakan yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan Bagian Umum dan BPPKAD.

Tabel 2.221.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	144,25	Sangat Tinggi	144.886.000	144.886.000	141.790.904	97,86	Sangat tinggi
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	30.360.000	30.360.000	28.763.445	94,74	Sangat tinggi
3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	103.753.800	103.753.800	94.364.928	90,95	Sangat tinggi
4	Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	80,95	Tinggi	271.844.600	271.844.600	267.262.145	98,31	Sangat tinggi
	URUSAN SOSIAL							
5	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100,00	Sangat Tinggi	38.065.000	38.065.000	32.802.690	86,18	Tinggi
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN							
6	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,00	Sangat Tinggi	185.964.000	185.964.000	169.895.719	91,36	Sangat tinggi
	URUSAN PILIHAN KOPERASI DAN UMKM							
7	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	120.219.100	120.219.100	101.897.921	84,76	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		103,60	Sangat Tinggi	895.092.500	895.092.500	836.777.752	93,49	Sangat tinggi

7. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 106,50% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,48% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.855.910.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.734.927.698,- atau 93,48% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Bagian Tata Pemerintahan adalah:

- 1) Adanya aturan waktu anggaran kas.
- 2) Keterbatasan personil.

Tabel 2.222.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN: SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	165.631.000	165.631.000	140.568.087	84,87	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.220.000	92,20	Sangat Tinggi
	URUSAN: PERTANAHAN							
3	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	25.132.300	83,77	Tinggi
	URUSAN: OTONOMI DAERAH							
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100,00	Sangat Tinggi	1.307.724.000	1.307.724.000	1.275.903.568	97,57	Sangat Tinggi
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	35.343.000	35.343.000	31.880.005	90,20	Tinggi
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	152,00	Sangat Tinggi	79.790.000	79.790.000	67.978.759	85,20	Tinggi
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100,00	Sangat Tinggi	22.422.000	22.422.000	14.471.446	64,54	Rendah
8	Program penataan peraturan perundang-undangan	100,00	Sangat Tinggi	205.000.000	205.000.000	169.773.533	82,82	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		106,50	Sangat Tinggi	1.855.910.000	1.855.910.000	1.734.927.698	93,48	Sangat Tinggi

H. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 96,70% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,04% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 689.476.250,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 560.581.250,- atau 91,04% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Kesra, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program adalah:

- 1) Mundurnya jadwal kegiatan dari yang telah ditentukan.
- 2) Keterlambatan Penetapan APBD 2017 yang ditetapkan pada bulan Februari 2017 sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu dan penyerapan anggaran tidak sesuai target.
- 3) Adanya kendala yang bersifat administratif.
- 4) Masih terkendalanya proses pengadaan barang/jasa.

Tabel 2.223.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,72	Sangat Tinggi	13.412.500	12.805.838	9.996.219	75,26	Sedang
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	77,74	Tinggi	11.500.000	9.391.486	10.500.000	87,50	Tinggi
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	99,76	Sangat Tinggi	21.000.000	20.948.855	21.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	99,80	Sangat Tinggi	165.000.000	164.674.160	139.643.000	84,63	Tinggi
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	21.000.000	20.999.850	21.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	23.000.000	22.999.825	23.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	24.000.000	23.999.700	24.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	99,99	Sangat Tinggi	24.000.000	23.997.475	24.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	96,87	Sangat Tinggi	351.563.750	337.858.998	259.854.031	84,21	Tinggi
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	97,14	Sangat Tinggi	35.000.000	33.999.375	27.588.000	78,82	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		96,70	Sangat Tinggi	689.476.250	671.675.561	560.581.250	91,04	Sangat Tinggi

C. KECAMATAN

1. KECAMATAN SALAMAN

Kecamatan Salaman pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 66,65% dengan predikat **sedang**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 99,46% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	5	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Kecamatan Salaman Tahun 2017 sebesar Rp. 474.752.553,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.466.320.677,00 atau 99,46 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Salaman, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	7	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.224.
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KECAMATAN SALAMAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25,00	Sangat Rendah	90.000.000	19.300.288	87.723.927	97,47	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,71	Sangat Rendah	178.102.553	18.346.350	169.315.975	95,07	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	2.500.000	3.499.950	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.975	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
5	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	27.150.000	27.150.000	27.149.925	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KEBUDAYAAN							
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KETAHANAN PANGAN							
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,12	Sangat Rendah	22.000.000	802.500	22.000.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25,00	Sangat Rendah	23.000.000	5.000.000	23.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25,00	Sangat Rendah	45.000.000	2.781.000	44.650.975	99,22	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	60,00	Rendah	33.000.000	7.537.500	32.979.975	99,94	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA :	66,65	Sedang	474.752.553	64.267.638	466.320.677	99,46	Sangat Tinggi

2. KECAMATAN BOROBUDUR

Kecamatan Borobudur Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 17 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa 'capaian kinerja program' sebesar 98,71% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,26% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 582.450.000,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 537.385.026,- atau 92,26 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Borobudur, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	13	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja program pada SKPD Kecamatan adalah:

- 1) Adanya kekompakan dalam tim pengelola kegiatan.
- 2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 3) Kedisiplinan dan yang diterapkan oleh pimpinan di SKPD Kecamatan Borobudur.

Tabel 2.225.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Borobudur

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101,91	Sangat Tinggi	93,035,000	93,035,000	83,410,576	89.66	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	187,000,000	187,000,000	162,757,075	87.04	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	10,000,000	10,000,000	9,543,725	95.44	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	81,71	Tinggi	20,000,000	20,000,000	19,859,850	99.30	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	25,000,000	25,000,000	24,950,000	99.80	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (PATEN)	94,44	Sangat Tinggi	70,000,000	70,000,000	65,905,500	94.15	Sangat Tinggi
7	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	100,00	Sangat Tinggi	6,000,000	6,000,000	5,979,950	99,67	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	8,000,000	8,000,000	7,999,950	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	100,00	Sangat Tinggi	10,000,000	10,000,000	9,755,000	97,55	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	Sangat Tinggi	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	30,000,000	30,000,000	28,367,350	94,56	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat Tinggi	7,765,000	7,765,000	7,000,000	90,15	Tinggi
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	100,00	Sangat Tinggi	20,000,000	20,000,000	18,875,000	94,38	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	27,500,000	27,500,000	25,399,500	92,36	Sangat Tinggi
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	22,150,000	22,150,000	22,150,000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	13,000,000	13,000,000	12,974,050	99,80	Sangat Tinggi
17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	25,000,000	25,000,000	24,457,500	97,83	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,71	Tinggi	582,450,00	582,450,000	537,385,026	92,26	Sangat Tinggi

3. KECAMATAN NGLUWAR

Kecamatan Ngluwar melaksanakan 4 (empat) urusan, dengan jumlah program sebanyak 20 (dua puluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 98,00% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 96,73% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	20	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.439.103.700,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 410.291.889,- atau 96,73% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sementara itu capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	20	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Ngluwar, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	20	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas
- 2) Dukungan akan ketersediaan sumber daya manusia di SKPD Kecamatan Ngluwar

3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Faktor penghambat yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja selama ini adalah kurangnya pemerataan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokoknya sehingga ada beberapa pegawai yang beban tugasnya lebih banyak yang menyebabkan dalam pencapaian kinerja memerlukan tenaga ekstra.

Tabel 2.226.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Ngluwar

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
2	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN SOSIAL							
4	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
5	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	22.890.000	22.890.000	22.890.000	100,00	Sangat Tinggi
	PANGAN							
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.059.500	15.059.500	15.059.500	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
11	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.455.000	98,71	Sangat Tinggi
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,65	Sangat Tinggi	61.680.000	61.680.000	58.505.139	94,85	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,11	Sangat Tinggi	196.010.000	196.010.000	185.818.250	94,80	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
15	Program peningkatan Sumber daya Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.020.500	8.020.500	8.020.500	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	98,34	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	27.043.500	98,34	Sangat Tinggi
19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN							
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,00	Sangat Tinggi	424.160.000	424.160.000	410.291.889	96,73	Sangat Tinggi

4. KECAMATAN SALAM

Kecamatan Salam Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 12 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 90,09% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 75,55% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.439.103.700,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 331.755.317,- atau 75,55% dengan predikat kinerja **sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Salam, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Rasa tanggung jawab dalam memegang amanah sebagai pelayan masyarakat.
- 2) Fasilitas yang memadai.
- 3) Kemampuan SDM yang ada.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah:

- 1) Belum adanya pengganti bendahara yang mutasi.
- 2) Adanya kesalahan dalam rekening anggaran kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tertunda pelaksanaanya.

Tabel 2.227.**Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Salam**

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,49	Tinggi	91.686.600	91.686.600	82.962.801	90,49	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57,60	Rendah	185.020.100	185.020.100	106.563.516	57,60	Rendah
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	100,00	Sangat Tinggi	9.280.000	9.280.000	9.280.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	100,00	Sangat Tinggi	10.005.000	10.005.000	10.005.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39,34	Sanat Rendah	30.200.000	30.200.000	11.880.000	39,34	Sanat Rendah
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	93,96	Sangat Tinggi	29.160.000	29.160.000	27.400.000	93,96	Sangat Tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.358.000	8.358.000	8.358.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	25.244.000	25.244.000	25.244.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	99,65	Sangat Tinggi	25.150.000	25.150.000	25.062.000	99,65	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		90,09	Tinggi	439.103.700	439.103.700	331.755.317	75,55	Sedang

5. KECAMATAN SRUMBUNG

Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang melaksanakan 6 (enam) urusan dan 12 (dua belas) program pada 6 (enam). Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,77% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.412.199.800,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp.378.274.255,- atau 91,77%% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Srumbung, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.228.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Srumbung

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,29	Sangat tinggi	117.683.800	117.683.800	115.639.245	98,26	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat tinggi	143.022.000	143.022.000	117.508.060	82,16	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat tinggi	14.500.000	14.500.000	14.439.450	99,58	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat tinggi	29.810.000	29.810.000	24.307.500	81,54	Tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
6	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	100,00	Sangat tinggi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat tinggi	30.550.000	30.550.000	30.550.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.995.000	99,90	Sangat tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	3.994.500	99,86	Sangat tinggi
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat tinggi	36.634.000	36.634.000	36.519.000	99,69	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa							
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat tinggi	6.500.000	6.500.000	5.821.500	89,56	Tinggi
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat tinggi	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100,00	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,19	Sangat tinggi	412.199.800	412.199.800	378.274.255	91,77	Sangat tinggi

6. KECAMATAN DUKUN

Kecamatan Dukun pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat **‘sangat tinggi.’** sementara capaian kineja anggaran sebesar 92,80% dengan predikat **‘sangat tinggi’**

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 529,045,000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 491,166,194,-, atau 92,80% dengan predikat kinerja **“sangat tinggi”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Kecamatan Dukun secara rinci, sebagai berikut

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.229.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Dukun

NO.	Program Kegiatan	Capaian Kinerja		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran Tahun 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100	sangat tinggi	88,500,000	88,500,000	81,195,208	91.7	sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100	sangat tinggi	264,845,000	264,845,000	236,665,986	89.4	tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	sangat tinggi
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	sangat tinggi	20,750,000	20,750,000	20,750,000	100.0	sangat tinggi
5	Program pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan daerah	100	sangat tinggi	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0	sangat tinggi
6	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100	sangat tinggi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	Sangat tinggi
7	Program penataan peraturan perundang-undangan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	sangat tinggi
8	Program Peningkatan Kehidupan Sosial dan keagamaan	100	sangat tinggi	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0	sangat tinggi
9	Program Penguatan kelembagaan Gender	100	sangat tinggi	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0	sangat tinggi

NO.	Program Kegiatan	Capaian Kinerja		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran Tahun 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0	sangat tinggi
11	Program penataan administrasi kependudukan	100	sangat tinggi	24,200,000	24,200,000	23,900,000	98.8	Sangat tinggi
12	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	100	sangat tinggi	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0	sangat tinggi
13	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	100	sangat tinggi	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0	sangat tinggi
14	Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	3,900,000	78,0	sedang
15	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	100	sangat tinggi	15,000,000	15,000,000	14,025,000	93.5	sangat tinggi
16	Program peningkatan ketahanan pangan	100	sangat tinggi	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0	Sangat tinggi
17	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	100	sangat tinggi	20,000,000	20,000,000	19,980,000	99.9	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100	Sangat tinggi	529,045,000	529,045,000	491,166,194	92.8	Sangat tinggi

7. KECAMATAN MUNTILAN

Kecamatan Muntilan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 104,72% dengan predikat '**sangat tinggi**' sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,92% dengan predikat '**sangat tinggi**'

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 745,159,000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 728,108,425,-, atau 91,92% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Kecamatan Muntilan secara rinci, sebagai berikut

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	10	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Suasana kerja SKPD Kecamatan Muntilan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).

- 2) Sinergitas sumber daya aparatur baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sarana dan prasarana kerja SKPD Kecamatan Muntilan sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Sebagian besar warga masyarakat Kecamatan yang agamis, peduli dan kritis terhadap perkembangan Kabupaten Magelang, sehingga menumbuhkan kesadaran yang cukup tinggi di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Muntilan dalam pelaksanaan program adalah:

- 1) Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 2) Sarana dan prasarana dalam pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Kecamatan Muntilan sehingga deviasi fisik rentangnya sangat jauh.

Tabel 2.230.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Muntilan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KELURAHAN MUNTILAN							
	FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.88%	Sangat Tinggi	41,589,000	41,589,000	36,439,850	83.98%	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100.00%	Sangat Tinggi	64,960,000	64,960,000	54,219,125	83.11%	Tinggi
3	Pogram peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.00%	Sangat Tinggi	7,470,000	7,470,000	8,732,500	100.00%	Sangat Tinggi
4	Pogram peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	Sangat Tinggi	5,740,000	5,740,000	2,340,000	93.60%	Sangat Tinggi
5	Pogram Pernataan Administrasi Kependudukan	100.00%	Sangat Tinggi	5,740,000	5,740,000	5,695,000	99.22%	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaann	100.00%	Sangat Tinggi	31,000,000	31,000,000	30,550,000	98.55%	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100.00%	Sangat Tinggi	10,800,000	10,800,000	2,485,500	99.43%	Sangat Tinggi
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00%	Sangat Tinggi	10,800,000	10,800,000	10,800,000	100.00%	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	89.44%	Tinggi	10,800,000	10,800,000	10,777,950	99.91%	Sangat Tinggi
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100.00%	Sangat Tinggi	8,150,000	8,150,000	8,150,000	100.00%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	200.00%	Sangat Tinggi	550,000,000	550,000,000	548,196,000	99.67%	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100.00%	Sangat Tinggi	5,150,000	5,150,000	4,822,500	93.64%	Sangat Tinggi
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	Sangat Tinggi	4,500,000	4,500,000	4,900,000	70.00%	Sedang
TOTAL RATA-RATA		104.72%	Sangat Tinggi	745,159,000	745,159,000	728,108,425	91.92%	Sangat Tinggi

8. KECAMATAN MUNGKID

Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang melaksanakan 17 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 98,21% dengan predikat **sangat tinggi** sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,21% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 2.193.298.300 ,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 2.154.128.753,- atau 98,21% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Mungkid, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	17	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Sesuai dengan Anggaran Kas.
- 2) Jadwal dan rencana sudah di bakukan sesuai dengan rencana kegiatan.

Tabel 2.231.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Mungkid

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,34	Sangat Tinggi	224.878.000	224.878.000	209.893.561	93,34	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,27	Sangat Tinggi	477.775.500	477.775.500	459.977.292	96,27	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan	99,85	Sangat Tinggi	49.380.000	49.380.000	49.304.425	99,85	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100,00	Sangat Tinggi	7.260.000	7.260.000	7.259.975	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	45.909.800	45.909.800	45.679.800	99,50	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	99,36	Sangat Tinggi	101.750.000	101.750.000	101.101.450	99,36	Sangat Tinggi
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	95,56	Sangat Tinggi	15.330.000	15.330.000	14.649.950	95,56	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	99,50	Sangat Tinggi	38.785.000	38.785.000	38.590.000	99,50	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	99,60	Sangat Tinggi	1.124.760.000	1.124.760.000	1.120.262.275	99,60	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	100,00	Sangat Tinggi	2.530.000	2.530.000	2.530.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	99,83	Sangat Tinggi	35.430.000	35.430.000	35.370.050	99,83	Sangat Tinggi
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	24.300.000	24.300.000	24.299.975	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,21	Sangat Tinggi	2.193.298.300	2.193.298.300	2.154.128.753	98,21	Sangat Tinggi

9. KECAMATAN SAWANGAN

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang melaksanakan 11 (sebelas) urusan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa 'capaian kinerja program' sebesar 104% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 422.020.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.373.644.739,00 atau 98% dengan predikat kinerja **sangat tinggi** dengan perincian sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Sawangan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.232.
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM SKPD KECAMATAN SAWANGAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111	Sangat Tinggi	59.470.000	59.470.000	54.590.816	89	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	Sangat Tinggi	171.555.000	171.555.000	132.550.173	83	Tinggi
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	150	Sangat Tinggi	3.356.000	3.356.000	3.356.000	100	Sangat Tinggi
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	Sangat Tinggi	7.020.000	7.020.000	7.019.950	100	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat membangun pedesaan	100	Sangat Tinggi	5.317.000	5.317.000	5.316.850	100	Sangat Tinggi
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	113	Sangat Tinggi	8.851.000	8.851.000	8.841.900	100	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Sangat Tinggi	10.336.000	10.336.000	10.335.900	100	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat Tinggi	12.300.000	12.300.000	12.300.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100	Sangat Tinggi	23.919.000	23.919.000	23.888.850	100	Sangat Tinggi
10	Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa	100	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.499.950	100	Sangat Tinggi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
11	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	Sangat Tinggi	21.750.000	21.750.000	21.749.950	100	Sangat Tinggi
	URUSAN OTDA, PEMDA, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN							
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Sangat Tinggi	9.500.000	9.500.000	9.472.350	100	Sangat Tinggi
13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Sangat Tinggi	39.673.500	39.673.500	35.310.450	89	Tinggi
	PERTANIAN							
14	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	100	Sangat Tinggi	2.550.000	2.550.000	2.489.950	98	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN							
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	9.933.000	9.933.000	9.933.000	100	Sangat Tinggi
	SOSIAL							
16	program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100	Sangat Tinggi	3.670.000	3.670.000	3.669.800	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	SOSIAL							
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100	Sangat Tinggi	30.319.500	30.319.500	30.318.850	100	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	104	Sangat Tinggi	422.020.000	422.020.000	373.644.739	98	Sangat Tinggi

10. KECAMATAN CANDIMULYO

Kecamatan Candimulyo pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,12 dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 87,85% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 462.472.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 406.286.755,- atau sebesar 87,85% dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	13	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor Pendorong tercapainya target kinerja Program pada SKPD Kecamatan Candimulyo adalah:

- 1) Ketersediaan tepat waktu.
- 2) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait.

Tabel 2.233.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Candimulyo

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,75	Sangat Tinggi	77.800.000	17.602.500	71.381.940	92,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	79,23	Tinggi	228.000.000	34.022.000	180.652.815	79,23	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	1.038.500	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak							
4	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	18.870.000	6.590.500	18.870.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	0	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	26.802.000	2.126.000	26.802.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	437.500	13.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	97,50	Sangat Tinggi	30.000.000	2.264.000	29.250.000	97,50	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	94,50	Sangat Tinggi	30.000.000	18.224.000	28.350.000	94,50	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	0	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	99,60	Sangat Tinggi	5.000.000	0	4.980.000	99,60	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib							
12	Program Perencanaan Pembangunan daerah	100,00	Sangat Tinggi	12.000.000	0	12.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pertanian							
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	97,12	Sangat Tinggi	462.472.000	86.305.000	406.286.755	87,85	Tinggi

11. KECAMATAN MERTOYUDAN

Kecamatan Mertoyudan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 19 (sembilan belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 96,80% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 96% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 1.251.148.432,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 1.206.802.752,- atau sebesar 96% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Mertoyudan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	18	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada SKPD Kecamatan Mertoyudan adalah:

- 1) Semakin berkurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Mertoyudan;
- 2) Terbatasnya kemampuan aparatur dalam penguasaan/penggunaan perangkat teknologi informasi yang berbasis komputer
- 3) Belum optimalnya penggunaan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 2.234.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Mertoyudan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,50	Sangat Tinggi	124.520.800	124.520.800	115.127.557	92,46	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,10	Sangat Tinggi	305.069.632	305.069.632	287.032.205	94,09	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	90,80	Tinggi	32.000.000	32.000.000	29.059.400	90,81	Tinggi
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	14.999.850	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dlm Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	23.190.000	23.190.000	23.190.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	70,00	Sedang	20.807.000	20.807.000	14.567.000	70,01	Sedang
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Tinggi	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	5.999.500	99,99	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95,50	Sangat Tinggi	34.661.000	34.661.000	33.111.000	95,53	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00	Sangat Tinggi
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	98,20	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.455.000	98,20	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	37.000.000	37.000.000	37.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	99,00	Sangat Tinggi	592.200.000	592.200.000	586.084.000	98,97	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	99,20	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.977.250	99,24	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.999.990	100,00	Sangat Tinggi
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		96,80	Sangat Tinggi	1.251.148.432	1.251.148.432	1.206.802.752	96,46	Sangat Tinggi

12. KECAMATAN TEMPURAN

Kecamatan Tempuran pada tahun 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,60% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 97,60% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 729.979.000,-. Realisasi Capaian Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar Rp. 712.458.686,- atau sebesar 97,60%, dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan dan direalisasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 2) Disusunnya Dokumen KUA dan Prioritas serta Plafon Anggaran Tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 2.235.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Tempuran

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,94	Sangat Tinggi	85.300.000	85.300.000	84.394.122	98,94	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,72	Sangat Tinggi	429.704.000	429.704.000	415.610.364	96,72	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	11.225.000	11.225.000	11.225.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dlm Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	20.750.000	20.750.000	20.750.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	99,95	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.987.500	99,95	Sangat Tinggi
14	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	96,49	Sangat Tinggi	71.500.000	71.500.000	68.991.700	96,49	Sangat Tinggi
15	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,60	Sangat Tinggi	729.979.000	729.979.000	712.458.686	97,60	Sangat Tinggi

13. KECAMATAN KAJORAN

Kecamatan Kajoran pada tahun 2017 melaksanakan 8 urusan dan 13 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 107,24% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,03% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 454.482.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 445.518.330,00 atau 98,03 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Kajoran, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.236.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kajoran

NO .	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan pada semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101,36	Sangat Tinggi	89.397.000	89.397.000	87.747.845	98,16	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,50	Tinggi	195.749.000	195.749.000	188.574.485	96,33	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	13.373.000	13.373.000	13.373.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	29.170.000	29.170.000	29.120.000	99,83	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
6	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO .	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	29.910.000	99,70	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,03	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	11.993.000	11.993.000	11.993.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	16.400.000	16.400.000	16.400.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pertanian							
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100,00	Sangat Tinggi	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		107,24	Sangat Tinggi	454.482.000	454.482.000	445.518.330	98,03	Sangat Tinggi

14. KECAMATAN KALIANGKRIK

Kecamatan Kaliangkrik pada tahun 2017 melaksanakan melaksanakan 2 (dua) urusan dan 11 (sebelas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,95% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 498.582.500,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 491.232.500,00 atau 98,95 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Kaliangkrik, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.237.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kaliangkrik

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	96,33	Sangat Tinggi	92.159.000	92.159.000	86.970.800	96,33	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatitr	99,54	Sangat Tinggi	197.516.500	197.516.500	195.603.700	99,54	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	38.000.000	38.000.000	38.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolgi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	52.257.000	52.257.000	52.256.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	27.500.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.752.000	97,52	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99.62	Sangat Tinggi	498.582.500	498.582.500	491.232.500	98,95	Sangat Tinggi

15. KECAMATAN BANDONGAN

Kecamatan Bandongan Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 15 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 97,36 % dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 85,93% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 505,353,000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 434,246,405,- atau 85,93 % dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Bandongan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	3	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	9	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja sangat tinggi dan tinggi adalah:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia sejumlah 17 (tujuh belas) pegawai.
- 2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai.
- 3) Ketersediaan Anggaran pada Kecamatan Bandongan sejumlah Rp. 505.353.000,- untuk tahun 2017.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah:

- 1) Pembagian beban kerja tidak proporsional;
- 2) Tidak terdapat pembagian tupoksi yang jelas di dalam struktur Organisasi di Kecamatan Bandongan;
- 3) Kurangnya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan;
- 4) Tidak diadakan koordinasi internal seluruh staf dan pejabat Kecamatan Bandongan dalam rangka evaluasi kerja dan tukar informasi pada setiap sub bagian dan /atau seksi;
- 5) Kurangnya kemampuan manajemen keuangan
- 6) Kurangnya konsistensi penyusun dalam menyusun indikator, target kinerja dalam Renstra, Renja maupun RKA dan DPA sebagai suatu dokumen perencanaan yang linier.

Tabel 2.238.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Bandongan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	89,29	Tinggi	2.780.200	2.780.200	2.780.050	99,99	Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	81,00	Tinggi	18.470.000	18.470.000	18.470.000	100,00	Rendah
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	117,00	Sangat Tinggi	10.985.000	10.985.000	10.985.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	86,67	Tinggi	4.503.000	4.503.000	4.480.000	99,49	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	96,67	Sangat Tinggi	2.400.000	2.400.000	2.270.000	94,58	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.480.000	99,20	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,64	Sangat Tinggi	136.633,800	136.633,800	122.809.405	89,88	Tinggi
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,36	Sangat Tinggi	252.725.000	252.725.000	233.652.150	92,45	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.798.000	2.798.000	2.798.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	95,07	Sangat Tinggi	23.500.000	23.500.000	3.498.000	14,89	Sangat Rendah
13	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	1.425.000	1.425.000	1.415.000	99,30	Sangat Tinggi
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	10.500.000	10.500.000	10.497.800	99,98	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,88	Sangat Tinggi	30.133.000	30.133.000	12.111.000	40,19	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA		97,36	Sangat Tinggi	505.353.000	505.353.000	434.246.405	85,93	Tinggi

16. KECAMATAN WINDUSARI

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa 'capaian kinerja program' sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 84,45% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.511.779.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.432.201.221,- atau 84,45% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	2	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Windusari, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.239.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Windusari

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat tinggi	56.487.000	56.487.000	53.003.721	93,83	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat tinggi	253.183.000	253.183.000	186.585.000	79,34	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat tinggi	6.385.000	6.385.000	5.025.000	78,70	Tinggi
	Urusan Kesehatan							
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat tinggi	38.028.000	38.028.000	28.916.250	76,04	Tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat tinggi	13.710.000	13.710.000	13.710.000	100,00	Sangat tinggi
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat tinggi	27.400.000	27.400.000	25.759.750	94,01	Sangat tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100,00	Sangat tinggi	36.125.000	36.125.000	27.679.000	76,62	Tinggi
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat tinggi	7.811.000	7.811.000	7.811.000	100,00	Sangat tinggi
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat tinggi	24.500.000	24.500.000	18.571.500	73,00	Sedang
	Urusan Sosial							
14	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat tinggi	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	2.990.000	74,75	Sedang
	Urusan Pertanian							
17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat tinggi	511.779.000	511.779.000	432.201.221	84,45	Tinggi

17. KECAMATAN SECANG

Kecamatan Secang melaksanakan 10 (sepuluh) urusan dan 18 (delapan belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,03% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 95,27% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.356.379.020,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.145.066.706,- atau 95,27% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Secang, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (RP)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	2	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif masuk predikat sangat tinggi (100%) kegiatan yang dilaksanakan maupun SPJ masuk sesuai dengan anggaran kas triwulan ke tiga.
- 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan predikat sangat tinggi (100%) kegiatan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan maupun SPJ masuk sesuai dengan anggaran kas triwulan ke tiga.
- 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah predikatnya juga tinggi (100%) kegiatan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan.
- 4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Masuk Predikat sangat Tinggi (100%) kegiatannya dilaksanakan ditriwulan I bulan Januari samapi dengan April 2017 dan Sesuai dengan perencanaan di Kelurahan Secang.
- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masuk predikat Sangat tinggi (100%) kegiatan dilaksanakan dengan persiapan dan kerjasama yang tertib tepat waktunya.
- 6) Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa memperoleh predikat sangat tinggi (100%) kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan I bulan Januari sampai dengan Pebruari 2017.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja adalah :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan masuk dalam predikat sangat rendah (78,25%) anggaran kegiatan keluar daerah tidak terpakai karena saat acara kegiatan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Secang dalam keadaan sakit mendadak sehingga tidak bisa ikut dan tidak bisa ter SPJ kan.
- 2) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan terserah 75,54 % dengan adanya OPD baru, untuk belanja honorarium penatausahaan keuangan Kelurahan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, yang bisa dicairkan/dilaksanakan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerima pembantu.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional tercapai 68,16 % karena adanya penggantian kendaraan/ mobil dinas (Camat) yang baru, sehinga belanja pemeliharaan mobil Dinas tidak dicairkan.

Tabel 2.240.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Secang

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,38	Sangat Tinggi	120.913.400	120.913.400	108.151.933	89,45	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,84	Sangat Tinggi	401.651.620	401.651.620	368.751.633	91,81	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,90	Sangat Tinggi	38.917.000	38.917.000	38.487.000	98,90	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	98,00	Sangat Tinggi	30.443.000	30.443.000	29.493.000	96,88	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	93,00	Sangat Tinggi	36.529.000	36.529.000	33.414.000	91,47	Sangat Tinggi
	URUSAN Pemberdayaan Masyarakat Desa							
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	98,50	Sangat Tinggi	585.905.000	585.905.000	430.255.000	73,43	Sedang
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	99,71	Sangat tinggi	34.500.000	34.500.000	34.400.000	99,71	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi	25.400.000	25.400.000	25.400.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10	Program Peningkatan Peran serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan	78,25	Tinggi	22.150.000	22.150.000	17.150.000	77,43	Tinggi
	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
11	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Kondusif	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Kebudayaan							
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	10.100.000	10.100.000	10.100.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100,00	Sangat Tinggi	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	98,00	Sangat Tinggi	9.680.000	9.680.000	9.274.500	95,81	Sangat Tinggi
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
15	Program 1 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Kearsipan							
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	Sangat Tinggi	4.610.000	4.610.000	4.609.640	99,99	Sangat Tinggi
	Urusan Kesehatan							
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	6.280.000	6.280.000	6.280.000	100	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,03	Sangat tinggi	1.356.379.020	1.356.379.020	1.145.066.706	95,27	Sangat Tinggi

18. KECAMATAN TEGALREJO

Kecamatan Tegalrejo pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,39% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 522.295.750,-. Realisasi Capaian Anggaran sebesar Rp. 492.992.250,- atau 94,39%, dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Pembagian beban kerja sudah proporsional.
- 2) Adanya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan.
- 3) Ketersediaan dana tepat waktu.
- 4) Tercukupinya sarana prasarana pendukung.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.

Tabel 2.241.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Tegalrejo

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	100	Sangat tinggi	87.500.000	87.500.000	84.329.000	96	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	100	Sangat tinggi	255.521.000	255.521.000	230.906.000	90	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Sangat tinggi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100	Sangat tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Sangat tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	Sangat tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Sangat tinggi	38.659.750	38.659.750	37.859.750	98	Sangat tinggi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	Sangat tinggi	29.930.000	29.930.000	29.930.000	100	Sangat Tinggi

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/ keagamaan	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.990.000	100	Sangat tinggi
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.992.500	100	Sangat tinggi
11	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan serta Etika	100	Sangat tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	Sangat tinggi
12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	100	Sangat tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	Sangat tinggi
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	Sangat tinggi	24.400.000	24.400.000	23.700.000	97	Sangat tinggi
14	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100	Sangat tinggi	20.285.000	20.285.000	20.285.000	100	Sangat tinggi
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100	Sangat tinggi	522.295.750	522.295.750	492.992.250	94,39	Sangat tinggi

19. KECAMATAN PAKIS

Kecamatan Pakis pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 16 (enam belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **99,05%** dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **99,05%** dengan predikat kinerja **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 531.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp.510.560.436,- atau **99,05 %**, dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja Tidak mencapai 100 % adalah:

- 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayarkan sesuai tagihan rekening.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional terdapat anggaran yang tidak dapat dibayarkan yaitu Anggaran BBM untuk Camat yang sedang menjalankan cuti menunaikan ibadah haji dan pemeliharaan mobil karena kondisi masih baru sehingga biaya pemeliharaan dapat diefisiensi.

Tabel 2.242.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pakis

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,79	Sangat Tinggi	68.167.000	68.167.000	63.254.400	92,79	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur.	92,10	Sangat Tinggi	200.819.000	200.819.000	184.957.300	92,10	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	Sangat Tinggi
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.	99,94	Sangat Tinggi	55.273.000	55.273.000	55.242.250	99,94	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	99,96	Sangat Tinggi	80.743.000	80.743.000	80.710.486	99,96	Sangat Tinggi
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	100	Sangat Tinggi	6.835.000	6.835.000	6.835.000	100	Sangat Tinggi
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100	Sangat Tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100	Sangat Tinggi
11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.	100	Sangat Tinggi	6.623.000	6.623.000	6.623.000	100	Sangat Tinggi
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat Tinggi	9.788.000	9.788.000	9.788.000	100	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	Sangat Tinggi
16	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99,05	Sangat Tinggi	531.398.000	531.398.000	510.560.436	99,05	Sangat Tinggi

20. KECAMATAN GRABAG

Kecamatan Grabag pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) urusan dan 14 (empat belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 99,84% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 944.263.000,-. Realisasi Capaian Anggaran 910.045.828,- atau 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Grabag, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/ PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	14	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Kecamatan Grabag adalah sebagai berikut:

- 1) Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 2) Sarana dan prasarana dalam pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.

- 3) Untuk beberpa kegiatan, terdapat realisasi harga yang lebih rendah dari indeks (di bawah indeks harga yang telah ditentukan).

Adapun saran tindak lanjut dalam upaya meningkatkan ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan aparatur kecamatan dan sistem kerja guna mendorong peran aktif aparatur kecamatan dalam mendorong pelayanan prima.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana guna optimalisasi Kecamatan dalam mendorong percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kecamatan.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi kewilayahan.

Tabel 2.243.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Grabag

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	4.999.850	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial							
3	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	28.390.000	28.390.000	28.190.000	99,30	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100,00	Sangat Tinggi	94.460.000	94.460.000	94.169.000	99,69	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100,00	Sangat Tinggi	25.040.000	25.040.000	25.040.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	Urusan Pilihan Pertanian							
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pilihan Perindustrian							
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN							
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
9	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	98,75	Sangat Tinggi	124.788.000	124.788.000	120.583.033	93,94	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	531.535.000	531.535.000	502.029.170	95,51	Sangat Tinggi
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.975	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	49.050.000	49.050.000	49.050.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan							
13	Program Pengembangan Data / Informasi	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan							
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	40.000.000	40.000.000	39.984.800	99,96	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99,84	Sangat Tinggi	944.263.000	944.263.000	910.045.828	96,62	Sangat Tinggi

21. KECAMATAN NGABLAK

Kecamatan Ngablak pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 19 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **96,40%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	19	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 535.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 515.907.947,-. atau **96,40%**, dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	19	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Ngablak, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	19	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.244.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan NGABLAK

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	78.860.000	78.860.000	73.636.113	93,38	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	148.267.000	148.267.000	135.591.734	91,45	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.500	99,99	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.980.000	99,33	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	6.150.000	6.150.000	6.149.500	99,99	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	19.000.000	19.000.000	18.070.000	95,11	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	17.795.000	17.795.000	17.595.000	98,88	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	16.030.000	16.030.000	16.028.000	99,99	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.999.900	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	6.150.000	6.150.000	6.150.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program : Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	59.140.000	59.140.000	59.069.400	99,88	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat Tinggi	535.172.000	535.172.000	515.907.947	96,40	Sangat Tinggi

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, seperti aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta berdasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2016. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2017, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang pada masing-masing urusan, dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama, (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.4.1. Permasalahan Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

2.4.1.1. Urusan Pendidikan

- a. Belum tercapainya target: rata-rata lama sekolah;
- b. Rendahnya APK dan APM di semua jenjang pendidikan;
- c. Rendahnya target APM di semua jenjang pendidikan;
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas guru;
- e. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- f. Kurangnya sarana prasana pendidikan.

2.4.1.2. Urusan Kesehatan

- a. Cukup tingginya angka kematian bayi (akb) dan kasus kematian ibu melahirkan;
- b. Belum tercapainya target: cakupan kunjungan bayi.

2.4.1.3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah;
- b. Belum tercapainya target penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

2.4.1.4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- a. Belum tercapainya target: rasio akseptor KB;
- b. Belum tercapainya target: cakupan peserta KB aktif;
- c. Tingginya prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

2.4.1.5. Urusan Sosial

- a. Masih tingginya angka kemiskinan;
- b. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Masih rendahnya kemampuan memberikan Bantuan Sosial bagi PMKS.

2.4.1.6. Urusan Kebudayaan

- a. Kurangnya sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- b. Rendahnya target pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

- 2.4.1.7. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - a. Rendahnya jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan kepemudaan;
 - b. Rendahnya jumlah organisasi olah raga dan jumlah kegiatan olah raga;
 - c. Rendahnya jumlah lapangan olah raga.
- 2.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Rendahnya target: cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - b. Rendahnya target: cakupan kelompok binaan PKK;
 - c. Rendahnya target: Jumlah LSM Yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.4.1.9. Urusan Perpustakaan
 - a. Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan;
 - b. Rendahnya rasio koleksi buku (jumlah buku per judul buku) yang tersedia di perpustakaan daerah.
- 2.4.2. Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing
 - 2.4.2.1. Urusan Ketenagakerjaan
 - a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada sektor dominan kesempatan kerja;
 - b. Masih besarnya proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja;
 - c. Rendahnya pencari kerja yang ditempatkan.
 - 2.4.2.2. Urusan Penanaman Modal
 - a. Belum tercapainya target: jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);
 - b. Belum tercapainya target: rasio daya serap tenaga kerja;
 - c. Belum tercapainya target: sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah;
 - d. Rendahnya target: lama proses perijinan (9 Hari)
 - 2.4.2.3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Rendahnya target: persentase koperasi aktif;
 - b. Belum tercapainya target: jumlah ukm non BPR/LKM UKM;
 - c. Belum tercapainya target: jumlah BPR/LKM;
 - d. Rendahnya target: usaha mikro dan kecil yang dibina
 - 2.4.2.4. Urusan Ketahanan Pangan
 Belum tercapainya target skor pola pangan harapan (PPH) daerah.
 - 2.4.2.5. Urusan Pertanian
 - a. Belum tercapainya target produktivitas jagung;
 - b. Besarnya kontribusi sub sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap pdrb adhb (%) sektor pertanian;
 - c. Belum besarnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap pdrb sektor pertanian;
 - d. Belum tercapainya target produksi hewan ternak kambing dan domba;
 - e. Belum tercapainya target produksi hewan unggas ayam pedaging, ayam ras petelur dan ayam buras;
 - f. Rendahnya penetapan target: angka konsumsi protein hewani;

- g. Belum tercapainya target angka konsumsi protein hewani (gr/kap/hr): telur dan susu.
- 2.4.2.6. Urusan Perikanan
 - a. Rendahnya target konsumsi ikan perkapita;
 - b. Rendahnya target produksi ikan;
 - c. Rendahnya target: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian.
- 2.4.2.7. Urusan Pariwisata
 - a. Belum tercapainya target: kunjungan wisata manca negara dan kunjungan wisata nusantara;
 - b. Belum tercapainya target: kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%).
- 2.4.2.8. Urusan Perdagangan
 - a. Rendahnya target: kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%);
 - b. Rendahnya target: ekspor bersih perdagangan (juta US\$);
 - c. rendahnya target: cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%).
- 2.4.2.9. Urusan Perindustrian;
 - a. Belum tercapainya target: cakupan bina kelompok pengrajin;
 - b. Belum tercapainya target: pertumbuhan sektor industri.
- 2.4.3. Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
 - 2.4.3.1. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
 - c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
 - 2.4.3.2. Urusan Perumahan
 - a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
 - b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 - c. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
 - d. Tingginya angka rumah tidak layak huni.
 - 2.4.3.3. Urusan Perhubungan
 Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan
 - 2.4.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.
- 2.4.4. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup
 - 2.4.4.1. Urusan Penataan Ruang
 - a. Penambangan tidak berijin;
 - b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
 - c. Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi.

- 2.4.4.2. **Urusan Lingkungan Hidup**
 - a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
 - b. Rasio TPS yang masih rendah;
 - c. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
 - d. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan.
- 2.4.4.3. **Urusan Kehutanan**
 Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan. pemulihan. pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.
- 2.4.5. **Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan**
 - 2.4.5.1. **Urusan Perencanaan Pembangunan**
 Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
 - 2.4.5.2. **Urusan Pertanahan**
 Rendahnya target: persentase luas lahan bersertifikat.
 - 2.4.5.3. **Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - a. Belum tercapainya target: rasio penduduk ber ktp per satuan penduduk;
 - b. Belum tercapainya target: bayi berakte kelahiran;
 - c. Rendahnya target: rasio pasangan berakte nikah.
 - 2.4.5.4. **Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
 - a. Belum tercapainya target: nilai AKIP;
 - b. Belum tercapainya target: persentase peningkatan PAD.
 - 2.4.5.5. **Urusan Statistik**
 Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.
 - 2.4.5.6. **Urusan Kearsipan**
 Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.
 - 2.4.5.7. **Urusan Komunikasi dan Informatika**
 - a. Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
 - b. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika.
- 2.4.6. **Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat**
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Belum tercapainya target: angka kriminalitas per seribu penduduk;
 - b. Rendahnya target: rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk;
 - c. Belum tercapainya target: kegiatan pembinaan politik daerah;
 - d. Belum tercapainya target: cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan;
 - e. Belum tercapainya target: cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Magelang 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2014-2019). yaitu:

2.5.1. Isu Strategis Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;
3. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
4. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
6. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

2.5.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing

1. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
2. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
3. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
4. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
5. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.

2.5.3. Isu Strategis Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

1. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
4. Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell* dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.

2.5.4. Isu Strategis Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
2. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
3. Perlunya 'pencegahan' dan pengendalian pencemaran lingkungan.

2.5.5. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
3. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan. kecamatan sampai kabupaten.

2.5.6. Isu Strategis Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

1. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparat yang dibantu masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

2.6. PERMASALAHAN PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pendidikan
2. Prioritas Kesehatan
3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah
5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik
6. Prioritas Lingkungan Hidup
7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.

Permasalahan, solusi dan program / kegiatan untuk pencapaian target delapan prioritas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.238.
Permasalahan Terkait Capaian Kinerja Aspek Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	PRIORITAS PENDIDIKAN	<p>a. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah di Kabupaten Magelang berdasarkan pendataan tahun 2017 sebanyak 7.620 orang , kondisi ini mempengaruhi tidak tercapainya target APK, APM & rata-rata lama sekolah;</p> <p>b. Letak geografis Kabupaten Magelang diantara Kota Magelang dan DIY, sehingga banyak masyarakat yang memilih sekolah di dua wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target APK di Kabupaten Magelang (data tahun 2017 sebanya 5.345 siswa);</p> <p>c. Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang yang cukup tinggi mempengaruhi APK, APM & rata-rata lama sekolah (angka kemiskinan Kab Magelang tahun 2017 adalah sebesar 12,42%);</p> <p>d. Di beberapa wilayah faktor geografis, kultural dan sosial budaya mempengaruhi partisipasi sekolah;</p> <p>e. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 DAK pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kendala regulasi dari pemerintah pusat menyebabkan tidak tercapainya ruang kelas sesuai SNP.</p> <p>f. Penanganan permasalahan pendidikan cenderung bersifat sektoral di Disdikbud kurang terintegrasi pada SKPD diluar Urusan Pendidikan.</p>	<p>a. Menurunkan angka putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.</p> <p>b. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sehingga siswa tidak memilih sekolah di wilayah lain.</p> <p>c. Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi.</p> <p>d. Mendekatkan tempat belajar mengajar dengan tempat tinggal siswa.</p> <p>e. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan rehab ruang kelas terutama pemanfaatan dana DAK.</p> <p>f. Menintegrasikan kegiatan bidang pendidikan dengan Kegiatan SKPD terkait.</p>	<p>a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>b. Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun;</p> <p>c. Penyelenggraaan Pendidikan Non formal;</p> <p>d. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan;</p> <p>e. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan;</p> <p>f. Integrasi Kegiatan Bidang Pendidikan Dengan Kegiatan SKPD terkait;</p> <p>g. Fasilitasi dan asistensi perencanaan bidang pendidikan Oleh Bappeda dan Litbangda;</p> <p>h. Penyediaan Bahan Pustaka oleh Dispuspa;</p> <p>i. Meningkatkan Tramtibum di lingkungan sekolah dan Mencegah timbulnya PMKS usia sekolah di jalanan (PGOT) Oleh Satpol PP & PK</p>
2.	PRIORITAS KESEHATAN	<p>a. Terjadinya kasus kematian ibu melahirkan / bayi disebabkan karena keluarga pasien tersebut membawa ke RS/Puskesmas pasien tersebut sudah dalam kondisi kritis sehingga tidak tertolong</p>	<p>a. Peningkatan sosialisasi dan promosi kesehatan terhadap Ibu hamil dan keluarga tentang persalinan</p> <p>b. Penanggulangan anemia pada ibu hamil dengan pemberian</p>	<p>a. Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK</p> <p>b. Penelusuran Kematian Ibu melahirkan, pelaksanaan FGD dan pembahasan risti bumil</p> <p>c. Rapat koordinasi KIA tingkat</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> b. Masih kurangnya kesadaran kesehatan ibu hamil dan terhadap janin dalam kandungannya. c. Kurangnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat /penderita TBC untuk melaporkan kepada petugas kesehatan; d. Poses pengobatan yang terputus/tidak tuntas karena masyarakat merasa sudah sembuh, sehingga tidak mau berobat lagi, namun sebenarnya penyakitnya belum tuntas dan masih perlu pengobatan. 	<ul style="list-style-type: none"> makanan tambahan c. Melaksanakan FGD dan rakor bagi bidan dan lintas sektor d. Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil e. Memaksimalkan kelas Ibu Hamil. f. Membangun jejaring layanan TB melalui Public Private Mix (PPM) yang melibatkan seluruh layanan kesehatan pemerintah (RS, puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri dalam rangka MENGHIMPUN DATA pasien yang diagnosis TB g. Menemukan kasus secara aktif di masyarakat melalui kegiatan KETUK PINTU oleh kader TB h. Melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan tentang TBC i. Melakukan kkrining TB di tempat-tempat khusus meliputi Sekolah dan pondok pesantren j. Melakukan survey kontak serumah pasien TB positif oleh petugas TB; Meningkatkan pejangkauan suspek TB oleh puskesmas yang tidak menemukan TB. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan dan kabupaten d. Pertemuan Surveilans e. Pemanfaatan PWS KIA dan Kohort Ibu Hamil f. Pertemuan Pembahasan Kematian Ibu (AMP) Tk Kabupaten g. Optimalisasi Program perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Tk. Kec h. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya i. Penanggulangan Anemia; j. Pemberantasan Penyakit TB Paru dan Kusta.
3.	PRIORITAS PENANGGULA-NGAN KEMISKINAN	<p>Selama rentang 4 tahun terakhir, capaian angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan target RPJMD, beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. b. Efektifitas kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan. c. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat. 	<p>Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dan diharapkan mampu memberikan penurunan angka kemiskinan secara signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seiring terbitnya Perbup 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun b. Program Pendidikan Menengah c. Program Pendidikan Tinggi d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat f. Program Pengembangan Perumahan g. Program Lingkungan Sehat Perumahan h. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			<p>Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Mengupayakan Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), perguruan tinggi dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan;</p> <p>c. Memetakan lokasi kemiskinan berdasarkan PBDT 2015 di semua Kecamatan di Kabupaten Magelang;</p> <p>d. Memperbaiki database kemiskinan (Komitmen pelaksanaan program/kegiatan menggunakan data BDT 2015</p>	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>j. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>l. Program Kerjasama Pembangunan</p> <p>m. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>o. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>p. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</p> <p>q. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>r. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>s. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>t. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>
4	Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan: Pertanian, UMKM dan Pariwisata			
4.a	Pertanian	<p>Selama 2014-2016, terdapat tiga indikator yang belum tercapai sesuai target, yaitu Skor Pola Pangan Harapan, Produktivitas Jagung, Produksi Jagung dan Angka Konsumsi Protein Hewani Susu.</p> <p>a. Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat. Saat ini yang masih rendah adalah konsumsi protein hewannya. Sehingga mempengaruhi nilai PPH secara keseluruhan.</p>	<p>a. Untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan, yang sudah dilakukan antara lain melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan, penganekaragaman olahan pangan lokal, Kampanye Konsumsi Makanan B2SA, Gemarikan, Gerimisur, Kampanye Konsumsi Makanan</p>	<p>a. Desa mandiri pangan;</p> <p>b. Pengembangan olahan pangan lokal;</p> <p>c. Survey pola pangan harapan (PPH);</p> <p>d. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan;</p> <p>e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan (B2SA);</p> <p>f. Gemarikan;</p> <p>g. Gerimisur;</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		b. Produktivitas Jagung belum mencapai target, karena kebanyakan jagung yang dikembangkan oleh petani adalah jagung benih local (bukan benih unggul pabrikan), sehingga memang produktivitasnya masih belum terpenuhi. c. Produksi jagung belum tercapai, karena lahan lebih banyak digunakan untuk menanam padi, karena ada target pajale untuk peningkatan produksi padi (sebagai catatan bahwa padi dan jagung ditanam di lahan yang sama secara bergiliran, sehingga jika produksi padi meningkat, secara bersamaan jagung menurun). a. Angka konsumsi susu, belum tercapai karena produksi susu di sentra sapi perah yang baru di Kecamatan Ngablak mengalami masa peralihan (dari budidaya sapi perah jantan untuk pembesaran dan penggemukan ke sapi perah betina), sehingga produksi belum optimal	B2SA, dsb. b. Angka Konsumsi Susu, upaya yang sudah dilakukan antara lain program replacement sapi perah melalui dana APBD II, APBD I, maupun APBN dan juga ada dukungan dari BI terhadap pengembangan klaster sapi perah di Kecamatan Ngablak.	h. Replacement sapi perah; i. Pengembangan klaster sapi perah (CSR BI). 2. Pengembangan UMKM.
4.b	UMKM	a. Rendahnya Layanan Pengembangan Usaha b. Rendahnya Kualitas/Kuantitas SDM c. Rendahnya Daya Saing Produk d. Tingginya tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatkan fasilitas pedagang pasar dan PKL b. Peningkatan kemampuan SDM (manajemen / teknis) c. Memfasilitasi promosi, pemasaran dan matchmaking bagi pelaku usaha yang dilaksanakan secara sistematis d. Mendorong Pengembangan ekonomi kreatif menjadi usaha ekonomi yang bersifat masal e. Pengembangan jaringan pelaku usaha lintas daerah dan wilayah melalui fasilitasi asosiasi usaha untuk dukungan kebutuhan bahan baku	
4.c	Pariwisata	a. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata b. Kurangnya promosi obyek wisata c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola destinasi wisata b. • Belum baiknya sinkronisasi pengelolaan	a. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan fokus mengacu pada dokumen rencana pengembangan wisata; b. Peningkatan promosi dan atraksi pariwisata dengan sinergitas	

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		obyek wisata oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun pihak ketiga.	pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan swasta; b. Meningkatkan kualitas SDM pelaku pariwisata	
5	Prioritas Infrastruktur			
5.a	PEKERJAAN UMUM: PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	<p>Panjang jalan kabupaten Magelang dalam kondisi baik dari tahun 2014 s.d 2016 telah mencapai 670,33 km, Jika menggunakan data panjang jalan tahun 2014 (887,83km) capaiannya sebesar 75,50%, dari target 69,01% maka telah melampaui sebesar 6,49%</p> <p>Namun dengan adanya Penambahan Panjang Jalan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km (berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor: 180.182 /180/KEP/25/2015), maka prosentase jalan kondisi baik berkurang menjadi 66,98%. Hal ini disebabkan karena panjang jalan kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km</p>	Penambahan anggaran tahun 2018 – 2019 untuk rehab/peningkatan jalan dengan panjang jalan yang harus ditingkatkan sepanjang 27,55 km	<p>Pembangunan Jalan Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 93.739.787.000,- • 2018 : Rp.104,404,825.000,- • 2019 : Rp. 51.702.744.000,- <p>Rehabilitasi Jalan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 17.226835.900,- • 2018 : Rp. 62.180.625.000,-,- • 2019 : Rp. 55.736.350.000,-
5.b	PERUMAHAN	Perubahan data rumah tidak layak huni pada tahun 2015 mengacu pada PBDT dengan jumlah menjadu 64.640 unit. Sedangkan baseline 2014 mengacu pada data PPLS tahun 2011. (Data RTLH berdasarkan verifikasi tim	Penambahan anggaran tahun 2018 dan 2019 untuk penguatan kelembagaan pelaksanaan fasilitasi rumah layak huni dan pembangunan RTLH	<p>Pembangunan RTLH</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017 (3.701 unit) - 2018 (1.062 unit) <p>Target pembangunan 2018 dan 2019 adalah 45.130 unit.</p> <p>Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 37.010.000.000,- • 2018 : Rp. 10.062.000.000,- • 2019 : Rp. 440,068,000.000,-
5.c	PERHUBUNGAN	a. Meningkatnya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.	a. Identifikasi ulang kebutuhan dan lokasi rambu-rambu lalu lintas tahun 2018 b. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di lokasi tahun 2018-2019	<p>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,- • 2018 : Rp. 101.960.000,- • 2019 : Rp. 466.373.300,-
		b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum	a. Pembinaan angkutan umum tahun 2018-2019 b. Peningkatan pengelolaan fasilitas	<p>Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,-

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			dan pelayanan angkutan umum dan terminal angkutan darattahun 2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 : Rp. 345.713.000,- • 2019 : Rp. 269.045.300,-
6	Prioritas Lingkungan Hidup	Semua target indikator telah tercapai		
7	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan pencapaian Opini WTP • Belum tercapainya Persentase Peningkatan PAD • Belum tercapainya nilai AKIP 	<p>UPAYA PENCAPAIAN :</p> <p>Untuk peningkatan capaian target PAD dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan harus melalui perda sementara jalur tata kelola melalui penyempurnaan administrasi pemungutan pajak; • Di wilayah perkotaan dan resor pariwisata, pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang perlu mendapat perhatian khusus; • Memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang dimiliki (Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan Aset) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Perencanaan Tata Ruang • Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
			<p>2. Untuk meningkatkan nilai AKIP upaya yang dilaksanakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kinerja harus menyentuh substansi perencanaan (outcome seharusnya menjadi awal dari 	

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			sebuah proses perencanaan) <ul style="list-style-type: none"> • melakukan inovasi-inovasi untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil • Meningkatkan fungsi monev 	
8	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat belum sampai ke desa • Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal masih kurang • Pencegahan dini korban penanggulangan bencana masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan dan pemantapan budaya politik • Meminimalisir gangguan keamanan • Peningkatan pencegahan dini korban penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri/ Fasilitasi Penanganan Kasus Masyarakat / Konflik Sosial; • Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA; • Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan • Peningkatan Kesadaran Bela Negara; • Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) atau POLMAS Desa; • Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik/ Sosialisasi Pilkada

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja, dengan strategi pengembangan kualitas tenaga kerja masyarakat yang mampu bersaing di pasar kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- b. Membaiknya struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal, dengan strategi menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama sinergis antar pelaku usaha.
- c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah, dengan strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dukungan pelayanan perijinan yang baik.
- d. Semakin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dengan strategi penguatan potensi lokal dalam pengembangan pangan, dukungan sarana prasarana serta diversifikasi pangan.
- e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
- f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan, dengan strategi meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan, dengan strategi pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, dan diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah, dengan strategi memperkuat industri kecil dan menengah yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional maupun internasional, untuk mendorong perekonomian daerah.
- i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah, dengan strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi wisata yang ada, keragaman budaya, dan peninggalan sejarah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari Tahun 2013 – 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada Tahun 2013, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.19,602 triliun. Pada Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,84% menjadi Rp.21,923 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,131 triliun pada Tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,07 %. Pada Tahun 2016 naik sebesar 8,67% menjadi Rp.26,223 trilion.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun, pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,03 % menjadi Rp.18,838 triliun dan Tahun 2016 naik sebesar 5,40% menjadi Rp.19,855 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2016

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2013	19.602.844,86	17.020.755,61
2	2014	21.923.411,31	17.936.288,38
3	2015	24.131.644,16	18.838.351,97
4	2016	26.223.219,71	19.855.844,24

Sumber : BPS, 2017

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2016, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 23,38%, disusul sektor pertanian sebesar 21,91%, dan sektor perdagangan sebesar 12,57%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2016 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,25%, disusul sektor sekunder sebesar 31,59% dan sektor primer sebesar 27,13%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2016, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,86% pada tahun 2016.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% meningkat sedikit menjadi 31,3% pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 21,26% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 naik lagi menjadi 32,2%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang, meskipun merupakan penyumbang tertinggi kontribusi namun demikian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor tersier sebesar 41,58% menurun menjadi 41,31% pada Tahun 2014, 41,03% pada Tahun 2015 dan 40,92% pada Tahun 2016.

Tabel. 3.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB
Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2016

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)			
		2013	2014	2015	2016
1	Primer	27,84	27,85	27,84	27,13
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,44	4,35
2	Sekunder	30,6	31,03	31,22	31,59
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,29	9,23
3	Tersier	41,58	41,12	40,94	41,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,39	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,66	3,65
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,09

Sumber : BPS, 2017.

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) Tahun 2012 sebesar Rp.14,55 juta, meningkat menjadi Rp.19,37 juta pada Tahun 2015 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.20,69 juta pada Tahun 2016. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) Tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun. Tahun 2012 PDRB ADHK sebesar Rp.13,18 dan pada Tahun 2015 menjadi Rp.15,10 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.15,66 pada Tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2016

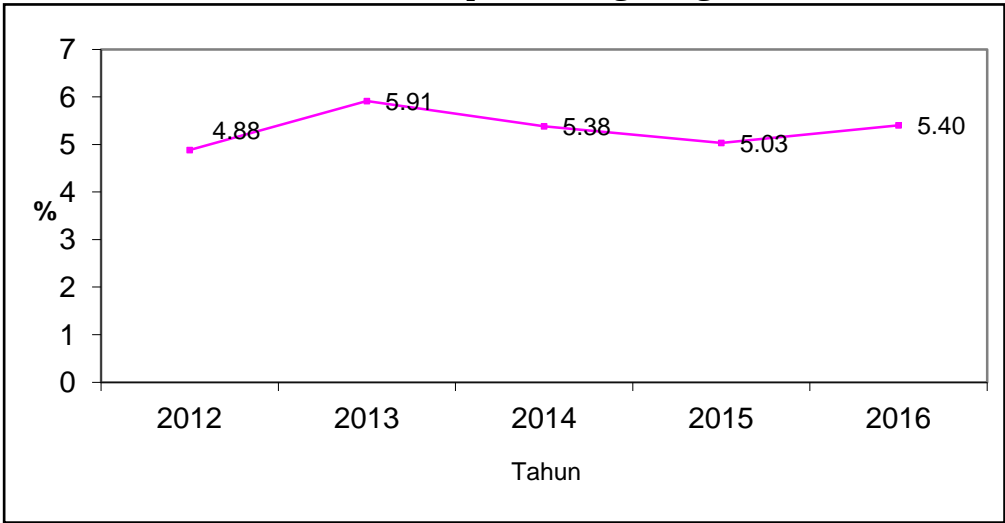
No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2012	14,55
2	2013	16,05
3	2014	17,69
4	2015	19,37
5	2016	20,86

Sumber : BPS, 2017.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari Tahun 2012 – 2016 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 4,88 % pada Tahun 2012, 5,91 % pada Tahun 2013, melambat menjadi 5,38 % pada Tahun 2014, kemudian turun menjadi 5,03% pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 naik menjadi 5,40%.

Gambar 3.1.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016



Sumber : BPS, 2017.

Tabel 3.4
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016

NO	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,46	1,89	1,75	3,26	3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	7,39	5,90	4,52	1,71	2,94
3	Industri Pengolahan	8,57	10,93	7,44	5,13	5,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,14	7,65	3,32	1,50	7,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	-0,29	1,81	1,33	2,17
6	Konstruksi	9,37	5,42	5,08	5,93	6,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,81	4,13	3,52	3,99	5,28
8	Transportasi dan Pergudangan	8,42	8,56	8,55	8,54	6,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,63	5,40	7,5	6,60	6,02
10	Informasi dan Komunikasi	10,56	7,95	13,04	9,45	8,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	4,39	5,23	8,44	10,07
12	Real Estate	4,01	7,7	7,18	7,35	6,56
13	Jasa Perusahaan	7,03	12,06	8,36	9,74	10,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,77	2,73	1,67	4,24	2,22
15	Jasa Pendidikan	17,82	9,41	10,17	7,10	6,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,46	7,10	11,78	6,92	9,78
17	Jasa lainnya	0,33	9,22	8,51	3,29	8,64
	PDRB	4,88	5,91	5,38	5,03	5,40

Sumber : BPS, 2017.

e. Inflasi

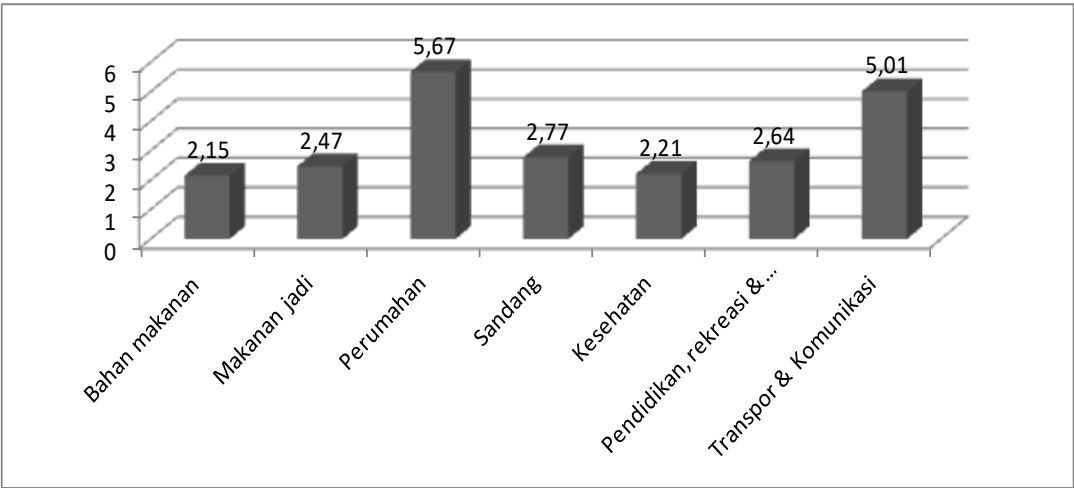
Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2017, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,47 persen, lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang laju inflasinya sebesar 2,86 persen. Namun demikian angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,71 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen.

Selama periode Januari-Desember 2017 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 0,91 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada Agustus 2017 sebesar minus 0,47 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2017 bisa dilihat dalam gambar di bawah ini. Laju inflasi pada Tahun 2017 tertinggi pada kelompok perumahan sebesar 5,67%, kelompok transportasi sebesar 5,01%, kelompok sandang sebesar 2,77%, kelompok pendidikan 2,64%, kelompok makanan jadi sebesar 2,47%, diikuti kelompok kesehatan 2,21%, dan terakhir kelompok bahan makanan 2,15%.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Tahun 2017 Menurut kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, 2017.

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 masih dapat dikendalikan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2019 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5.
Target indikator makro ekonomi Tahun 2019

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	PDRB ADHB	Rp. 32.673.049,68 Juta
2	PDRB ADHK 2010	Rp. 23.097.613,78 Juta
3	Pertumbuhan PDRB ADHK	6,4 – 7,1 %
4	PDRB Perkapita ADHB	Rp.25,67 Juta
5	Inflasi	4 + 1 %

Sumber : RPJMD Kab. Magelang 2014-2019

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah.

Realisasi pendapatan Tahun 2016-2017 dan target pendapatan daerah Tahun 2018-2019 yang meliputi PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1	Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
2	Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
4	Lain-lain PAD Yang Sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	44.220.622.000	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	580.298.328.000
1	Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	110.491.800.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	148.979.996.000	-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	867.190.000
	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	325.360.832.000
	J U M L A H	2.036.310.089.428	2.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.372.174.484.855

Sumber : BPPKAD

Kenaikan PAD Tahun 2017 dibandingkan dengan PAD Tahun 2016 tersebut berasal dari :

1. Pajak Daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau pendataan wajib pajak baru dan pemutakhiran subjek dan objek pajak serta dilaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk peningkatan kesadaran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak.
2. Retribusi Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh yang signifikan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga disebabkan kunjungan wisata di tempat rekreasi dan olahraga semakin meningkat dan peningkatan dari retribusi pelayanan pasar yang dipengaruhi dari retribusi penempatan kios pertama di Pasar Secang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya bagi hasil laba BUMD terutama di

- Sektor Perbankan seperti Bapas, Bank Jateng dan BPR/BKK ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen pengelolaan perbankan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor, antara lain Penerimaan bunga deposito yang mengalami penurunan sangat signifikan ini menggambarkan bahwa perencanaan penganggaran belanja Tahun 2017 lebih baik dari Tahun 2016 dengan kata lain menurunnya SILPA Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2016.

Target yang ditentukan pada Tahun 2017 lebih kecil dibandingkan Tahun 2016 karena jumlah asset yang direncanakan dihapus dan dilelang pada Tahun 2017 jumlahnya lebih sedikit.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 sebesar Rp.1.375.873.488.567,- atau 91,04 % dari Total Belanja Tidak Langsung, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebesar Rp.1.440.436.939.257,- atau mencapai 90,79% dari total Belanja Tidak Langsung. Pada Tahun 2019 pada komponen Belanja Tidak langsung direncanakan alokasi belanja Hibah sebesar Rp.56.405.500.000, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.16.633.414.000.

Penganggaran belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Kebijakan belanja pegawai diasumsikan sama dengan tahun 2017 yaitu tidak ada kenaikan gaji pegawai tetapi menganggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya untuk pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi

daerah. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2016 s/d 2018 dan prediksi tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018 dan Prediksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374
	1 Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480
	2 Belanja Bunga	-	-	-	-
	3 Belanja Subsidi	-	-	-	-
	4 Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	52.841.150.000
	5 Belanja Bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	8.685.350.000
	6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
	7 Belanja Bantuan Keuangan	-	479.610.746.506	455.888.980.000	630.069.450.300
	8 Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	697.923.996.996	917.112.364.905	1.175.175.774.000	1.198.416.231.224
	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	
	Belanja modal	353.167.692.583	474.366.015.948	619.732.051.000	
	Jumlah Belanja	2.073.797.409.332	2.357.549.304.162	2.662.575.016.000	2.861.496.717.598

Sumber : BPPKAD, 2018.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga

pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 s.d. 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		0		0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		20.398.400		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	300.000.000	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		0		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		0		0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
	Pembiayaan neto	495.035.168.182	483.558.451.178	306.731.923.000	78.302.773.540
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)				(411.019.459.203)

Sumber : BPPKAD, 2018.

Secara keseluruhan, postur APBD Tahun 2016 – 2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
1.2.2	D A U	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
1.2.3	D A K	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
1.2.4	DID	-	44.220.622.000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	580.298.328.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	110.491.800.000
1.3.2	Dana darurat				0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	148.979.996.000	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	867.190.000
1.3.6	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	325.360.832.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.310.089.428	2.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.372.174.484.855
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
2.1.1	Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	0
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	0
2.1.4	Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	52.841.150.000
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	8.685.350.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	-	479.610.746.506	455.888.980.000	630.069.450.300
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374
2.2	Belanja Langsung	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	1.198.416.231.224
2.2.1	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	-
2.2.3	Belanja modal	353.167.692.583	478.366.015.948	619.732.051.000	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	1.198.416.231.224
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.073.797.409.332	2.361.549.304.162	2.662.575.016.000	2.861.496.717.598
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.487.319.904)	(183.876.775.220)	(306.731.923.000)	(489.322.232.743)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
			-		
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	321.342.500	20.398.400	-	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		-		0
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	-	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
	Pembiayaan Netto	495.056.510.682	483.558.451.178	306.731.923.000	78.302.773.540
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	457.569.190.778	299.681.675.958	0	(411.019.459.203)

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2018.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita); (4) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (5) dan pokok pikiran DPRD.

Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, merupakan tahap akselerasi. Tahap akselerasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu juga untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap ke 3 (tiga) dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Tahun 2019 merupakan tahap akselerasi dengan tema: *“Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan”*. Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke 6 (enam) yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi 6 (enam), juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

Untuk mendukung tema tersebut diatas diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam Bab II buku ini.
2. Fokus pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 pada :
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kualitas / derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Menurunkan jumlah rakyat miskin;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Peningkatan kemampuan keuangan daerah;
 - g. Pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah;
 - h. Optimalisasi penegakan hukum;
 - i. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
 - j. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.
3. Prioritas pembangunan Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
4. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan propinsi dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan.
 - b. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol.
 - c. Kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan.
 - d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga.
 - e. Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca.
 - f. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan.
 - g. Bertambahnya kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan berkurangnya kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.
 - h. Terwujudnya karakter masyarakat yang beragama, berbudaya, serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
 - i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan turut dalam pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja.
 - b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal.
 - c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah.
 - d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
 - e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan.
 - g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan.
 - h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
 - i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah.
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

- c. Terpenuhiya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan.
- d. Terpenuhiya sarana dan prasarana penunjang perhubungan.
- 4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - b. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.
 - c. Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana.
- 5. Meningkatnya manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
 - b. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal.
 - c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
 - d. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan.
- 6. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat serta kesadaran dan kepatuhan hukum.
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
 - b. Berkurangnya Risiko bencana yang berdampak pada masyarakat.

Selengkapnya keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2019

Visi: KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat	a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan b. Terwujudnya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol c. Kualitas Pembangunan Manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan. d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas. g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. h. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai nilai Pancasila

		<ul style="list-style-type: none"> i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan
Misi 2: Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan. h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah
Misi 3: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik, serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. b. terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat. berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat. c. terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan d. terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan
Misi 4: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam b. terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya c. terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana
Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Meningkatnya manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah b. terwujudnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak d. meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil.
Misi 6: Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.. b. Berkurangnya resiko bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi antara lain:

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
 - a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 - b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 - c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Prioritas pembangunan nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
 5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
2. Mendasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 yang diarahkan untuk pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan prioritas:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada : Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin, Penguatan *sustainable livelihood* dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu.
 - b. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada: peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).

- c. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada : Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
- d. Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, fokus pada: peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.
- e. Ketahanan pangan dan energi, fokus pada: terwujudnya pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan.
- f. Kesenjangan wilayah, fokus pada: penguatan infrastruktur, konektivitas pemerataan, prasarana sarana dasar dan ekonomi, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur serta mengoptimalkan potensi kelautan.
- g. Peningkatan pelayanan publik, perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perwujudan kelembagaan birokrasi yang professional dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2019 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pendidikan

Kebijakan pada Urusan Pendidikan diarahkan pada upaya (1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

1. Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.
2. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri dan Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri dan Swasta
3. Pelaksanaan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.
4. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel.
6. Pendidikan Anak Usia Dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD dan peningkatan prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
7. Penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.

4.2.2. Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada Urusan Kesehatan diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu

pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan; (3) Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat; dan (4) Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada :

1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya melalui pembangunan RS Kelas B.
2. Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) non Jamkesmas untuk penanggulangan kemiskinan
3. Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit melalui peningkatan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) dan Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komperhensif (PONEK).
5. Peningkatan kesehatan lansia melalui posyandu lansia.
6. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
7. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
8. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan perencanaan terpadu.

4.2.3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk (1) Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial; (2) Peningkatan nilai-nilai religius dan penghargaan terhadap kearifan lokal; dan (3) Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada Tahun 2019 penanggulangan kemiskinan difokuskan pada :

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Desa, PMTAS.
2. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.
3. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan Kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat.
5. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
6. Pembangunan pedesaan dan perkotaan melalui penanganan lingkungan permukiman kumuh.
7. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.

4.2.4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah difokuskan pada :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani
2. Revitalisasi pasar tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik.
3. Pengembangan pasar bersama IKM.
4. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.2.5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik

Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada (1) Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi; (2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan; dan (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Kebijakan Urusan Perhubungan diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, dan irigasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI).
3. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan/pedesaan.
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah.
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

4.2.6. Prioritas Lingkungan Hidup

Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi dan konservasi.

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Lingkungan Hidup difokuskan pada :

1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air.
2. Mempertahankan Adipura Kota Muntilan.
3. Pengelolaan sampah melalui Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
4. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

4.2.7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan difokuskan pada :

1. Terlaksananya merit sistem dalam pengisian jabatan melalui peningkatan manajemen kepegawaian.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

4.2.8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.

Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; (3) Perlindungan masyarakat; dan (4) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana.

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana difokuskan pada :

1. Fasilitasi desa bersaudara (sister village)
2. Pengembangan desa tangguh bencana
3. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
4. Peningkatan kualitas jalur evakuasi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2019

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
1.	<p>Prioritas Pendidikan fokus pada :</p> <p>A. Pendidikan Anak Usia Dini melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD.</p> <p>B. Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.</p> <p>C. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.</p>	<p>a. Angka Partisipasi Kasar PAUD</p> <p>b. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A*</p> <p>c. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B*</p> <p>d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A*</p> <p>e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*</p>	<p>a. 90%</p> <p>b. 104,54%</p> <p>c. 96%</p> <p>d. 93,05%</p> <p>e. 68%</p>	<p>1. Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>3. Program Pendidikan Non Formal</p>	Disdikbud

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>D. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP.</p> <p>E. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel.</p> <p>F. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta</p>	f. Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/SMP	f. SD 84,68%, SMP 90%		
2.	<p>Prioritas Kesehatan fokus pada :</p> <p>A. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana</p>	a. Pembangunan RS Type B Tahap II	a. 1 paket	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana	a. Dinas Kesehatan

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Kelas B.</p> <p>B. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin).</p> <p>C. Pengembangan pelayanan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap</p> <p>D. Pengembangan rumah sakit kelas D melalui Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Grabag.</p>	<p>b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin)</p> <p>c. Pengembangan pelayanan puskesmas menjadi rawat inap</p> <p>d. Rumah Sakit Tipe D*</p>	<p>b. 166.816 orang</p> <p>c. 2 puskesmas</p> <p>d. 1 RS</p>	<p>dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata</p>	<p>b. RSUD Muntilan</p> <p>c. DPU PR</p>
3.	<p>Prioritas Penanggulangan Kemiskinan fokus pada :</p> <p>A. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui</p>	a. Penguatan cadangan pangan**	a. 64%	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS.</p> <p>B. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.</p> <p>C. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.</p> <p>D. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja</p>	<p>b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan***</p> <p>c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**</p>	<p>b. 100%</p> <p>c. 78,68%</p>	<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>a. Distan dan Pangan</p> <p>b. Dinas Kesehatan</p> <p>c. Disperinnaker</p> <p>d. Disdikbud</p> <p>e. Bappeda Dan Litbangda</p> <p>f. DPU PR</p>

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>masyarakat.</p> <p>E. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.</p> <p>F. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh.</p> <p>G. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.</p>	<p>d. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**</p> <p>e. Besaran buruh/pekerja yang menjadi peserta program BPJS**</p> <p>f. Prosentase Rumah layak huni</p> <p>g. Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi</p> <p>h. Rumah tangga bersanitasi***</p> <p>i. Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh</p>	<p>d. 92,11%</p> <p>e. 71,28%</p> <p>f. 85%</p> <p>g. 100%</p> <p>h. 84,2%</p> <p>i. 2,45%</p>	<p>c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>d. Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong</p>	
4.	Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan				

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Menengah fokus pada :</p> <p>A. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>B. Pengembangan Sentra Benih Ikan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan</p> <p>C. Revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik.</p> <p>D. Pengembangan pasar bersama IKM.</p> <p>E. Pengembangan Destinasi Pariwisata.</p>	<p>a. Jumlah kerjasama pemasaran (kemitraan) yang terjalin*</p> <p>b. Nilai Tukar Petani*</p> <p>c. Jumlah produksi perikanan benih</p> <p>d. Persentase jumlah pasar dengan kategori baik*</p> <p>e. Obyek Wisata yang dikembangkan*</p>	<p>a. 5 MOU</p> <p>b. 106.5 point</p> <p>c. 2.000.000 ekor</p> <p>d. 81,25%</p> <p>e. 2 obyek</p>	<p>a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</p> <p>b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>d. Program Peningkatan Sarana Perdagangan</p> <p>e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p>	Distan dan Pangan Dispeterikan Disdagkop UMKM

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
5.	Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik fokus pada : A. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan, dan irigasi.	a. peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik b. Peningkatan Jembatan Kabupaten c. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun d. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	a. 69,73% b. 7 lokasi c. 8 lokasi d. 69,73%	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPU PR
6.	Prioritas Lingkungan Hidup fokus pada : A. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	a. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor	a. 6%	a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber	DLH

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air.</p> <p>B. Pencapaian Adipura Kota Muntilan.</p> <p>C. Pengelolaan sampah melalui Pembangunan TPS 3R</p>	<p>dan Sumber Mata Air***</p> <p>b. Naiknya nilai Adipura***</p> <p>c. Masyarakat yang menerima bantuan sarpras pengelolaan limbah cair dan padat yang tersedia</p>	<p>b. Piala Adipura</p> <p>6 kelompok</p>	<p>Daya Alam</p> <p>b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>	
7.	<p>Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan fokus pada :</p> <p>A. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian.</p> <p>B. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.</p> <p>C. Meningkatnya</p>	<p>a. Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III dan IV dan terisinya jabatan fungsional</p>	<p>c. 100%</p>	<p>a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>b. Pengelolaan dan</p>	<p>a. BKPPD</p> <p>b. BPPKAD</p> <p>c. Inspektorat</p> <p>d. Setda</p> <p>e. Bappeda dan Litbangda</p>

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.	b. Tercapainya Opini WTP c. Peningkatan PAD d. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yg ditangani e. Pemantauan Rencana Aksi Daerah- Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	d. WTP e. 12% f. 300 obrik d. 8 laporan	Keuangan Daerah c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	
8.	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana fokus pada : A. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village) B. Pengembangan Desa Tangguh Bencana C. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) D. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.	a. Jumlah Desa bersaudara (pasang) b. Jumlah desa Tangguh Bencana (desa) c. Jumlah TEA d. Cakupan masyarakat yang mendapat	a. 3 desa b. 5 desa c. 4 unit d. 100%	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
		pengetahuan kebencanaan			

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019, yang sejalan dengan strategi pencapaian 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) Tahun 2015-2019, prioritas nasional tahun 2019 dan arah prioritas kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Adapun keselarasan antara agenda prioritas pembangunan nasional, prioritas nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
1	Pendidikan	PD_2. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada : Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan serta Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.	NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia NW.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2	Kesehatan		NW.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
3	Penanggulangan kemiskinan	PD_1. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada : Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin, Penguatan <i>sustainable livelihood</i> dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu.	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	PN_1. Pembangunan manusia melalui Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
4	Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah	PD_3. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada: a. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan; b. Optimalisasi potensi sumber daya hutan, c. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri	NW.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis NW.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	PN_4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. PN_3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		<p>kecil, mikro, dan menengah;</p> <p>d. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat; Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif</p> <p>PD_5. Ketahanan pangan dan energi, fokus pada: Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur</p>		
5	Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik	<p>PD_6. Kesenjangan wilayah, fokus pada:</p> <p>a. penguatan infrastruktur, konektivitas</p> <p>b. pemerataan, prasarana sarana dasar dan ekonomi,</p> <p>c. menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur, serta</p> <p>d. mengoptimalkan potensi kelautan.</p>	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	PN_2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
6	Lingkungan Hidup	PD_4. Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, fokus pada: meningkatkan	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.	kerangka negara kesatuan.	peningkatan pelayanan dasar
7	Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana		NW.1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.	PN_5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu
8	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	PD_7. Tata Kelola Pemerintahan, a. Peningkatan pelayanan publik b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi	NW. 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. NW.4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya NW.8 Melakukan revolusi karakter bangsa. NW.9 Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	PN-5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu

3.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan / prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut yaitu :

1. Penyusunan APBD harus tepat waktu.

Penetapan APBD Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun selalu terlambat. Hal ini dikarenakan antara lain kurang terbangunnya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Keterlambatan penetapan APBD bisa berpengaruh pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Magelang.

Keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, berakibat Kabupaten Magelang terkena sanksi Menteri Keuangan. Sanksi yang dikenakan adalah dikurangnya dana kurang lebih sebesar Rp. 40 Milyar pada APBD TA 2018.

Langkah upaya perbaikan dari permasalahan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD yaitu penyampaian KUA – PPAS, baik penetapan maupun perubahan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses penyelesaian APBD juga tepat waktu.

2. Pengelolaan Anggaran Belum Maksimal.

Pengelolaan APBD Kabupaten Magelang belum maksimal dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2,6 Trilyun. Sementara besarnya PAD baru mencapai Rp. 354.000.000,00 (proporsi PAD kurang lebih 12%). Prosentase ini masih rendah. Rendahnya prosentase PAD tersebut, mendorong upaya PAD Tahun Anggaran 2019 naik secara signifikan.

Potensi PAD Kabupaten Magelang antara lain pada : PBB Perkotaan, PPJU, BPHTB, Retribusi Pasar dan Metrologi, RSUD, BUMD, Menara Telekomunikasi, Parkir, dan lain-lain.

- Struktur APBD pada Belanja Modal baru sekitar 20% dari APBD. Sedangkan struktur belanja APBD yang ideal untuk Belanja Modal idealnya mencapai 30%.

Agar anggaran menjadi optimal maka APBD Tahun Anggaran 2019 dirancang dengan struktur Belanja Modal menjadi sebesar 25% sehingga dapat menggambarkan keberpihakan APBD kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut Kabupaten Magelang dapat membiayai proyek-proyek yang tertunda maupun proyek –proyek strategis bagi kepentingan publik.

- Kinerja anggaran tahun 2017, baru mencapai penyerapan sebesar 83%. Kurang terserapnya anggaran dari tahun ke tahun, mengakibatkan silpa yang besar. Data silpa tersebut sebagai berikut :

- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.417.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.373.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.492.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.457.000.000.000,00.

Besarnya SILPA mencerminkan bahwa APBD tidak sehat, menggambarkan perencanaan dan kinerja yang kurang baik.

3. Pencapaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Pada tahun 2017 Kabupaten Magelang telah berhasil meraih Predikat WTP. Prestasi ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meraih predikat WTP pada tahun-tahun berikutnya. Melalui kerja keras secara optimal Kabupaten Magelang berharap untuk dapat meraih predikat WTP kembali pada tahun 2018 ini.

4. Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berkualitas dalam mengemban tugas umum pemerintahan, sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu kelemahan yang ada di Kabupaten Magelang adalah kualitas pelayanan. Rendahnya pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Contoh dari lemahnya pelayanan masyarakat antara lain waktu yang relatif lama dan berbelit belit pada saat mengurus perijinan dan kurang memadainya pelayanan kesehatan di RSUD.

Upaya reformasi birokrasi dari sisi pelayanan adalah melalui penataan yang serius di bidang perijinan dan pelayanan kesehatan. Harapan kedepan adalah Kabupaten Magelang menjadi “Kabupaten Ramah Pelayanan “.

Dalam hubungannya dengan reformasi pelayanan publik, konsep reformasi birokrasi pemerintah adalah peningkatan kualitas SDM birokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu kriteria birokrasi pemerintah yang diharapkan mampu melaksanakan hal itu adalah Aparatur Sipil Negara yang netral, yaitu mampu melayani semua lapisan masyarakat , tanpa memihak kepada suatu kekuatan politik tertentu

Terkait dengan netralitas ASN masih disinyalir terdapat ASN di Kabupaten Magelang yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Untuk itu diharapkan bupati tetap melakukan pembinaan rutin terhadap ASN di Kabupaten Magelang.

Selain itu upaya reformasi birokrasi adalah Pemerintah kabupaten Magelang didorong untuk segera mengisi jabatan kosong. Saat ini, beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (plt), seperti Sekda, dan jabatan lainnya. Kondisi kekosongan ini sudah berlangsung beberapa tahun silam. Kondisi seperti ini mengakibatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak maksimal. Untuk ke sekian kalinya dewan minta agar segera diangkat pejabat yang definitif.

5. Prioritas Program Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib. Data kemiskinan di 3 (tiga) program ini kadang berbeda dan tumpang tindih antara data BPJS, PKH, Jamkesda dan Raskin. Untuk itu diharapkan tahun yang akan datang dilakukan validasi untuk satu data. Antara APBD dan Dana Desa harus bersinergi untuk pengentasan kemiskinan, baik dalam program RTLH dan program lainnya.

6. Prioritas pada Bidang Unggulan Pertanian, UMKM, dan Pariwisata.

Program-program harus fokus untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai sentra-sentra produk pertanian, sentra perikanan darat, dan sentra-sentra UMKM.

Kemudian dalam bidang Pariwisata, hendaknya fokus pada penatan obyek wisata unggulan.

7. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur jalan/jembatan/irigasi di Kabupaten Magelang pada umumnya dalam kondisi baik. Namun demikian dewan tetap mengharapkan adanya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.

Mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah Rawan Bencana, maka pemeliharaan infrastruktur jalan evakuasi hendaknya benar-benar diperhatikan.

Yang lebih penting lagi adalah tentang kualitas bangunannya, harus baik. Untuk itu kepada OPD yang terkait harus melakukan pengawasan yang ketat.

8. Pembangunan Pasar Kaliangkrik, Pasar Muntilan, dan RSUD.

Pembangunan Pasar Kaliangkrik, Pasar Muntilan, dan RSUD merupakan proyek besar dan strategis. Proyek-proyek tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Dalam upaya penyelesaian atas proyek-proyek tersebut juga dibutuhkan penanganan yang profesional, matang, dan pengawasan yang serius. Untuk itu prosesnya agar dipastikan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Apabila pembangunan pasar-pasar tersebut sudah selesai, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bisa mendorong revitalisasi pasar tradisional lainnya, seperti Borobudur, Windusari, Salaman.

Adapun RSUD, merupakan sarana pemenuhan kesehatan masyarakat. Sarana yang modern, tempat yang luas, tenaga medis

dan paramedis yang profesional, ketercukupan obat, dan pelayanan yang prima merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu dewan meminta agar Pemerintah Daerah bisa mewujudkannya.

9. Rendahnya kualitas Program/Kegiatan Hasil Perencanaan.

Untuk Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Magelang masih banyak program-program kegiatan yang tidak berkualitas. Sebagai contoh Program Pengadaan Baliho sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya pengadaan baliho-baliho tersebut secara masif dengan anggaran bermilyar-milyar pada tahun 2017. Baliho-baliho tersebut sangat bermuatan politik, untuk kepentingan tertentu.

Hal ini sangat ironis ketika angka kemiskinan tahun 2017 masih cukup tinggi, yaitu 12,42% (diatas angka Provinsi yaitu 12,23%, dan Nasional yang mencapai 10,12%).

Untuk itu dewan meminta agar Program/kegiatan pengentasan kemiskinan ditingkatkan.

10. Penguatan Pemerintahan Desa.

Antara Perencanaan Kabupaten (RPJMD) dan Desa (RPJMDes) harus selaras.

Fasilitasi dan pengawasan pengelolaan anggaran desa harus baik untuk mencapai Tertib Administrasi dan Terciptanya Akuntabilitas. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa hendaknya ditingkatkan.

11. Penataan Kawasan Borobudur.

Penataan tata ruang dengan menyesuaikan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat. Hal ini harus diperhatikan.

Penataan Pasar Borobudur, Terminal Borobudur, dan PKL di Borobudur belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat yang kumuh di sekitar obyek dimaksud. Kondisi tersebut tidak mendukung Borobudur sebagai destinasi Pariwisata Internasional. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan penataan terhadap kawasan dimaksud dan melakukan pembinaan kepada lembaga terkait maupun masyarakat.

12. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang –Yogyakarta.

Jalan Tol Semarang-Yogyakarta merupakan penghubung dan bisa memperlancar para wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Pembangunan Jalan Tol akan berdampak pada pertumbuhan kawasan, untuk itu perlu kajian yang mendalam agar pembangunan Tol bermanfaat bagi perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah hendaknya secara intens melakukan kooordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dan mengambil langkah-langkah proaktif.

13. Pemilukada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.

Perencanaan penganggaran Pemilu Tahun 2019. Netralitas ASN harus dipegang teguh. ASN hendaknya fokus pada program/ kegiatan tahun 2018 dan tidak terganggu adanya Pemilukada tahun 2018.

14. Tambahan Alokasi Anggaran BKK, RTLH dan Hibah/Bansos

Mengingat Pokok-Pokok Pikiran dari DPRD hasil reses anggota DPRD cukup banyak, maka DPRD mengusulkan alokasi anggaran BKK, RTLH, dan Hibah/Bansos dari semula Rp. 50.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 10.000.000.000,00, menjadi Rp. 60.000.000.000,00 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Alokasi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 pembagiannya :

- * Ketua : Rp.1.500.000.000,00
- * Wakil Ketua : @ Rp.1.250.000.000,00
- * Anggota : @ Rp.972.826.087,00

b. Alokasi Tambahan Sebesar Rp. 10 M dengan pembagian sebagaimana tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4
Alokasi Tambahan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang

No.	Jabatan	Hibah/bansos Rp.	RTLH Rp.	Infrastruktur Rp.
1	Ketua	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2	Wakil Ketua	@ 200.000.000,00	@ 150.000.000,00	@ 150.000.000,00
3	Anggota	@ 100.000.000,00	@ 40.000.000,00	@ 30.000.000,00

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan, yaitu:

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan pada RPJMD dan Renstra SKPD. Konsultasi publik Rancangan awal RKPD dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018, dengan mengundang pemangku kepentingan seperti LSM, Perguruan Tinggi, Kepala Desa, asosiasi profesi dan lain-lain. Tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi rancangan awal RKPD, serta meminta masukan guna perbaikan rancangan awal RKPD. Dalam rancangan awal ini ada 840 program dan 2.337 kegiatan dengan total usulan Rp.805.443.357.543,00.

2. Penyiapan Rancangan RKPD, dilakukan dengan 4 tahapan:

a. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) Tahun 2019.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 25 Januari 2018. Sesuai Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 050/630/24/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018, untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, masing-masing desa melakukan *input* 4 usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Usulan Desa (SIDUDES). Secara keseluruhan usulan desa/kelurahan yang masuk sebanyak 5.460 usulan dengan jumlah anggaran Rp.1.302.701.648.350,00.

Dari usulan desa yang masuk, kecamatan harus menyusun prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Rapat Teknis. Jumlah usulan setiap kecamatan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah desa di masing-masing kecamatan. Usulan ini harus masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Jumlah usulan kecamatan (RPTK) yang dibawa ke Rapat Teknis (Ratek) adalah 367 usulan dengan jumlah anggaran Rp.441.764.576.154,00.

b. Rapat Tehnis (Ratek)

Rapat Teknis (Ratek) adalah forum musyawarah antara SKPD dengan Kecamatan untuk mensinkronkan antara Rancangan Renja SKPD dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). Ratek dilaksanakan tanggal 30 Januari s.d. 1 Pebruari 2018. Hasil

ratek adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang akan masuk dalam Renja SKPD.

Keluaran Rapat Teknis adalah Berita Acara Kesepakatan berdasarkan urutan prioritas lokasi kegiatan yang bisa diakomodir oleh masing-masing SKPD. Usulan yang masuk dalam Ratek melalui aplikasi SIPPD sebanyak 169 program dan 1.180 kegiatan dengan nilai anggaran Rp.441.764.576.155,00.

c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait.

Keluaran kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan Berita Acara Forum SKPD. Rancangan Renja SKPD disusun dalam Pra-Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD melalui aplikasi SIPPD.

Forum SKPD dilaksanakan dari tanggal 7 s.d. 14 Pebruari 2018. Jumlah usulan yang masuk sebanyak 167 program dan 1.842 kegiatan dengan total anggaran Rp1.513.613.544.435,00.

d. Forum Rumpun SKPD

Forum Rumpun SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas (harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi) prioritas kegiatan pembangunan antar SKPD sebagai upaya menyempurnakan Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Keluaran kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD dan Berita Acara Forum Rumpun SKPD Kabupaten.

Forum rumpun dilaksanakan tanggal 19 s.d. 21 Pebruari 2018 yang dibagi dalam 3 forum rumpun yaitu forum rumpun Ekonomi dan SDA, forum rumpun Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, serta forum rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan rancangan Renja SKPD. Musrenbang Kabupaten Magelang dilaksanakan 2 (dua) hari tanggal 7 s.d. 8 Maret 2018. Hari pertama Pembukaan dan hari ke-2 sidang Komisi, yang dibagi menjadi Komisi Ekonomi dan SDA, Komisi Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Pemerintahan dan Sosial Budaya. Usulan yang dibahas dalam musrenbang sebanyak 167 program dan 1.842 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.513.613.544.435,00.

4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Pasca musrenbang, usulan SKPD dicermati kembali dengan melakukan desk dan pleno dari mulai tanggal 19 s.d. 29 Maret 2018. Pencermatan ini dilakukan dalam rangka menyusun prioritas dan pencapaian indikator RPJMD, dengan mendasarkan ketersediaan anggaran yang ada. Kesepakatan hasil desk dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala SKPD dan Bappeda, untuk selanjutnya dibahas

bersama Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan kesepakatan desk tersebut SKPD melakukan edit Pra-RKA Renja SKPD melalui aplikasi SIPPD.

Dari keseluruhan yang diusulkan kegiatan yang disepakati dan diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD sebanyak 166 program, 1.764 kegiatan dengan total anggaran Rp.1.207.534.938.474,00.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Magelang, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 antara lain:

1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah meluncurkan kebijakan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan (PEPAK). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang selama lima tahun terakhir (tahun 2011-2015) hanya turun 0,21 %. Untuk mendukung kebijakan tersebut Bupati Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang. Dengan peraturan tersebut diharapkan terbangun sistem percepatan penurunan angka kemiskinan yang komprehensif, integratif dan partisipatif. Dengan kebijakan ini diharapkan penurunan angka kemiskinan rata-rata tiap tahun sebesar 2,43 %.

2. Prioritas Pendidikan

Peningkatan kesejahteraan bagi GTT/PTT melalui pemberian insentif yang didasarkan pada hasil uji kompetensi GTT/PTT.

3. Prioritas Pengembangan Pertanian

Pengembangan Organik Center, rencana pendanaan tahun 2019 sebesar Rp.500.000.000. Kegiatan ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membentuk organik center.

Organik Center atau pusat pertanian organik memiliki fungsi pendidikan, praktek, *showroom* produk dan pemasaran. Kedepan, Organik Center di Kabupaten Magelang diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan organik di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung prioritas nasional, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, antara lain:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur

Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Borobudur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan penataan terhadap kawasan tersebut.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 di Kawasan Strategis Nasional Borobudur yaitu :

- a. Pembangunan Jembatan Pete Desa Majaksingi, Kec. Borobudur senilai Rp.500.000.000,-
- b. Peningkatan jalan dalam kota Borobudur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-
- c. Pelebaran Jembatan Sileng di Ruas Jalan Borobudur-Pakem dengan anggaran Rp.1.700.000.000,-
- d. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Pakem di Ruas Jalan Borobudur-Pakem dengan anggaran Rp.385.000.000,-
- e. Pengadaan tanah Jembatan Gantung Pabelan ruas jalan Mendut-Tanjung Japuan dengan anggaran Rp.100.000.000,-

- f. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong lingkungan Kota Mungkid dengan anggaran Rp.1.250.000.000,-
 - g. Pembangunan pengaman senderan dan saluran jembatan sileng ruas jalan Borobudur-Bigaran Kec. Borobudur dengan anggaran Rp.200.000.000,-
 - h. Pelebaran jembatan Karangrejo ruas jalan Borobudur-Ngadiharjo Kec. Borobudur dengan anggaran Rp.800.000.000,-
2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur
 - a. Penelitian Pengembangan Kawasan Perdesaan di Perbukitan Menoreh. Lokasi penelitian merupakan kawasan yang berada di sekitar Borobudur dan Badan Otorita Pariwisata Borobudur yang berlokasi di Kabupaten Purworejo.
 - b. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang berlokasi di Borobudur. Dengan kegiatan pembinaan ini, diharapkan para pedagang kaki lima dan asongan dalam menjual dagangannya menjadi lebih kreatif, santun, mengikuti selera pasar.
 3. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
 Berdasarkan Perpres 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang mengamanahkan mewujudkan tata runag Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana, Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan kegiatan-kegiatan :
 - a. Penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air Desa Wates, di Desa Kalibening, Desa Ngargomulyo, kec. Dukun dengan anggaran Rp.487.919.000
 - b. Konservasi bantaran sungai di Banyubiru kec. Dukun dengan anggaran Rp.238.750.000
 - c. Pemulihan lahan akibat kerusakan lingkungan di Desa Ngargosoko Kec.Srumbung dengan anggaran Rp.238.580.000.
 - d. Pengendalian dampak perubahan iklim di Desa Banyubiru, Kec.Dukun dengan anggaran Rp.330.679.000
 - e. Peningkatran Jembatan Duren di ruas jalan Srumbung-Sudimoro dengan anggaran Rp.600.000.000
 - f. Peningkatan Jembatan Sewukan di ruas jalan Tlatar-Talun dengan anggaran Rp.400.000.000
 - g. Peningkatan jembatan Mangunsoko Ruas Jalan Tlatar-Talun Kec. Dukun dengan anggaran Rp. 200.000.000
 - h. Pembangunan jalan Srumbung-Sudimoro dengan anggaran Rp.3.000.000.000
 - i. Pembangunan Jalan Mangunsoko-Krinjing dengan anggaran Rp.7.000.000.000
 - j. Pembangunan Jalan Tegalancar-Cawakan dengan anggaran Rp.500.000.000

Secara keseluruhan rencana program Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
0	Pada Semua Urusan	126.499.889.225
0.0	Pada Semua Bidang	126.499.889.225
0.0.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24.419.400.065
0.0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.011.650.605
0.0.3	Program peningkatan disiplin aparatur	1.176.381.000
0.0.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.696.462.525
0.0.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.195.995.030
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	758.364.062.549
1.1	Pendidikan	179.789.200.450
1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.320.000.000
1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	139.906.298.450
1.1.18	Program Pendidikan Non Formal	2.725.052.000
1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.904.200.000
1.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.933.650.000
1.2	Kesehatan	314.531.159.896
1.2.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.482.559.800
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.099.974.500
1.2.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000
1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	196.140.000
1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	664.534.000
1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	383.388.000
1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	502.743.000
1.2.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000
1.2.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	33.299.880.000
1.2.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16.769.919.500
1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	67.141.062.000
1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000
1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000
1.2.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000
1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.179.818.000
1.2.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	167.459.624.096
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.219.482.978
1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	88.109.400.000
1.3.16	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	14.301.775.000
1.3.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	40.299.903.000
1.3.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000
1.3.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.779.000.000
1.3.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan	23.081.040.000

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
1.3.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000
1.3.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.280.165.000
1.3.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	335.000.000
1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	596.553.978
1.3.31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000
1.3.32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	235.445.000
1.3.33	Program Perencanaan Tata Ruang	375.001.000
1.3.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	526.200.000
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	57.207.553.500
1.4.15	Program Pengembangan Perumahan	4.955.425.000
1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.838.549.500
1.4.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7.585.914.000
1.4.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	38.827.665.000
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	26.249.561.375
1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.101.281.950
1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.332.434.275
1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	540.736.000
1.5.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	223.245.000
1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	34.495.500
1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	53.477.000
1.5.21	Program pendidikan politik masyarakat	188.451.000
1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	19.775.440.650
1.6	Sosial	5.367.104.350
1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.700.825.400
1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	512.179.000
1.6.17	Program pembinaan anak terlantar	73.682.000
1.6.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	87.763.000
1.6.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.496.000
1.6.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.936.158.950
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	117.696.052.589
2.1	Tenaga Kerja	3.374.493.850
2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.498.741.025
2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.553.395.150
2.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga	322.357.675

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	Ketenagakerjaan	
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.008.726.050
2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	340.341.000
2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	281.160.000
2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	288.275.000
2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.098.950.050
2.3	Pangan	1.517.661.275
2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.517.661.275
2.4	Pertanahan	255.238.925
2.4.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	227.967.925
2.4.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000
2.5	Lingkungan Hidup	28.254.999.350
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.366.775.750
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.304.317.100
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.646.964.000
2.5.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	369.730.000
2.5.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	245.998.500
2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	121.800.000
2.5.26	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	275.636.000
2.5.28	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	5.923.778.000
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.284.813.000
2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.284.813.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.110.880.025
2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	739.329.200
2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	976.253.250
2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.350.453.675
2.7.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.044.843.900
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.328.388.225
2.8.15	Program Keluarga Berencana	7.485.875.125
2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500
2.8.17	Program pelayanan Kontrasepsi	455.250.000
2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	277.416.600
2.8.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	60.400.000
2.9	Perhubungan	9.291.181.000
2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	914.188.000
2.9.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300.103.000
2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.051.855.000

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
2.9.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.745.150.000
2.9.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.279.885.000
2.10	Komunikasi dan Informatika	15.697.561.500
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	11.118.346.000
2.10.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	205.000.000
2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.374.215.500
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.102.709.739
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	648.946.839
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	332.013.250
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	312.525.650
2.12	Penanaman Modal	1.156.880.020
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	282.855.670
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	784.860.000
2.12.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.164.350
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	22.476.576.680
2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	261.000.000
2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	514.790.000
2.13.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	131.000.000
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.373.452.230
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	16.196.334.450
2.14	Statistik	1.212.052.000
2.14.15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	1.212.052.000
2.16	Kebudayaan	3.812.179.950
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.670.183.000
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	619.649.000
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.522.347.950
2.17	Perpustakaan	1.163.046.000
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.163.046.000
2.18	Kearsipan	648.665.000
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	143.983.000
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	237.952.000
2.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	266.730.000
3	Urusan Pilihan	124.306.723.621
3.1	Kelautan dan Perikanan	2.441.478.650
3.1.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.619.100.000
3.1.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	722.378.650
3.1.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000
3.2	Pariwisata	12.288.413.670

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.676.739.000
3.2.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.029.458.880
3.2.17	Program Pengembangan Kemitraan	582.215.790
3.3	Pertanian	21.739.274.976
3.3.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	847.259.545
3.3.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	995.860.000
3.3.18	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1.373.565.100
3.3.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.964.103.066
3.3.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.328.983.265
3.3.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	944.300.000
3.3.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	8.095.404.000
3.3.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	70.000.000
3.3.24	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	119.800.000
3.6	Perdagangan	86.725.147.025
3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.433.953.550
3.6.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	189.810.000
3.6.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	1.158.838.800
3.6.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	2.277.941.000
3.6.20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	81.664.603.675
3.7	Perindustrian	937.241.600
3.7.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	18.860.000
3.7.18	Program Penataan Struktur Industri	0
3.7.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	918.381.600
3.8	Transmigrasi	175.167.700
3.8.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.167.700
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	71.716.653.240
4.1	Administrasi Pemerintahan	26.160.902.100
4.1.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.562.147.000
4.1.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.498.927.000
4.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	417.291.650
4.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	640.570.300
4.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	112.555.000
4.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.303.385.750
4.1.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	43.000.000
4.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	56.180.000
4.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.418.545.400
4.1.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	108.300.000

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
4.2	Pengawasan	3.641.504.750
4.2.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.487.585.750
4.2.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	160.041.000
4.2.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	993.878.000
4.3	Perencanaan	9.280.490.640
4.3.15	Program Pengembangan Data /Informasi	1.522.631.700
4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000
4.3.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.840.024.040
4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	303.336.500
4.3.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.773.321.900
4.3.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	471.625.000
4.3.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	212.551.500
4.4	Keuangan	20.602.542.750
4.4.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.602.542.750
4.5	Kepegawaian	12.031.213.000
4.5.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	29.754.000
4.5.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	6.485.065.000
4.5.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.049.538.000
4.5.31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	466.856.000
Jumlah		1.198.416.231.224

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan sekaligus merupakan tahap akselerasi dengan tema: “*Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan*”. Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke 6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram.

Dalam rangka pencapaian target kinerja diakhir periode RPJMD, SKPD harus memperhatikan evaluasi capaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Tahun 2019, digunakan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dituangkan dalam matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Magelang Tahun 2019

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	70,23	70,56	70,56
2	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i	Indeks	0,325	0,295	0,295
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(\alpha_i - Y)^2 f_i \ln n}}{Y}$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi	Indeks	0,4105	0,4046	0,4046

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Persentase penduduk miskin		Persen	13,97	8,00	8,00
5	IPM		Indeks	73,14 (2012)	75,94	75,94
MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing						
Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah						
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
6	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	Persen	5,6	6,40 – 7,1	6,4 – 7,1
7	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan tahun}}$	Juta Rp.	8,85	15,06	15,06
8	Laju inflansi	$\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana: Inf_n = nilai inflansi pd tahun n Inf_(n+1) = nilai pada 1 th berikutnya n = tahun</p>	Persen	8,49	4±1	4±1
9	Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$	-	95,42	97,97	97,97
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$	Rp.(juta)	23,24	38,38	38,38
11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100$	Persen	34,27	37,03	37,03
12	Nilai tukar petani		-	106,13	106,99	106,99
MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah						
Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah						
ASPEK DAYA SAING						
13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$	-	0,0030	0,0017	0,0017
MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup						
Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan						
ASPEK DAYA SAING						
14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	Persen	66,12	76,80	76,80

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
15	Luas Wilayah Industri	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$	Persen	0,37	0,37	0,37
MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis						
Tujuan : Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis						
ASPEK DAYA SAING						
16	Lama Proses Perijinan (Hari)	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	Hari	9	9	9
17	Opini BPK 'WTP'		-	WDP	WTP	WTP
18	Nilai AKIP		-	CC (50,61)	B	B

Adapun matriks Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Matriks Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Magelang Tahun 2019

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	ASPEK DAYA SAING					
	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat					
	Tujuan : Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jlh tindak kriminal yg terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jlh penduduk seluruhnya}} \times 10.000$	Indek	2,91	1,45	1,45
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib					
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
	Tujuan: Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat					
	Sasaran:					
	1. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan					
	Urusan : Kesehatan					
2	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	Jumlah kematian ibu melahirkan	Kasus	11	11	11
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi	Kasus	7,27	6,50	6,50

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
4	Persentase Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Persen	0,17	0,15	0,15
5	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian balita}}{\text{Jumlah bayi lahir hidup}} \times 1000 \text{ KH}$	Permil	8,11	8,00	8,00
6	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	$\frac{\text{Jlh penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wil kerja selama 1 th}}{\text{Jlh seluruh balita gizi buruk yg ditemukan disatu wil dlm kurun waktu yg sama}}$	-	100	100	100
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	$\frac{\text{Jlh balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelay kesehatan di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jlh seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	-	100	100	100
9	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jlh penderita TBC BTA (+) ditemukan dan diobati disatu wil kerja selama 1 th}}{\text{Jlh penderita TBC BTA (+) disatu wil dlm kurun waktu yg sama}}$	-	89,01	90,00	90,00
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	$\frac{\text{Jlh kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1}}{\text{Jlh seluruh pasien miskin di kabupaten}}$	-	62,77	100	100
11	Cakupan Kunjungan Bayi	$\frac{\text{Jlh kunjungan bayi memperoleh pely kesehatan sesuai standar di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jlh seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	-	96,50	95,00	95,00
	2. Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol					
	Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
12	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah Keluarga}}$	-	1.75	1,57	1,57
13	Rasio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Persen	75,20	81,50	81,50
14	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB Aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Persen	80,59	80,89	80,89
15	Keluarga Pra Sejahtera(%)	$\frac{\text{Jlh Keluarga pra sejahtera}}{\text{Jlh keluarga}} \times 100\%$	Persen	22,6	20,18	20,18
16	Keluarga Sejahtera I (%)	$\frac{\text{Jlh Keluarga sejahtera I}}{\text{Jlh keluarga}} \times 100\%$	Persen	17,38	14,38	14,38
	3. Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan					
	Urusan : Pendidikan					
17	APK PAUD	$APK_{PAUD}^t = \frac{E_{PAUD}^t}{P_{PAUD}^t} \times 100$ Dimana,	Persen	53,63	54,54	54,54

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		<p>h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p> $E_h^t E_h^t E_h^t$ <p>=adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> $P_{h,a}^t P_{h,a}^t P_{h,a}^t$ <p>= adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan</p>				
18	Angka melek huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> $LIT_{15+}^t = LIT_{15+}^t + LIT_{15+}^t$ <p>= angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun ke atas) pada tahun t</p> $L_{15+}^t + L_{15+}^t + L_{15+}^t$ <p>= Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t</p> $L_{15+}^t + P_{15+}^t + P_{15+}^t$ <p>= Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>	Persen	93,35	93,95	93,95
3	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7,55 (2012)	10,00	10,00
4	Angka Partisipasi Murni :	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p> $E_{h,a}^t E_{h,a}^t E_{h,a}^t$ <p>= jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> $P_{h,a}^t P_{h,a}^t P_{h,a}^t$ <p>= jumlah penduduk kelompok usia a</p>	Persen			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			93,69	97,09	97,09
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			76,60	82,65	82,65
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C			49,56	66,56	66,56

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
7	Angka partisipasi kasar	<div>$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$<p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p><div>$E_h^t = E_h^t + E_h^t + E_h^t$<p>=adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan</p><div>$P_{h,a}^t = P_{h,a}^t + P_{h,a}^t + P_{h,a}^t$<p>= adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan</p></div></div></div>	Persen			
	a. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A			102,74	101,84	101,84
	b. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B			94,56	97,56	97,56
	c. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C			65,10	80,00	80,00
10	Angka Putus Sekolah:	<div>$\frac{\text{Jlh capaian kinerja APS pada setiap jenjang sekabupaten}}{\text{Jlh seluruh APS setiap jenjang sekabupaten}} \times 100\%$</div>				
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,17		0,14	0,14		
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	-		0,69	0,57	0,57	
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA			0,96	0,81	0,81	
13	Angka Kelulusan:	<div>$\frac{\text{Jlh lulusan pd jenjang}}{\text{Jlh siswa tingkat tertinggi jenjang pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$</div>				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Persen	99,56	99,98	99,98
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			99,81	99,99	99,99
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			96,02	99,98	99,98
	Rerata Nilai UN :					
16	Rerata Nilai UN SD/MI		Nilai	7,62	7,75	7,75
17	Rerata Nilai UN SMP/MTs		Nilai	6,39	6,49	6,49
18	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK		Nilai	7,07	7,18	7,18
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<div>$\frac{\text{Jlh guru berjasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jlh Guru SD/MI,SMP/MTS,/SMA SMK/MA}} \times 100\%$</div>	Persen	80,00	88,00	88,00
	Angka Melanjutkan :					
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	<div>$\frac{\text{Jlh siswa baru Tk I pd jenjang SMP/MTS}}{\text{Jlh lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$</div>	Persen	88,62	89,62	89,62
21	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	<div>$\frac{\text{Jlh siswa baru Tk I pd jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jlh lulusan pd jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$</div>	Persen	66,61	70,55	71,55

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	$\frac{\text{Jlh ruang kelas SD/SDLB/MI sesuai SNP}}{\text{Jlh seluruh ruang kelas SD/SDLB/MI}} \times 100\%$	Persen	58,70	86,74	86,74
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	$\frac{\text{Jlh ruang kelas SMP/MTS sesuai SNP}}{\text{Jlh seluruh ruang kelas SMP/MTS}} \times 100\%$	Persen	71,43	91,43	91,43
4. Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga						
Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga						
24	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah orgaisasi pemuda	-	21	27	27
25	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga	-	28	36	36
26	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	17	19	19
27	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah kegiatan olah raga	-	23	24	24
28	Lapangan Olah Raga	$\frac{\text{Jlh lapangan olah raga di Kabupaten}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000$	Permil	0,21	2,00	2,00
5. Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca						
Urusan : Perpustakaan						
29	Jumlah Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Unit	698	815	815
30	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun n	Orang	40.259	45.335	45.335
31	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	$\frac{\text{Jlh koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jlh judul buku yang tersedia di perpusatakaan daerah}}$		1,96	2,24	2,24
6. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan						
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
32	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan}}{\text{Jlh pekerja perempuan}} \times 100$	Persen	2,44	2,56	2,56
33	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jlh KDRT}}{\text{Jlh rumah tangga}} \times 100$	Persen	0,03	0,024	0,024
34	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	$\frac{\text{Jlh pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jlh pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100$	Persen	100	100	100
7. Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin						

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Urusan : Sosial					
35	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	Unit	33	34	34
36	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	$\frac{\text{Jlh PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jlh PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	Persen	13,70	20	20,00
	8. Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila					
	Urusan : Kebudayaan					
37	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	36	38	38
38	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	18	18	18
39	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jlh benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Total benda, situs kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	Persen	66,45	70	70,00
	9. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan					
	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
40	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Persen	16.94	19,00	19,00
41	Cakupan Kelompok Binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	Persen	5,65	39,52	39,52
42	Jumlah LSM	Jumlah LSM yang aktif	-	4	6	6
	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing					
	Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah					
	Sasaran:					
	1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja					
	Urusan: Ketenagakerjaan					
43	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 th ke atas}}{\text{Jlh penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100$	Persen	74,70	76,65	76,65
44	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	$\frac{\text{Jlh sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$	Persen	0,77	1,28	1,28
45	Pencari Kerja yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jlh pencari kerja yg ditempatkan}}{\text{Jlh pencari kerja yg mendaftar}} \times 100\%$	Persen	7,25	54,27	54,27
46	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jlh penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jlh penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Persen	4,58	3,02	3,02

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
47	Keselamatan dan Perlindungan	$\frac{\text{Jlh perusahaan yg menerapkan K3 pd tahun n}}{\text{Jlh perusahaan di wilayah Kabupaten pada tahun n}} \times 100\%$	Persen	65,00	79,00	79,00
49	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jlh penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dg kebijakan pemda pd th n}}{\text{Jlh kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dg kebijakan pemda}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
2. Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Eknomi Lokal						
Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
50	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jlh seluruh koperasi}} \times 100\%$	Persen	74,78	78,18	78,18
51	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	-	106.403	106.384	106.384
52	Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM aktif	-	363	382	382
53	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jlh usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$	Persen	0,39	0,38	0,38
3. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah						
Urusan: Penanaman Modal						
54	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	687	1.164	1.164
55	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.348.528	724.647	724.647
56	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jlh tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jlh seluruh PMA/PMDN}}$	-	13,19	31,19	31,19
57	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Realiasi PMDN Th Evaluasi – Realiasi PMD th sebelum evaluasi	Milyar rupiah	69	359	359
4. Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat						
Urusan : Ketahanan Pangan						
58	Ketersediaan Pangan Utama Beras	$\frac{\text{Rata - rata Jlh ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Persen	187,96	188,1	
59	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		-	83,70	93,1	
5. Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.						
Urusan: Pertanian						
60	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar :	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya}}{\text{luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya}}$	Kw/ha	59,89	60,10	
	Produktivitas Padi					60,10
61	Produksi Padi	Jumlah produksi padi	Ton/Th	354.966	355.676	355.676

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
62	Produktivitas Jagung	<u>Produksi tanaman jagung pangan utama lokal lainnya</u> <u>luas areal tanaman jagung pangan utama lokal lainnya</u>	Kw/ha	59,18	59,30	59,30
63	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung	Ton/Th	74.187	74.337	74.337
64	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	Persen	25.19	20,03	20,03
65	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertanian (tanaman pangan)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	74,14	71,84	71,84
66	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	6,91	7,73	7,73
67	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor peternakan}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	11,74	13,09	13,09
68	Cakupan Bina Kelompok Petani	$\frac{\text{Jlh kelompok petani yg mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	Persen	1,8	2,7	14,9
	Produksi Hewan Ternak					
69	- Sapi potong	Jumlah produksi ternak (daging)	Kg	1.653.553	1.862.169	1.862.169
70	- Kerbau		Kg	480	541	541
71	- Kambing		Kg	704.397	793.265	793.265
72	- Domba		Kg	990.644	1.115.626	1.115.626
	Produksi Hewan Unggas					
73	- Ayam Pedaging	Jumlah produksi hewan unggas	Ton	8.841,6	9.957,1	9.957,1
74	- Ayam Ras Petelur		Ton	905,36	1.019,5	1.019,5
75	- Ayam Buras		Ton	1.101,07	1.239,98	1.239,98
76	- Itik		Ton	83,563	94,106	94,106
77	- Sapi Perah	Jumlah produksi susu	Liter	662.567	746.158	746.158
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)					
78	a. daging		Gr/kap/hr	5,35	6,20	6,20
79	b. telur			3,61	4,65	4,65
80	c. susu			0,03	0,11	0,11
	6. Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan					
	Urusan: Kelautan dan Perikanan					
81	Produksi Perikanan (Benih)	Jumlah produksi benih ikan	Juta ekor	1.015	2.000	2.000

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
82	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	13.246	18.000	18.000
83	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	208,25	263,57	263,57
84	Konsumsi Ikan		Kg/kap / tahun	14,30	15,75	15,75
85	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perikanan}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	2,29	2,68	2,68
7. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan						
Urusan: Perdagangan						
86	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perdagangan/komoditi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	10,16	9,98	9,98
87	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Juta US\$	88	89	89
88	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	$\frac{\text{Jlh kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jlh kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	Persen	2,46	13,55	13,55
8. Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah						
Urusan: Perindustrian						
89	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	$\frac{\text{Jlh kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$	Persen	2,79	16,83	16,83
90	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	18,59	17,95	17,95
91	Pertumbuhan Industri.	$\frac{\text{Jlh industri tahun n} - \text{Jlh indusrti tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah industri s. d th n}} \times 100\%$	Persen	3,76	3,76	3,76
9. Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah						
Urusan: Pariwisata						
92	Kunjungan Wisata: Manca Negara	Jumlah kunjungan wisatwan	Orang	303.036	860.549	860.549
93	Kunjungan Wisata: Nusantara	Jumlah kunjungan wisatwan	Orang	3.606.557	6.594.051	6.594.051
94	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	5.31	6,89	6,89
MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah						
Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah						
Sasaran:						
1. Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru						

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Urusan: Pekerjaan Umum					
95	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$	Persen	67,58	69,73	69,73
96	Luas Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100$	Persen	30,57	30,57	30,57
97	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Persen	51,90	67,40	67,40
	2. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat.					
	Urusan: Perumahan					
98	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	$\frac{\text{Jlh RT bersanitasi}}{\text{Jlh seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Persen	70,50	84,20	84,20
99	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	$\frac{\text{Luas lingkungan pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	Persen	2,59	2,45	2,45
100	Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jlh rumah layak huni}}{\text{Jlh seluruh rumah}} \times 100\%$	Persen	55,94	85,00	85,00
	3. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan					
	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral					
101	Persentase Pertambangan Berijin	$\frac{\text{luas pertambangan berijin}}{\text{luas pertambangan seluruhnya}} \times 100\%$	Persen	0	50	50
102	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	2,62	2,64	2,64
	4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan					
	Urusan: Perhubungan					
103	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1(satu) tahun.	Orang	3.705.271	3.705.271	3.705.271
104	Jumlah Ijin Trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	-	1.023	1.069	1.069
105	Rasio Uji Kir Kendaraan	$\frac{\text{Jlh kendaraan yg melaksanakan uji kir}}{\text{Jlh kendaraan wajib uji kir}} \times 100\%$	Persen	93,69	96,7	96,7
106	Jumlah Terminal Bis	Jumlah terminal bis	Terminal	6	8	8
107	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum	Menit	32	32	32
108	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada/tidak		ada	ada	ada

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
109	Pemasangan Rambu-Rambu	$\frac{\text{Jlh pemasangan rambu - rambu pada tahun n}}{\text{Jlh rambu - rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Persen	61,53	94,00	94,00
MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup						
Tujuan: Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal Dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan						
Sasaran:						
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam						
Urusan: Penataan Ruang						
110	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$	Persen	>30	>30	>30
111	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$	Persen	3,10	4	4,00
112	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	$\frac{\text{Jlh ruang publik yg berubah fungsi (ha)}}{\text{Jlh ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	Persen	0	0	0
113	Luas Kawasan Lindung (ha)	Luas Kawasan Lindung (ha) yang dipertahankan	Ha	25 .886	25 .886	25 .886
114	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Luas kawasan budidaya (ha) yang dipertahankan	Ha	8 .2687	8 .2687	8 .2687
115	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	Jumlah IMB yang dikeluarkan	-	461	676	676
116	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Prosentase RTR kawasan yang disusun dibanding jumlah kawasan perkotaan	-	32%	38%	38%
2. Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya						
Urusan: Lingkungan Hidup						
117	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Volume sampah yg ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$	Persen	16,00	31,00	31,00
118	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	$\frac{\text{Jlh penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{Jlh seluruh wil rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100$	Persen	1,10	2,10	2,10
119	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	$\frac{\text{Jlh perus wajib UKL - UPL yang diawasi}}{\text{Jlh seluruh perusahaan wajib UKL - UPL}} \times 100\%$	Persen	20	30	30
120	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jlh daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}}$	-	0,940	1,76	1,76
121	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	Jumlah daya tampung TPS	m³	432	2.300.000	2.300.000

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	3. Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana					
	Urusan: Kehutanan					
122	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	2.250	2.822	2.822
123	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jlh PDRB Sektor pertanian / perkebunan}} \times 100\%$	Persen	4,91	4,66	4,66
	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis					
	Tujuan: Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis					
	Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah					
	Urusan: Perencanaan Pembangunan					
124	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
125	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
126	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
127	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jlh program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jlh program RPJMD yang harus dilaksanakan th berkenaan}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
	2. Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal					
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
128	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jlh polisi pamong praja}}{\text{Jlh penduduk}} \times 10.000$	-	0,44	0,44	0,44
129	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jlh penduduk}} \times 10.000$	-	94,09	100,87	100,87
130	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	Menunjukkan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	-	2	4	4
131	Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jlh penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jlh pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	Persen	75	75	75
132	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD Thn} - \text{realisasi APDThn} - 1}{\text{Realiasi PAD Tahun} - 1} \times 100\%$	Persen	17,89	12,02	12,02
133	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada / tidaknya survey IKM di Pemda		ada	ada	ada
	Urusan : Statistik					
134	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/tidak		ada	ada	ada
135	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada/tidak		ada	ada	ada

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Urusan : Kearsipan					
136	Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\text{Jlh SKPD yg telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	persen	81,16 (53 SKPD) 6,21 (734 UP)	100	100
137	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	176	329	329
	3. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak					
	Urusan : Komunikasi dan Informatika					
138	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah	-	6	6	6
139	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada/tidak	-	ada	ada	ada
140	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	-	9/3	9/3	9/3
	4. Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil					
	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil					
141	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jlh penduduk usia > 17 yg berKTP}}{\text{Jlh penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100\%$	Persen	86,93	91,87	91,87
142	Bayi Berakte Kelahiran	$\frac{\text{Jlh bayi berakte}}{\text{Jlh kelahiran bayi}} \times \frac{\text{Jlh bayi berakte}}{\text{Jlh kelahiran bayi}} \times 100$	Persen	71,50	100	100
143	Rasio Pasangan Berakte Nikah	$\frac{\text{Jlh pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jlh keseluruhan pasangan nikah}} \times 100$	Persen	1,62	1,80	1,80
144	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum		Sudah	Sudah	Sudah
	Urusan : Pertanahan					
145	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	$\frac{\text{Jlh luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Persen	33,55	33,83	33,83
146	Penyelesaian Izin Lokasi	$\frac{\text{Jlh ijin lokasi}}{\text{Jlh permohonan ijin lokasi}} \times 100\%$	Persen	80	100	100
	MISI VI. Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat					
	Tujuan: Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum					
	Sasaran : 1. Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat					
	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
147	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	-	12	12	12
148	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	-	12	12	12
	1. Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat					

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
149	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelatihan kebencanaan}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	30	100	100
150	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan tanggap darurat}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
151	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jlh dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yg disusun}}{\text{Jlh dokumen yang wajib disusun}} \times 100\%$	Persen	10	100	100
152	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Magelang karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang perlu menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, setelah Musrenbang RKPD dilaksanakan kegiatan perumusan rancangan akhir RKPD. Dimana perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota adalah merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan pada berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Penyempurnaan rancangan RKPD ini juga dalam rangka mengakomodir perkembangan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam Rancangan RKPD, dilakukan melalui proses perbaikan perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Salah satu kegiatan lain dalam perumusan rancangan akhir RKPD termasuk didalamnya adalah harmonisasi antara asumsi kondisi keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab III, dengan rencana kerja dan pendanaan daerah pada Bab V dalam Rancangan RKPD ini.

Selanjutnya, setelah dilakukan perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir dilaksanakan pembahasan oleh seluruh perangkat daerah. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan semua perangkat daerah sudah terakomodir dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Berdasarkan pada rancangan akhir RKPD tersebut gubernur melalui Bappeda Provinsi melaksanakan fasilitasi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Hasil fasilitasi dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2018, sebelum fasilitasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, Penetapan RKPD dilakukan setelah Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD oleh Gubernur. Menindaklanjuti hasil fasilitasi oleh gubernur, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 beserta perubahannya disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 beserta perubahannya harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 beserta perubahannya ini sangat diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Magelang mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah)".

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001